QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2045





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2025

BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2045

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2045, Kabupaten Pidie Jaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonisia Nomor 459 tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);

25. Qanun ..

25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

8. Rencana ...

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJPA serta memperhatikan RPJMN.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada RPJPK Pidie Jaya serta memperhatikan Rencana RPJMN dan RPJMA.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Pidie Jaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi RPJPK Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Kabupaten Pidie Jaya yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan Visi RPJPA dan RPJPN Tahun 2025-2045.
15. Misi RPJPK Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Pidie Jaya untuk mewujudkan visi RPJPK Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
16. Arah Kebijakan RPJPK Tahun 2025-2045 adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPK Tahun 2025-2045.
17. Sasaran Pokok RPJPK Tahun 2025-2045 adalah gambaran rangkaian kinerja Kabupaten Pidie Jaya dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPK Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
18. Permasalahan Pembangunan dalam RPJPK Tahun 2025-2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian.

BAB II ..

BAB II
SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPJPK Pidie Jaya disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI : PENUTUP
(2) RPJPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini yang merupakan suatu ketentuan dan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 3

(1) RPJPK Pidie Jaya merupakan dokumen perencanaan yang bersifat makro yang memuat Permasalahan, visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan selama periode 20 tahun.
(2) RPJPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
a. pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMK, RKPK, Renstra SKPK dan RENJA SKPK selama kurun waktu tahun 2025-2045;dan
b. seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten dan DPRK maupun bagi kalangan dunia usaha (swasta) dan masyarakat umumnya dalam mengarahkan proses pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK Pidie Jaya.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPK Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) RPJPK Pidie Jaya tahun 2025-2045 dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
(2) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 setelah qanun RPJPK Pidie Jaya ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan diMeureudu
pada tanggal 28 Mei 2025 M
1 Dzulhijjah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUNAWAR IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2025, NOMOR : (1/11/2025)

PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang dibagi dalam bentuk tahapan pembangunan tiap 5 (lima) tahun. Dokumen RPJPK ditetapkan dengan peraturan daerah dan menjadi dasar bagi pimpinan daerah yang akan menyusun visi dan misi pembangunan jangka menengah, sehingga pembangunan daerah yang dihasilkan akan berkesinambungan dan berhasil guna dengan baik. RPJPK akan dijabarkan dalam dokumen berikutnya yang berupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMK juga ditetapkan dengan peratuaran daerah untuk masa 4 (empat) tahun kepeminpinan kepala daerah terpilih, selanjutnya setiap tahun pelaksanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. RPJPK akan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama priode kepemimpinan kepala daera yang bersangkutan.

b. RPJPK Pidie Jaya disusun dengan berpedoman kepada RPJPA dan RPJPN, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun 2014 Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan danun daerah nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014–2034 yang merujuk kepada RTRW Aceh yang merupakan bahagian yang tidak bertentangan dengan RTRW Nasional, dengan berpedoman kepada RTRW Kabupaten tersebut maka penyusunan RPJPK Pidie Jaya diharapkan sejalan dan searah dengan RTRW yang telah ditetapkan. RPJPK ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada dan dikembangkan untuk menciptakan Pidie Jaya yang Islami, Maju dan Berkelanjutan, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 1

LAMPIRAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KABUPATEN PIDIE JAYA

TAHUN 2025-2045

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN DAN AKRONIM		
3TP	:	Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AKABA	:	Angka Kematian Balita
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKI	:	Angka Kematian Ibu
APBA	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	:	*Association of South East Asia Nation*
ATDC	:	*Aceh Trade and Distribution Center*
ATR/BPN	:	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BARSELA	:	Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat - Selatan
BASAJAN	:	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho
BAU	:	*Business As Usual*
BCG	:	Bacillus Calmette-Guerin
BI	:	Bank Indonesia
BIBD	:	Balai Inseminasi Buatan Daerah
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Balan Layanan Umum Daerah
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP3K	:	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTA	:	Basil Tahan Asam
BUMA	:	Badan Usaha Milik Aceh
BUMG	:	Badan Usaha Milik Gampong
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUPP	:	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
CAT	:	Cekungan Air Tanah
CCS/CCUS	:	*Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture Utilization* and Storage
CDR	:	Case Detection Rate
CHS	:	*Cleanliness, Health, dan Safety*
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CPR	:	Contraceptive Prevalence Rate
CRU	:	*Conservation Response Unit*
CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
D3TLH	:	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum

SINGKATAN DAN AKRONIM		
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
Depkeu	:	Departemen Keuangan
DHS	:	*Demographic Health Survey*
DI	:	Daerah Irigasi
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DM	:	Diabetes Mellitus
DOKA	:	Dana Otonomi Khusus Aceh
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
DRAM	:	Dokumen Rencana Aksi Mitigasi
DTGA	:	Dataran Tinggi Gayo Alas
EBT	:	Energi Baru Terbarukan
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESS	:	*Energy Storage System*
FGD	:	*Focused Group Discussion*
FOLU	:	*Forestry and Other Land Use*
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka
GDPK	:	Grand Design Pembangunan Kependudukan
GGP	:	*Green Growth Plan*
GK	:	Garis Kemiskinan
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HDI	:	Human Development Index
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HL	:	Hutan Lindung
HLS	:	Harapan Lama Sekolah
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hand Phone
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
iBANGGA	:	Indeks Pembangunan Keluarga
ICOR	:	Incremental Capital Output Ratio
ID	:	Indeks Demokrasi Indonesia
IDL	:	Imunisasi Dasar Lengkap
IDM	:	Indeks Desa Mandiri
IDSD	:	Indeks Daya Saing Daerah
IGRK	:	Inventarisasi Gas Rumah Kaca
IHK	:	Indeks Harga Konsume
IID	:	Indeks Inovasi Daerah
IJSP		Industri Jasa Sektor Pertanian
IKA	:	Indeks Kualitas Air
IKAL	:	Indeks Kualitas Air Laut
IKD	:	Indeks Ketahanan Daerah
IKG	:	Indeks Ketimpangan Gender
IKK	:	Ibukota Kecamatan

SINGKATAN DAN AKRONIM		
IKL	:	Indeks Kualitas Lahan
IKLH	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
IKP	:	Indeks Ketahanan Pangan
IKS	:	Indeks Keluarga Sehat
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IKUB	:	Indeks Kerukunan Umat Beragama
ILEDSA	:	*Integrated Low Emission Development Strategy for Aceh*
IPA	:	Indeks Perlindungan Anak
IPG	:	Indeks Pembangunan Gender
IPHP	:	Industri Pengolahan Hasil Pertanian
IPK	:	Indeks Pembangunan Kebudayaan
IPLM	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPMP	:	Industri Peralatan Mesin Pertanian
IPP	:	Indeks Pembangunan Pemuda
IPP	:	Indeks Profesionalitas Pegawai
IPS	:	Indeks Pembangunan Syariah
IPTEK	:	Ilmu pengetahuan dan Teknologi
IRB	:	Indeks Risiko Bencana
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IUKI	:	Izin Usaha Kawasan Industri
IW	:	Indeks Williamson
JKA	:	Jaminan Kesehatan Aceh
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
KARHUTLA	:	Kebakaran Hutan dan Lahan
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KEL	:	Kawasan Ekosistem Leuser
KI	:	Kawasan Industri
KIA	:	Kawasan Industri Aceh
KIP	:	Komisi Independen Pemilihan
KK	:	Kepala Keluarga
KKL	:	Kerangka Kerja Logis
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
Kominsa	:	Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kop UKM	:	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPBPB	:	Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
KPI	:	Key Performance Indicators
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPMG	:	Kegiatan Pembangunan Masyarakat Gampong
KPPN	:	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum

SINGKATAN DAN AKRONIM		
KSN	:	Kawasan Strategis Nasional
KSP/USP	:	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
KSPPS	:	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
l/dtk	:	liter per detik
LH	:	Lahir Hidup
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LKS	:	Lembaga Keuangan Syariah
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	:	Multi Basiler
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MCP	:	*Monitoring Centre for Prevention*
MDG's	:	Millenium Development Goals
MINERBA	:	Mineral dan Batubara
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPA	:	Masyarakat Peduli Api
MPKG	:	Masyarakat Peduli Konflik Gajah
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MSR	:	Multi Stakeholder Review
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NBM	:	Neraca Bahan Makanan
NDC	:	*Nationally Determined Contribution*
NEK	:	Nilai Ekonomi Karbon
NPL	:	Non Performing Loan
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAA	:	Pendapatan Asli Aceh
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBM	:	Peraturan Bersama Menteri
PDRB	:	Product Domestic Regional Bruto
Perkim	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PETI	:	Pertambangan Tanpa Izin
PHBS	:	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
PISA	:	*Programme for International Student Assesment*
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKLNPRT	:	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKPN	:	Program Kredit Peumakmue Nanggroe
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara

SINGKATAN DAN AKRONIM		
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	:	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PMTB	:	Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayatul Hisbah
PON	:	Pekan Olah Raga Nasional
POPDA	:	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
POPNAS	:	Pekan Olah Raga Pelajar Nasional
PORDA	:	Pekan Olah Raga Aceh
POSPENAS	:	Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPKS	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPS	:	Pelabuhan Perikanan Samudera
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PRG	:	Petugas Registrasi Gampong
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
RBP	:	*Result-Based Payment*
RHL	:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RLH	:	Rumah Layak Huni
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSIA	:	Rumah Sakit Ibu dan Anak
RSJ	:	Rumah Sakit Jiwa
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUZA	:	Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin
RT	:	Rumah Tangga
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTLH	:	Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Manusia

SINGKATAN DAN AKRONIM		
Setda	:	Sekretariat Daerah
SIDa	:	Sistem Inovasi Daerah
SKPA	:	Satuan Kerja Perangkat Aceh
SPAL	:	Sistem Pengolahan Air Limbah
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SRAP	:	Strategi Rencana Aksi Pengelolaan
TATIMLAGA	:	Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues
TGM	:	Tingkat Kegemaran Membaca
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNGL	:	Taman Nasional Gunung Leuser
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPS	:	Tempat Pembuangan Sementara
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TUKS	:	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
UEP	:	Usaha Ekonomi Produktif
UHH	:	Usia Harapan Hidup
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USPPS	:	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-Undang Pemerintahan Aceh
VUCA	:	*Volariliry, Uncercaincy, Complexity, Ambiguity*
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
ZISWAF	:	Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN ---------- **i**
DAFTAR ISI ---------- **vii**
DAFTAR TABEL ---------- **xi**
DAFTAR GAMBAR ---------- **xvii**

BAB I PENDAHULUAN ---------- **I - 1**
1.1 Latar Belakang ---------- I - 1
1.2 Dasar Hukum ---------- I - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya ---------- I - 7
1.4 Maksud dan Tujuan ---------- I - 10
1.4.1 Maksud ---------- I - 10
1.4.2 Tujuan ---------- I - 10
1.5 Sistematika Penulisan ---------- I – 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ---------- **II - 1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II - 1
2.1.1. Aspek Geografi ---------- II - 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ---------- II - 1
2.1.1.2. Kondisi Topografi ---------- II - 3
2.1.1.3. Kondisi Geologi ---------- II - 4
2.1.1.4. Hidrologi ---------- II - 5
2.1.1.5. Klimatologi ---------- II - 14
2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang ---------- II - 16
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana ---------- II - 18
2.1.2. Demografi ---------- II - 28
2.1.2.1 Jumlah Penduduk ---------- II - 28
2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk ---------- II - 28
2.1.2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk ---------- II - 32
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II - 33
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ---------- II - 33
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ---------- II - 33
2.2.1.2. Laju Inflasi ---------- II - 40
2.2.1.3. Indeks Gini ---------- II - 41
2.2.1.4. Angka Kemiskinan ---------- II - 42
2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka ---------- II - 46
2.2.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM) ---------- II - 48
2.2.1.7. Pendapatan Perkapita ---------- II - 49
2.2.2. Kesejahteraan Sosial dan Budaya ---------- II - 50
2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat ---------- II - 50
2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga ---------- II - 54
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). ---------- II - 55
2.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup ---------- II - 58
2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ---------- II - 59
2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah ---------- II - 61
2.2.2.8. Indeks Desa Membangun (IDM) ---------- II - 62
2.2.2.9. Indeks Pembangunan Syariah ---------- II - 64
2.2.2.10. Kesejahteraan Sosial ---------- II - 67
2.3. Aspek Daya Saing Daerah ---------- II - 69

2.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) ---------- II - 69
2.3.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ---------- II - 70
2.3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ---------- II - 70
2.3.2.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita ---------- II - 72
2.3.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur---------- II - 73
2.3.3.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan---------- II - 74
2.3.3.2 Ketersediaan Air Bersih ---------- II - 74
2.3.3.3 Ketersediaan Listrik---------- II - 76
2.3.4 Fokus Iklim Berinvestasi ---------- II - 78
2.3.4.1 Angka Kriminalitas---------- II - 78
2.3.4.2 Jumlah Demonstrasi---------- II - 79
2.3.4.3 Keamanan dan ketertiban ---------- II - 79
2.3.4.4 Perizinan---------- II - 80
2.3.5 Fokus Sumber Daya Manusia ---------- II - 84
2.3.5.1 Ketenagakerjaan---------- II - 85
2.4 Aspek Pelayanan Umum---------- II - 87
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ---------- II - 87
2.4.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar ---------- II - 87
2.4.1.1.1 Pendidikan---------- II - 87
2.4.1.1.2 Kesehatan---------- II - 97
2.4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---------- II - 109
2.4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman---------- II - 118
2.4.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ---------- II - 120
2.4.1.1.6 Sosial ---------- II - 122
2.4.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar ---------- II - 123
2.4.1.2.1 Tenaga Kerja ---------- II - 123
2.4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak---------- II - 124
2.4.1.2.3 Pangan ---------- II - 125
2.4.1.2.4 Pertanahan ---------- II - 129
2.4.1.2.5 Lingkungan Hidup---------- II - 130
2.4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- II - 134
2.4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong---------- II - 135
2.4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana---------- II - 138
2.4.1.2.9 Perhubungan---------- II - 140
2.4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika ---- II - 141
2.4.1.2.11 Koperasi dan UMKM ---------- II - 143
2.4.1.2.12 Penanaman Modal---------- II - 144
2.4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga ------ II - 147
2.4.1.2.14 Statistik ---------- II - 150
2.4.1.2.15 Persandian---------- II - 150
2.4.1.2.16 Kebudayaan ---------- II - 151
2.4.1.2.17 Perpustakaan ---------- II - 154
2.4.1.2.18 Kearsipan ---------- II - 156

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ---------- II - 156
2.4.2.1 Kelautan dan Perikanan ---------- II - 156
2.4.2.2 Pariwisata ---------- II - 163
2.4.2.3 Pertanian ---------- II - 165
2.4.2.4 Perdagangan ---------- II - 175
2.4.2.5 Perindustrian ---------- II - 176
2.4.2.6 Transmigrasi ---------- II - 178
2.4.3 Penunjang Urusan ---------- II - 179
2.4.3.1 Perencanaan Pembangunan ---------- II - 179
2.4.3.2 Keuangan ---------- II - 181
2.4.3.3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan ---------- II - 184
2.4.3.4 Penelitian dan pengembangan ---------- II - 186
2.4.3.5 Pengawasan ---------- II - 187
2.4.3.6 Sekretariat Daerah Kabupaten ---------- II - 189
2.4.3.7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ---------- II - 190
2.4.3.8 Kecamatan ---------- II - 192
2.4.4 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan ---------- II - 194
2.4.4.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama ---- II - 194
2.4.4.2 Baitul Mal ---------- II - 200
2.4.4.3 Peranan Majelis Adat Daerah ---------- II - 203
2.4.4.4 Majelis Pendidikan Daerah (MPD) --------- II - 206
2.4.4.5 Pendidikan Dayah ---------- II - 207
2.5 Evaluasi Hasil RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035 --------- II - 212
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ---------- II - 214
2.6.1 Tren Demografi dan Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan Tahun 2045. ---------- II - 214
2.6.1.1 Jumlah Total Penduduk ---------- II - 214
2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ---------- II - 214
2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur ---------- II - 215
2.6.1.4 Bonus demografi, dan penduduk usia tua - II - 216
2.6.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 ---------- II - 217
2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal ---------- II - 218
2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum ---------- II - 218
2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik ---------- II - 219
2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan ---------- II - 220
2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan -- II - 221
2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan -- II - 222
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ---------- II - 224
2.7.1 Penggambaran Rencana Struktur Ruang ---------- II - 225
2.7.1.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 225
2.7.1.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 226
2.7.1.3 Rencana Sistem Jaringan Energi ---------- II - 226
2.7.1.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi - II - 227

2.7.1.5 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air ---------- II - 228
2.7.2 Penggambaran Rencana Pola Ruang Hutan Lindung II - 229
2.7.3 Kawasan Strategis Kabupaten ---------- II - 229
2.7.3.1 Kawasan Perkotaan Meureudu ---------- II - 229
2.7.3.2 Kawasan Strategis Agropolitan ---------- II - 230
2.7.3.3 Kawasan Strategis Minapolitan ---------- II - 231
2.7.3.4 Kawasan Agrowisata ---------- II - 231
2.7.3.5 Kawasan Gampong Terpadu ---------- II - 232
2.7.3.6 Kawasan Historis Blang Raweue ---------- II - 232
2.7.3.7 Kawasan Strategis Pariwisata ---------- II - 233
2.8 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPK ---------- II - 233

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ---------- III - 1
3.1 Permasalahan Pembangunan ---------- III - 1
3.2 Isu Strategis ---------- III - 11
3.2.1. Isu Megatren dan Internasional ---------- III - 11
3.2.2. Isu strategis Nasional ---------- III - 17
3.2.3. Isu Strategis Provinsi Aceh ---------- III - 27
3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya ---------- III – 34

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH ---------- IV - 1
4.1. Visi ---------- IV - 1
4.2. Misi ---------- IV – 5

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH ---------- V – 1
5.1. Arah Kebijakan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 -------- V - 1
5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 ---------- V - 1
5.1.2. Arah Kebijakan Periode (2030-2034) ---------- V - 3
5.1.3. Arah Kebijakan Periode (2035-2039) ---------- V - 4
5.1.4. Arah Kebijakan Periode (2040-2045) ---------- V - 6
5.2. Sasaran Pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 -------- V - 12
5.2.1. Arah Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ---------- V - 43
5.2.1.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial -------- V - 43
5.2.1.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi ----- V - 49
5.2.1.3. Transformasi Tata Kelola ---------- V - 63
5.2.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam ---------- V - 66
5.2.1.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis V - 71
5.2.2. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah --------- V - 80

BAB VI PENUTUP ---------- VI - 1
6.1. Kaidah Pelaksanaan ---------- VI - 1
6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan ---------- VI - 1
6.2.1. Keterkaitan RPJPK Pidie Jaya dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi ------- VI - 2
6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan ---------- VI - 3
6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran ------ VI - 4
6.2.2.2. Kerangka Pengendalian ---------- VI - 4
6.2.3. Sistem Insentif ---------- VI - 5
6.2.4. Mekanisme Perubahan ---------- VI - 5

6.2.5. Komunikasi Publik---------- VI - 6
6.3. Pembiayaan Pembangunan---------- VI - 6
6.4. Kerangka Regulasi ---------- VI - 7
6.5. Analisis Manajemen Resiko---------- VI - 7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 2
Tabel 2.2. Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 3
Tabel 2.3. Data Panjang Sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya---------- II - 6
Tabel 2.4. Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya-------- II - 14
Tabel 2.5. Data Curah Hujan dan Hari Hujan Stasion SMPK BPN Meureudu Selama Kurun Waktu 10 Tahun 2014-2023------ II - 15
Tabel 2.6. Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 17
Tabel 2.7. Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005---------- II - 20
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Tahun 2019 - 2023 ---------- II - 28
Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 29
Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk, Rumah Tangga, dan Jumlah Jiwa/RT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 30
Tabel 2.11. Mayoritas Profesi/Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 31
Tabel 2.12. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Sampai Tahun 2045 Dengan Menggunakan Metoda Proyeksi Polinomial (Jiwa) ---------- II - 33
Tabel 2.13. PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku 2019-2023 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) ---------- II - 37
Tabel 2.14. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2018 s.d 2023 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 40
Tabel 2.15. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2014-2023 ---------- II - 41
Tabel 2.16. Jumlah Rumah Tangga (RT) Menurut Status Kesejahteraan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Berdasarkan Desil (D1,D2,D3) ---------- II - 44
Tabel 2.17. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 46
Tabel 2.18. Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023 II - 54
Tabel 2.19. Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 ---------- II - 59
Tabel 2.20. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 ---------- II - 61
Tabel 2.21. Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 62
Tabel 2.22. Dasar Regulasi Dimensi Indeks Pembangunan Syariah ------ II - 64
Tabel 2.23. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019–2023---------- II - 67
Tabel 2.24. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023 ---------- II - 71
Tabel 2.25. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2023. (ADHK) ---------- II - 73
Tabel 2.26. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 74
Tabel 2.27. Pelanggan PDAM Tirta Krueng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 75

Tabel 2.28. Pengguna Listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023 ---------- II - 76
Tabel 2.29. Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Sesuai Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2034 - II - 78
Tabel 2.30. Jumlah kasus kriminalitas dan penyelesaian kasus di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 78
Tabel 2.31. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 79
Tabel 2.32. Jumlah Tindak Pidana Menonjol di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023 ---------- II - 79
Tabel 2.33. Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2021 ---------- II - 80
Tabel 2.34. Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022-2023 ---------- II - 82
Tabel 2.35. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 84
Tabel 2.36. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 86
Tabel 2.37. Rasio Ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 ---------- II - 87
Tabel 2.38. Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018–2023 ---------- II - 89
Tabel 2.39. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023 ---------- II - 90
Tabel 2.40. Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 ---------- II - 92
Tabel 2.41. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 93
Tabel 2.42. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023 ---------- II - 93
Tabel 2.43. Jumlah Guru Bersertifikasi dan Guru Sarjana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 95
Tabel 2.44. Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023 ---------- II - 97
Tabel 2.45. Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023 ---------- II - 98
Tabel 2.46. Indikator Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 100
Tabel 2.47. Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 101
Tabel 2.48. Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 102
Tabel 2.49. Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- 103
Tabel 2.50. Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---- II - 104
Tabel 2.51. Standar Ketenagaan Puskesmas Nasional ---------- II - 106
Tabel 2.52. Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 107
Tabel 2.53. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 107
Tabel 2.54. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023---------- II - 108
Tabel 2.55. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di Kabupaten Tahun 2019 -2023---------- II - 109

Tabel 2.56. Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 112
Tabel 2.57. Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 113
Tabel 2.58. Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031 ---------- II - 116
Tabel 2.59. Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023---------- II - 120
Tabel 2.60. Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 121
Tabel 2.61. Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 121
Tabel 2.62. Jumlah Sarana Sosial yang Tersedia di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 – 2023 ---------- II - 122
Tabel 2.63. Indikator Ketenagakerjaan Pidie Jaya 2019 - 2023---------- II - 123
Tabel 2.64. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 ---------- II - 124
Tabel 2.65. Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 126
Tabel 2.66. Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 126
Tabel 2.67. Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 127
Tabel 2.68. Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2023 ---------- II - 129
Tabel 2.69. Volume dan Sarana Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023 ---------- II - 131
Tabel 2.70. Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023 ---------- II - 132
Tabel 2.71. Jumlah KTP dan Akta yang di Terbitkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 135
Tabel 2.72. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 136
Tabel 2.73. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 136
Tabel 2.74. Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 138
Tabel 2.75. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023---------- II - 139
Tabel 2.76. Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia di KabupatenPidie Jaya Tahun 2023---------- II - 141
Tabel 2.77. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh Tahun 2022-2023---------- II - 142
Tabel 2.78. Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023---------- II - 144
Tabel 2.79. Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Pidie Jaya (PMDN) ---------- II - 146
Tabel 2.80. Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023 ---------- II - 148
Tabel 2.81. Jumlah Sarana dan Olahraga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 149
Tabel 2.82. Peringkat Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2008 s.d 2022---------- II - 150

Tabel 2.83. Capaian Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2023 ---------- II - 150
Tabel 2.84. Indikator Urusan Persandian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2023 ---------- II - 151
Tabel 2.85. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya 2023 ---------- II - 152
Tabel 2.86. Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya 2023 ---------- II - 153
Tabel 2.87. Jenis Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Pidie Jaya 2023 ---------- II - 153
Tabel 2.88. Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan ------ II - 155
Tabel 2.89. Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 158
Tabel 2.90. Rekapitulasi Data Produksi Budidaya Perikanan Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---- II - 159
Tabel 2.91. Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 160
Tabel 2.92. Jumlah Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023---------- II - 161
Tabel 2.93. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 162
Tabel 2.94. Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 163
Tabel 2.95. Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya----- II - 164
Tabel 2.96. Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata ---------- II - 165
Tabel 2.97. Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 166
Tabel 2.98. Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 167
Tabel 2.99. Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 168
Tabel 2.100. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 169
Tabel 2.101. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 170
Tabel 2.102. Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023---------- II - 171
Tabel 2.103. Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 172
Tabel 2.104. Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 173
Tabel 2.105. Jumlah Kelompok Terak di Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 173
Tabel 2.106. Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 174
Tabel 2.107. Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 176
Tabel 2.108. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 177
Tabel 2.109. Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 179
Tabel 2.110. Indikator Keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 182
Tabel 2.111. Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 185

Tabel 2.112. Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 188
Tabel 2.113. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 190
Tabel 2.114. Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 191
Tabel 2.115. Kinerja Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 192
Tabel 2.116. Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 197
Tabel 2.117. Jumlah Mesjid Dan Meunasah Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2023---------- II - 199
Tabel 2.118. Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2023---------- II - 199
Tabel 2.119. Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2023---------- II - 200
Tabel 2.120. Jumlah Penerimaan dan Realisasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 dan Tahun 2023---------- II - 201
Tabel 2.121. Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 208
Tabel 2.122. Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023---------- II - 209
Tabel 2.123. Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 209
Tabel 2.124. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- II - 214
Tabel 2.125. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 ---------- II - 215
Tabel 2.126. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045---------- II - 215
Tabel 2.127. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- II - 218
Tabel 2.128. Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- II - 219
Tabel 2.129. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- II - 220
Tabel 2.130. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- II - 221
Tabel 2.131. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ---------- II - 222
Tabel 2.132. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ---------- II - 223
Tabel 3.1. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023 ---------- III - 3
Tabel 4.1 Sinkronisasi Visi dan Sasaran Visi RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- IV - 4
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- IV - 7
Tabel 4.3 Sinkronisasi Misi RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------- IV – 8

Tabel 4.4	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ----------	IV - 9
Tabel 5.1.	Arah Kebijakan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045---------	V - 8
Tabel 5.2.	Perumusan Sasaran Pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ----------	V - 13
Tabel 5.3.	Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1 ----------	V - 43
Tabel 5.4.	Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2 ----------	V - 45
Tabel 5.5.	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3 -------	V - 47
Tabel 5.6.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4 ----	V - 51
Tabel 5.7.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5 ----	V - 56
Tabel 5.8.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6 ----	V - 57
Tabel 5.9.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7 ----	V - 59
Tabel 5.10.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8 ----	V - 60
Tabel 5.11.	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 9 -	V - 64
Tabel 5.12.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 10----------	V - 66
Tabel 5.13.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 11----------	V - 68
Tabel 5.14.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 12----------	V - 70
Tabel 5.15.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 13----------	V - 71
Tabel 5.16.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 14----------	V - 73
Tabel 5.17.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 15----------	V - 75
Tabel 5.18.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 16----------	V - 76
Tabel 5.19.	Arah Kebijakan Sasaran Pokok 17----------	V - 78
Tabel 5.20.	Indikator Sasaran Pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ----------	V - 81
Tabel 5.21.	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ----------	V - 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya ---------- I - 9
Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 2
Gambar 2.2. Peta delapan ruas sungai di Kabupaten Pidie Jaya-------- II - 6
Gambar 2.3. Peta Sungai Krueng Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya---------- II - 7
Gambar 2.4. Peta Sungai Krueng Cubo di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.---------- II - 7
Gambar 2.5. Peta Sungai Krueng Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya- II - 8
Gambar 2.6. Peta Sungai Krueng Beuracan di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya ------- II - 9
Gambar 2.7. Sungai Krueng Meureudu di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 10
Gambar 2.8. Peta Sungai Krueng Ulim di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. ---------- II - 10
Gambar 2.9. Peta Sungai Krueng Jeulanga di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 11
Gambar 2.10. Peta Sungai Krueng Kiran di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 12
Gambar 2.11. Peta Distribusi pusat gempa bumi tanggal 7-13 Desember 2016 di Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 19
Gambar 2.12. Wilayah Rawan Bencana Tsunami Aceh ---------- II - 20
Gambar 2.13. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 21
Gambar 2.14. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 22
Gambar 2.15. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 23
Gambar 2.16. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 23
Gambar 2.17. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 24
Gambar 2.18. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 25
Gambar 2.19. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 25
Gambar 2.20. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 26
Gambar 2.21. Prosentase Lapangan Usaha Bagi Penduduk yang Bekerja Tahun 2023---------- II - 32
Gambar 2.22. Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2019-2023 Kabupaten Pidie Jaya (triliun rupiah) ---------- II - 35
Gambar 2.23. Peranan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2019-2023 Kabupaten Pidie Jaya (Persen) ---------- II - 35
Gambar 2.24. Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 38
Gambar 2.25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023---------- II - 39
Gambar 2.26. Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023---------- II - 41

Gambar 2.27. Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011 s.d 2023 (Persentase) ---------- II - 43
Gambar 2.28. Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Rumah Dhuafa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2023 (Unit) ------- II - 46
Gambar 2.29. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023 ---------- II - 47
Gambar 2.30. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023 ---------- II - 48
Gambar 2.31. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah), ---------- II - 50
Gambar 2.32. Laju Indeks Implisit Kabupaten Pidie Jaya (Persen), 2019-2023 ---------- II - 50
Gambar 2.33. Indeks Keluarga Sehat Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 ---------- II - 53
Gambar 2.34. Perbandingan IPA, IPHA dan IPKA Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2023---------- II - 56
Gambar 2.35. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 ---------- II - 57
Gambar 2.36. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023 ---------- II - 58
Gambar 2.37. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2014 s.d 2023---------- II - 60
Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya ---------- II - 66
Gambar 2.39. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023. ---------- II - 69
Gambar 2.40. Peningkatan Pengeluaran Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2023. --------- II - 71
Gambar 2.41. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (ADHB) Sejak Tahun 2019 s.d 2023. ---------- II - 72
Gambar 2.42. Prosentase Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 ---------- II - 85
Gambar 2.43. Perbandingan Jalan Beraspal dalam Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Km)---------- II - 112
Gambar 2.44. Surplus/Cadangan Beras di Kabupaten Pidie Jaya (Ton) - II - 128
Gambar 2.45. Capaian Potensi Penurunan GRK di Bidang Energi (PRK Daerah-Ton CO2e)---------- II - 134
Gambar 2.46. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021-2023 ---------- II - 186
Gambar 3.1. Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011 s.d 2023 (Persentase) ---------- III - 4
Gambar 3.3. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah)---------- III - 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Pidie Jaya Tahun 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPK yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara ***Bottom-Up*** dengan ***Top Down Planning***. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan ***holistik-tematik***, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahn yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu ***integratif***, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam

upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah. Selanjutnya pendekatan ***Spasia***l, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Pidie Jaya wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, sehingga upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Pencapaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2023 secara ringkas dapat digambarkan melalui pencapaian sebagai berikut: 1) Tahun 2023, PDRB Pidie Jaya 4,24 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB Aceh sebesar 4,23 dan lebih rendah dari PDRB Nasional sebesar 5,04; Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2023 sebesar 18,40 persen lebih tinggi dari provinsi Aceh yaitu sebesar 14,45 persen sedangkan angka kemiskinan nasional sudah berada pada angka 9,36 persen. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan Aceh dan Nasional, angkanya terus turun dari tahun ke tahun; 3) Tingkat pengangguran Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar 4,34 persen cenderung menurun ke arah yang lebih baik dan sudah di atas rata-rata Aceh sebesar 6,03 persen dan nasional pada angka 5,32; 4) Indeks pembangunan manusia (IPM) Pidie Jaya sudah sangat baik di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Tahun 2023, IPM Kabupaten Pidie Jaya sebesar 76,04 sudah lebih baik dari IPM Aceh sebesar 74,70 dan Nasional sebesar 74,39; 5) Indeks Gini Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar 0,221 sudah lebih baik dari pada Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Indeks Gini Nasional yaitu 0,388; selanjuntya 6) Tingkat Inflasi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 masih terkendali pada angka 1,54.

Berdasarkan dari hasil evaluasi capaian TPB menunjukkan bahwa pencapaian indikator TPB Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan KLHS RPJPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 memiliki empat status capaian TPB. Dari 230 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian TPB, terdapat 101 indikator Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dengan persentase 43,90%, 60 indikator dengan Status Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (26,10%), 0 indikator (0,00%) memiliki Status Belum Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target. Sedangkan, 69 indikator (30,00%) tidak bisa diukur pencapaiannya karena Belum Atau Tidak Tersedianya Data. Dari hasil evaluasi

pencapaian TPB, capaian TPB terbesar di Kabupaten Pidie Jaya memiliki status capaian sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan RPJPK Tahun 2025-2045, yang meliputi:
   - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPK;
   - Orientasi mengenai RPJPK;
   - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPK;
   - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPK Tahun 2025-2045, meliputi:
   - Analisis gambaran umum kondisi daerah;
   - Analisis permasalahan pembangunan daerah;
   - Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
   - Analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang;
   - Perumusan visi dan misi daerah;
   - Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan;
   - KLHS.
   - Pembahasan ranwal RPJPK dengan SKPK;
   - Berita acara kesepakatan antara Kepala Bappeda dan Kepala SKPK;
   - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
   - Konsultasi Ranwal RPJPK Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.
c. Penyusunan Rancangan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045.
d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045.
e. Perumusan Rancangan Akhir RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045, meliputi:
   - Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 ke DPRK;
   - Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dengan DPRK;
   - Persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati tentang Rancangan Akhir Rancangan Qanun RPJPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045.

Bappeda bersama dengan stakholder lainnya dalam menyusun racangan Akhir RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 telah melaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim penyusun RPJPK Tanggal 30 Maret 2023;
2. Kickoff meeting Tim Penyusunan RPJPK Tanggal 3 April 2023;
3. Bimtek penyusunan RPJPK tahun 2025-2045 di Banda Aceh Tanggal 29-30 Agustus 2023;
4. Rapat Konsultasi Publik RPJPA di Banda Aceh tanggal 31 Agustus 2023;
5. Orientasi Penyusunan RPJPK Tahun 2025-2045 di Bappeda Pidie Jaya tanggal 14 November 2023;
6. FGD penyusunan Ranwal RPJPK tahun 2025-2045 Tanggal 23 November 2023 di Aula Bappeda Pidie Jaya;
7. FGD Sinkronisasi RPJP Nasional, RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota di Hotel Parkside Takengon tanggal 29 s.d 30 November 2023;
8. Forum Konsultasi Publik RPJPK tanggal 11 Januari 2024 di Bappeda Pidie Jaya;
9. FGD Bersama BPS Pidie Jaya Tanggal 23 November 2023 di kantor BPS Pidie Jaya;
10. Musrenbang RPJPK Pidie Jaya Tanggal 4 April 2024 di Aula Bappeda Pidie Jaya;
11. Reviu APIP Rancangan Akhir RPJPK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025-2045 oleh Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dilakukan pada Tanggal 3 Mei 2024
12. Penyampaian Rancangan Akhir RPJPK Pidie Jaya tahun 2025-2045 kepada Bupati melalui Sekretaris daerah untuk mendapat persetujuan Pembahasan dengan DPRK pada tanggal 13 Mei 2024
13. Penyampaian Rancangan Akhir RPJPK Pidie Jaya tahun 2025-2045 kepada DPRK Pidie Jaya untuk dilakukan pembahasan untuk mendapat kesepakatan Bersama pada tanggal 14 Mei 2024
14. Pembahasan Rancangan Akhir RPJPK Pidie Jaya tahun 2025-2045 bersama DPRK Pidie Jaya pada tanggal 10 Juli - 15 Agustus 2024.
15. Persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati Pidie Jaya tentang Rancangan Akhir Rancangan Qanun RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perudangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonisia Nomor 459 tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
23. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, menyatakan bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, untuk menciptakan integrasi, keselarasan, konsistensi dan sinergi antara RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dengan RPJMN Tahun 2025-2045, maka RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Periode RPJPK Pidie Jaya mengikuti periode RPJPN Tahun 2025-2045;
b. Memastikan 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan;
c. Memastikan keselarasan muatan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.2. Keterkaitan dengan RTRW.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terdapat tiga aspek penyelarasan yang meliputi;

a. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
b. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah; dan
c. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah dengan fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung

ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya.

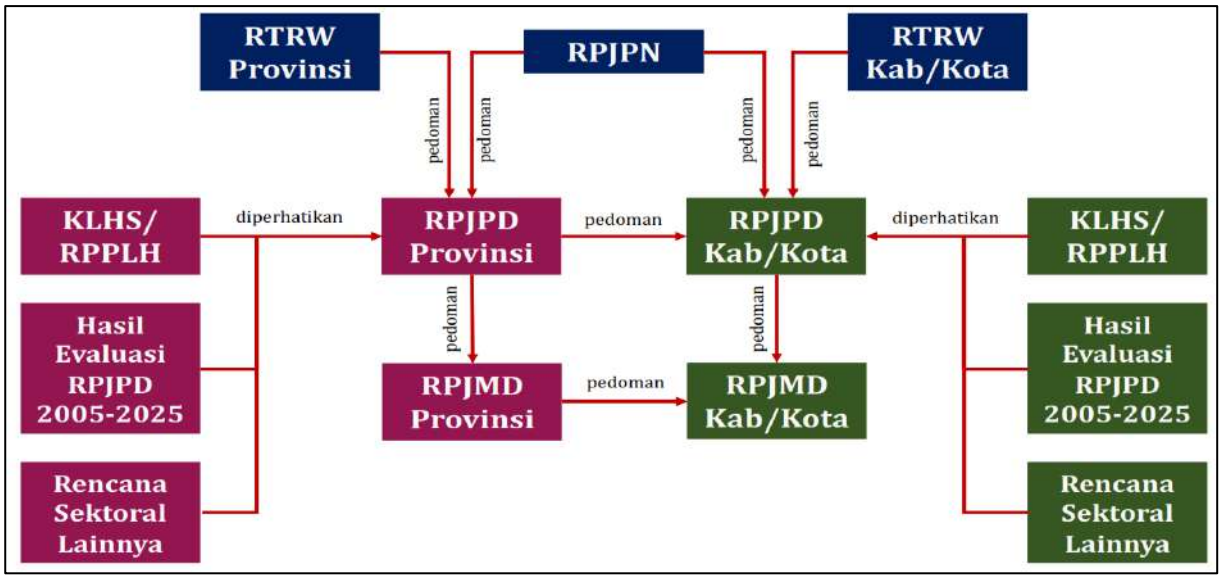
1.3.3. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)/RPPLH dengan RPJPK

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang wajib disusun untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah (RPJPD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RTRW, RPJP dan RPJM serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. KLHS RPJPD menjadi bahan masukan dalam persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 terutama dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan daerah.

1.3.4. Keterkaitan dengan RPJMK

RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMK terutama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator utama pembangunan daerah lima tahunan.

Gambar 1.1. menunjukan sinkronisasi antara dokumen RPJPK dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Dokumen RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:

1. RPJPN dan RPJP Aceh Tahun 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan;
2. RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah.

Penyusunan dokumen RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPK Pidie Jaya tahun 2025-2045 adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada hilirnya memberikan hubungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi-misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya yang berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Aceh dan RTRW Kabupaten Pidie Jaya, dalam rangka:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan Aceh dengan Kabupaten Pidie Jaya.
3. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya;
4. Menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksaan, dan pengawasan pembangunan; serta
6. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dengan demikian, sistematika dimaksud terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok daerah, serta Penutup, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPK secara keseluruhan

meliputi latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPK, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum tentang kondisi kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan RPJPK yang meliputi:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana yang dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang meliputi capaian indikator kinerja urusan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pelayanan wajib dan urusan layanan pilihan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPK Tahun 2015-2035

Menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan

daerah.

2.8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPK

Menguraikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan analisis TPB serta isu-isu strategis yang dapat menjadi masukan dalam menganalisis permasalahan, isu-isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan di dalam RPJPK.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

3.1. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten.

3.2. Isu Strategis

Menguraikan isu-isu strategis Nasional, Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi perhatian dan memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Menjabarkan secara jelas visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten.

4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Menguraikan secara jelas dan sistematis misi yang telah dirumuskan untuk pencapaian visi dan sasaran pokok.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka Panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap 5 tahun selama 4 periode.

5.2. Sasaran Pokok RPJPK Tahun 2025-2045

Menjelaskan sasaran pokok pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPK. Sasaran pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

Bab VI Penutup

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPK serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPK dalam RPJMK periode ke depan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Aspek geografi meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Secara astronomis Kabupaten Pidie Jaya terletak pada $96^0$3'16,62" sampai dengan $96^0$20'40,5" Bujur Timur dan $5^0$18'6,607" sampai dengan $4^0$56'42,1" Lintang Utara. Sesuai dengan peta administratif maka Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah strategis Aceh yang mudah diakses karena letaknya berada pada jalur strategis lintas Nasional Banda Aceh-Medan yang merupakan urat nadi perekonomian kedua wilayah.

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, dan 222 Gampong. Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Pidie (Kecamatan Kembang Tanjong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).

Posisi Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh-Medan. Hal ini memudahkan akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan tersebut. Kota Meureudu ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisinya berada di tengah-tengah kecamatan lainnya. Batas wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1.
Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(km²)	Gampong (desa)	Kemukiman
1	Bandar Baru	220,47	43	8
2	Panteraja	15,00	10	2
3	Trienggadeng	79,37	27	5
4	Meureudu	124,79	30	4
5	Meurah Dua	287,07	19	3
6	Ulim	41,75	30	5
7	Jangka Buya	9,35	18	2
8	Bandar Dua	174,32	45	5
Jumlah		**952,11**	**222**	**34**

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 (data awal)

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kecamatan Meurah Dua adalah kecamatan terluas dengan luas sebesar 30,15 persen dari total wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Sebaran luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang membentang dari kecamatan Bandar Baru (Lueng Putu) sampai dengan Bandar Dua (Ule Glee) dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu ± 45 menit. Kecamatan Meurah Dua merupakan kecamatan terluas diikuti Bandar Baru dan Bandar Dua yang merupakan pusat perdagangan di perbatasan kabupaten Pidie dan Bireuen.



Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya

Kawasan yang mencakup seluruh Kabupaten Pidie Jaya diantaranya kawasan pesisir dan kawasan pegunungan. Kawasan pesisir terhampar dari kecamatan Bandar Baru hingga Jangka Buya. Hanya satu daerah yang tidak memiliki pesisir yaitu kecamatan Bandar Dua. Sedangkan untuk kawasan

pergunungan terdapat hampir disemua daerah kecuali kecamatan Jangka Buya. Untuk kawasan pedalaman umumnya berada di daerah pegunungan seperti desa/gampong yang berada di perbatasan hutan lindung yang terdapat di kecamatan Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Bandar Dua dan Bandar Baru.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

A. Kemiringan Lahan

Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan kelayakan suatu daerah untuk menjadi lahan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40 persen akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Gambaran kondisi kelerengan Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat melalui Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Lereng Kelas (%)					
		(0 – 3)	(4 – 8)	(9 – 15)	(16–25)	(26- 40)	>40
1	Bandar Baru	22.36	29.24	16.63	12.23	9.28	10.26
2	Panteraja	44.01	46.41	9.58	-	-	-
3	Trienggadeng	44.01	46.41	9.58	-	-	-
4	Meureudu	4.82	10.39	11.12	2.20	40.74	30.74
5	Meurah Dua	4.82	10.39	11.12	2.20	40.74	30.74
6	Ulim	59.02	19.44	12.55	3.39	2.58	3.01
7	Jangka Buya	-	-	-	-	-	-
8	Bandar Dua	8.34	7.88	4.05	5.71	11.56	54.46

Sumber : Atlas Pengembangan Kakao Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 (data awal)

Kemiringan lahan dikelompokkan kedalam 5 (lima) lereng yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 8 persen (datar). Lahan dengan kemiringan seperti ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil.
2. Kemiringan lereng 8 – 15 persen (landai). Lahan dengan kemiringan lereng seperti ini dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan masih mungkin terjadi erosi.
3. Kemiringan lereng 15 – 25 persen (agak curam) kemungkinan terjadi erosi lebih besar.

4. Kemiringan lereng 25 – 45 persen (curam), jika tumbuhan menutupi permukiman lahan ditebang, maka lereng akan mudah tererosi.
5. Kemiringan lereng 45 persen (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatan harus bersifat nonbudidaya. Apabila terjadi penebangan hutan, akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan yang lebih luas.

B. Ketinggian Lahan

Kondisi topografi kabupaten Pidie Jaya relatif tidak datar dengan ketinggian bervariasi antara 0 – 8 mdpl (meter di atas permukaan laut) hingga >1500 mdpl. Luas dataran dengan ketinggian 0 – 8 mdpl 28,53 persen dari luas keseluruhan kabupaten, sedangkan sisanya berada di daerah selatan mempunyai kontur ketinggian permukaan tanah yang sangat variatif atau perbukitan dengan tingkat kemiringan lereng antara 25 – 40 persen. Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari aluvium, campuran estuarin dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalt, andesit, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada di bagian selatan Pidie Jaya. Selanjutnya jenis tanah yang terdapat di Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya, seperti gleisol, regosol, andosol, aluvial dan podsolik.

Tanah *Gleisol* terdiri atas Gleisol Eutrin, Gleisol Fleirik, dan Gleisol Halik merupakan tanah yang mempunyai prosentase liat yang tinggi dengan pengaruh reduksi unsur besi (fe). Umumnya dijumpai pada dataran datar. Umumnya dijumpai pada tanah datar. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

Tanah *Alluvial* merupakan jenis tanah timbunan sehingga belum mempunyai perkembangan horizon lebih lanjut. Lapisan atasnya masih selalu mendapat bahan

tambahan yang kadang-kadang mengandung zat organik. Di Kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru.

Tanah *Regosol* merupakan tanah yang terdiri dari lapisan gambut (bahan organik) di atas tanah mineral yang mengalami gleisasi. Ditemukan di daerah rawa-rawa yang terus menerus tergenang atau daerah yang lebih tinggi yang drainase nya sangat buruk dengan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu.

Tanah *Podsolik* berwarna merah sampai kuning dengan perkembangan yang sedang dan kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini umumnya ditemukan pada wilayah yang mempunyai ketinggian 50-1.000 meter dari permukaan laut. Jenis tanah ini ditemukan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Tanah *Latosol* adalah tanah yang mempunyai distribusi kadar liat yang tinggi dengan tingkat kelapukan yang telah lanjut. Stabilitas agregat adalah tinggi dengan tanah warna merah , coklat kemerahan, coklat kekuningan atau kuning. Tanah ini banyak ditemukan pada tanah yang mempunyai ketinggian 0 – 900 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

Tanah Komplek *Podsolik* Merah Kuning dan *Litosol* merupakan gabungan dari sifat-sifat tanah di atas. Jenis tanah ini dijumpai di wilayah tengah sampai pegunungan, seperti di Kecamatan Bandar Baru, Meuredu dan Bandar Dua.

Tanah Komplek *Rendzina* dan *Litosol* merupakan jenis tanah gabungan antara jenis tanah rendzina dan litosol. Tanah Rendzina merupakan tanah yang mempunyai horizon permukaan mollik dan dibawahnya langsung berupa batu kapur. Sedangkan jenis tanah litosol adalah tanah dangkal yang berada di atas batu keras sampai dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah serta belum ada perkembangan profil lebih lanjut akibat pengaruh erosi yang kuat. Jenis tanah komplek rendzina dan litosol ini ditemukan di kecamatan Bandar Baru walaupun dalam luasan yang relatif kecil.

2.1.1.4. Hidrologi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRTM/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah Sungai, Kabupaten Pidie Jaya mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan wewenang pemerintah Pusat yang langsung di Bawah Pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Berikut adalah Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

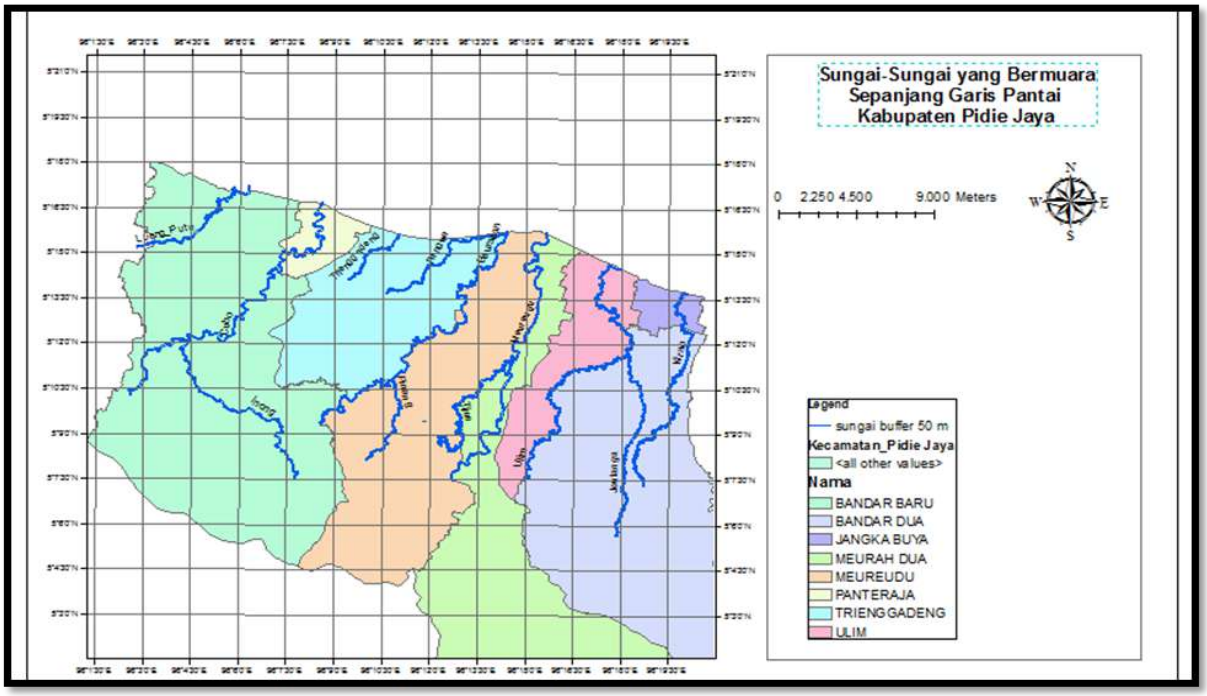
Tabel 2.3.
Data Panjang Sungai dalam Kabupaten Pidie Jaya

No	Kode BWS I	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (Km)
1	015	Kr. Putu	12.780	37,02
2	016	Kr. Panteraja	22.780	43,02
3	017	Kr. Pangwa	1.479	8,10
4	018	Kr. Beuracan	9.640	28,32
5	019	Kr. Meureudu	38.660	55,99
6	020	Kr. Jeulanga	12.090	34,54
Jumlah Total			**97.239**	**206,99**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya/ Tim GIS Pengairan Tahun 2024 (data awal)

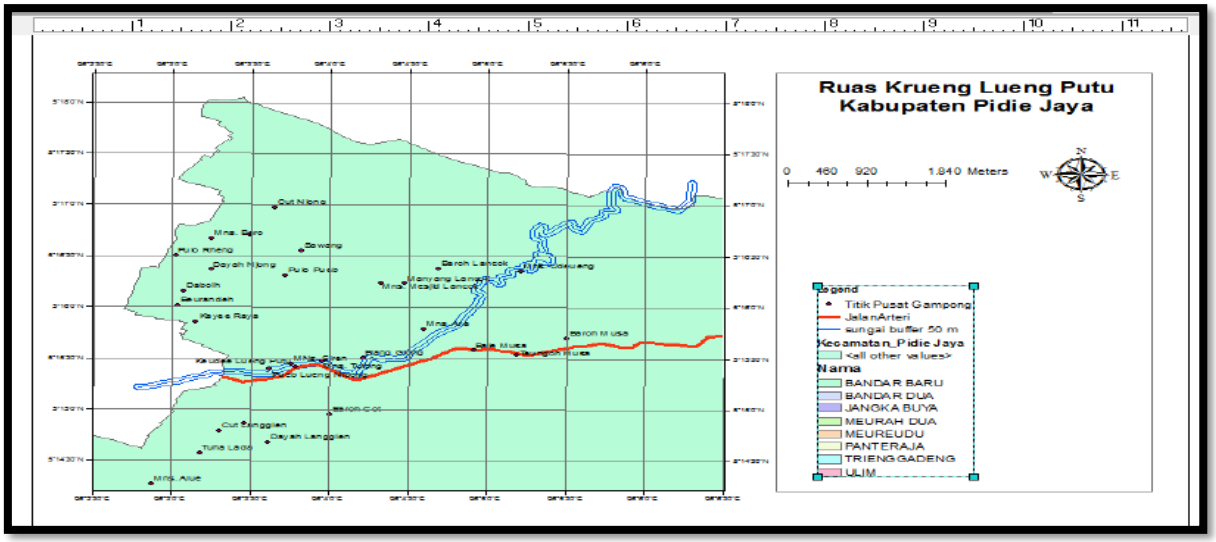
C.1. Aliran Sungai

Kabupaten Pidie Jaya memiliki delapan ruas sungai besar yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya. Kedelapan sungai itu adalah Sungai Lueng Putu, Sungai Cubo, Sungai Trienggadeng, Sungai Beuracan-Pangwa, Sungai Meureudu, sungai Ulim, sungai Jeulanga, dan Sungai Kiran (untuk selanjutnya dalam kearifan lokal Pidie Jaya yang umumnya bersuku Aceh nama sungai dibahasakan sebagai "Krueng").



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024
Gambar 2.2. Peta delapan ruas sungai di Kabupaten Pidie Jaya

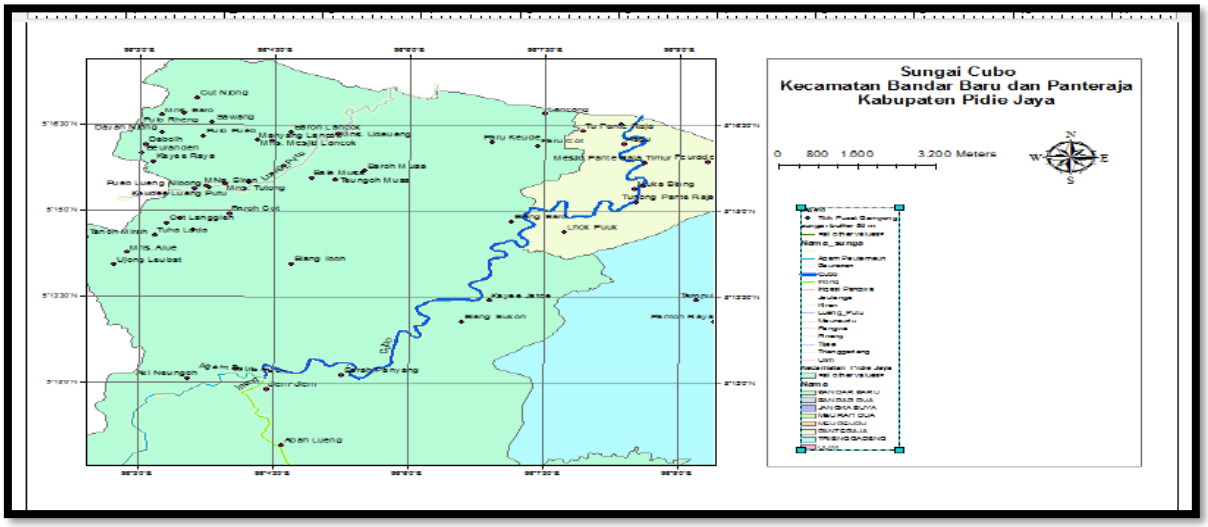
Krueng Lueng Putu, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah kabupaten tetangga Pidie, yang lintasan ruas sungainya sejajar/ di tepi jalan negara yang membelah ibukota Kecamatan Bandar Baru, Lueng Putu, ruasan sungai dilanjutkan pada desa Blang Glong dan berakhir di muara yang umumnya daerah tambak ikan di desa Udeng dan Baroh Lancok.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.3. Peta Sungai Krueng Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Rekam Jejak Bencana pada September-Desember 2008, November 2009, November 2010, dan Desember 2011 yang berlanjut pada Januari 2023, luapan air sungai ini telah menyebabkan genangan setinggi 0 sd 40 cm di desa Blang Glong, Ara, Udeung, dan memberikan dampak erosi pengikisan yang cukup parah sepanjang jalan negara yang menghancurkan pengaman tebing sungai di beberapa titik Kota Lueng Putu pada tahun 2010 dan 2011. Penanganan secara alamiah dengan penanaman kembali rumpun bambu dan pembangunan tebing pengaman dinding sungai telah dilakukan pada tahun 2009, dan dilanjutkan kembali dengan rekonstruksi ulang dinding pengaman tebing sungai pada tahun 2012.



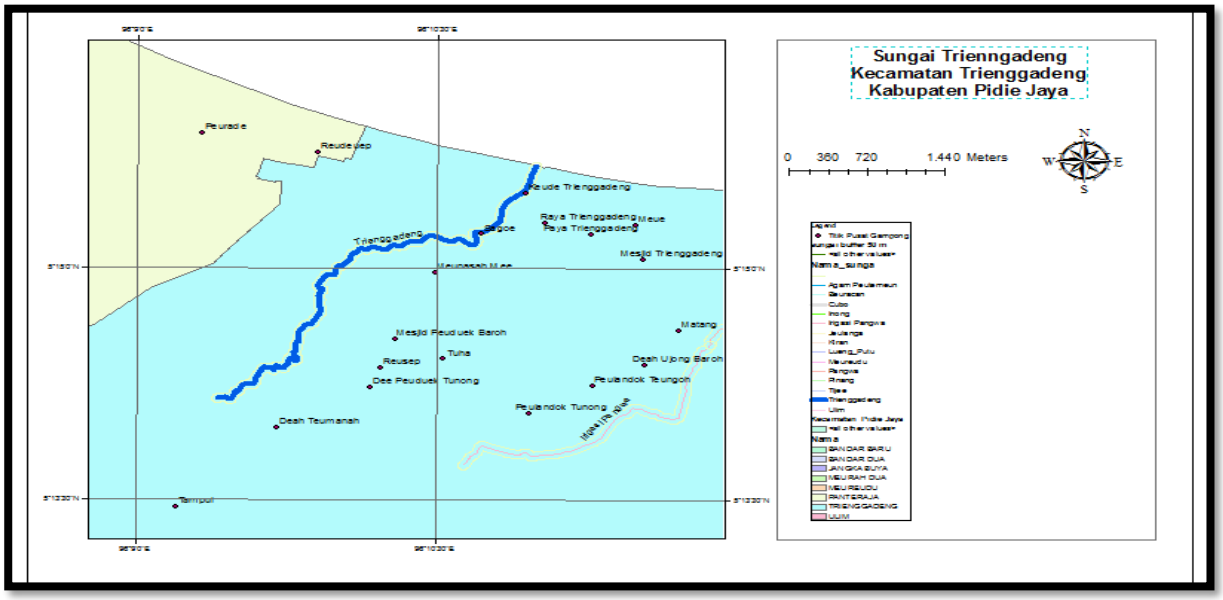
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.4. Peta Sungai Krueng Cubo di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.

Krueng Cubo, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah pegunungan selatan Kabupaten Pidie dan Pidie jaya. Sungai ini pada ruasan terakhirnya merupakan gabungan dua sungai besar, yaitu Krueng Inong dan Krueng Agam, yang ruasan sungai melintasi pemukiman penduduk di dua kecamatan, yaitu mengairi ruas sungai di pemukiman Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Panteraja. Muara sungai ini berada di garis pantai Kecamatan Panteraja.

Pada Bagian hulu sungai, erosi yang diakibatkan aliran sungai Cubo mengakibatkan ancaman pada fasilitas Irigasi, pengikisan tebing di komplek perumahan/fasilitas militer yang dimiliki kompi C Senapan Bhirawa Yudha, yang terjadi pada musim penghujan tahun 2009, 2010, dan 2011. Pada bagian ruas di sekitar desa Blang Sukon dan Kayee Jatoe, juga terjadi erosi sungai yang luar biasa karena dipicu galian C yang eksplorasinya telah dihentikan pada tahun 2011. Desa Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee Jatoe adalah desa-desa yang mengalami pengikisan tebing sungai terparah yang mengancam keberadaan perkebunan penduduk. Aliran sungai ini juga membawa dampak erosi pada pondasi jembatan rangka Baja yang terdapat di dua titik, yaitu titik Blang Krueng dan Kaye Jatoe.

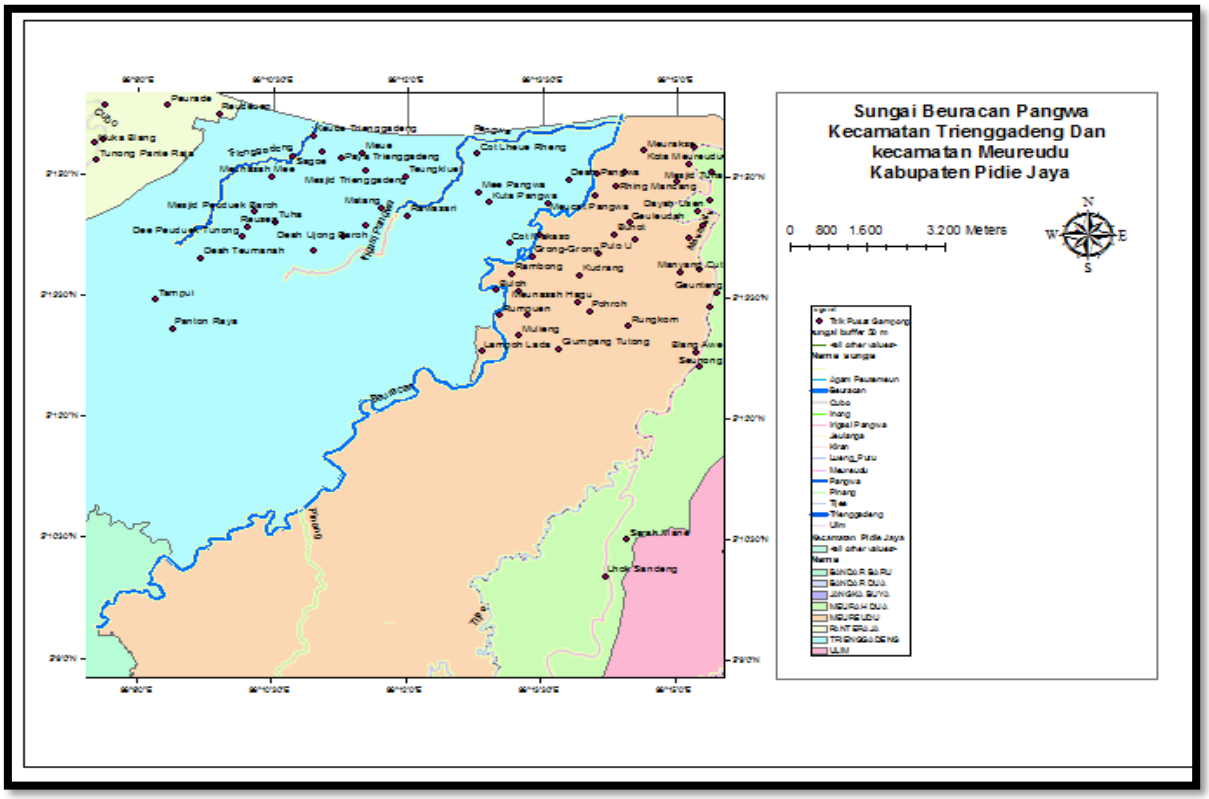
Pada daerah Kecamatan Panteraja, sungai Cubo melalui beberapa desa mulai dari desa Lhok Puuk sampai ke muara sungai di Keude Panteraja. Sementara erosi tebing sungai Cubo di desa Lhok Puuk telah mengancam fasilitas olahraga masyarakat berupa Lapangan Sepakbola Lhok Puuk. Khusus untuk desa Lhok Puuk, erosi diperparah dengan adanya pengambilan rumpun bambu yang berfungsi menyangga keutuhan tebing sungai.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.5. Peta Sungai Krueng Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya

Sungai Ketiga yang bermuara di garis pantai Pidie Jaya adalah Krueng Trienggadeng (Gambar 2.5). Sungai ini terbentuk seperti alur kecil yang sumber mata airnya adalah embung (daerah tangkapan air) di daerah Tampui dan Panton Raya. Panjang ruas sungai ini relatif pendek (sekitara 4500 meter), namun erosi yang ditimbulkan telah mengakibatkan kerusakan badan jalan kabupaten dan tebing pengaman jalan kabupaten di beberapa desa dalam kecamatan Trienggadeng, seperti Desa Meunasah Sagoe, Mee Peuduk dan Keude Trienggadeng.

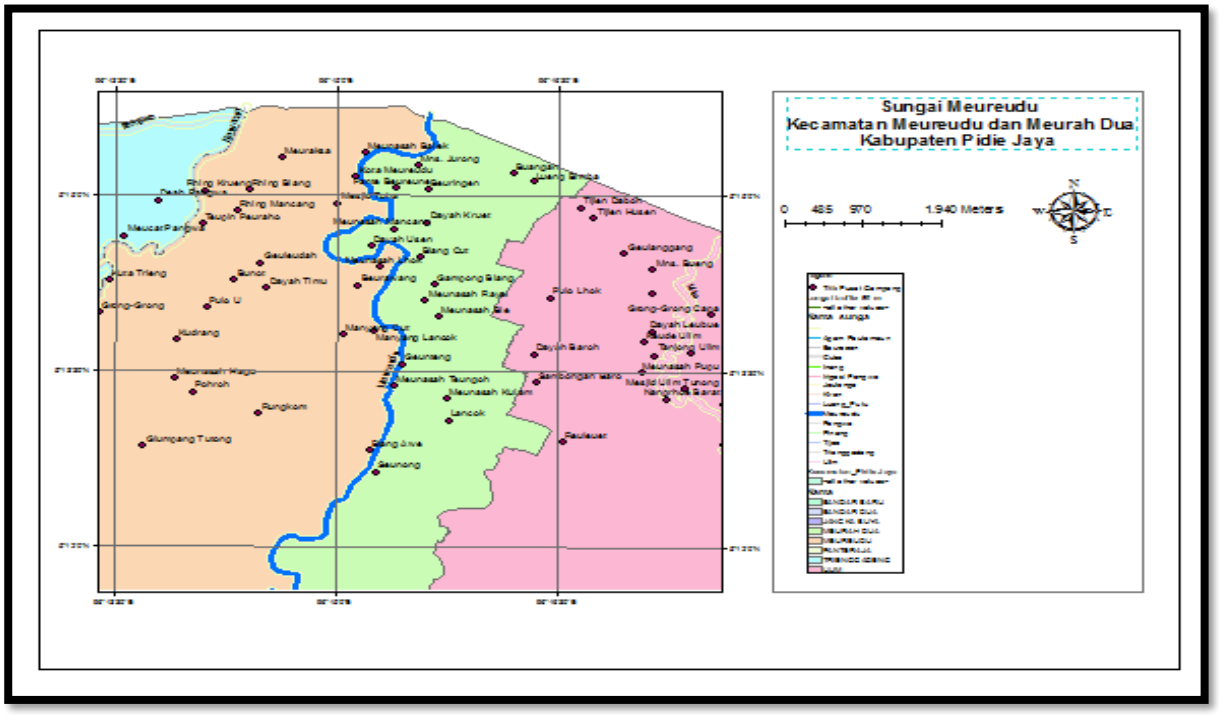


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.6. Peta Sungai Krueng Beuracan di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

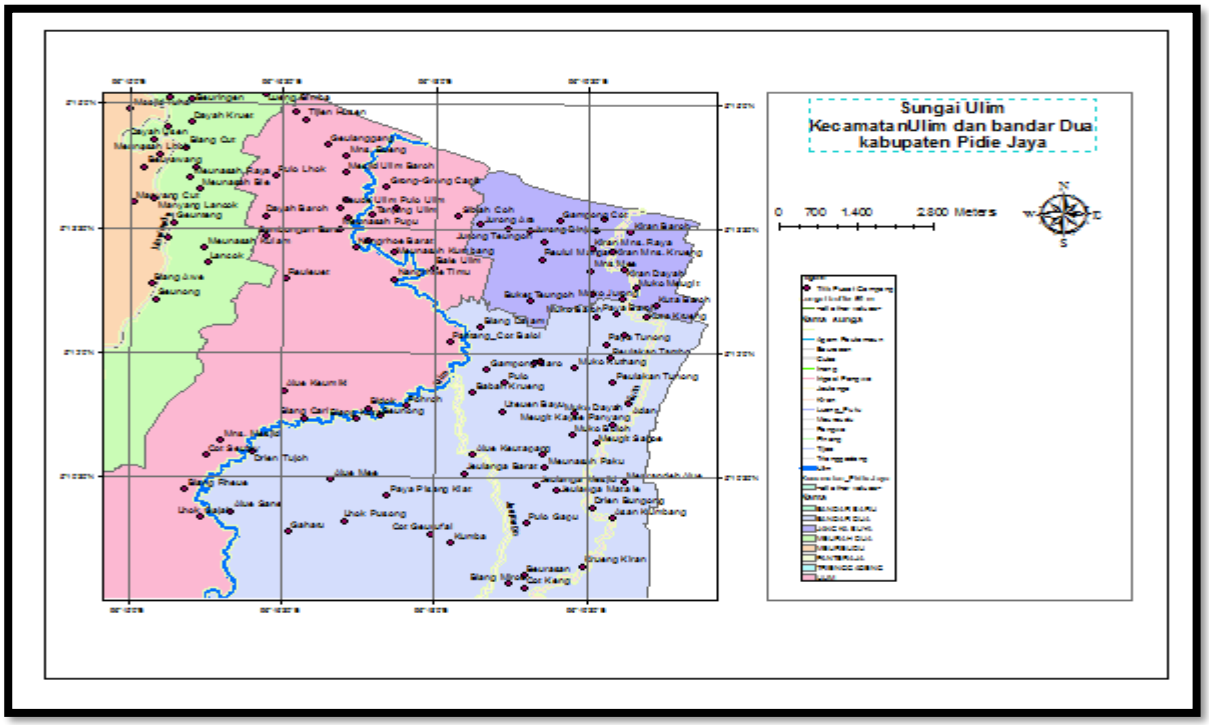
Sungai Keempat adalah sungai Beuracan Pangwa (Gambar 2.5), sungai ini berasal dari pegunungan selatan Pidie Jaya dan menjadi tapal batas antara Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Meureudu. Gerusan erosi yang diakibatkan aliran sungai Beuracan Pangwa in mengancam beberapa fasilitas mulai dari Bangunan Irigasi Alue Demam, Jembatan Gantung di Desa Lampoh Lada dan Buloh, Jembatan Beton di Jalan Negara di perbatasan Beuracan Pangwa. Aliran sungai juga mengancam kebun, pemukiman dan sawah penduduk di dua Kecamatan. Di Kecamatan Trienggadeng Desa Buloh, Meucat Panwa, Deah Pangwa, dan di Kecamatan Meureudu seperti Desa Rumpun, Grong-grong Krueng, Rambong, Kuta Trieng, Teupin Peuraho,sampai dengan

Rhing Krueng. Muara sungai ini bersisian dengan tiga desa, yaitu desa Rhing Krueng, Meuraksa, dan Rhing Blang di Kecamatan Meureudu.



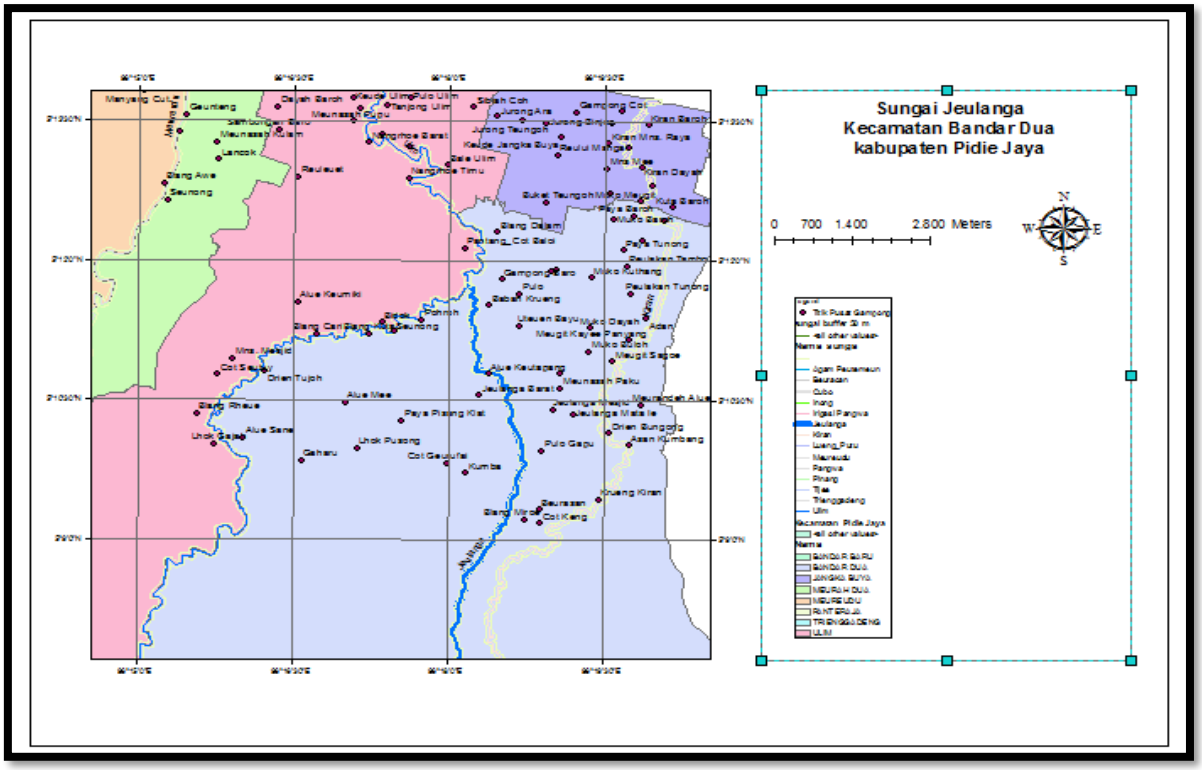
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.7. Sungai Krueng Meureudu di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.8. Peta Sungai Krueng Ulim di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.



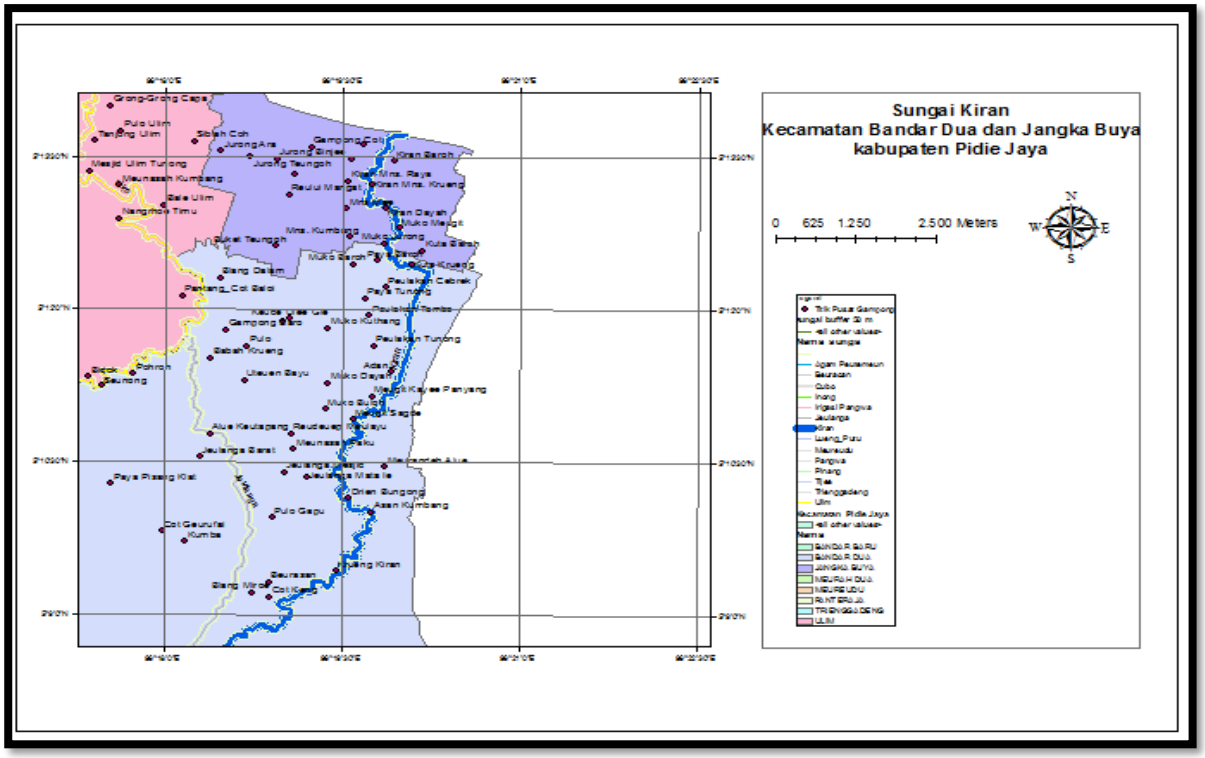
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.9. Peta Sungai Krueng Jeulanga di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 2.7 menjelaskan bahwa sungai kelima yang melintasi Pidie Jaya adalah Sungai Meureudu. Krueng Meureudu adalah sungai yang termasuk dalam empat sungai beraliran deras dibagian timur Kabupaten Pidie Jaya. Empat sungai di bagian Barat, seperti Putu, Cubo, Trienggadeng, dan Beuracan, memiliki ferhang (kemiringan aliran) yang lebih rendah dibanding dengan keempat sungai di Bagian Timur Pidie Jaya. Pada 19 Desember 2009, pukul 21.00 WIB, keempat sungai di bagian Timur Pidie Jaya ini pernah mengakibatkan bencana banjir besar yang mengenang 40 (empat puluh) desa, yang meliputi desa dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, dan Jangka Buya

Selannjutnya Gambar 2.9 menjelaskan bahwa krueng Jeulanga adalah Sungai yang memiliki hulu di daerah selatan pegunungan Pidie Jaya yang memiliki alur akhir bergabung dengan ruas sungai Ulim, pertemuan ruas sungai Jeulanga dan Ulim ini berimpitan di desa Babah Krueng,

Krueng Kiran adalah sungai yang memiliki ruas hulu di pegunungan selatan kecamatan Bandar Dua dan bermuara ke garis pantai Kecamatan Jangka Buya, untuk ebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.10



Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Gambar 2.10. Peta Sungai Krueng Kiran di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya

1. Air Permukaan

Kabupaten Pidie Jaya mempunyai area konservasi air yang cukup luas, yaitu di area hutan lindung atau hutan produksi yang berada pada sisi barat, yaitu deretan pegunungan Bukit Barisan. Areal pertanian tanaman pangan atau persawahan ada di lembah atau bagian timur yang bertopografi datar. Area perkebunan ada di perbukitan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, oleh karena itu fungsi hutan sebagai penyangga sumber daya alam dan sumber daya air bagi wilayah permukiman dan pertanian mempunyai arti yang sangat penting. Secara Geografis, potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Pidie Jaya, sangat dimungkinkan untuk membangun satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Tower air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan/pedesaan, perumahan, perkantoran, dan zona Industri dalam kurun waktu 5 s.d 20 tahun ke depan.

Pemanfaatan lahan dataran lereng pegunungan dan dataran tinggi untuk tanaman perkebunan yang mempunyai arti penting karena selain penghasil bahan industri atau bahan ekspor juga berperan dalam hidrologi wilayah. Sungai besar maupun kecil yang mengarah ke timur, mata airnya ada di areal hutang lindung.

Adapun sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah sungai Krueng Kalla di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie,

sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Beuracan yang membelah Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua, Krueng Ulim yang melintas Kecamatan Ulim dan Krueng Jeulanga yang melintas Kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Wilayah sungai yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah Wilayah Sungai (WS Aceh – Meureudu) yang mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS); a). DAS Krueng Lueng Putu; b). DAS Krueng Pante Raja; c). DAS Krueng Beuracan; d). DAS Krueng Meureudu; e). DAS Krueng Ulim; f). DAS Krueng Jeulanga; dan h). DAS Krueng Kiran.

Air permukaan yang terdapat di wilayah kota Meureudu adalah sungai Krueng Beuracan dan sungai Krueng Meureudu. Sungai Krueng Meureudu ini mempunyai panjang 45 Km, dengan luas DAS 3.770 Km2. Dewasa ini penggunaan badan air tersebut hanya terbatas untuk menampung dan mengalirkan aliran drainase. Sejalan dengan rencana penerapan sempadan sungai dan perlakuan yang baik terhadap sungai diharapkan kualitas air sungai dapat diperbaiki.

2. Air Bawah Tanah

Berdasarkan Peta hidrogeologi Indonesia dapat diidentifikasikan jenis litologi batuan (lithological rock types) serta potensi dan prospek air tanah (groundwater potential and prospects). Pada Peta Hidrogeologi Indonesia ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang relatif memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada di wilayah Aceh (relatif berarah barat laut – tenggara). Terkait dengan aspek hidrogeologi di atas, selanjutnya dikemukakan juga mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada di wilayah Pidie Jaya. Dengan mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasikan ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pidie Jaya. Berdasarkan qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Cekungan Air Tanah (CAT) seluas 22.380,29 Ha meliputi: a). CAT Sigli seluas 6.354,10 Ha, meliputi Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja; b). CAT Kemiki seluas 3.471,55 Ha, meliputi Kecamatan Merah Dua. C). CAT Jeunib seluas 12.554,63 Ha, meliputi Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Untuk lebih jelasnya seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Cekungan	Luas (ha)
1	Bandar Baru	Sigli	4.566,18
2	Bandar Dua	Jeunib	3.992,11
3	Jangka Buya	Jeunib	926,15
4	Meurah Dua	Kemiki	3.471,55
5	Meurah Dua	Jeunib	1.704,11
6	Meureudu	Jeunib	2.260,97
7	Pante Raja	Sigli	1.236,61
8	Trienggadeng	Jeunib	426,36
9	Trienggadeng	Sigli	551,32
10	Ulim	Jeunib	3.244,94
Jumlah			22.380,30

Sumber: Hasil Perhitungan GIS Tahun 2023 (data awal)

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus dengan kapasitas yang optimum. Ketersediaan Air bersih sangat tergantung pada sumber air yang dapat di olah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya dengan 2 cara, yaitu: melalui jaringan sistem perpipaan PDAM, dan sistem non perpipaan (swadaya masyarakat).

Kondisi sekarang ini, pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu Meureudu, Panteraja dan Ulim. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya diambil dari sumur galian, mata air dan sungai. Sasaran akhir RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2035 dalam hal ini daerah perkotaan di Pidie Jaya dapat terlayani jaringan sistem perpipaan PDAM dengan baik.

2.1.1.5. Klimatologi

A. Tipe

Berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah maka tipe curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya adalah tipe A sesuai rumus Schmidt dan Ferguson. Temperatur berkisar dari suhu minimum 19°C – 22°C sampai dengan suhu maksimum 30°C – 35°C.

B. Curah hujan

Menurut Atlas Curah Hujan Bakosurtanal, Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi 4 kawasan curah hujan, yaitu :

a. Wilayah pantai utara mempunyai curah hujan 1.500 mm/tahun;
b. Wilayah daratan rendah dengan ketinggian 50 – 100 mdplbercurah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun;
c. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 – 200 mdplbercurah hujan 2.000 – 2.500 mm/tahun;
d. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian >400 mdplbercurah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun.

Curah Hujan (MM) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Hari Hujan adalah hari dengan curah hujan paling sedikit 1 mm/hari (satu milimeter per hari). Untuk lebih jelasnya mengenai curah hujan dan hari hujan selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Data Curah Hujan dan Hari Hujan Stasion SMPK BPN Meureudu
Selama Kurun Waktu 10 Tahun 2014-2023

Bulan	Tahun																			
	2014*		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH
Januari	88	4	280	13	329	13	153	11	70	7	86	8	66	5	151	12	326	13	458	12
Februari	31	4	25	3	266	10	63	5	40	5	64	7	319	5	150	8	212	15	313	11
Maret	48	5	72	6	88	4	99	7	23	5	49	7	166	9	136	11	253	11	140	12
April	23	2	74	5	49	8	38	6	53	6	72	9	312	16	143	10	103	11	43	4
Mei	151	11	110	5	74	6	89	7	58	6	84	10	312	15	148	11	50	6	27	4
Juni	7	1	104	2	136	10	63	5	14	2	26	5	85	7	198	12	183	11	67	2
Juli	27	3	78	12	75	8	65	8	29	4	15	4	192	14	189	14	40	7	23	2
Agustus	160	13	32	4	40	6	35	4	14	2	47	5	116	7	105	13	173	10	45	4
September	135	10	174	10	54	4	127	10	73	6	68	6	58	8	169	13	8	4	261	9
Oktober	164	18	137	9	54	8	133	12	237	12	236	13	21	5	202	17	325	15	262	14
November	131	9	104	14	182	14	171	15	239	12	234	13	242	16	375	23	359	16	150	17
Desember	241	11	251	10	256	18	233	19	294	14	246	15	210	16	226	18	325	18	235	13
Jumlah	1.206	91	1.441	93	1.603	109	1.266	108	1.143	80	1.227	102	2.099	123	2.192	162	2.357	137	2.024	104

*Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Curah hujan bulanan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah (100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Tingkat curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Pidie Jaya tertinggi terjadi pada akhir tahun pada bulan November dan Desember yang mencapai kisaran 200-360 mm. Rata-rata curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juni mencapai dikisaran 7-100 mm. Jumlah curah hujan di

Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 cenderung naik kemudian sedikit menurun di tahun 2017 dan 2018, naik sedikit pada tahun pada tahun 2019, kemudian naik signifikan pada tahun 2020 sampai 2022, namun pada tahun 2023 cenderung turun kembali.

2.1.1.6. Pemanfaatan Ruang

A. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pidie Jaya memiliki keunggulan di sektor pertanian dan kelautan yang merupakan penyumbang PDRB terbesar. Padi sawah, kakao dan perikanan merupakan komoditi unggulan daerah yang terus dikembangkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan daerah maka Kabupaten Pidie Jaya diharapkan mampu mengembangkan industri-industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan. Disamping itu juga Kabupaten Pidie Jaya terus mengembangkan kawasan peternakan guna mendukung perekonomian masyarakat khususnya kawasan perdesaan.

Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang berbeda, yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan. Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air payau dan perikanan tangkap. Kawasan daratan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perikanan air tawar, dan peternakan. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan tanaman perkebunan, kehutanan, pengembangan hortikultura dan peternakan.

B. Pola Pemanfaatan Ruang

Adapun peruntukan untuk wilayah laut yang luasnya sebesar 210,84 km^2 melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, tripang, dan potensi laut lainnya. Berdasarkan ketentuan penggunaan wilayah laut untuk kabupaten/kota berjarak 4 mil dari tepi pantai. Pengembangan sektor kelautan sangat memberikan harapan dan menjanjikan jika dikelola secara baik. Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya

No	Peruntukan	Luas (Ha)	Prosentase
	Kawasan Lindung	**50.946,86**	**53,51%**
1	Hutan Lindung	48.004,21	50,42%
2	Sempadan Sungai	2.067,15	2,17%
3	Sempadan Pantai	228,57	0,24%
4	Sungai	646,93	0,68%
	Kawasan Budidaya	**44.264,10**	**46,49%**
5	Hutan Pendidikan	150,21	0,16%
6	Hutan Produksi Terbatas	4.865,11	5,11%
7	Hutan Rakyat	1.225,39	1,29%
8	Pengembangan Lahan Basah	75,30	0,08%
9	Kawasan Hankam	19,94	0,02%
10	Kawasan Pendidikan	110,16	0,12%
11	Kasawan Holtikultura	2.331,68	2,45%
12	Kawasan Industri Perikanan	19,63	0,02%
13	Kawasan Industri	91,27	0,10%
14	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	21,05	0,02%
15	Lahan Program PLKSDA-BM	201,86	0,21%
16	Lokasi Transmigrasi	561,28	0,59%
17	Pemukiman Pedesaan	3.769,41	3,96%
18	Pemukiman Perkotaan	2.754,51	2,89%
19	Perikanan	24,34	0,03%
20	Perkebunan Rakyat	17.004,26	17,86%
21	Pertanian Lahan Basah	7.739,21	8,13%
22	Pertanian Lahan Kering	365,56	0,38%
23	Peternakan	1.271,55	1,34%
24	Tambak	1.662,38	1,75%
	Total	**95.210,96**	**100,00**

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034. (data awal)

Persentase pembagian pola pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pidie Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 53,51 persen atau 50.946,86 hektar dan kawasan budidaya seluas 46,49 persen atau 44.264,10 hektar sesuai dengan tata ruang nasional. Kawasan lindung di Kabupaten Pidie Jaya dimanfaatkan sebagai wilayah serapan yang tidak dapat diganggu keberadaannya yang berada di lima Kecamatan sebagai barikut:

a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang.
b. Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Panton Raya.

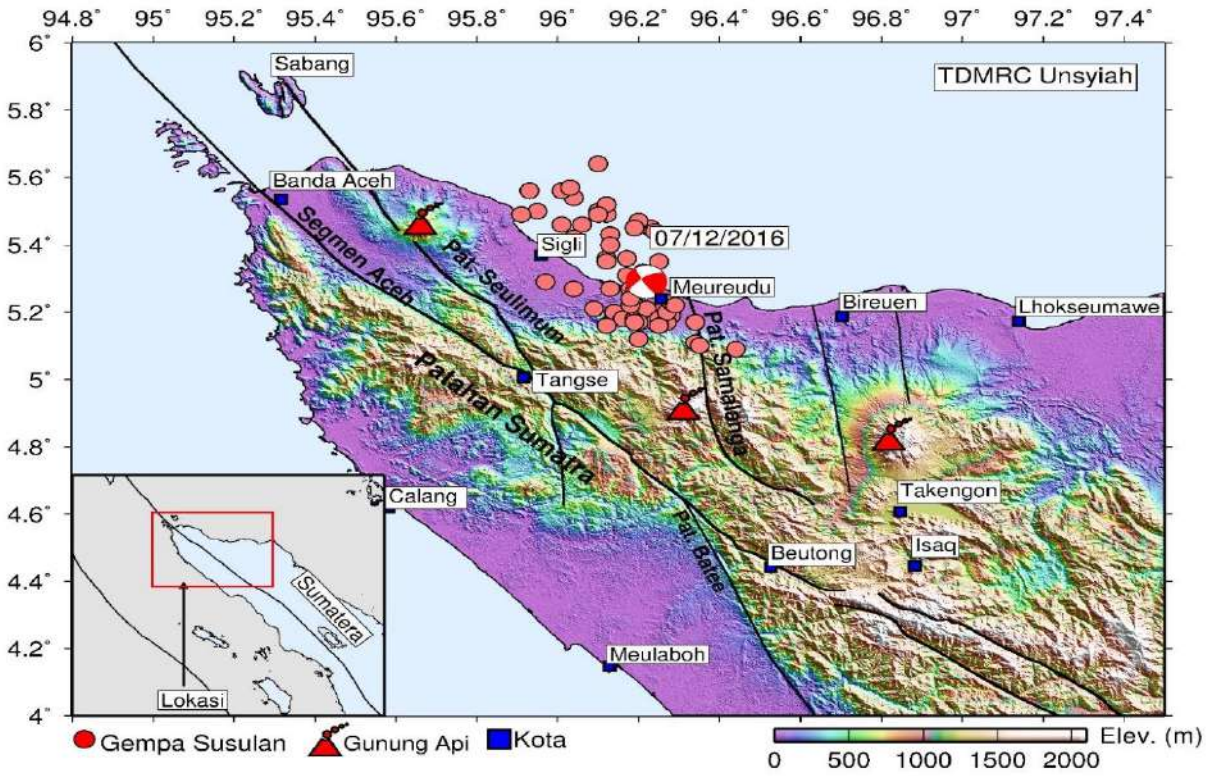
c. Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong.
d. Kecamatan Meurah Dua, dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng.
e. Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateueh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane.

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

A. Gempa Bumi

Seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi. Hal tersebut telah terbukti pada tanggal 07 Desember 2016 pukul 05:02:36 WIB terjadi Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pidie Jaya Aceh dengan magnitude 6,5 SR yang berlokasi $5,19^0$ Lintang Utara, $96,36^0$ Bujur Timur yang berpusat di 18 km Timur Laut Kabupaten Pidie Jaya Aceh dengan Kedalaman 8,7 km. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), beberapa kali terjadi gempa susulan pasca gempa utama. Bencana tersebut mengakibatkan 104 orang meninggal dunia yang tersebar di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen dan Kabupaten Pidie, korban terbanyak terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebanyak 97 orang. Selain itu juga terdapat korban luka berat dan luka ringan. Bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap perumahan masyarakat, insfrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 2.11 memperlihatkan pusat gempa bumi yang terjadi pada Tanggal 7 Desember 2016 dan beberapa gempa bumi susulan yang terjadi sampai dengan Tanggal 13 Desember 2016. Berdasarkan posisi pusat gempa bumi dan kedalamannya, kejadian gempa bumi ini disebabkan aktivitas sesar aktif di daerah tersebut.



Sumber : katalog BMKG Tahun 2016

Gambar 2.11. Peta Distribusi pusat gempa bumi tanggal 7-13 Desember 2016 di Kabupaten Pidie Jaya

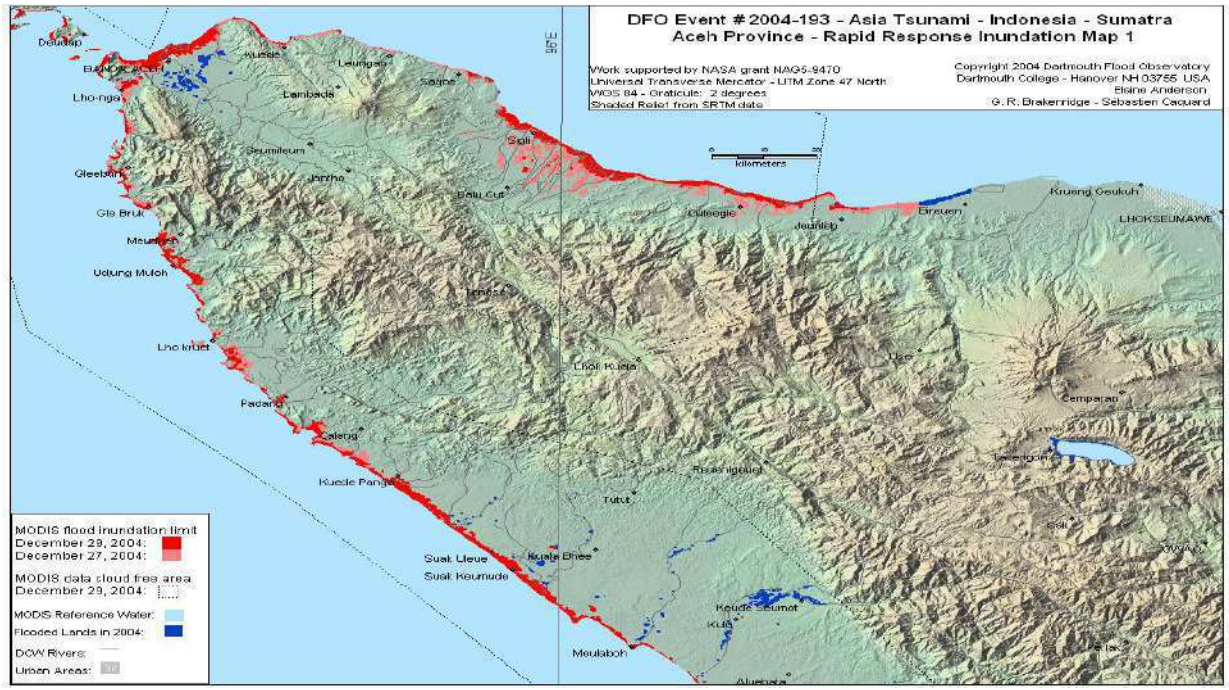
Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan (10.929 unit), kerusakan sedang (4.542 unit) dan kerusakan berat (2.202 unit) yang tersebar di delapan kecamatan. Di samping itu, kerusakan rumah akibat gempa susulan dengan kategori rusak berat sejumlah 715 unit.

B. Tsunami/ Gelombang Pasang

Daerah/wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/ wilayah potensi rawan bencana tsunami/ gelombang pasang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Bandar Baru meliputi Gampong : Cut Njong, Mns.Baro, Sawang, dan Lancang, Paru
2. Kecamatan Penteraja meliputi Gampong : Keude Pante Raja, Reudeup, Peurade dan TU.
3. Kecamatan Trienggadeng meliputi Gampong : Mns. Keude, Meue, Cot Lheue Rheng dan Deah Pangwa
4. Kecamatan Meureudu meliputi Gampong : Meuraksa dan Mns. Balek
5. Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong : Mns Jurong, Lueng Bimba dan Buangan
6. Kecamatan Ulim meliputi Gampong : Tijien Husen, Gelanggang
7. Kecamatan Jangka Buya meliputi Gampong Cot

Peta wilayah rawan bencana tsunami Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.12 dan Jumlah korban dan pengungsi wilayah Kabupaten Pidie Jaya pasca tsunami sebagaimana Tabel 2.7.



Sumber : Pictures Of Asian Tsunami Disaster Tahun 2004

Gambar 2.12. Wilayah Rawan Bencana Tsunami Aceh

Tabel 2.7.
Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005

No	Kecamatan	Korban (jiwa)			
		Meninggal	Hilang	Luka-Luka	Pengungsi (jiwa)
1	Meureudu	11	-	-	110
2	Meurah Dua	1	-	-	175
3	Bandar Dua	-	-	-	-
4	Jangka Buya	25	27	2	1.534
5	Ulim	8	-	-	577
6	Trienggadeng	310	35	-	1.668
7	Pante Raja	191	9	-	3.022
8	Bandar Baru	15	-	-	1.080
Jumlah		**561**	**62**	**2**	**8.166**

Sumber: Dinas Sosial Kab. Pidie Tahun 2019 (data awal)

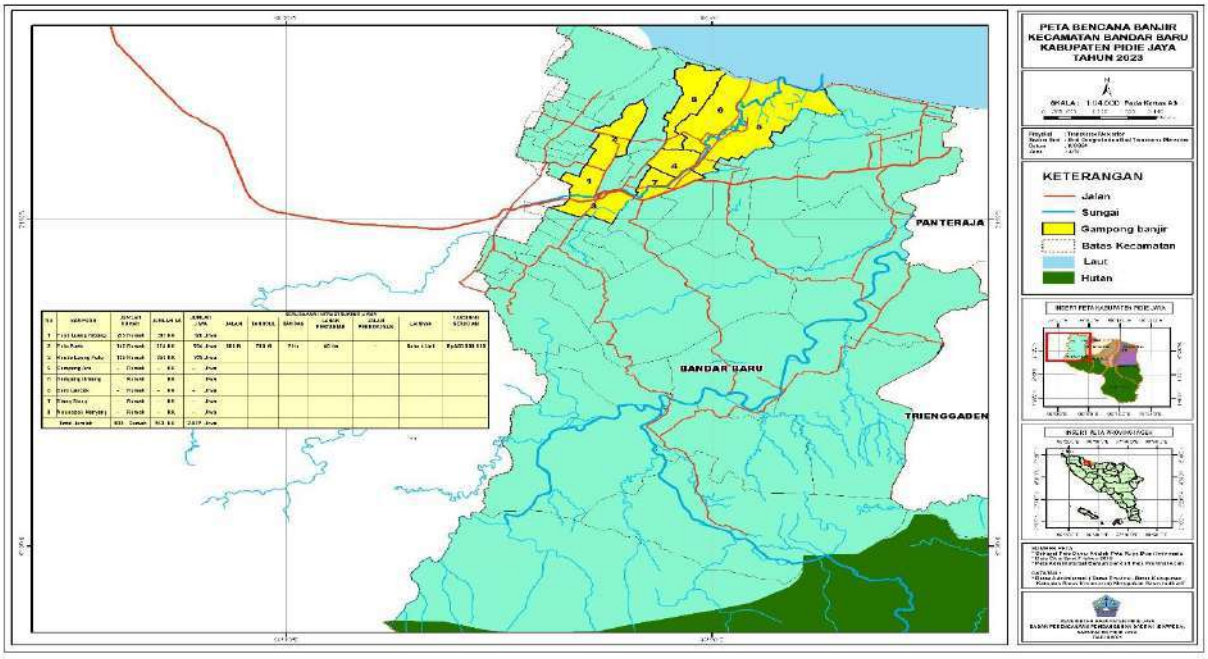
Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. Hal ini menyebabkan terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie.

C. Banjir dan Erosi

Banjir merupakan Fenomena alam yang terjadi di kawasan yang banyak di aliri oleh aliran air sungai atau bisa juga di definisikan sebagai hadirnya air disuatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam hal ini Kabupaten Pidie Jaya sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, sehingga secara keseluruhan kawasannya rawan terhadap banjir. Berikut daerah rawan banjir berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

C1. Kecamatan Bandar Baru

Kecamatan Bandar Baru, ibukotanya Lueng Putu merupakan wilayah yang paling sering terdampak banjir. Dari 43 gampong (desa), terdapat 8 desa yang terdampak banjir. Aliran air sungai bermula dari Abah Lueng sampai ke Blang Iboh. Kemudian, aliran air di wilayah Pueb Lueng Nibong berasal dari luapan sungai Teupin Raya (Kabupaten Pidie) Sampai Ke Meunasah Udeung.



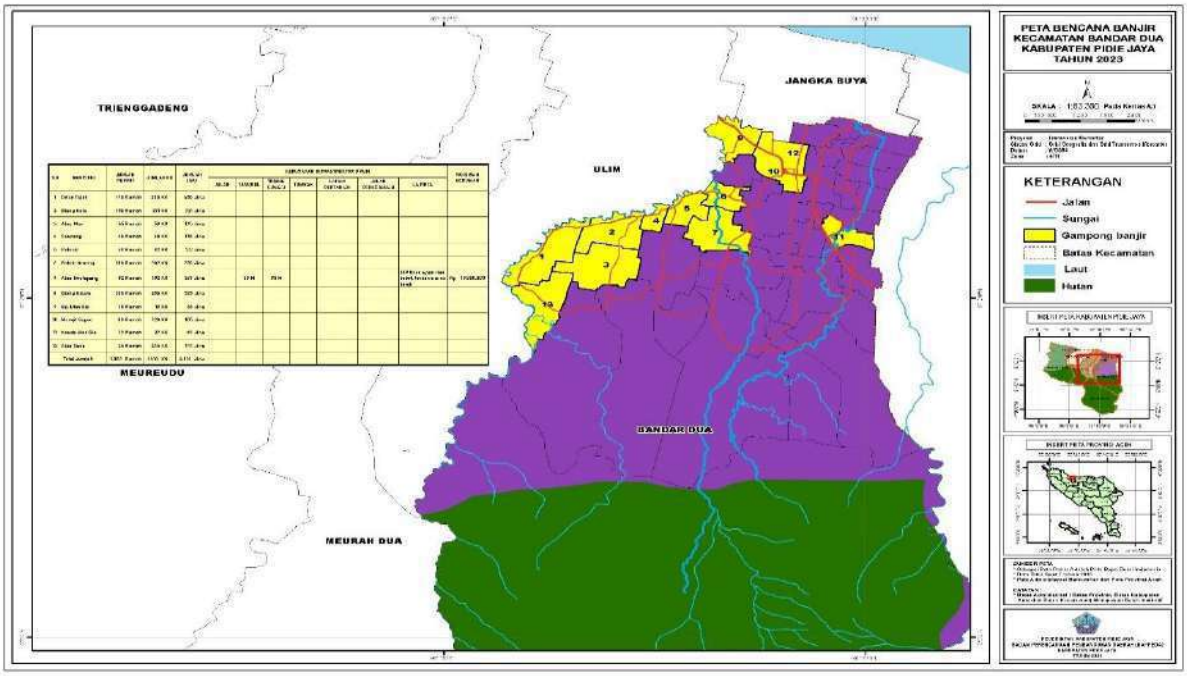
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.13. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Baru Kabupaten Pidie Jaya

Langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Bandar Baru dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) Pembersihan Sungai (Krueng); dan 2) Peningkatan Tebing Sungai (Bronjong) dalam ini sangat di prioritaskan.

C2. Kecamatan Bandar Dua

Kecamatan Bandar Dua dengan ibukota kecamatan adalah Ulee Glee yang terdiri dari atas 45 (empat puluh lima) Gampong. Di kecamatan tersebut terdapat 12 (dua belas) gampong yang sering dilanda musibah banjir. Banjir bermula dari aliran sungai di Alue Sane Sampai ke Paya Baroh.



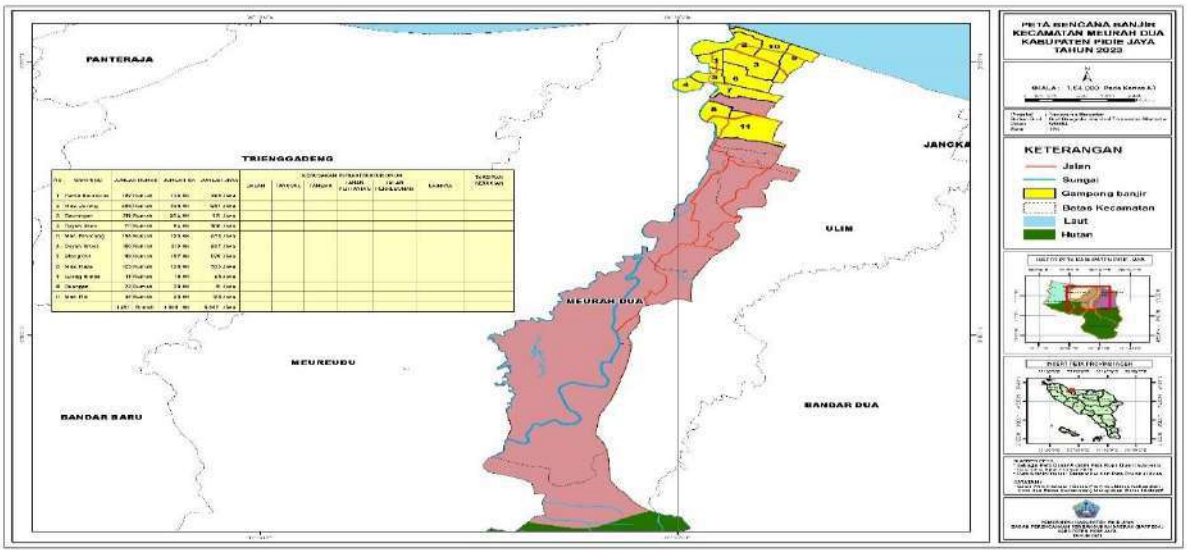
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.14. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya

Adapun langkah-langkah pencegahan banjir di Kecamatan Bandar Dua dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) pembagunan talud; dan 2) pembagunan gorong-gorong.

C3. Kecamatan Meurah Dua

Kecamatan Meurah Dua merupakan kawasan rawan banjir. daerah yang paling terdampak banjir adalah dari desa Meunasah Meunasah Bie sampai desa Pante Beureune merupakan dataran yang paling rendah di kecamatan Meurah Dua Sehingga hujan dengan curah rendah pun bisa mengakibatkan banjir.



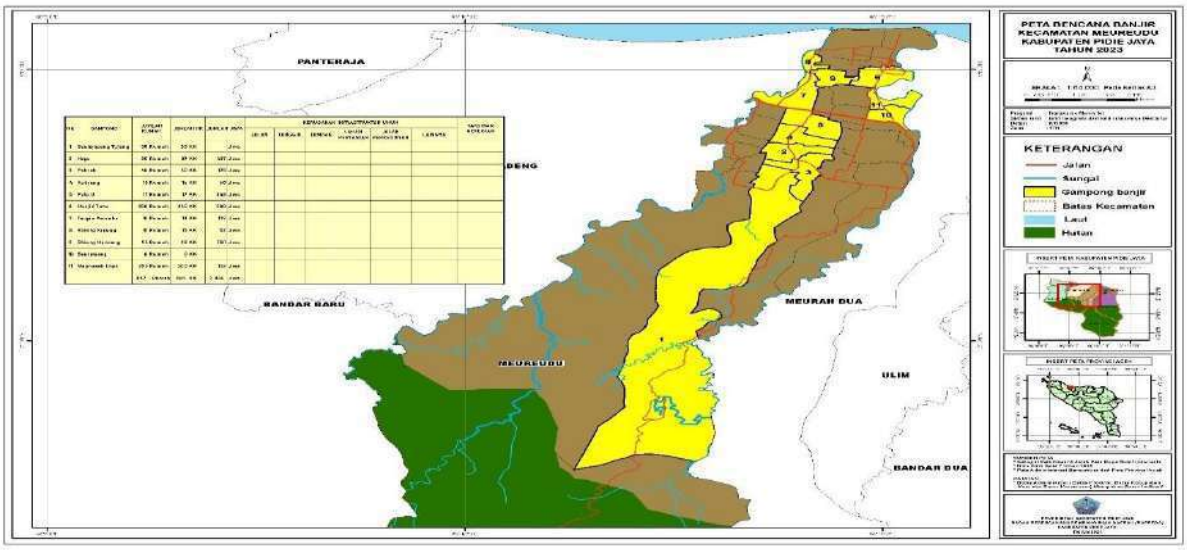
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.15. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Langkah-langkah pencegahan Banjir di Kecamatan Meurah Dua antara lain: 1). Membuat saluran plat beton yang memotong jalan di sekitar desa pante Beureune supaya air tidak terkurung; 2) menanam pohon; 3) pengerukan sungai; dan 4) peningkatan tebing sungai.

C4. Kecamatan Meureudu

Kecamatan Muerudu merupakan Pusat Kota di Kabupaten Pidie Jaya, Letaknya strategis dan padat penduduk, hampir semua wilayahnya terdampak banjir. Wilayah yang paling besar terdampak adalah Gampong Mesjid Tuha.



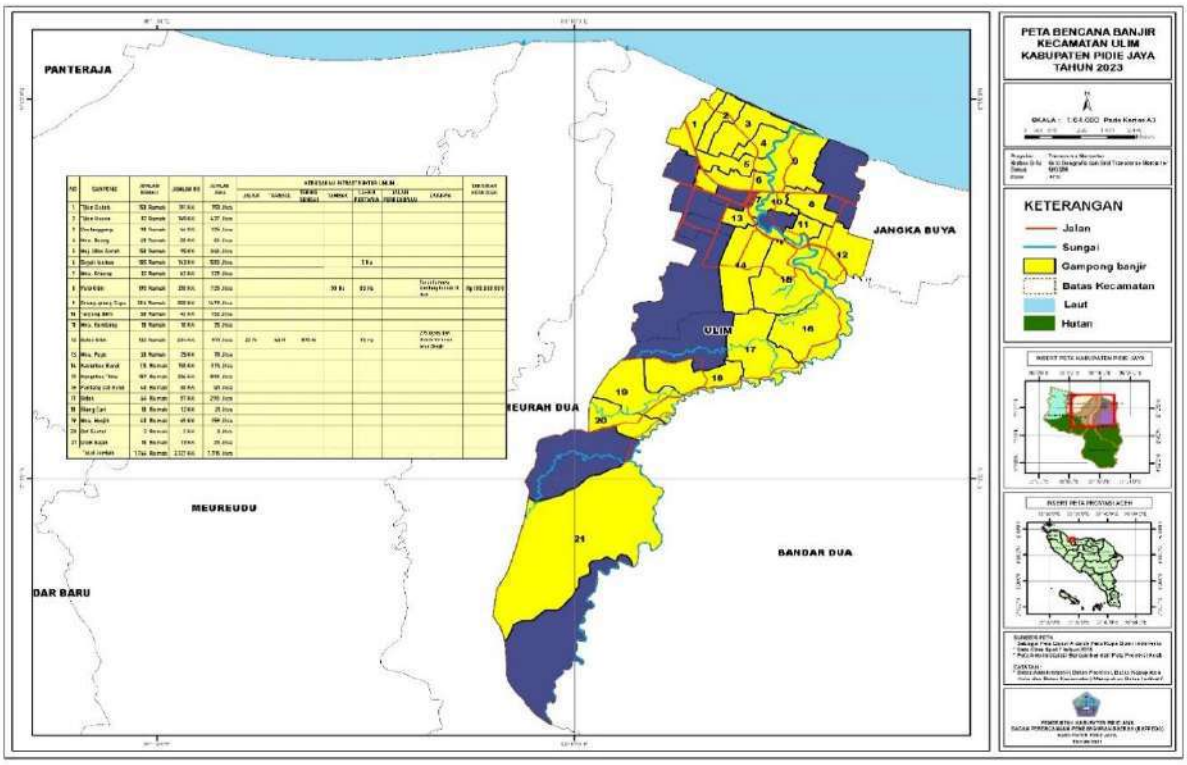
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.16. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Meureudu dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) memperbaiki saluran Air; 2) membuang sampah pada tempatnya; 3) menanam pohon; dan 4) Peningkatan Tebing Sungai.

C5. Kecamatan Ulim

Kecamatan Ulim merupakan kecamatan yang sering dilanda banjir. Kecamatan dengan ibukotanya Ulim terdiri dari 30 desa dan 21 desa merupakan desa sering terkena dampak banjir. Banjir ini akibatkan oleh meluapya air sungai Krung Ulim yang bersamaan dengan terjadinya pasang air laut.



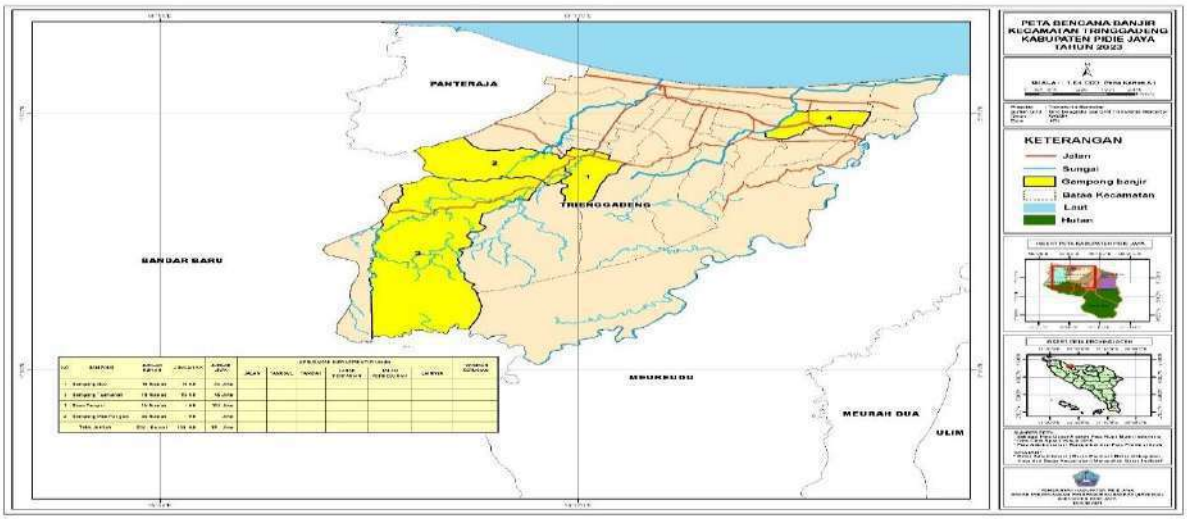
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.17. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya

Langkah – langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Ulim dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1) peningkatan tebing sungai; 2) pembangunan tanggul pemecah ombak; dan 3) perbaikan saluran air agar tidak terjadi genangan

C6. Kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng terdiri dari 27 gampong, dan ada 13 gampong yang terdampak banjir (Gambar 2.9). Namun banjir yang paling besar dampaknya terdapat di 4 (empat) desa yakni; Gampong Dee, Deah Teumanah, Tampui dan Mee Pangwa.



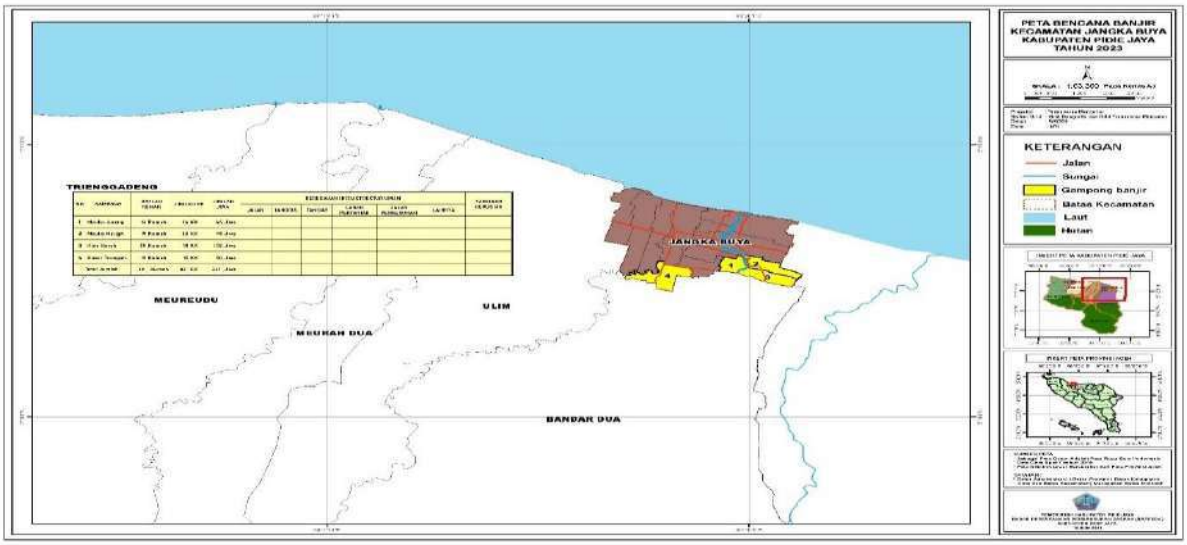
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.18. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

Langkah – langkah Pencegahan antara lain: 1) normalisasi sungai; dan 2) perbaikan waduk yang telah jebol/rusak

C7. Kecamatan Jangka Buya

Di Kecamatan Jangka Buya terdapat beberapa wilayah yang sering terdampak banjir diantaranya Gampong Mukoe Jurong, Mukoe Meugit, Kuta Baroh dan Buket teungouh. Kecamatan yang hanya terdiri dari 18 Gampong ini merupakan kecamatan di hulu sungai sehingga dampak banjir sering terjadi akibat hujan deras sehingga air sungai meluap dan kepermukiman penduduk.



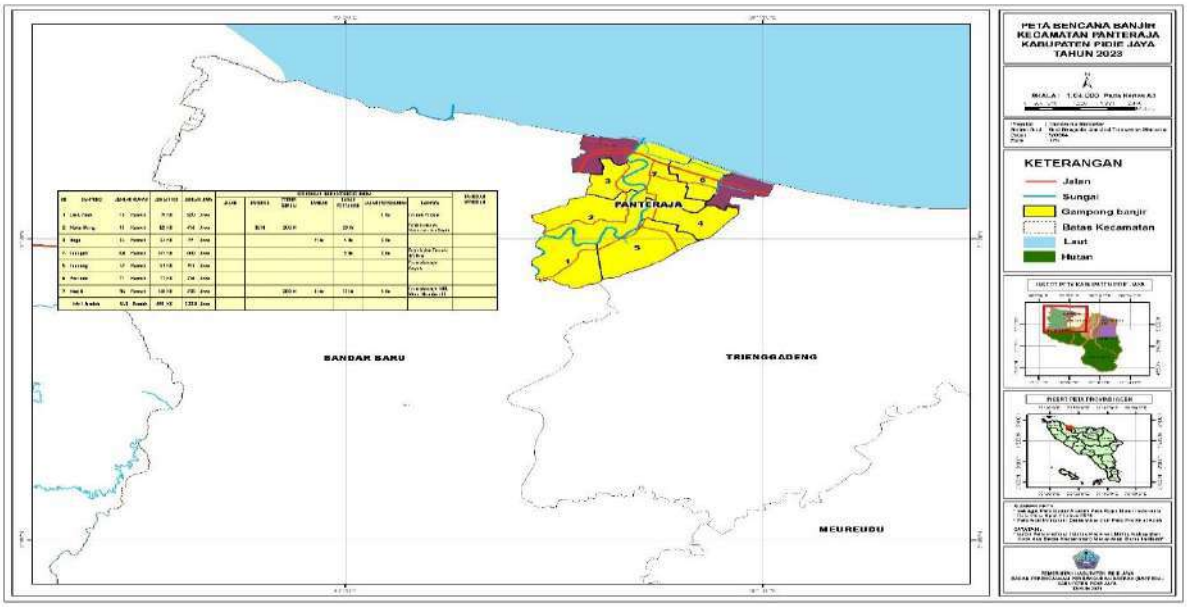
Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.19. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya

Langka-langka yang dapat dilakukan untuk pencagahan banjir tersebut antara lain: 1) membuat bendungan; 2) menanam pohon; 3) melestarikan hutan; dan 4) mengeruk sungai.

C8. Kecamatan Panteraja

Kecamatan Panteraja ibukotanya Panteraja terdiri 10 desa, yang terdampak banjir ada 7 desa. Yang paling berat terdampak banjir adalah desa Meunasah Mesjid, Hagu dan Meunasah Teungoh. Banjir di sebabkan karena luapan air sungai bertemu dengan air laut pasang.



Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.20. Peta Daerah Rawan Bencana Banjir di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya

Langkah – langkah Pencegahan Banjir di Kecamatan Panteraja dapat dilakukan antara lain: 1) perbaikan tanggul yang roboh sepanjang sungai yang mengaliri wilayah Panteraja; dan 2) perbaikan saluran pembuangan air di sekitar pemukiman penduduk.

D. Letusan Gunung Berapi

Walaupun Pidie Jaya tidak memiliki gunung berapi yang aktif, namun dengan adanya Gunung Peut Sagoe yang berada 1 km dari perbatasan Kecamatan Meurah Dua (Pidie Jaya) dengan Kecamatan Geumpang (Pidie), telah memberikan ancaman potensi banjir lahar dan debu panas. Tercatat pada tahun 1974 Gunung Berapi Peut Sagoe yang berada pada Kabupaten tetangga Pidie Jaya (Kabupaten Pidie) pernah meletus dan mengirimkan lahar sampai memasuki kawasan Pidie Jaya sejauh 35 Km, mengakibatkan banyaknya endapan lahar yang menggenangi lembah Blang

Raweu, sehingga menimbulkan endapan komposit mineral andesit yang cukup banyak. Sementara debu dan awan panas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kenyamanan pada penduduk yang berada di beberapa desa seperti Sarah Mane, Lhok Sandeng di Kecamatan Meurah Dua, dan Lhok Gajah di Kecamatan Ulim.

E. Tanah Longsor

Tanah Longsor adalah fenomena geologis, yaitu pergerakan tanah, misalnya jatuhnya bebatuan, aliran reruntuhan, yang bisa terjadi di lepas pantai, pinggir pantai dan di daratan. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Pidie Jaya antara lain: Menengah: Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Rendah : Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka buya, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Ulim. Tinggi : Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Meurah Dua.

F. Angin Kencang/Puting Beliung

Kondisi kebencanaan angin puting beliung dipicu oleh kondisi pertemuan kondisi udara kering di pesisir lautan utara Pidie Jaya dengan kondisi kelembaban udara di daerah pegunungan bagian selatan. Klasifikasi angin puting beliung yang ada di Kecamatan Pidie Jaya meliputi: a). Bahaya Menengah: Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru; b). Bahaya Rendah: Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan Bandar Baru; c). Bahaya Tinggi: Kecamatan Ulim, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, dan Kecamatan Bandar Baru.

G. Kebakaran

Pidie Jaya memiliki pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Kota-kota di kecamatan yang menjadi pasar lokal bagi penduduk sekitar juga memiliki bangunan pertokoan yang berbahan kayu (semi permanen) yang rentan terhadap bencana kebakaran. Bencana kebakaran besar yang pernah terjadi di Pidie Jaya pada tanggal 8 Agustus 2012 yang menghanguskan 21 rumah penduduk di Kecamatan Panteraja.

H. Abrasi

Abrasi pantai terutama terjadi pada wilayah sempadan pantai yang telah terpakai untuk kegiatan budidaya (pertambakan dan industri pembuatan garam). Selain terjadi abrasi, sebagian wilayah di pantai Kabupaten Pidie Jaya telah terkena

air laut (intrusi air laut) terutama di kecamatan Meureudu, Trienggadeng, Panteraja serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

2.1.2. Demografi

Potensi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas, administrasi dan karakteristik pembangunan penduduk dalam suatu daerah. Pembangunan bidang kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dilakukan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui keluarga sejahtera dan mandiri.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sebesar 163.591 jiwa. Bila rata-rata 4 jiwa per rumah tangga, maka total rumah tangga sebanyak 40.897 KK. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun terhitung 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2022 ke 2023 mencapai 0,40% dengan tingkat kepadatan 194,05 jiwa/km^2. Lebih jelas tentang jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa/tahun)					Kepadatan (jiwa/km^2) Th 2023
		2019*	2020	2021	2022	2023	
1	Bandar Baru	36.720	37.726	37.052	36.943	37.596	133,68
2	Panteraja	8.993	9.219	9.076	9.059	9.274	231,62
3	Trienggadeng	23.534	24.278	23.854	23.913	24.380	190,47
4	Meureudu	22.250	22.812	22.493	22.745	23.101	147,38
5	Meurah Dua	12.531	12.853	12.744	12.924	13.035	44,61
6	Ulim	16.267	16.595	16.376	16.452	16.735	275,56
7	Jangka Buya	10.199	10.545	10.488	10.630	10.801	364,53
8	Bandar Dua	28.088	28.146	27.858	28.162	28.669	164,52
Jumlah		**158.582**	**162.174**	**159.941**	**160.828**	**163.591**	**194,05**

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 0,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 160.828 jiwa, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 163.591 jiwa. Peningkatan ini bervariasi di setiap kecamatan, dengan laju pertumbuhan tertinggi tercatat di Kecamatan Jangka Buya sebesar 0,75%, diikuti oleh Kecamatan Meurah Dua dengan 0,74%, dan Kecamatan Bandar Dua serta Meureudu masing-masing sebesar 0,63%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Bandar Baru yang mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06% sebagaimana terlihat pada Tabel 2.9 di bawah ini

Tabel 2.9.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan
		2022*	2023	
1	Bandar Baru	36.943	37.596	(0,06)
2	Pante Raja	9.059	9.274	0,02
3	Trienggadeng	23.913	24.380	0,22
4	Meureudu	22.745	23.101	0,63
5	Meurah Dua	12.924	13.035	0,74
6	Ulim	16.452	16.735	0,33
7	Jangka Buya	10.630	10.801	0,75
8	Bandar Dua	28.162	28.669	0,63
Laju Pertumbuhan		**160.828**	**163.591**	**0,40**

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

Kabupaten Pidie Jaya memiliki kepadatan penduduk yang masih relatif jarang khususnya pada kecamatan tertentu. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jangka Buya, ini disebabkan karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Meurah Dua karena luas wilayahnya merupakan terbesar dari 7 kecamatan lainnya. Untuk kecamatan Meureudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kepadatan penduduk 145,11 jiwa/km2. Sedangkan untuk jumlah anggota keluarga per rumah tangga (RT) mencapai rata - rata 4 orang. Sedangkan untuk jumlah anggota keluarga per rumah tanggga (RT) mencapai rata - rata 4 orang. Lebih jelas tentang jumlah rumah tangga dan jumlah rata-rata jiwa/RT dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Kepadatan Penduduk, Rumah Tangga, dan Jumlah Jiwa/RT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Jumlah Jiwa/RT
1	Bandar Baru	281,24	37.596	133,68	11.680	4
2	Pante Raja	40,04	9.274	231,62	2.885	4
3	Trienggadeng	128,00	24.380	190,47	7.725	3
4	Meureudu	156,74	23.101	147,38	1.148	4
5	Meurah Dua	292,20	13.035	44,61	3.948	4
6	Ulim	60,73	16.735	275,56	4.988	4
7	Jangka Buya	29,63	10.801	364,53	4.211	4
8	Bandar Dua	174,26	28.669	164,52	8.703	4
Jumlah		**1.162,84**	**163.591**	**194,05**	**50.288**	**4**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Penduduk Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh suku Aceh yaitu mencapai 97% dan selebihnya adalah suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain. Mayoritas penduduk Kabupaten Pidie Jaya memeluk agama Islam (Muslim).

Seiring dengan tingginya minat penduduk Kabupaten Pidie Jaya untuk menempuh jalur pendidikan formal pada setiap tingkat pendidikan, pada kenyataannya hal tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja pada sektor tersebut. Data BPS Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 untuk laki-laki mencapai 4,12% atau 1.978 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 47.896 jiwa. Untuk perempuan 4,74% atau 1.204 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja 25.352 jiwa. Sedangkan secara keseluruhan mencapai 4,34% atau 3.182 jiwa dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah 73.248 jiwa. Angka tersebut masih dibawah rata-rata TPT Aceh yakni 6,03%. Bertambahnya jumlah angkatan kerja masih belum disertai oleh peningkatan ketersediaan dan keberagaman lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran terhitung masih relatif tinggi.

Data Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 menjelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya lebih memilih sektor pertanian dan jasa-jasa sebagai mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis daerah yang mendukung. Kemudian diikuti dengan wiraswasta, perdagangan dan nelayan serta sektor lainya. Sulitnya membuka lapangan usaha dan terkendala pada kemampuan permodalan serta pemasaran adalah faktor utama penyebab pengangguran daerah.

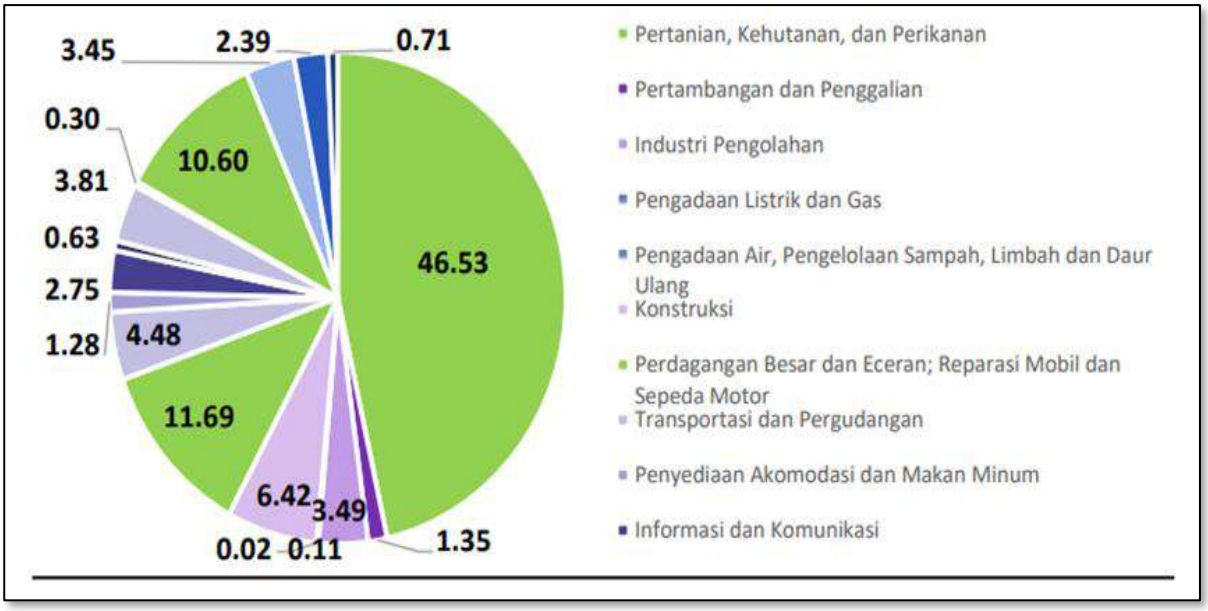
Tabel 2.11.
Mayoritas Profesi/Mata Pencaharian Penduduk
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No.	Profesi/Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani/Pekebun	22.620	13,82
2.	Nelayan	2.704	1,65
3.	Pedagang	2.106	1,28
4.	Wiraswasta	11.829	7,23
5.	PNS	3.263	1,99
6.	TNI/POLRI	491	0,30
7.	Karyawan/Honorer	1.604	0,98
8.	Lain-lain	76.763	46,92
9.	Ibu RT, Pelajar, Mahasiswa, Balita (*Belum/Tidak Bekerja*)	42.211	25,80
Jumlah Penduduk		163.591	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Sementara itu, Data BPS Tahun 2023 menjelaskan bahwa penduduk Pidie Jaya yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 46,60 persen (angka ini naik dari sebelumnya 45,80 persen jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,01 persen (turun dari 11,52 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,65 persen (turun dari 11,72 persen di tahun 2018).

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan dari tahun sebelumnya. Sebaliknya Administrasi Pemerintahan Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Berikut adalah kelompok lapangan usaha untuk penduduk yang bekerja dapat dilihat dalam Gambar 2.12.



Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 (Inkesra)

Gambar 2.21. Prosentase Lapangan Usaha Bagi Penduduk yang Bekerja Tahun 2023

Data BPS tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penduduk yang pekerjaannya tidak tetap atau sering berpindah profesi khususnya pada lapangan usaha pertanian seperti petani, nelayan, dan buruh. Hal tersebut disebabkan banyak petani, pekebun dan nelayan mengeluh lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain. Keadaan ini tidak tertutup kemungkinan angka pengangguran daerah akan semakin tinggi apabila mereka tidak menjalankan mata pencaharian tersebut secara yakin dan sungguh-sungguh. Dampak lainnya yang dirasakan akibat perpindahan profesi atau mata pencaharian sektor pertanian/perkebunan adalah menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB akan terus menurun.

2.1.2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sampai akhir tahun perencanaan 2045 dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk setiap kecamatan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Dasar pertimbangannya adalah bahwa setiap kecamatan memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda dan terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perkembangan penduduk wilayah tersebut. Model yang digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk disesuaikan dengan karakteristik perkembangan penduduk setiap kecamatan. Teknik proyeksi yang digunakan adalah polinomial. Dengan demikian jumlah penduduk akan membawa konsekuensi bertambahnya penduduk.

Dengan menggunakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebesar 0,051 persen pertahun, maka pada akhir tahun perencanaan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 539.631 jiwa. Jumlah penduduk hasil proyeksi pada tahun-tahun perencanaan akan menjadi dasar dalam penentuan jumlah sarana dan utilitas wilayah perencanaan, sehingga pemenuhan sarana-sarana akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Tabel 2.12.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Sampai Tahun 2045 Dengan Menggunakan Metoda Proyeksi Polinomial (Jiwa)

Kecamatan	Proyeksi Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
Meureudu	42.243	56.530	75.651	101.237	135.479
Meurah Dua	9.649	10.653	11.762	12.986	14.337
Bandar Dua	25.465	28.392	31.655	35.294	39.351
Jangka Buya	26.103	35.429	48.087	65.267	88.585
Ulim	15.036	21.485	30.702	43.872	62.691
Trienggadeng	17.858	21.005	24.708	29.062	34.185
Panteraja	12.482	17.919	25.726	36.932	53.021
Bandar Baru	32.395	43.969	59.678	80.999	109.937
JUMLAH	**183.255**	**237.413**	**310.002**	**407.690**	**539.631**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya (diolah), 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hasil maksimal perlu percepatan pertumbuhan sektor-sektor pendukung perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan dan energi, industri pengolahan, konstruksi/bangunan perdagangan, transportasi dan jasa-jasa.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

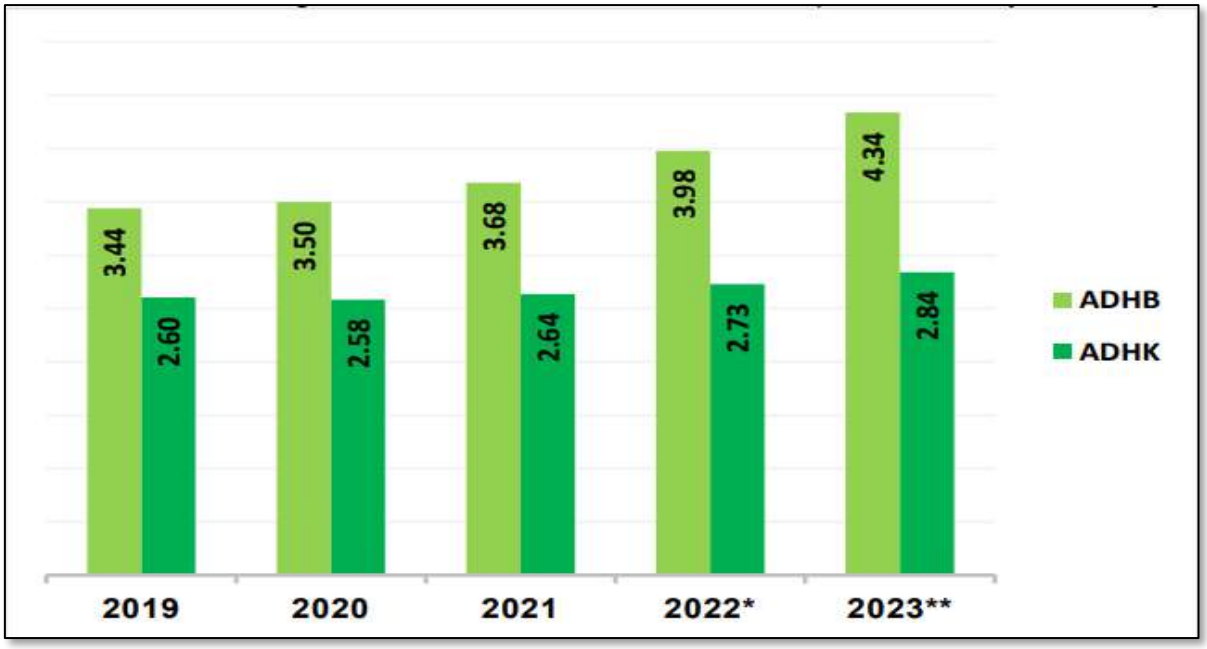
Salah satu indikator ekonomi yang paling sering digunakan dalam menilai kinerja perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB, dimana telah terjadi berubah metode perhitungannya dimulai dari tahun 2015 yang mana sebelumnya, PDRB dihitung berdasarkan 9 (Sembilan)

sektor lapangan usaha, kini telah dihitung berdasarkan 17 (Tujuh Belas) sektor lapangan usaha. Perhitungan tersebut menunjukkan struktur pembangunan ekonomi daerah atau Kabupaten Pidie Jaya sejak 5 tahun terakhir, dimana sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB.

Perkembangan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi telah menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Meskipun terlihat fluktuatif, hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahunnya yang terus meningkat baik dari nilai dari Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB Pidie Jaya ADHB mencapai 4,34 Triliun Rupiah pada tahun 2023. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3,44 Triliun Rupiah atau meningkat sebesar ± 899,22 Miliar Rupiah selama 5 (Lima) tahun terakhir. Jika dilihat secara rata-rata, setiap tahunnya di periode 2019-2023 PDRB ADHB Pidie Jaya naik sebanyak 224,81 Miliar Rupiah per tahun. Dalam Perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

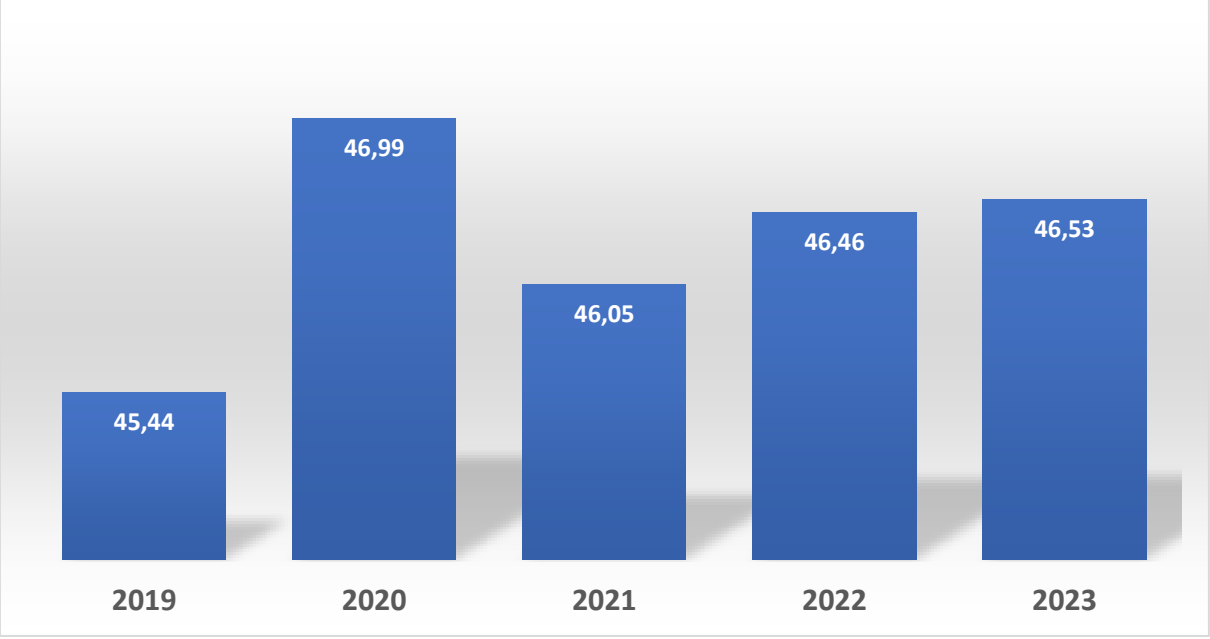
Nilai PDRB ADHK Pidie Jaya tahun 2020 telah mencapai 2,58 Triliun Rupiah, turun sebesar ± 20,46 Miliar dari tahun 2019. Namun Pada tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 2,63 Triliun Rupiah. Perekonomian Pidie Jaya di tahun 2020 mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar -0,79 persen. Turunnya kinerja perekonomian Pidie Jaya di tahun 2020, sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19. Angka ini terus meningkat sehingga nilai PDRB ADHK Pidie Jaya mencapai 2,73 pada tahun 2022. Selanjutnya dengan adanya kegiatan PKPJ (Pekan Kebudayaan Pidie Jaya) tahun 2023, berdampak meningkatkan perekonomian, sehingga nilai PDRB ADHK Pidie Jaya menjadi 2,84 Triliun Rupiah. Perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 2.22.



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.22. Perbandingan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2019-2023 Kabupaten Pidie Jaya (triliun rupiah)

Kekuatan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya saat ini lebih didominasi oleh sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Gambar 2.23 menunjukkan peranan sektor pertanian sebagai kontribusi utama perekonomian rakyat.



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.23. Peranan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2019-2023 Kabupaten Pidie Jaya (Persen)

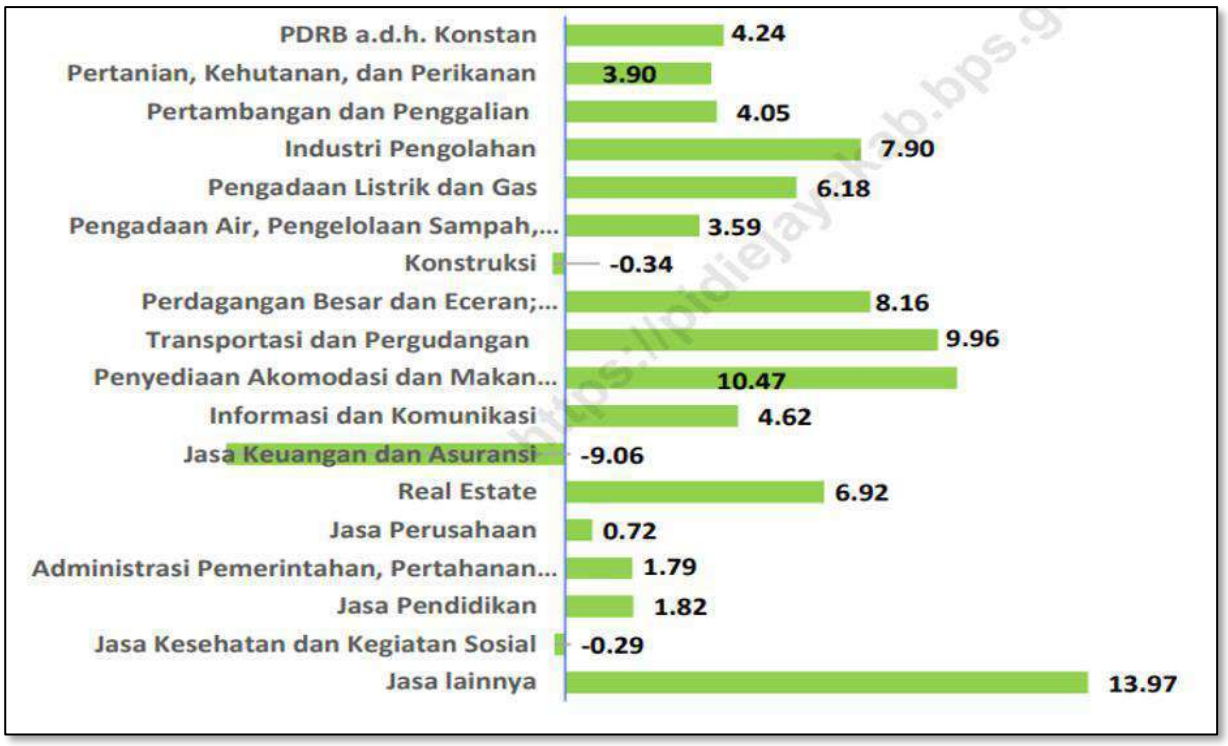
Struktur ekonomi masyarakat Pidie Jaya yang dilihat dari lapangan usaha lebih dominan pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dimana lapangan usaha ini telah menjadi leading sector dengan peranan hampir mencapai 46,53% pada tahun 2023. Sumbangan terbesar ke dua dihasilkan oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi sebesar 11,69%. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan kontribusi sebesar 10,60% yang berada pada posisi ke tiga, serta posisi ke empat kontribusi ada pada lapangan usaha Konstruksi dengan sumbangan mencapai 6,42%. Sementara itu untuk lapangan usaha lainnya kontribusinya masih berada dibawah 5% per tahun. Kontribusi yang paling sedikit kontribusinya terhadap PDRB yaitu Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana hanya mencapai 0,02% saja.

Kontribusi Nilai PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.13 dan Persentase kontribusi PDRB ADHB Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.24 sebagai berikut:

Tabel 2.13.
PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023 Atas Dasar Harga Berlaku 2019-2023
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Sektor	2019*		2020		2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.567.691,4	45,44	1.644.767,5	46,99	1.694.804,5	46,18	1.849.134,5	46,46	2,023.658,2	46,53
2	Pertambangan dan Penggalian	44.590,4	1,29	46.956,0	1,34	49.607,9	1,35	55.789,9	1,40	58.746,2	1,35
3	Industri Pengolahan	109.014,5	3,16	107.640,9	3,08	119.488,8	3,26	138.052,8	3,47	151.702,2	3,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.040,4	0,12	3.999,1	0,11	4.082,9	0,11	4.382,1	0,11	4.736,5	0,11
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah Daur Ulang	642,6	0,02	633,0	0,02	707,4	0,02	921,1	0,02	962.0	0,02
6	Konstruksi	259.771,8	7,53	273.846,8	7,82	271.589,7	7,40	274.962,6	6,91	279.034,5	6,42
7	Perdagangan Besar dan Enceran; Reparasi Kendaraan	386.946,9	11,22	368.213,9	10,52	392.441,1	10,69	436.761,3	10,97	508.469,5	11,69
8	Transportasi dan Pergudangan	141.270,2	4,09	105.929,4	3,03	136.016,8	3,71	157.698,7	3,96	194.963,4	4,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.489,0	1,06	35.594,1	1,02	34.543,9	0,94	48.203,1	1,21	55.519,4	1,28
10	Informasi dan Komunikasi	82.862,1	2,40	92.520,0	2,64	100.943,6	2,75	112.987,2	2,84	119.532,2	2,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	31.112,4	0,90	31.126,4	0,89	29.107,7	0,79	29.763,4	0,75	27.378,7	0,63
12	Real Estat	140.162,4	4,06	140.267,2	4,01	142.650,5	3,89	152.348,0	3,83	165.507,4	3,81
13	Jasa Perusahaan	9.902,1	0,29	9.838,1	0,28	10.084,6	0,27	12.313,5	0,31	12.868,4	0,30
14	Adm Pemerintah,Pertahanan, Jaminan Sosial wajib	411.845,4	11,94	399.515,4	11,41	430.511,9	11.73	434.772,5	10,92	460.801,4	10,60
15	Jasa Pendidikan	129.370,0	3,75	136.155,3	3,89	140.502,0	3,83	144.595,6	3,63	150.022.7	3,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.380,2	2,13	81.508,3	2,33	89.795,9	2,45	101.429,7	2,55	104.102.,2	2,39
17	Jasa Lainnya	20.774,5	0,60	21.854,8	0,62	22.771,7	0,62	26.062,1	0,65	31.078,4	0,71
PDRB		**3.449.866,4**	**100**	**3.500.366,2**	**100**	**3.669.650,7**	**100**	**3.968.178,8**	**100**	**4.349.088,4**	**100**

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. *(data awal)*



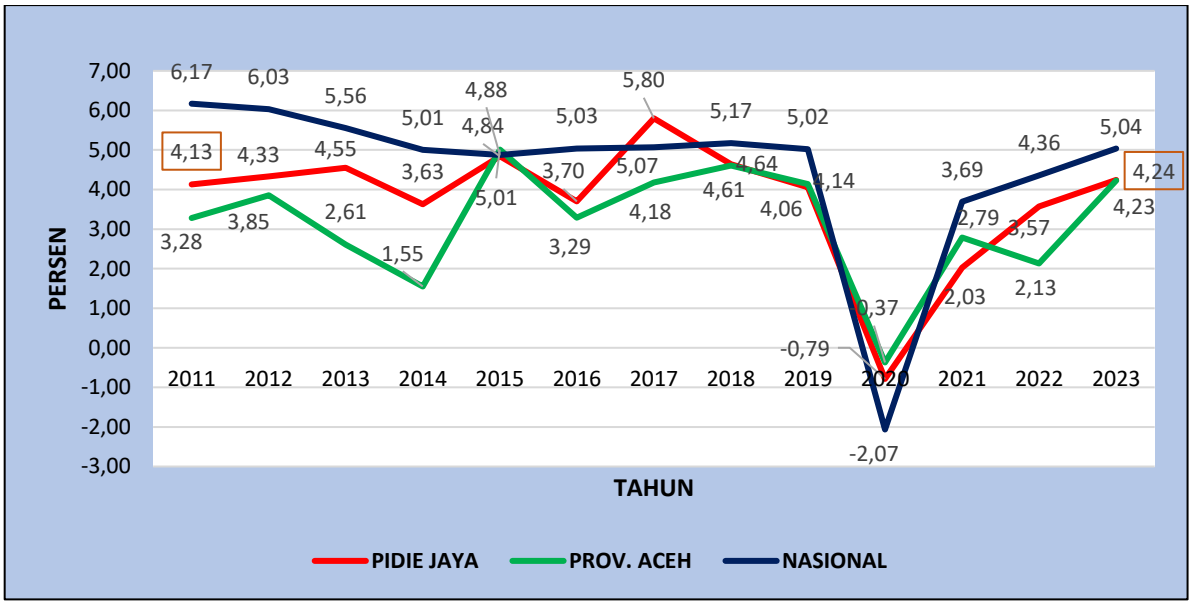
Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2024

Gambar 2.24. Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

Sejak tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang positif dan berfluktuasi. Namun demikian pertumbuhan cenderung meningkat pada tahun terakhir. Perekonomian Pidie Jaya di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,24 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pidie Jaya tahun 2021 sebesar 2,64 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,58 Triliun Rupiah. Pertumbuhan ekonomi positif 2,03 persen di tahun 2021 karena adanya Pelonggaran PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari tahun 2020, mulai dari kegiatan di pusat perbelanjaan, restoran hingga aktivitas belajar mengajar, berdampak pada menggeliatnya kembali perekonomian. Selanjutnya, perekonomian Pidie Jaya dinilai semakin membaik dengan meningkatnya nilai PDRB ADHK Pidie Jaya tahun 2022 menjadi 2,73 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan 3,57 persen dan pada tahun 2023 menjadi 2,84 triliun rupiah, dengan laju pertumbuhan 4,24 persen.

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 3,57% pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 4,24% atau naik sebanyak 0,67%. Kondisi tersebut juga terjadi untuk laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan juga Nasional seperti yang terlihat pada Gambar 2.25 berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023

Data pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan secara nasional menunjukkan tren yang menarik dari tahun 2011 hingga 2023. Kabupaten Pidie Jaya, sebuah wilayah yang relatif kecil, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan seringkali lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Meskipun mengalami fluktuasi, Provinsi Aceh, dengan basis ekonomi yang lebih besar, juga menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan Pidie Jaya. Namun demikian, tahun 2020 menjadi titik yang menonjol di mana semua wilayah tersebut mengalami kontraksi ekonomi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda global. Meskipun demikian, kinerja ekonomi wilayah-wilayah tersebut pulih dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan resiliensi yang signifikan. Analisis data ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi, stabilitas politik, dan faktor eksternal lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Dengan memahami tren ini, kebijakan ekonomi dan pengembangan regional dapat dirancang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal sambil memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe. Prediksi laju inflasi Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan berkisar1,54% (antara 1,56-1,53) pada tahun 2023.

Laju inflasi Kabupaten Pidie Jaya, Lhokseumawe, Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional menggambarkan pola yang menarik dalam fluktuasi harga dari tahun 2011 hingga 2023. Dalam analisis data tersebut, terlihat bahwa tingkat inflasi umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada pertengahan periode, yang kemudian diikuti oleh penurunan atau stabilisasi. Meskipun demikian, terdapat variasi antara tahun-tahun tertentu dan antara wilayah-wilayah tersebut. Meskipun tingkat inflasi nasional cenderung mencerminkan tren yang sama dengan tingkat inflasi lokal, ada beberapa perbedaan dalam angka spesifik. Faktor-faktor eksternal seperti harga minyak mentah, nilai tukar mata uang, serta kebijakan moneter dan fiskal dapat memengaruhi tingkat inflasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tren inflasi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga dan mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

Laju Inflasi tahun kalender Desember 2023 untuk Kota Banda Aceh sebesar 1,53 persen, Kota Lhokseumawe 1,56 persen. Begitu juga dengan Inflasi "*year on year*" (Desember 2023 terhadap Desember 2022). Tabel 2.14 berikut merupakan laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe yang menjadi acuan inflasi Kabupaten Pidie Jaya adalah:

Tabel 2.14.
Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2018 s.d 2023 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rerata Inflasi (2022 s.d 2023)
Kota Banda Aceh	1,93	1,38	3,46	2,41	6,00	1,53	4,47
Kota Lhokseumawe	2,05	1,20	3,55	1,97	5,37	1,56	3,46
Kabupaten Pidie Jaya*	1,99	1,29	3,51	2,19	5,68	1,54	3,61

Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2024. (Data peyesuaian)
** Pidie Jaya, Angka prediksi antara Kota Banda Aceh dan Lhoksemawe*

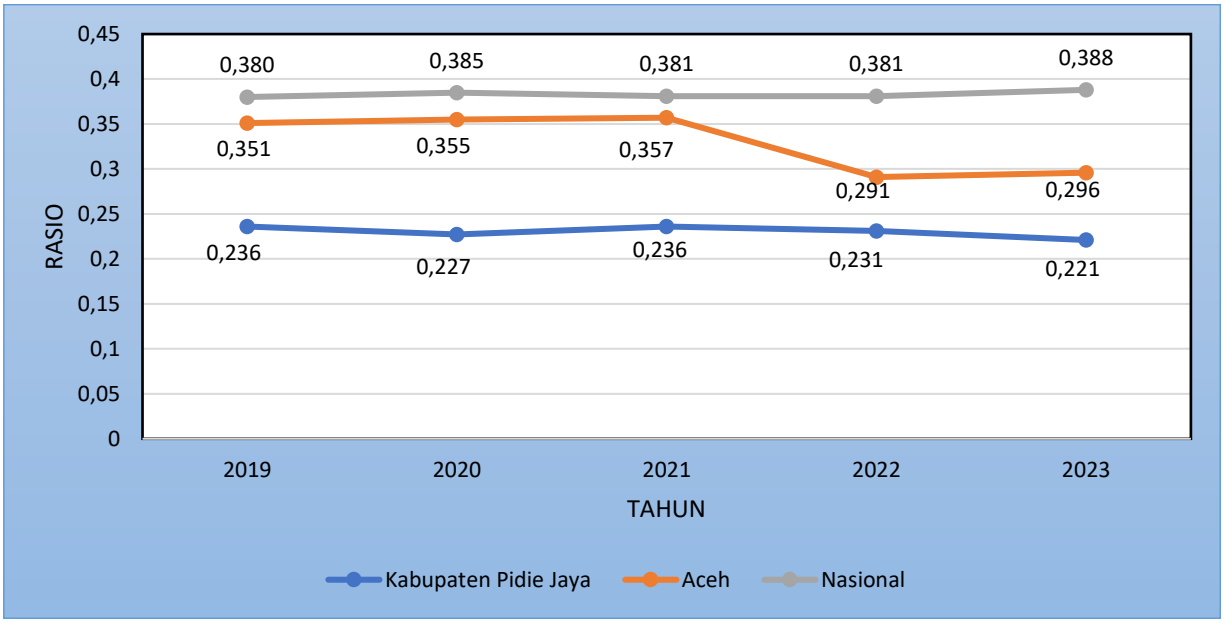
2.2.1.3. Indeks Gini

Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Pemerintah Daerah dapat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi dengan menggunakan Rasio Gini yang capaiannya dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, Rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang mendekati nilai 1 mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan masyarakat yang sangat tinggi, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data 10 (sepuluh) tahun terakhir indeks gini Kabupaten Pidie Jaya dapat tabel 2.15 dan gambar 2.26 berikut:

Tabel 2.15.
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional
Tahun 2014-2023

URAIAN	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PIDIE JAYA	0,225	0,238	0,249	0,220	0,233	0,236	0,227	0,236	0,231	0,221
PROV. ACEH	0,337	0,339	0,341	0,334	0,338	0,351	0,355	0,357	0,291	0,296
NASIONAL	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS Aceh Tahun 2024 (data awal)



Sumber : BPS Aceh Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.26. Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Data Gini Ratio untuk Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 memberikan wawasan tentang tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan di berbagai tingkatan. Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren positif dengan Gini Ratio yang menurun secara konsisten dari 0,236 pada tahun 2019 menjadi 0,221 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesetaraan distribusi pendapatan di tingkat lokal, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.

Provinsi Aceh mengalami perubahan yang signifikan, terutama dengan penurunan Gini Ratio yang mencolok dari 0,351 pada tahun 2019 menjadi 0,296 pada tahun 2023. Perbaikan ini menandakan langkah-langkah yang berhasil diambil untuk mengurangi ketidaksetaraan distribusi pendapatan di tingkat provinsi, membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, tingkat nasional Indonesia mencerminkan ketidakstabilan relatif dalam Gini Ratio, tetap berada di kisaran 0,380 hingga 0,388. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengurangi ketidaksetaraan distribusi pendapatan di tingkat nasional, yang mungkin memerlukan perhatian khusus dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi secara menyeluruh.

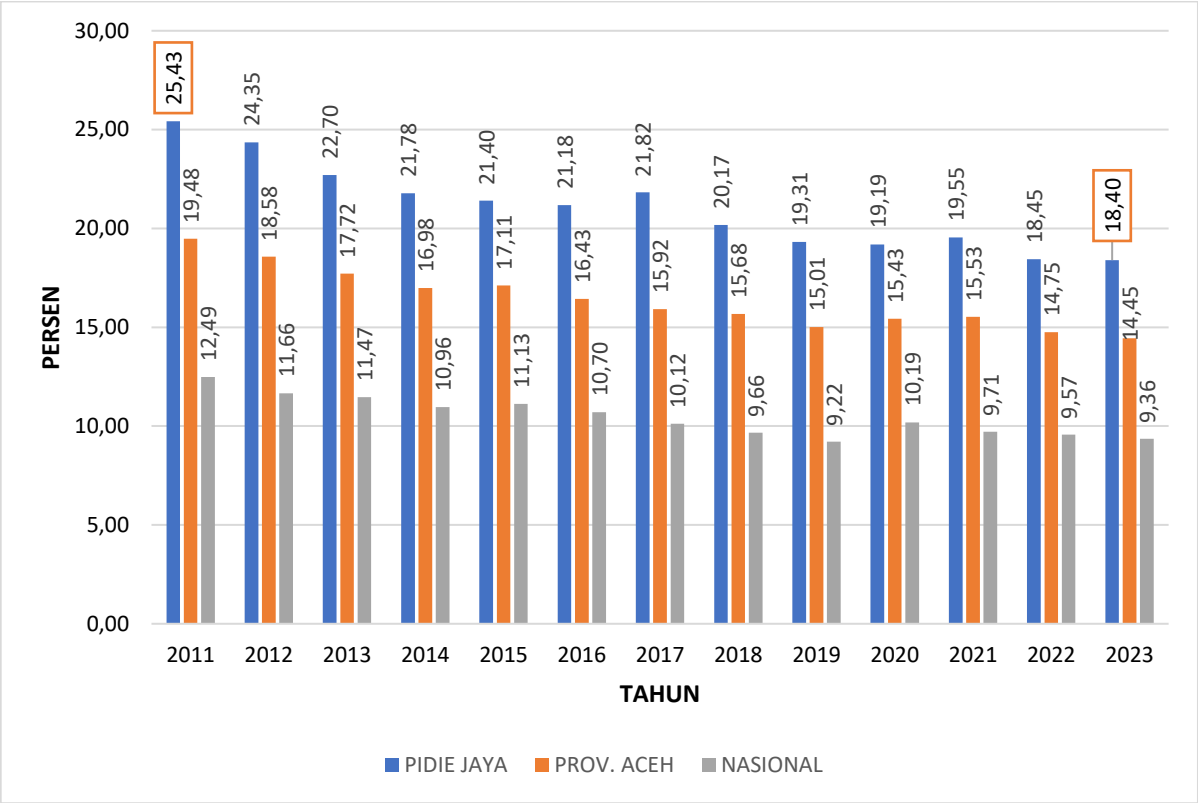
2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan serta fasilitas infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi merupakan penyebab utama kemiskinan struktural di Kabupaten Pidie Jaya. Ada beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan dan tingkat pengeluaran konsumsi kebutuhan pokok masyarakat yang masih rendah ($< Rp\ 10.000\ per\ hari$), banyaknya rumah yang tidak layak huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024, Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 berada pada 18,40% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 30.740 jiwa. Hal ini sudah lebih baik dari tahun 2022 yakni 18,45%. Meskipun mengalami penurunan, Angka kemiskinan Pidie Jaya masih lebih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 14,45% dan Nasional sebesar 9,40%.

Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum relevan juga dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat Provinsi Aceh

dan Nasional. Grafik tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Gambar 2.27 sebagai berikut:



Sumber : BPS Aceh Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.27. Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011 s.d 2023 (Persentase)

Berdasarkan data Percepatan Pensasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024. Rumah tangga dilihat berdasarkan status kesejahteraannya dapat dikelompokan ke dalam 4 desil dengan desil 1 termasuk kedalam tingkat kesejahteraan paling rendah. TNP2K menetapkan bahwa rumah tangga miskin dan sangat miskin adalah rumah tangga yang status kesejahteraannya berada pada desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data P3KE tahun 2024 jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dimana rumah tangga yang berada di desil 1 adalah 7.267 rumah tangga, desil 2 sejumlah 9.328 rumah tangga dan desil 3 sejumlah 5.138 rumah tangga. Angka kemiskinan ekstrem yang tertinggi berada di kecamatan Bandar Dua, Bandar Baru dan Trienggadeng. Berikut adalah tingkat status rumah tangga berdasarkan status kesejahteraan di kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dalam Tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16.
Jumlah Rumah Tangga (RT) Menurut Status Kesejahteraan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Berdasarkan Desil (D1,D2,D3)

NO	KECAMATAN	D1	D2	D3	Jumlah RT (D1+D2+D3)	Jumlah RT/ KK Keseluruhan
1	BANDAR BARU	1.504	1.856	1.095	4.455	11.680
2	PANTE RAJA	367	406	249	1.022	2.885
3	TRIENGGADENG	954	1.407	872	3.233	7.725
4	MEUREUDU	700	1.068	688	2.456	1.148
5	MEURAH DUA	642	798	366	1.806	3.948
6	ULIM	1.024	1.174	549	2.747	4.988
7	JANGKA BUYA	384	552	303	1.239	4.211
8	BANDAR DUA	1.692	2.067	1.016	4.775	8.703
TOTAL		**7.267**	**9.328**	**5.138**	**21.733**	**50.288**

Sumber : Bappeda Tahun 2024 (P3KE 2024)
Ket. : D1 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 10% (Sangat Miskin)
D2 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 11 – 20%
D3 – Rumah Tangga dengan Kesejahteraan 21 – 30%

Berdasarkan data pada Tabel 2.16 maka program pemerintah pusat dan daerah akan fokus pada jumlah rumah tangga prasejahtera yang dikeluarkan oleh P3KE yang menjadi basis data terpadu untuk berbagai program sosial lintas sektor yang dijalankan baik pusat dan daerah seperti Program Raskin, PKH, Subsidi Listrik, Kartu Indonesia Pintar, dan seterusnya.

Persentase Rumah Tangga (RT) berdasarkan Tingkat Kesejahteraan sesuai dengan jumlah KK menurut desil pada setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga diperoleh wilayah Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua dengan Prosentase RT pra sejahtera tertinggi yaitu masing-masing mencapai 47,5%, 57,8%, dan 56,46%.

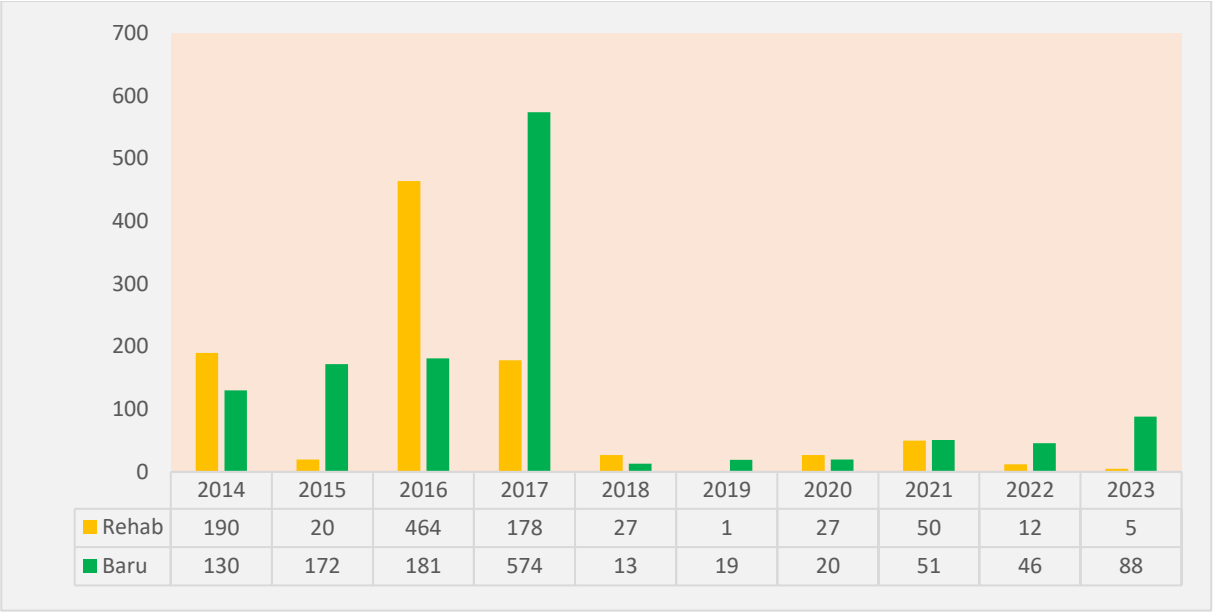
Kabupaten Pidie Jaya masih tertinggal dalam beberapa hal seperti pembangunan Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan serta tingkat kesejahteraan rakyat dan pelayanan dasar. Ditingkat pemerintahan desa, infrastruktur penunjang perekonomian masih sangat minim. Masyarakat pedesaan umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Kurangnya penunjang, maka membuat produktifitas masyarakat Pidie Jaya yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan tersebut menjadi rendah serta berdampak pada tingkat kesejateraan mereka. Meskipun sektor pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap PDRB yaitu 46,53%, namun tingkat kemiskinan masyarakat terbesar berada pada sektor ini.

Pada sisi lain, tingginya kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah merupakan prioritas utama pembangunan daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan. Hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, kebutuhan rumah layak huni di Pidie Jaya mencapai sekitar 12.000 unit, angka ini diakibatkan masih terdapat banyak rumah masyarakat yang belum direhabilitasi pasca gempa yang melanda Pidie Jaya pada tahun 2016 silam.

Tahun 2016, Pemerintah hanya mampu membangun dan merehab rumah layak huni kurang dari 2% per tahun atau rata-rata 180 unit per tahun. Hal tersebut jauh dari harapan masyarakat. Namun pada tahun 2017, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tentang Dana Otsus Kabupaten Pidie Jaya maka pada rencana awal dana Otsus tersebut lebih banyak dititikberatkan pada pembangunan rumah layak huni di tingkat pedesaan. Setiap desa mendapat 2-3 unit pembangunan baru sesuai dengan standar yang ditetapkan. Target 574 unit rumah tidak layak huni dapat terbangun pada tahun 2017 tersebut. Ini bertujuan agar target penyelesaian persoalan perumahan lebih cepat dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Namun kondisinya berbeda pada tahun 2018 dimana Dana DOKA kembali dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sehingga program pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu menjadi tertunda. Sehingga hanya terbangun 13 unit saja dan rehab sebanyak 27 unit. Tahun 2019, program pembangunan perumahan untuk masyarakat kurang mampu terbangun 19 unit dan rehab sebanyak 1 unit. Untuk tahun 2023, program pembangunan perumahan dhuafa terbangun 88 unit dan rehab sebanyak 5 unit.

Berbeda dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa Pidie Jaya yang terjadi pada tahun 2016 yang menghancurkan hampir 3.000 unit rumah, sehingga harus dibangun kembali, dan ± 4.000 unit rumah mengalami rusak dan harus mendapatkan perbaikan. Program ini fokus kepada rumah yang rusak dan hancur karena gempa tanpa melihat status miskin atau kaya. Total jumlah pembangunan rumah pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kategori rusak sedang dan rusak berat sebanyak 6.487 unit.

Gambar 2.28 Rehabilitiasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Pembangunan Baru untuk masyarakat miskin Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Sosial, PU, Baitul Mal Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.28. Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Rumah Dhuafa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2023 (Unit)

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mencegah ketimpangan sosial jumlah penduduk harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya diperoleh dari hasil SAKERNAS tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja, baik yang mempunyai pekerjaan maupun penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17.
Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

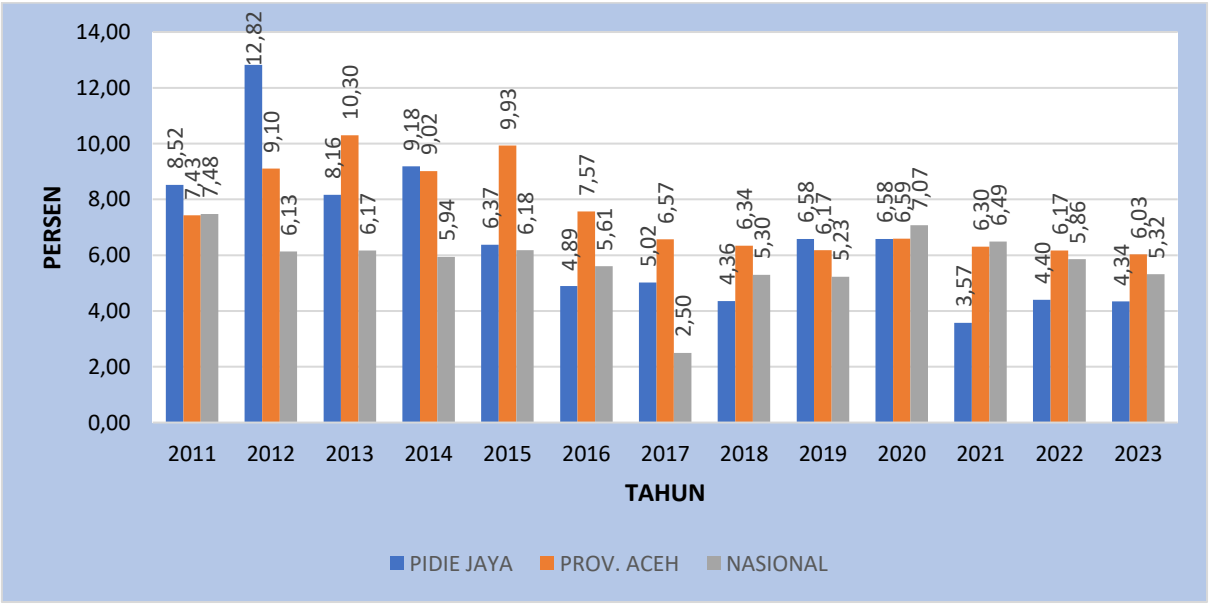
Rincian	2019*	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	69.845	73.331	69.359	70.905	73.248
Bekerja	66.814	68.507	66.881	67.784	70.066
Pengangguran	3.031	4.824	2.478	3.121	3.182
Bukan Angkatan Kerja	46.160	44.692	50.706	51.578	49.252
TPAK (%)	60,21	62,13	57,77	57,89	59,79
TPT (%)	4,34	6,58	3,57	4,40	4,34

Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi yang signifikan dalam pasar tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja, yang mencakup individu yang aktif mencari atau bekerja, menunjukkan tren naik turun, dengan puncak terjadi pada tahun 2020 dan 2023. Di sisi lain, kelompok yang tidak masuk dalam angkatan kerja, seperti pelajar dan ibu rumah tangga, menunjukkan tren penurunan yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun mengalami sedikit lonjakan pada tahun 2021.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami variasi dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada tahun 2020 sebesar 62,13% dan penurunan di tahun-tahun berikutnya sebelum sedikit pulih pada 2023. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dari 3,57% pada tahun 2021 hingga 6,58% pada tahun 2020, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan memperluas partisipasi angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam kurun lima tahun ini, Kabupaten Pidie Jaya mengalami variasi dalam hal angkatan kerja, tingkat partisipasi, dan tingkat pengangguran. Perubahan ini bisa mencerminkan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kondisi perekonomian dan lapangan kerja di wilayah ini. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada gambar 2.29 berikut.



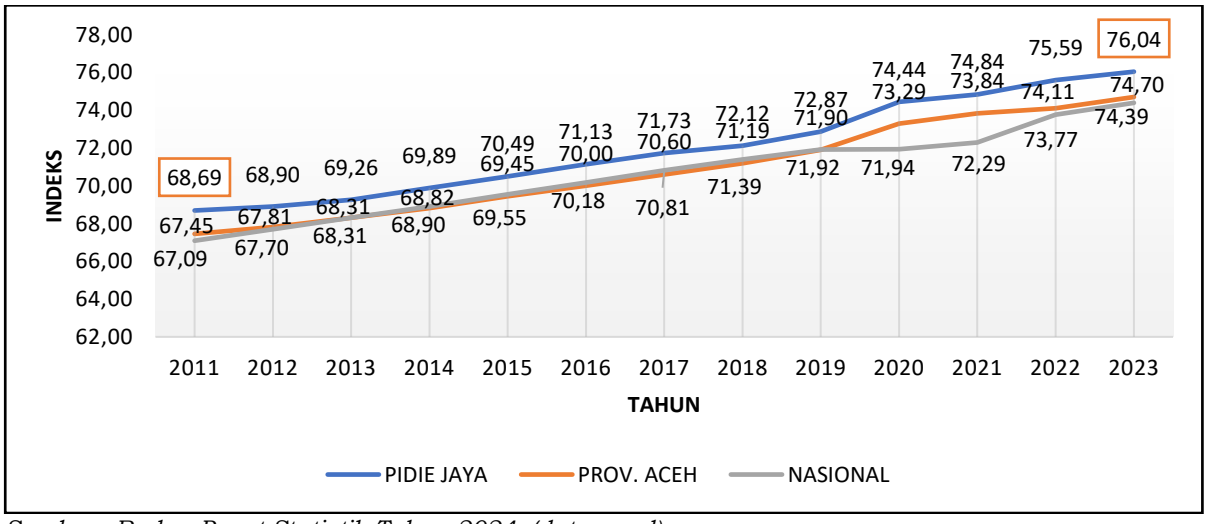
Sumber: BPS Aceh Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.29. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023

2.2.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipakai sebagai salah satu indikator pembangunan di Indonesia dan Dunia, karena pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan sceara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup *(Longevity),* pengetahuan *(Knawlledge)* dan hidup layak (*decent living*), peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli dalam rupiah *(Purchasing Power parity).*

Berdasarkan capaian kinerja Pemerintah kabupaten Pidie Jaya sajak tahun 2011 bahwa IPM sudah mencapai angka 68,69 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 76,04. IPM Kabupaten Pidie Jaya nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Aceh tahun 2011 sebesar 67,45 meningkat menjadi 74,70 di tahun 2023. Secara umum dapat dilihat IPM Kabupaten Pidie Jaya selalu diatas IPM Aceh dan Nasional. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan terus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan memfokuskan pembangunan bidang kemasyarakatan berupa peningkatan kualitas kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan serta peyediaan lapangan kerja seluas luasnya, penyediaan modal usaha, peningkatan keahlian melalui pelatihan ketrampilan/sekolah, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya perbandingan IPM dapat dilihat pada gambar 2.30 berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024. (data awal)

Gambar 2.30. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011-2023

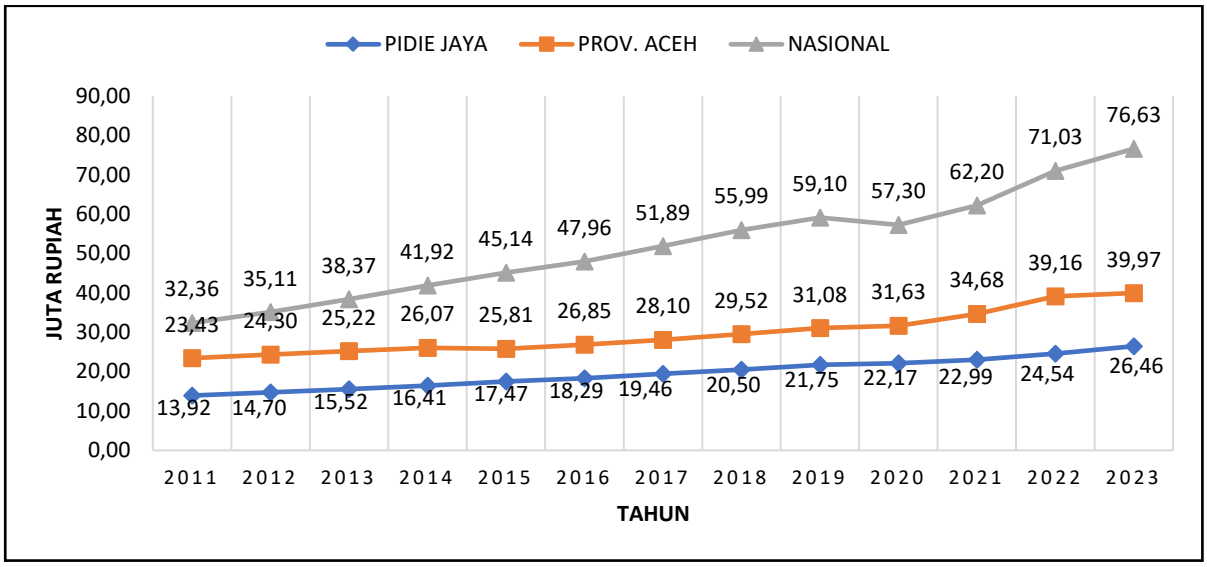
2.2.1.7. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita (ADHB) adalah ukuran ekonomi yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh individu dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu, diukur dalam harga berlaku atau harga saat ini. Pendapatan per kapita yang diukur dengan harga berlaku mencerminkan nilai pendapatan aktual yang diterima oleh individu pada saat itu, tanpa memperhitungkan inflasi atau perubahan nilai uang dari waktu ke waktu.

Dengan menggunakan pendapatan per kapita (ADHB), kita dapat menganalisis tingkat kesejahteraan relatif masyarakat atau wilayah pada saat tertentu. Ini memungkinkan untuk membandingkan daya beli dan tingkat kehidupan antara berbagai populasi atau wilayah dalam kondisi yang sama pada periode tertentu.

Pendapatan per kapita (ADHB) sangat penting dalam analisis ekonomi dan kebijakan publik karena memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa pada waktu tertentu. Ini juga memungkinkan pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan sosial yang ada serta merencanakan langkah-langkah kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

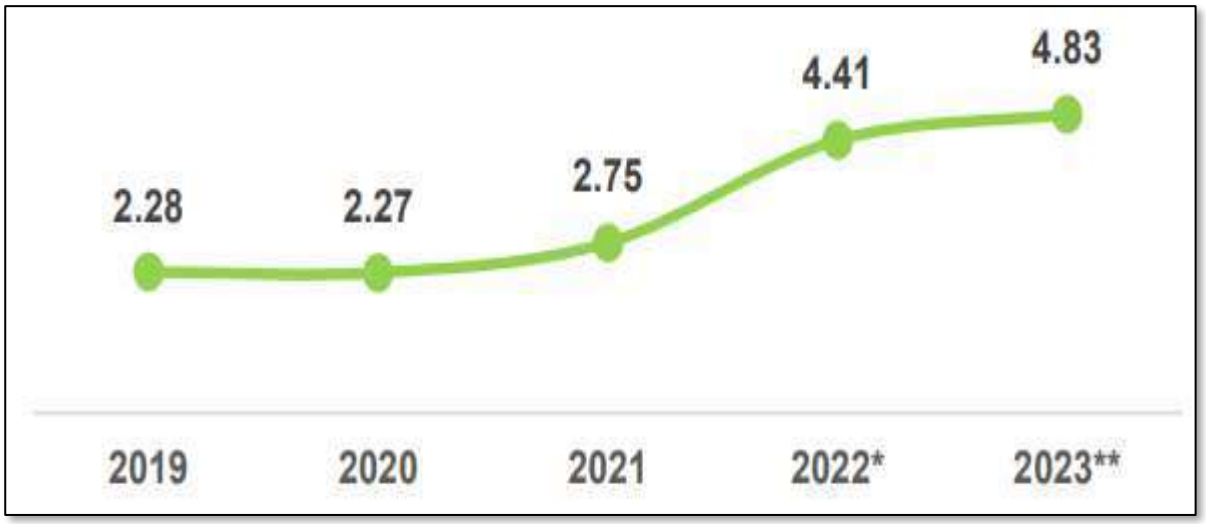
Pendapatan Perkapita di Pidie Jaya meningkat secara signifikan dari tahun 2011 hingga 2023, naik dari 13,92 juta Rupiah menjadi 26,46 juta Rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang mungkin didorong oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan sektor ekonomi lokal dan upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Provinsi Aceh juga mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dari 23,43 juta Rupiah pada tahun 2011 menjadi 39,97 juta Rupiah pada tahun 2023. Meskipun tren pertumbuhannya agak bervariasi dari tahun ke tahun, peningkatan ini mencerminkan kemajuan ekonomi yang signifikan di tingkat provinsi. Secara nasional, Pendapatan Perkapita juga menunjukkan tren peningkatan yang kuat dari 32,36 juta Rupiah pada tahun 2011 menjadi 76,63 juta Rupiah pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang luas di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa meski Pendapatan Perkapita meningkat, kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan isu-isu ketimpangan ekonomi masih menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, serta memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.31. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah),

Jika dilihat dari tren selama 2 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2023 dan 2022, maka kecenderungan percepatan pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK dimana masing-masing meningkat sebesar 8,53% dan 3,22%. Gambar 2.32 berikut mengambarkan PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB.



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.32. Laju Indeks Implisit Kabupaten Pidie Jaya (Persen), 2019-2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas. IKS terdiri dari 12 (dua belas) indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial,

dan lingkungan, yang meliputi 5 (lima) indikator program gizi kesehatan ibu anak, 3 (tiga) indikator pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan 3 (tiga) indikator perilaku dan kesehatan lingkungan. Kementerian Kesehatan menjabarkan aspek IKS tersebut menjadi 12 indikator keluarga sehat. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Tidak semata membatasi jumlah anak dalam keluarga, program KB juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapat ASI yang cukup dan pola asuh yang optimal sehingga bisa menjadi anak yang sehat dan cerdas.
Selain itu, program KB juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga dapat menjaga kesejahteraan keluarga.

2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan yang memadai akan mendukung proses persalinan yang aman dan minim risiko komplikasi kehamilan. Setelah melahirkan, ibu juga akan memiliki tempat untuk memeriksa kesehatannya dan bayinya secara berkala. Dengan begitu, keselamatan serta kesehatan ibu dan anak jadi lebih terjamin.

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap

Imunisasi anak sangat penting dilakukan guna mencegah terjadinya penyakit infeksi yang bisa berakibat fatal baginya, seperti polio, campak, dan difteri. Untuk mendapatkan imunisasi wajib, Anda bisa membawa anak ke posyandu, puskesmas, atau rumah sakit.

4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

Keunggulan air susu ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi bayi memang sudah tidak diragukan lagi. ASI dapat melindungi bayi dari beragam penyakit serta mendukung perkembangan tubuh dan otaknya secara optimal, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Itulah sebabnya pemberian ASI eksklusif sangat berperan besar untuk membentuk keluarga sehat.

5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Berat badan bayi perlu ditimbang setiap bulannya, sejak lahir sampai usia 5 tahun. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak selalu baik, serta mendeteksi secara dini bilamana terdapat gangguan pada pertumbuhannya.

6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang dapat menurunkan kualitas hidup seseorang dan keluarganya. Tuberkulosis yang tidak ditangani dengan benar berisiko menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah dan penularan ke orang-orang terdekat.

Maka dari itu, bila terdapat anggota keluarga yang mengalami gejala tuberkulosis, seperti batuk lebih dari 3 minggu, batuk darah, sesak napas, keringat dingin, dan penurunan berat badan drastis, segera bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan.

7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering terabaikan karena sering kali tidak memiliki gejala. Meski begitu, dampak yang terjadi akibat hipertensi bisa fatal, mulai dari serangan jantung hingga stroke. Hal ini tentu akan memengaruhi keadaan suatu keluarga, apalagi jika terjadi pada kepala keluarganya.

Oleh karena itu, bila terdapat anggota keluarga yang menderita hipertensi, ingatkan ia agar selalu menerapkan gaya hidup sehat, meminum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter, serta melakukan kontrol teratur.

8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

Gangguan jiwa tidak hanya dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya secara signifikan, tapi juga keluarganya. Namun, sebenarnya penyakit ini dapat sembuh selama ditangani dengan baik dan sedini mungkin.

Oleh karena itu, bila ada anggota keluarga yang memiliki tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan emosi atau perilaku, temani dan bujuk dia untuk segera berobat ke psikiater guna mendapatkan penanganan yang tepat.

9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Sudah kita ketahui bersama bahwa asap rokok mengandung banyak zat beracun bagi tubuh. Meskipun hanya satu orang yang merokok di rumah, asapnya bisa dihirup anggota keluarga lain dan membuat mereka menjadi perokok pasif.

Perlu Anda pahami bahwa menjadi perokok pasif sama berbahayanya dengan menjadi perokok aktif. Jadi, jika di keluarga Anda ada yang merokok, jangan putus asa untuk membujuk dan membantunya agar bisa berhenti. Jika tidak bisa, ingatkan dia untuk merokok di luar rumah.

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dengan menjadi anggota program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, seluruh anggota keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang

sesuai kebutuhan, tanpa harus memikirkan biaya. Ini juga bisa menjaga keadaan finansial keluarga

11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Sarana air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dari berbagai penyakit infeksi. Untuk mewujudkan hal ini, pastikan sumber air yang Anda pakai di rumah tidak tergenang atau tercemar dengan berbagai kotoran maupun polutan.

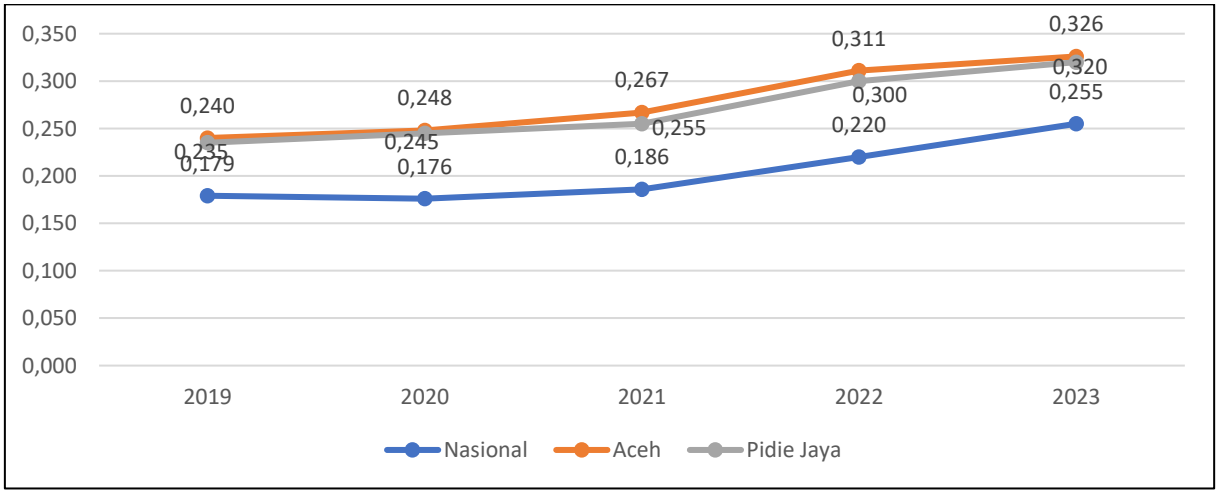
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Memiliki akses sanitasi layak dan jamban sehat juga termasuk indikator penting dalam mewujudkan keluarga sehat. Untuk itu, setiap anggota keluarga diharuskan selalu buang air besar dan buang air kecil di jamban atau toilet. Selain membuat lingkungan bersih dan tidak berbau, langkah ini juga dapat membantu mencegah penyakit infeksi.

Untuk mewujudkan keluarga sehat memang tidak mudah. Namun, pikirkanlah efek jangka panjangnya. Dengan memenuhi indikator-indikator di atas, kualitas hidup Anda dan keluarga akan terjaga, bahkan hingga generasi selanjutnya.

Perlu Anda ketahui bahwa program keluarga sehat juga merupakan bagian dari program puskesmas. Jadi Anda bisa meminta bantuan dokter puskesmas wilayah Anda jika mengalami kesulitan dalam memenuhi indikator-indikator di atas.

Nilai IKS Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 lebih baik dibandingkan nasional, dan sedikit lebih rendah dari Provinsi Aceh. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Kemenkes, 2023 (data awal)

Gambar 2.33. Indeks Keluarga Sehat Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

Kabupaten Pidie Jaya, meskipun berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks meningkat dari 0,235 pada tahun 2019 menjadi 0,320 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya dalam meningkatkan kesehatan keluarga cukup berhasil, dan kabupaten ini berhasil mengikuti tren positif yang terjadi di provinsi Aceh.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi kesehatan keluarga baik secara nasional maupun di Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya. Peningkatan yang konsisten ini dapat diartikan sebagai hasil dari program-program kesehatan yang efektif dan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk menjaga tren positif ini, penting untuk terus memperkuat dan mengembangkan inisiatif kesehatan keluarga serta memastikan implementasi yang efektif di semua tingkat pemerintahan

2.2.2.2. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas yang menciptakan rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Data Peserta KB aktif di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18.
Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023

Uraian	TAHUN					
	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
Pasangan Usia Subur	27.588	28.545	22.728	20.880	21.775	22.124
Peserta KB Aktif	20.935	16.190	13.397	14.013	12.704	13.704
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	75,88	56,72	58,94	67,11	58,34	62,93

*Sumber: BPS, 2024 *(data awal)*

Dari tahun 2018 hingga 2023, Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi dalam jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif. Pada tahun 2018, jumlah PUS adalah 27.588 dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 75,88%. Namun, cakupan ini menurun tajam pada tahun 2019 menjadi 56,72% meskipun jumlah PUS meningkat.

Pada tahun 2020, jumlah PUS menurun drastis menjadi 22.728, dan jumlah peserta KB aktif juga berkurang, namun cakupan peserta KB aktif sedikit meningkat

menjadi 58,94%. Pada tahun 2021, jumlah PUS terus menurun menjadi 20.880, tetapi cakupan peserta KB aktif meningkat signifikan menjadi 67,11%.

Tahun 2022 melihat peningkatan jumlah PUS menjadi 21.775, tetapi jumlah peserta KB aktif turun lagi, menyebabkan cakupan peserta KB aktif turun menjadi 58,34%. Pada tahun 2023, jumlah PUS meningkat sedikit menjadi 22.124, dan jumlah peserta KB aktif naik menjadi 13.704, sehingga cakupan peserta KB aktif mencapai 62,93%.

Terjadinya penurunan peserta KB aktif antara lain disebabkan karena keyakinan sebahagian masyarakat akibat efek samping penggunaan alat kontrasepsi dan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP. Disamping itu, belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Aceh.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. iBangga Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 berada pada angka 56,67 dan tahun 2023 pada angka 64,05.

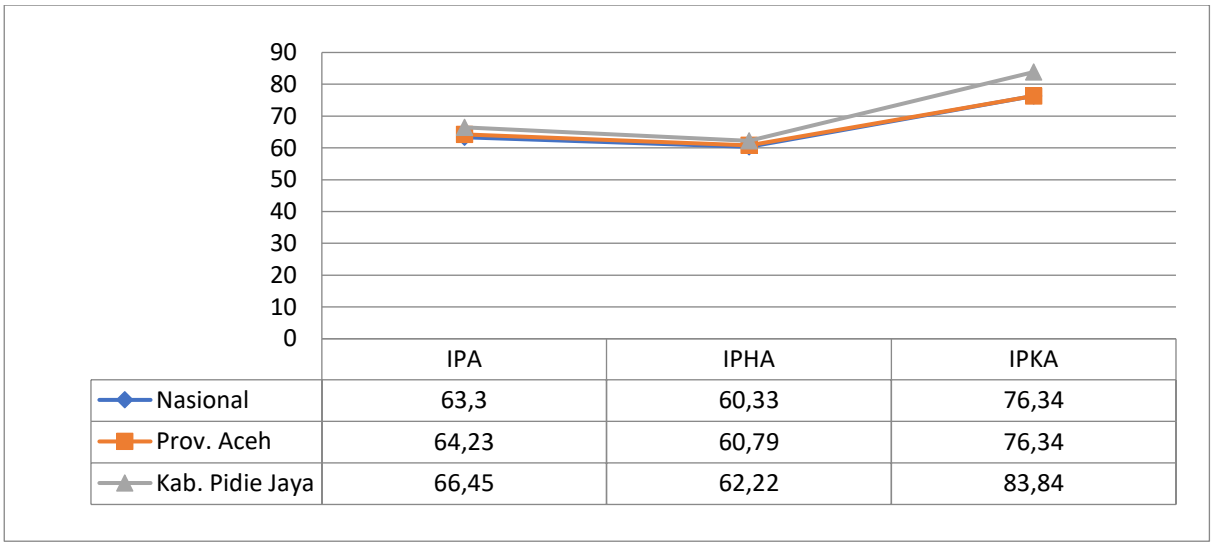
2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Indeks Indeks Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Capaian IPHA yang rendah mengindikasikan semakin rendahnya realisasi pemenuhan hak anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, semakin tinggi capaian IPHA, semakin nyata peran pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak di tanah air.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang

termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.



	IPA	IPHA	IPKA
Nasional	63,3	60,33	76,34
Prov. Aceh	64,23	60,79	76,34
Kab. Pidie Jaya	66,45	62,22	83,84

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Gambar 2.34. Perbandingan IPA, IPHA dan IPKA Kab. Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2023

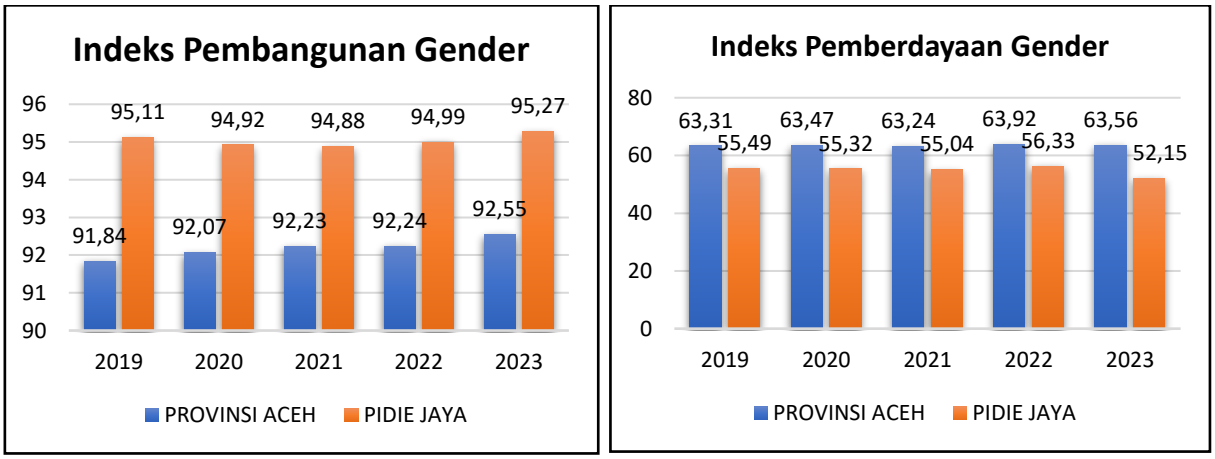
Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan angka yang lebih tinggi dari persentase pencapaian IPA dan IPHA di tingkat Provinsi Aceh dan persentase pencapaian nasional. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek perlindungan anak, termasuk kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Pidie Jaya. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi implementasi kebijakan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak.

Peningkatan ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Pidie Jaya. Pada pencapaian IPKA Kabupaten Pidie Jaya menunjukan capaian yang sangat baik, dimana Kabupaten Pidie Jaya mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan target persentase capaian IPKA secara nasional yaitu sebesar 71,6%.. Kabupaten Pidie Jaya dalam memenuhi IPKA mencapai persentase 83.84%, hal ini menunjukkan rasio angka anak bersekolah serta pemanfaatan internet, baik yang disabilitas maupun disabilitas cukup tinggi, serta anak yang bekerja dan anak terlantar terbilang rendah di Kabupaten Pidie Jaya.

2.2.2.4. Pengarusutamaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Selama periode 2019 hingga 2023 di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang stabil dan sedikit meningkat, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2023, IPG di Pidie Jaya mencapai 95,27, yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh, menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan di Pidie Jaya cenderung lebih baik. Secara keseluruhan, baik Provinsi Aceh maupun Kabupaten Pidie Jaya mengalami kemajuan dalam kesetaraan gender, dengan Pidie Jaya menunjukkan performa yang sangat baik dan terus meningkat dalam memberikan akses dan peluang bagi perempuan.

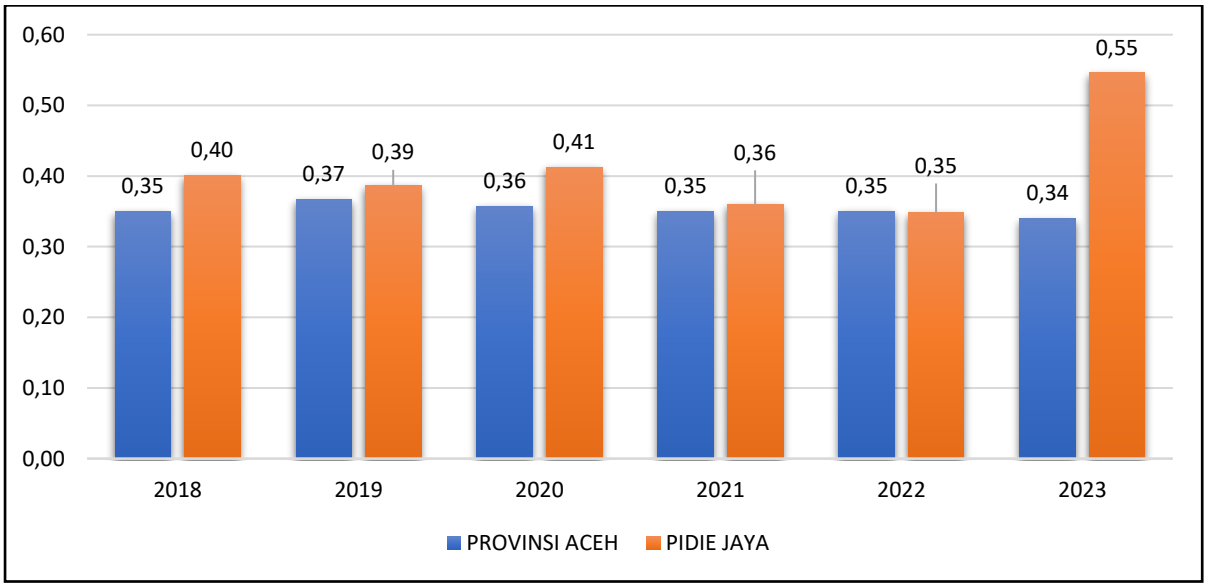
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Selama periode 2019 hingga 2023, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Pidie Jaya menghadapi tantangan yang signifikan dalam pemberdayaan gender. IPG di Pidie Jaya menurun dari 55,49 pada tahun 2019 menjadi 55,32 pada tahun 2020, dan terus menurun hingga 55,04 pada tahun 2021. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022 menjadi 56,33, angka ini kembali turun drastis menjadi 52,15 pada tahun 2023. Penurunan yang signifikan pada tahun 2023 menunjukkan adanya masalah struktural dalam upaya pemberdayaan gender yang perlu segera ditangani. Secara keseluruhan, meskipun Provinsi Aceh menunjukkan stabilitas dan sedikit peningkatan dalam pemberdayaan gender, Kabupaten Pidie Jaya memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Gambaran perkembangan IPG dan IDG Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya dapat terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2024 (data awal)

Gambar 2.35. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Selama periode 2018 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender di Pidie Jaya menurun dari 0,40 pada tahun 2018 menjadi 0,35 pada tahun 2022, namun terjadi lonjakan tajam hingga 0,55 pada tahun 2023. Lonjakan ini menandakan peningkatan ketimpangan gender yang drastis dan mengindikasikan adanya masalah struktural dalam kesetaraan gender yang memerlukan perhatian segera. Sementara Provinsi Aceh secara keseluruhan berhasil menjaga dan sedikit meningkatkan kesetaraan gender, Kabupaten Pidie Jaya menghadapi tantangan besar yang harus diatasi melalui kebijakan dan program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Gambar 2.36 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024 (data awal)

Gambar 2.36. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023

2.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. Secara umum, UHH masyarakat Pidie Jaya mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Gambaran perbandingan UHH Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional dari tahun 2018 sampai tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19.
Perbandingan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pidie Jaya	69,81	70,06	70,14	70,18	70,41	73,16
2	Aceh	69,64	69,87	69,93	69,96	70,18	70,34
3	Nasional	71,2	71,34	71,47	71,57	71,85	73,93

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data awal)

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, usia harapan hidup di Pidie Jaya adalah 69,81 tahun. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 73,16 tahun pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 3,35 tahun dalam lima tahun ini mencerminkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas hidup dan layanan kesehatan di Pidie Jaya.

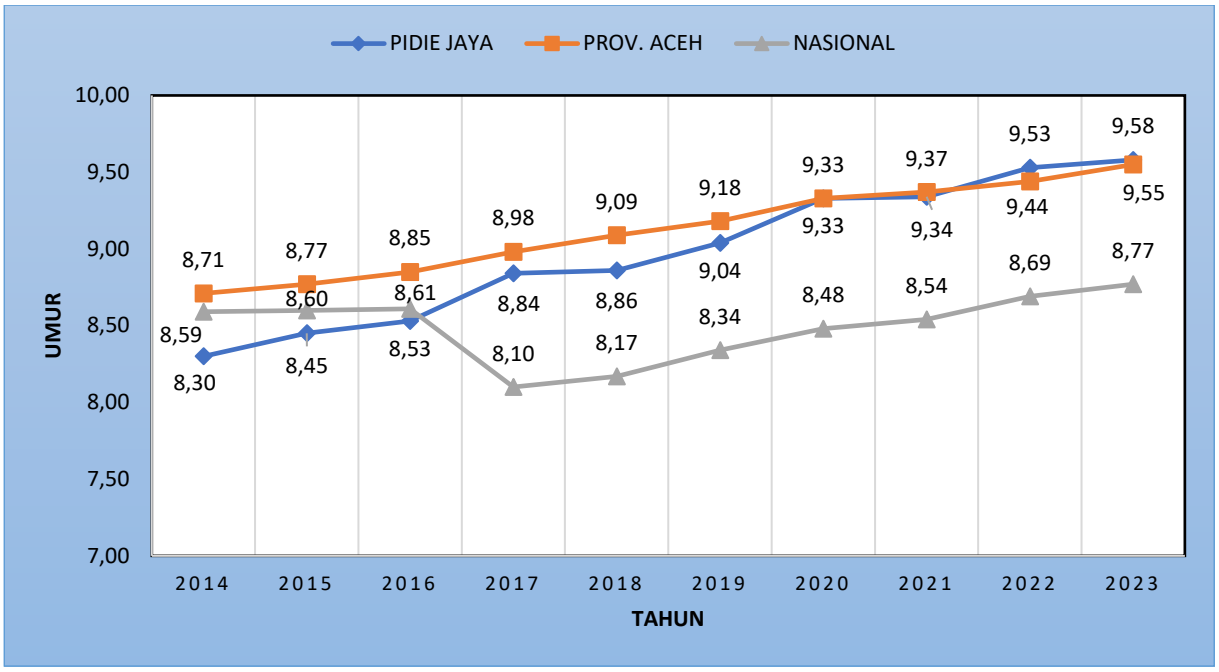
Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh dan nasional, Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, terutama pada tahun 2023 di mana usia harapan hidupnya hampir setara dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 73,93 tahun. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, program-program kesehatan masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga kesehatan. Dengan terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan program-program kesehatan, diharapkan tren positif ini dapat dipertahankan dan usia harapan hidup masyarakat Pidie Jaya terus meningkat di masa mendatang

2.2.2.6. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk suatu wilayah. RLS mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk, biasanya dihitung untuk kelompok usia tertentu, seperti 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk menilai akses dan partisipasi dalam sistem pendidikan serta untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu daerah.

Gambar 2.37 berikut merupakan perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2014-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.37. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2014 s.d 2023

Gambar diatas menjelaskan bahwa data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2014 hingga 2023, Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2014, RLS di Pidie Jaya tercatat sebesar 8,30 tahun, yang kemudian meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 9,58 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Pidie Jaya.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh secara keseluruhan, RLS di Pidie Jaya umumnya sedikit lebih rendah, meskipun selisihnya semakin mengecil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, RLS di Provinsi Aceh adalah 8,71 tahun, lebih tinggi 0,41 tahun dibandingkan Pidie Jaya. Namun, pada tahun 2023, selisih ini menurun menjadi hanya 0,03 tahun, dengan Provinsi Aceh mencatat RLS sebesar 9,55 tahun dan Pidie Jaya 9,58 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Pidie Jaya berhasil memperkecil kesenjangan pendidikan dengan rata-rata provinsi.

Di tingkat nasional, Pidie Jaya memiliki RLS yang umumnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, kecuali pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, RLS nasional adalah 8,59 tahun, sedikit lebih tinggi dari Pidie Jaya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Pidie Jaya terus mencatat peningkatan yang lebih

cepat, melewati RLS nasional yang cenderung meningkat secara perlahan dari 8,59 tahun di 2014 menjadi 8,77 tahun di 2023.

Secara keseluruhan, peningkatan RLS di Pidie Jaya menunjukkan kemajuan yang berarti dalam sektor pendidikan, dengan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah tahun sekolah yang diikuti oleh penduduk. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan lokal dalam mendukung akses yang lebih luas dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Keberhasilan ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa.

2.2.2.7. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak di suatu wilayah pada masa depan. Data HLS dari 2018 hingga 2023 untuk Nasional, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	PIDIE JAYA	14,53	14,54	13,82	14,97	14,98	14,99
2	ACEH	14,27	14,3	14,31	14,36	14,37	14,38
3	NASIONAL	12,91	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2024 (data awal)

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat bahwa Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan rata-rata nasional mengalami berbagai tingkat peningkatan dalam jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan. Pada tahun 2018, HLS di Pidie Jaya mencapai 14,53 tahun dan terus meningkat hingga 14,99 tahun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam harapan pendidikan di wilayah tersebut.

Di Provinsi Aceh, HLS juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 14,27 tahun pada 2018 menjadi 14,38 tahun pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh provinsi.

Pada tingkat nasional, HLS meningkat dari 12,91 tahun pada 2018 menjadi 13,15 tahun pada 2023. Meskipun peningkatannya tidak sebesar di Pidie Jaya, hal ini tetap menunjukkan adanya kemajuan dalam harapan pendidikan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Pidie Jaya yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan bahkan provinsi menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam upaya meningkatkan pendidikan di daerah tersebut. Perbandingan dengan Provinsi Aceh dan nasional mengindikasikan bahwa Pidie Jaya telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga memberikan harapan yang lebih baik bagi masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Upaya berkelanjutan dalam bidang ini perlu terus didorong agar tercapai kesetaraan dan peningkatan pendidikan di seluruh wilayah

2.2.2.8. Indeks Desa Membangun (IDM)

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk menyalurkan Dana Desa (DD) dimulai sejak tahun 2015. Hal ini telah membuktikan bahwa adanya dana desa telah mendongkrak kemandirian desa di Indonesia yang diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) khususnya di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ke tahun.

IDM yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek ketahanan sosial, aspek ketahanan ekonomi dan aspek ketahanan ekologi/lingkungan. Aspek ketahanan sosial umumnya diukur dengan tingkat kesehatan, pendidikan, perumahan, sosial dan budaya. Aspek Ketahanan Ekonomi diukur dengan tingkat pendapatan, ketenagakerjaan, akses ekonomi dan ketahanan pangan. Sedangkan aspek ketahanan ekologi/lingkungan diukur dengan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam dan resiliensi lingkungan. Untuk Indek Desa Membangun (IDM) Pidie Jaya dapat di lihat di Tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21.
Status Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Status IDM Kab. Pidie Jaya	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
2	Indeks Desa Membangun	0,5952	0.6561	0.6563	0.6565	0.6849
3	Jumlah Desa mandiri	0	0	0	0	5
4	Jumlah Desa Maju	2	3	4	5	14
5	Jumlah Desa berkembang	105	103	117	150	184
6	Jumlah Desa tertinggal	111	112	98	64	17
7	Jumlah Desa sangat tertinggal	4	4	3	3	2

Sumber : Kemendes, Tahun 2024 (data awal)

Berdasarkan Tabel 2.21 Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2019-2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan desa di Kabupaten Pidie Jaya. Pada tahun 2019, status IDM Kabupaten Pidie Jaya berada pada kategori "Tertinggal". Namun, pada tahun 2020, status ini meningkat menjadi "Berkembang" dan terus bertahan hingga tahun 2023, mencerminkan upaya perbaikan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah.

Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2019, IDM berada di angka 0,5952 dan meningkat signifikan menjadi 0,6561 pada tahun 2020. Peningkatan ini berlanjut meski dengan laju yang lebih lambat, mencapai 0,6563 pada tahun 2021, 0,6565 pada tahun 2022, dan akhirnya 0,6849 pada tahun 2023. Peningkatan IDM ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan desa, termasuk infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan dasar.

Jumlah desa mandiri yang awalnya tidak ada dari tahun 2019 hingga 2022, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dengan 5 desa (Meunasah Lhok, Keude Ulim, Keude Ulee Gle, Meunasah Bie, Kota Meureudu) yang mencapai status mandiri. Jumlah desa maju juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 2 desa pada tahun 2019 menjadi 14 desa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah desa mandiri dan maju ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di desa-desa tersebut.

Di sisi lain, jumlah desa berkembang juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 105 desa pada tahun 2019 menjadi 184 desa pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang berhasil meningkatkan statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan yang signifikan, dari 111 desa pada tahun 2019 menjadi hanya 17 desa pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan-tantangan pembangunan di desa-desa tersebut.

Selain itu, jumlah desa sangat tertinggal juga menurun dari 4 desa pada tahun 2019 menjadi 2 desa (Sarah Mane dan Lhoksandeng) pada tahun 2023. Meskipun jumlah desa sangat tertinggal relatif kecil, penurunan ini penting karena menunjukkan perbaikan dalam kualitas pembangunan di desa-desa yang paling tertinggal.

Secara keseluruhan, data IDM Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa upaya dan program pembangunan yang dilakukan berhasil meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di desa-desa. Peningkatan dalam berbagai kategori desa,

dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri, mencerminkan kemajuan yang signifikan dan positif dalam pembangunan desa di Kabupaten Pidie Jaya

2.2.2.9. Indeks Pembangunan Syariah

Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh, yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi syariat Islam dan capaiannya salah satunya diukur dengan Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang didasarkan pada 7 dimensi pembangunan yang terdiri dari Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat, dan Akhlak. Penetapan 7 dimensi ini adalah hasil deduksi dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Tabel 2.22.
Dasar Regulasi Dimensi Indeks Pembangunan Syariah

No.	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah	Dasar Regulasi
1	Aqidah	Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
2	Akhlak	Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam
3	Manajemen Mesjid	
4	Melek al-Qur'an	
5	Hukum Jinayat	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
		Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
6	Kesadaran Membayar Zakat	Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
7	Lembaga keuangan Syariah	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Sumber : Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2024

Indikator Penilaian Aqidah:

- Pemahaman Masyarakat terhadap Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, merujuk pada *Fatwa MPU Aceh No. 4 Tahun 2012, 34 kriteria.*
- Pemahaman sesat yang tersebar dalam Masyarakat, merujuk kepada *Pasal 11 Qanun No.8/2015, 13 kriteria.*
- Muallaf, berdasarkan data muallaf di kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pidie Jaya.

Indikator Penilaian Akhlak:

- Tuntunan Akhlak Islami (Nilai- Nilai Keislaman) : Persaudaraan, Kasih Sayang, Kesetaraan, Penghormatan Bersama, Pencegahan kerusakan, Konsumsi

- Tata Pergaulan Hidup Islami : Tidak berdua-duaan selain mahram, menjaga mahram, pergaulan yang baik, bertegur sapa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menyambung silaturrahmi, toleransi pemahaman agama dalam damai, toleransi antar umat beragama
- Tata Busana Islami : Menutup Aurat, Tidak menyerupai lawan jenis, fungsi perlindungan pakaian, pengetahuan tentang aurat, kewajiban menutup aurat, Batasan menutup aurat, pakaian Islami mengikuti zaman, pengalaman berpakaian sesuai syariat, persepsi aturan berpakaian, peran pemerintah dalam mengatur berpakaian.

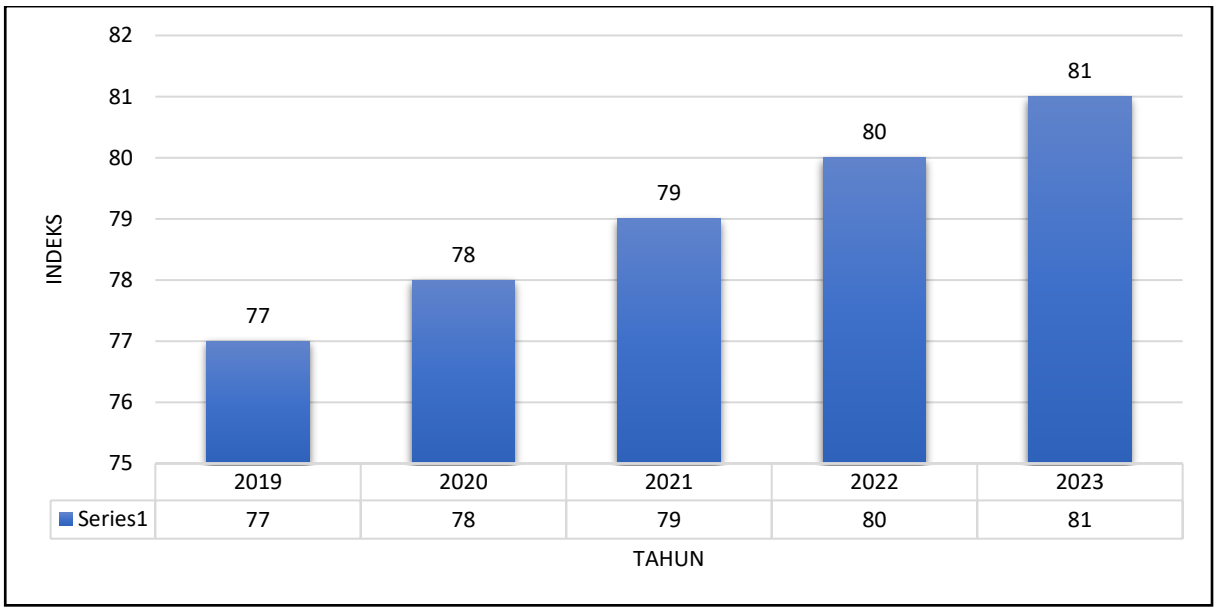
Indikator Penilaian Syariah:

- Persepsi Qanun LKS Qanun No.11 Tahun 2018 : Keberadaan Perbankan Syariah, Penutupan Bank Konvensional, produk perbankan Syariah, Kemudahan pembiayaan, Preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah
- Persepsi ZISWAF : Kepatuhan Muzakki membayar Zakat, peningkatan pengumpulan zakat oleh Baitul mal, pemetaan distribusi zakat, pengembangan sistem pengelolaan zakat, peran zakat mengentaskan kemiskinan, urgensi hikmah berzakat
- Melek Al Quran : Lembaga Formal Pendidikan AL Quran, Kemampuan membaca Al Quran sejak dini ,Penguasaan Tajwid, Kemampuan membaca sesuai makhraj, pemahaman pentingnya tajwid, rutinitas membaca Al Quran, Kemampuan Menghafal, Kemampuan membaca dengan fasih, Peran lembaga Pendidikan Al Quran, Ayat-ayat pendek pada Shalat.
- Manajemen Mesjid : Keberadaan Shalat Jamaah, Azan setiap waktu Sholat, Jumlah Jamaah, Pemutaran Ayat-ayat suci Al Quran pada pengeras suara, akhlak pengurus masjid, akhlak jamaah, kebersihan, pengaturan pemisahan saf, keindahan, keamanan.
- Kesadaran Sholat Berjamaah : Seberapa rutin berjamaah, penguasaan rukun shalat, Pelaksanaan Shalat Rawatib, Intensitas Masbuk, Persentasi Usia Jamaah, Jamaah Anak, Kultum, Menjaga waktu Shalat(Ketepatan Waktu), Pengajian Rutin, Jamaah Wanita
- Persepsi Masyarakat Terhadap Qanun Jinayat : Pemahaman Qanun, Sosialisasi Pemerintah, Peran Media dalam Sosialisasi, Implementasi Qanun, Efektivitas Penerapan, Prosesi Pelaksanaan Uqubat (Cambuk), Pengawasan, Peran Aparatur Desa, Peran Akademisi, Penguatan Qanun kedepan.

Adapun langkah stategis sebagai wujud untuk mencapai target realisasi Indeks Pembangunan Syariat Islam terdapat 5 kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam, terdiri dari :

a. Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
b. Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam
c. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al-Quran
d. Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam
e. Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam.

Data realisasi Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.38 berikut.



Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan data yang ditampilkan Gambar 2.29, Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPS tercatat sebesar 77 persen dan meningkat menjadi 78 persen pada tahun 2020. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan IPS sebesar 79 persen, kemudian menjadi 80 pada tahun 2022 persen, dan mencapai 81 persen pada tahun 2023. Peningkatan tahunan yang rata-rata sebesar 1 poin ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan implementasi syariat Islam di daerah tersebut.

Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, termasuk program pembinaan aqidah yang intensif, peningkatan akhlak Islami melalui

pendidikan dan pembinaan, pengelolaan masjid yang semakin baik, serta program-program pendidikan Al-Quran yang berhasil. Selain itu, implementasi hukum jinayat yang semakin efektif, peningkatan kesadaran dan kepatuhan membayar zakat, dan preferensi masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan syariah juga berkontribusi pada peningkatan IPS.

Secara keseluruhan, data realisasi IPS menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah berhasil memperkuat pelaksanaan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai capaian yang lebih tinggi di masa mendatang

2.2.2.10. Kesejahteraan Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 masih sangat tinggi, yaitu 18,40 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, hal ini tercermin dari banyaknya kasus PMKS seperti pengemis, yatim piatu, anak terlantar, orang tua jumpo yang tidak terurus dan kelompok rentan lainnya masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019–2023

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Tahun (Jiwa)				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Fakir Miskin	30.970	31.390	31.769	30.410	34.447
2	Anak Terlantar	449	409	121	121	98
3	Lanjut Usia Terlantar	314	236	236	236	255
4	Orang Dengan Kecacatan (ODK)	1.696	1.272	1.272	1.272	1481
5	Anak Nakal	25	19	19	19	12
6	Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana (MTDRB)	4.634	4.753	4.700	6.200	6.200
7	Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	10	16
8	Tuna Sosial (WTS)	-	-	0	0	3
9	Anak Korban Tindak Kekerasan	9	12	22	17	1
10	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	6	7	22	1	5
11	Eks Penyakit Kronis (EKPK)	177	133	133	105	108
12	Mantan Warga Binaan LP (Eks Narapidana)	111	155	155	155	150
13	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	3.112	3.132	3.925	3.341	3.335
14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3	3	0	0	1
15	Korban Bencana dan Musibah Lainnya	459	-	68	71	35

*Sumber: Dinas Sosial, P3A Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Penanganan penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah orang terlantar serta

penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat bantuan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS).

Tantangan yang muncul adalah adanya konflik horizontal dan vertikal yang dapat menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa, sehingga dapat menambah persoalan sosial lainnya. Arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan pergerakan barang, modal, dan orang menyebabkan tingkat kompetensi hidup yang semakin meningkat. Jika hal ini tidak di antisipasi, maka sebagian masyarakat akan tersisih dan dapat menimbulkan masalah sosial.

Secara internal, permasalahan yang muncul adalah adanya sikap malas dari sebagian masyarakat akibat ketergantungan bantuan dari lembaga donor. Kurangnya tingkat kompetensi dan keterampilan hidup masyarakat untuk bersaing dalam kehidupan yang semakin kompleks. Faktor keberhasilan ke depan yaitu adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan hidup dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kehidupan kota. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan etos kerja masyarakat sebagai akibat transfer pengetahuan dan keterampilan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Pidie Jaya. Semakin banyaknya program pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan.

Kondisi keluarga sejahtera dan sosial di Kabupaten Pidie Jaya untuk masa mendatang diharapkan akan lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh antara lain : Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma, penyediaan dan pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatkan sumber daya kelembagaan kesejahteraan sosial, dan menerapkan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial kepada semua PMKS.

Sementara untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh stakeholder untuk merumuskan kebijakan yang tepat mengingat masih kerap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pidie Jaya. Dalam kurun waktu 2020-2023 terdapat sebanyak 36 kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebanyak 93 kasus kekerasan terhadap anak, meskipun angka terjadinya kasus ini terus mengalami

penurunan dari tahun ke tahun, tetap dibutuhkan perhatian dan strategi khusus yang harus ditempuh guna mencegah kembali terjadinya peningkatan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pidie Jaya.

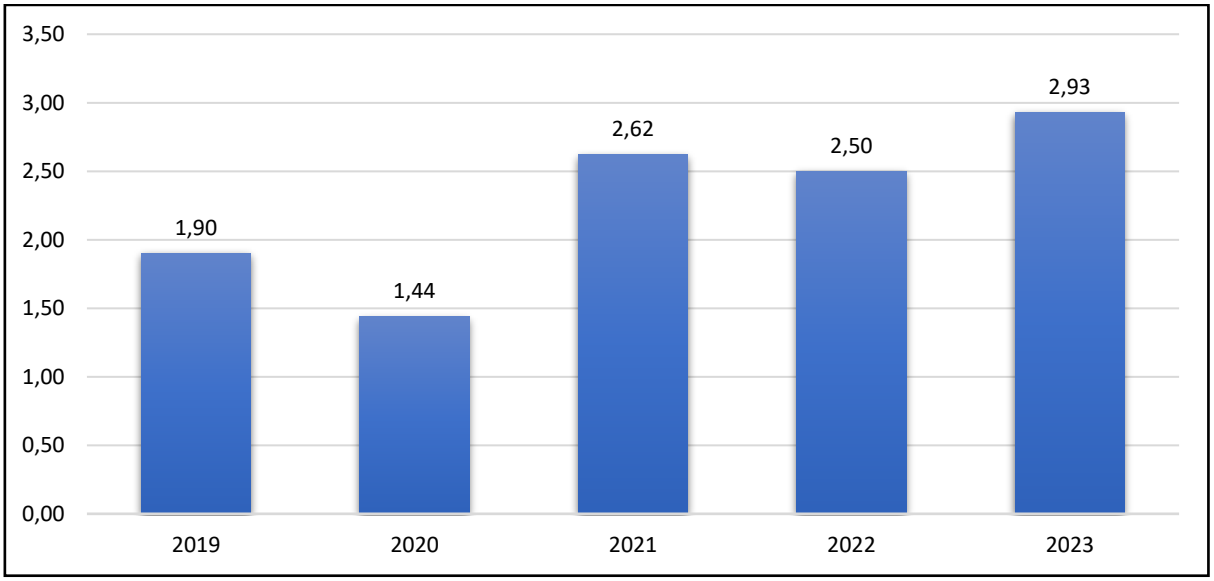
Untuk menjaga, menciptakan dan memperkuat usaha peningkatan kesejahteraan sosial, untuk tahun 2023 Kabupaten Pidie Jaya didukung oleh 56 orang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan rincian sebanyak 8 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 36 orang SDM PKH, 2 orang pendamping rehabilitasi sosial, 6 orang Penyuluh Sosial Ahli Muda, dan 4 orang Calon Penyuluh Sosial Ahli Pertama

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

dari sisi daya dukung wilayah dan sumber daya manusia, Kabupaten Pidie Jaya memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing di tingkat provinsi maupun nasional. Namun saat ini Kabupaten Pidie Jaya masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya angka kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tahun 2023, Kabupaten Pidie Jaya memperoleh Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2,93. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.39 berikut.



Sumber : Brin, Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.39. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2019, indeks tercatat sebesar 1,9, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 1,44. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi dan sosial.

Namun, mulai tahun 2021, indeks menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 2,62. Peningkatan ini bisa jadi merupakan hasil dari upaya pemulihan ekonomi dan implementasi kebijakan-kebijakan strategis yang efektif oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2022, indeks sedikit menurun menjadi 2,5, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan angka 2,93, yang merupakan nilai tertinggi selama periode lima tahun tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, tren peningkatan indeks daya saing daerah ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan pada berbagai aspek yang memengaruhi daya saing Kabupaten Pidie Jaya, termasuk kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing daerah akan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini di masa mendatan

2.3.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

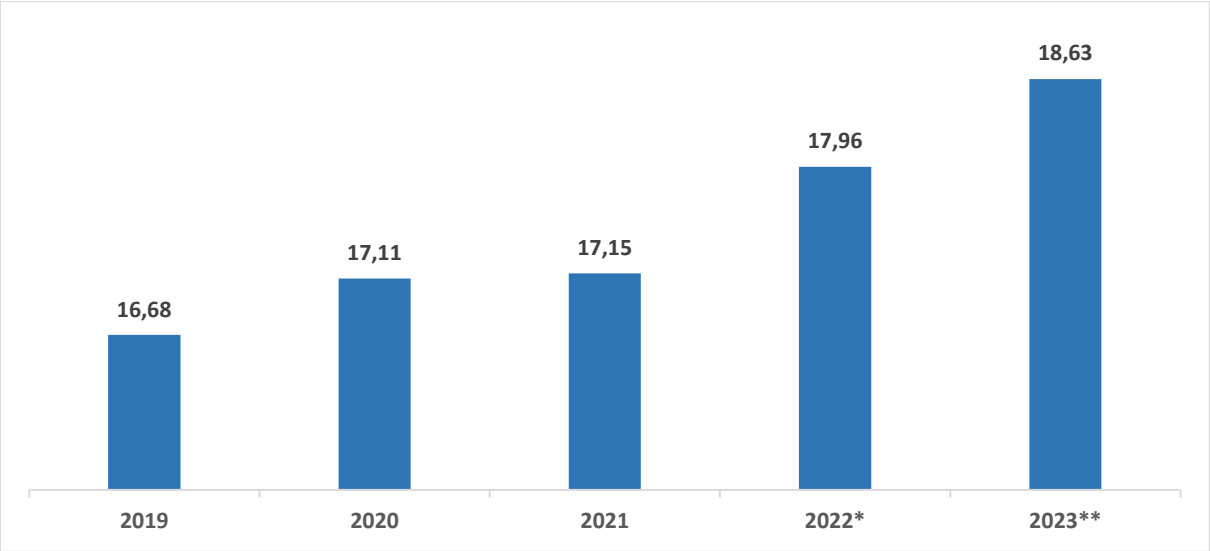
Fokus kemampuan ekonomi daerah mengukur pengeluaran rata-rata per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraannya.

2.3.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksud untuk mengetahui tingkat konsumsi RT yang menjelaskan seberapa besar pengeluaran RT tersebut dalam setahun. Semakin besar konsumsi RT maka semakin besar kemampuan untuk peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi

masyarakat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan pengeluaran yaitu makanan dan non makanan.

Data BPS Tahun 2023, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita ADHB Kabupaten Pidie Jaya mencapai Rp. 18.630.000,- per tahun. Pengeluaran komsumsi rumah tangga tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan pada Gambar 2.40 berikut.



**Angka Sementara*

***Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.40. Peningkatan Pengeluaran Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 s.d 2023.

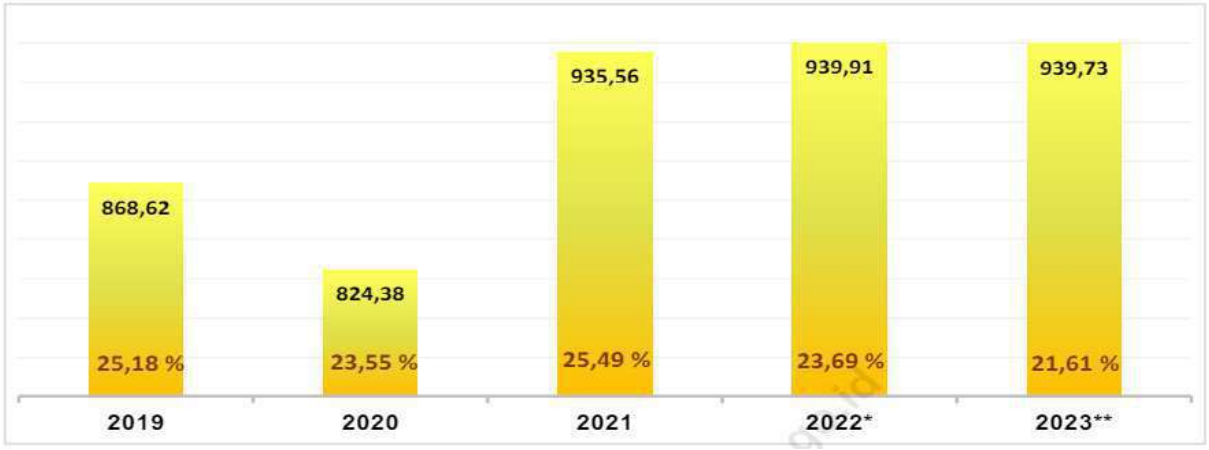
Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli produk yang juga diindikasikan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat. Analisa grafik di atas menunjukkan ada kenaikan komsumsi rumah tangga antara 5,5-6% per tahun. Faktor lain penyebab konsumsi rumah tangga per kapita naik karena inflasi dan gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Untuk data Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	2019*	2020	2021	2022*	2023**
1	Pengeluran Konsumsi RT Per Kapita (Rp)	16.680.000	17.110.000	17.150.000	17.960.000	18.630.000
2	Laju Pertumbuhan Konstan Perkapita	5,70	2,57	0,23	4,72	3,73

*Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Pidie Jaya, 2024. *(data awal)*

Lebih lanjut BPS Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa faktor penyebab naiknya pertumbuhan ekonomi daerah karena disebabkan adanya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah ini dapat membuka lapangan kerja pada bidang kontruksi, pertanian, perdagangan dll. Persentase jumlah pengeluaran konsumsi pemerintah di Kabupaten Pidie Jaya lebih besar dari pengeluaran konsumsi rumah tangga atau lembaga non profit. Namun pengeluaran pemerintah merupakan merupakan komsumsi akhir dalam perekonomian daerah. Proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam PDRB Pidie jaya pada tahun 2019-2023 sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun, dari sebesar 25,18 persen di tahun 2019 menjadi sebesar 23,55 persen di tahun 2020. Pada tahun 2021, kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah naik menjadi sebesar 25,49, kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 23,69 di tahun 2022 dan kembali turun sebesar 21,69 persen di tahun 2023 seperti terlihat pada Gambar 2.41 berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya, 2024
**) angka sementara*
***)angka Sangat Sementara*

Gambar 2.41. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (ADHB) Sejak Tahun 2019 s.d 2023.

2.3.2.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan meningkatnya pendapatannya. Secara menyeluruh pengeluaran konsumsi non pangan dan konsumsi pangan masyarakat di kabupaten/kota merupakan gambaran Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Pidie Jaya, pengeluaran konsumsi perkapita terhadap PDRB Tanpa Migas atas dasar harga berlaku tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya

jumlah pengeluaran rumah tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada jumlah pengeluarannya. Tingginya komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Pola konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun dapat memperlihatkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat bila porsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk non makanan meningkat. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan masyarakat dihabiskan untuk pengeluaran makanan maka dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif menurun sebagaimana tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2023. (ADHK)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Makanan (%)	72,2	72,02	71,36	70,28	52,88
Non Makanan (%)	27,8	27,98	28,64	29,72	47,12

*Sumber : BPS Kab. Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

2.3.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Qanun RTRW tersebut memuat diantaranya Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Penetapan Wilayah Strategis Kabupaten. Struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah. Sedangkan Rencana Pola Ruang memuat kawasan hutan lindung, kawasan budidaya, pertanian, perikanan, pemukiman, industri, dan pariwisata.

Wilayah pedesaan yang menjadi akar kekuatan ekonomi rakyat di mana sektor pertanian menjadi andalan mereka. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengembangkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang menuju pada akses-akses produksi agar mudah terhubung dengan wilayah pemasaran sehingga mampu menekan biaya produksi dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi petani. Fasilitas tersebut seperti jalan usaha tani, irigasi, saluran tersier dan lain lain.

2.3.3.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.26.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kenderaan	43540	43540	47010	49340	49550
2	Panjang Jalan	520,843	520,843	520,843	520,843	520,843
3	Rasio	1 : 84	1 : 84	1 : 90	1 : 95	1 : 95

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari Tabel 2.26 diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2019-2023 di Kabupaten Pidie Jaya cenderung meningkat dimana tahun 2019 sebesar 1:84 pada tahun 2023 menjadi 1: 95, hal ini disebabkan peningkatan volume kendaraan

2.3.3.2 Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam

melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersedian air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Pidie Jaya. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebagai penganti Millennium Development Goals (MDGs) yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan MDGs terkait peningkatan akses terhadap air bersih, SDGs menekankan pengelolaan sumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam United Nations (UN) diharuskan mengagendakan kegiatankegiatan yang mendukung tujuan SDGs, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per detik). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Pidie Jaya dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Meureudu. Tabel berikut akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.27.
Pelanggan PDAM Tirta Krueng Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tangga Pelanggan PDAM	7.046	7.444	7.840	8.042	8.383
2	Jumlah Rumah Tangga	47.744	48.263	45.696	49.512	41.415
3	Persentase Pelanggan PDAM	14,75	15,42	17,15	16,24	20,24

*Sumber : PDAM Tirta Krueng Meureudu Tahun 2023 *(data awal)*

Dari Tabel 2.27 diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Meureudu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah pelanggan mencapai 7.046, dan terus meningkat hingga mencapai 8.383 pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2020 dan 2022,

namun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Penurunan yang tajam pada tahun 2023 disebabkan oleh migrasi, perubahan data, dan faktor operasional lainnya. Persentase pelanggan PDAM terhadap jumlah rumah tangga juga menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase ini mencapai 20,24%, meningkat dari 14,75% pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan PDAM dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan air bersih. Meskipun demikian, penurunan jumlah rumah tangga di beberapa tahun perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas layanan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan jumlah pelanggan dan kualitas layanan yang optimal

2.3.3.3 Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dengan cakupan 99,48 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 50.458 pelanggan. Pengguna listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28.
Pengguna Listrik di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah RT Pengguna Listrik	46.329	46.329	47.191	49.191	50.458
2	Jumlah RT	47.744	48.263	47.696	49.512	50723
3	Persentase RT pengguna listrik	97,03	95,99	98,94	99,35	99,48

*Sumber : Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Meureudu Tahun 2024 *(data awal)*

Berdasarkan data pada tabel 2.28 dapat dijelaskan bahwa penggunaan listrik di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna listrik. Pada tahun 2019, jumlah RT pengguna listrik tercatat sebanyak 46.329, dan angka ini tetap sama pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, jumlah ini meningkat menjadi 47.191, kemudian naik lagi menjadi 49.191 pada tahun 2022, dan mencapai 50.458 pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, jumlah total RT di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah total RT adalah

47.744 dan meningkat menjadi 48.263 pada tahun 2020. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah total RT sebesar 47.696. Jumlah total RT kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 49.512 dan terus bertambah hingga 50.723 pada tahun 2023.

Persentase RT pengguna listrik juga mengalami perubahan yang positif. Pada tahun 2019, persentase RT pengguna listrik adalah 97,03%, sedikit menurun menjadi 95,99% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase ini melonjak menjadi 98,94% dan terus meningkat menjadi 99,35% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase RT pengguna listrik mencapai 99,48%.

Dari data ini, terlihat bahwa meskipun ada fluktuasi dalam jumlah total RT, jumlah RT pengguna listrik terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan akses listrik di Kabupaten Pidie Jaya, yang dapat berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Persentase RT pengguna listrik yang hampir mencapai 100% pada tahun 2023 mencerminkan hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki akses listrik, menunjukkan keberhasilan program elektrifikasi di daerah tersebut. Hal ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2034. Lahirnya qanun tersebut merupakan titik unggul bahwa Kabupaten Pidie Jaya yang tergolong baru, telah memiliki aspek legal hukum tentang pembangunan kewilayahan. Struktur pola ruang telah mengatur pembangian wilayah sesuai dengan peruntukan masing-masing. Hal ini merupakan dasar penting untuk investasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Pidie Jaya fokus terhadap pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan harus selalu mengacu pada RTRW Kabupaten. Bila dilihat pada rencana pola pemanfaatan ruang maka sebagian besar wilayah Pidie Jaya dikelilingi oleh Kawasan Lindung yang mencapai 53,51 persen atau berkisar 50.946,86 ha.

Sedangkan untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten, akan dimanfaatkan pola ruangnya sebesar 29,48% atau 28.065 ha. Sebesar 91,27 ha atau 0,10% diperuntukkan untuk kawasan industri strategis, dan sebesar 6.523,92 ha atau 6,85% dimanfaatkan untuk kawasan

pemukiman. Tabel 2.29 berikut menjelaskan perbandingan antara Luas Kasawan Lindung dengan Luas Kawasan Budidaya.

Tabel 2.29.
Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Sesuai Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2034

No	Uraian	Luas (Ha)	Prosentase
1	Luas Kawasan Lindung	50.946,86	53,51
2	Luas Kawasan Budidaya	44.264,10	46,49
3	Jumlah Keseluruhan	95.210,96	100,00
4	Rasio (1/2)	1 : 1	-

Sumber : RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034. (data termutakhir)

Letak daerah yang strategis diantara Kabupaten Bireuen dan Pidie selalu memberikan aspek kemudahan transportasi lintas daerah. Dengan jalan Negara Banda Aceh-Medan sebagai jalur utama transportasi lintas barang dan jasa, telah memberikan efektifitas dan nilai ekonomis dalam perdagangan. Semua kecamatan dalam wilayah Kabupten Pidie Jaya terletak pada jalan Negara yang merupakan lintas utama. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra perdagangan akan cepat tumbuh. Seperti Bandar Baru, Bandar Dua, dan Meureudu.

2.3.4 Fokus Iklim Berinvestasi

2.3.4.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 masih dalam batas kewajaran. setiap kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, namun demikian ada juga kasus seperti pencurian dan penipuan yang masih luput dari proses hukum. Hal inilah yang perlu upaya lebih dari pihak keamanan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30.
Jumlah kasus kriminalitas dan penyelesaian kasus di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Jenis Kriminal	Tahun 2023		
		Jumlah Kasus	Kasus yang diselesaikan	Persentase
1.	Jumlah kasus narkoba	5	5	100,00
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	1	100,00
3.	Jumlah kejahatan seksual	8	8	100,00
4.	Jumlah kasus penganiayaan	69	68	98,55
5.	Jumlah kasus pencurian	60	17	28,33
6.	Jumlah kasus penipuan	13	8	61,54
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	100,00
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	132	118	89,39
Angka kriminalitas				
	Jumlah penduduk : 163.591			
	Persentase kriminalitas %	0,08	0,07	

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data termutakhir)

2.3.4.2 Jumlah Demonstrasi

demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Pidie Jaya sangat jarang terjadi hal ini sesuai dengan data BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024. Pada tahun 2019 pernah terjadi 2 kali demonstrasi terkait bidang politik dan tahun-tahun setelahnya nihil. Hal ini merupakan sebuah hal yang bagi iklim investasi. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31.
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Bidang politik	2	-	-	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-

*Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.3.4.3 Keamanan dan ketertiban

Perkembangan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya selama periode tahun 2019-2023 berfluktuasi, Pencurian dengan pemberatan dominan tahun 2019 sebanyak 10 kasus, pencurian biasa terjadi pada tahun 2021 sebanyak 19 kasus, Pencurian kendaraan bermotor meningkat pada tahun 2021 sebanyak 36 kasus dan Narkotika sebanyak 20 kasus pada tahun 2022, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32.
Jumlah Tindak Pidana Menonjol
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Kasus	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Pencurian dengan pemberatan (curat)	10	-	8	2	2
2	Pencurian kenderaan bermotor	25	17	36	37	37
3	Pencurian dengan kekerasan (curas)	-	7	1	2	1
4	Pencurian Biasa	12	11	19	26	22
5	Penganiayaan Berat/ringan	12	7	54	53	56
6	Kebakaran	1	1	0	-	-
7	Penggelapan	4	6	6	11	11
8	Perkosaan	-	4	2	-	-
9	KDRT	1	3	8	7	6
10	Perjudian	8	4	9	1	8
11	Narkotika	27	13	9	20	-

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 *(data awal)*

2.3.4.4 Perizinan

Perubahan paradigma perizinan berusaha dari berbasis izin menjadi berbasis risiko telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memudahkan proses mendirikan usaha, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Pemerintah menggunakan pendekatan "trust but verify" dalam perizinan berusaha berbasis risiko, yang berarti memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memulai kegiatan usaha dengan persyaratan yang lebih sederhana di awal, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian standar usaha. Persyaratan untuk mendirikan usaha mikro dan kecil telah dipermudah, sehingga pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memulai kegiatan usaha, dan persyaratan lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS Berbasis Risiko.

Perizinan usaha sekarang dikelompokkan berdasarkan risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak memerlukan persyaratan yang kompleks, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko tinggi memerlukan persyaratan yang lebih ketat, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setelah kegiatan usaha dimulai, pemerintah melakukan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian standar usaha dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, perubahan paradigma perizinan berusaha dari berbasis izin menjadi berbasis risiko bertujuan untuk memudahkan proses mendirikan usaha, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Manfaat besar bagi usaha mikro dan kecil (UMK) juga diperoleh dari perubahan ini, karena mereka dapat mendapatkan perizinan berusaha dengan lebih mudah dan cepat, serta memiliki akses yang lebih baik ke pembiayaan dan pasar. Adapun jenis izin di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel 2.33 dan 2.34 berikut.

Tabel 2.33.
Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2021

No	Jenis Perizinan	Jumlah		
		2019	2020	2021
	PERIZINAN BERUSAHA			
1	Izin Lokasi	0	0	0
2	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0
3	Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	0	0	0
4	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	5	2	7
5	Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0
6	Izin Operasional Klinik	1	2	2

No	Jenis Perizinan	Jumlah		
		2019	2020	2021
7	Izin Apotek	1	6	6
8	Izin Toko Obat	5	6	6
9	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama	0	1	0
10	Izin Operasional Labaoratorium Klinik Umum Pratama	0	0	0
11	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	0	0	0
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	6	1
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	20	24	21
14	Sertifkat Laik Fungsi (SLF)	0	0	0
15	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	179	263	47
16	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	299	695	274
17	Izin Usaha Toko Swalayan	0	0	0
18	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	0	0	0
19	Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	1	0
20	Izin Usaha Industri (IUI)	0	1	2
21	Izin Perluasan Kawasan Industri	0	0	0
22	Izin Usaha Kawasan Industri	0	0	0
23	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	0	2	0
24	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	0	888	250
25	Izin Usaha Perkebunan	0	0	0
26	Izin Usaha Tanaman Pangan	0	0	0
27	Izin Usaha Holtilkultura	0	0	0
28	Izin Usaha Peternakan	0	0	0
29	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0
30	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0	0	0
31	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	0	0	0
32	Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura	0	0	0
33	Pendaftaran Usaha Peternakan	0	0	0
34	Izin Usaha Perikanan Budidaya	0	0	0
35	Izin Usaha Perikanan Tangkap	0	0	0
36	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	0	8	38
37	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)	0	0	0
38	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing	0	0	0
39	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	0	0	0
40	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0	0	0
41	Izin Lingkungan	0	0	0
42	Izin Pengolahan Limbah Cair	0	0	0
43	Izin Tempat Pembuangan Sementara	0	0	0
44	Izin Pengumpulan Limbah B3	0	0	0
45	Izin Penimbunan Limbah B3	0	0	0
JUMLAH		**510**	**1905**	**654**
PERIZINAN				
46	Izin Praktik Dokter	80	47	63
47	Izin Praktik Dokter Gigi	14	14	9
48	Izin Praktik Dokter Hewan	0	0	0
49	Izin Praktik Bidan	18	15	25
50	Izin Praktik Perawat	15	8	13
51	Izin Praktik Fisioterapi	0	0	0
52	Izin Praktik Tenaga Gizi	0	0	1
53	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	28	5	3
54	Izin Praktik Penata Anestesi	0	0	3
55	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	4	0	0
56	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	1	32	23
57	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	0	0	0
58	Izin Kerja Bidan	53	57	61
59	Izin Kerja Perawat	56	22	30
60	Izin Kerja Fisioterapi	0	0	0
61	Izin Kerja Tenaga Gizi	0	0	2
62	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	0	0	0
63	Izin Kerja Radiografer	0	0	0
64	Izin Depot Air Minum	0	0	0
65	Izin Operasional Optikal	0	1	0
66	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	12	0	0
67	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	0	0	0
68	Surat Izin Panti Sehat	0	0	0
69	Izin Insidentil	0	2	3
70	Izin Angkutan Orang dan atau Barang	0	0	0
71	Surat Izin Penangkapan Ikan	0	2	0
72	Bukti Pencatatan Kapal	0	0	0

No	Jenis Perizinan	Jumlah		
		2019	2020	2021
73	Izin Penyelenggaraan Reklame	0	9	3
JUMLAH		**281**	**214**	**239**
NON PERIZINAN				
74	Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	0	1	0
75	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (Galian C)	6	3	7
76	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (Stone Crusher)	0	0	0
JUMLAH		**6**	**4**	**7**

Sumber : DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Tabel 2.34.
Jenis-jenis Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022-2023

No	Jenis Perizinan	Jumlah	
		2022	2023
PERIZINAN BERUSAHA			
1	Perizinan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	3	1
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	62	46
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
	Jumlah	**65**	**47**
2	Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	9	14
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	46	41
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
	Jumlah	**55**	**55**
3	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	0	0
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	4	11
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	6	4
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	18	15
	Jumlah	**28**	**30**
4	Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	5	1
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	0	0
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
	Jumlah	**5**	**1**
5	Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	0	0
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	0	0
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	5	1
	Jumlah	**5**	**1**
6	Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	48	137
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	3	1
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
	Jumlah	**51**	**138**
7	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	500	467
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	6	0
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
	Jumlah	**506**	**467**
8	Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	243	447
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	27	62
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	1
	Jumlah	**270**	**510**
9	Perizinan Berusaha Sektor Pertanian		
	Risiko Rendah (NIB - Terbit Otomatis)	48	48

No	Jenis Perizinan	Jumlah 2022	Jumlah 2023
	Risiko Menengah Rendah (NIB dan Sertifikat Standar - Terbit Otomatis)	27	20
	Risiko Menengah Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Sertifikat Standar Terverifikasi)	0	0
	Risiko Tinggi (NIB - Terbit Otomatis, Izin Terverifikasi)	0	0
Jumlah		**75**	**68**
PERIZINAN			
10	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	6	39
11	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	0
12	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0	0
13	Persetujuan Lingkungan	0	0
14	Izin Praktik Dokter Spesialis/Umum	98	92
15	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis/Umum	11	23
16	Izin Praktik Bidan	598	291
17	Izin Praktik Perawat	351	173
18	Izin Praktik Fisioterapi	0	0
19	Izin Praktik Tenaga Gizi	2	0
20	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	17	20
21	Izin Praktik Penata Anestesi	4	0
22	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	38	19
23	Izin Praktik Apoteker	17	11
24	Izin Praktik Elektromedis	11	0
25	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	28	31
26	Izin Praktik Akupuntur Terapis	0	0
27	Izin Praktik Okupasi Terapis	0	0
28	Izin Praktik Ortotis Prostetis	0	0
29	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	0	0
30	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Interkontinental	0	0
31	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu	0	0
32	Izin Praktik Terapis Wicara	0	0
33	Izin Kerja Bidan	25	0
34	Izin Kerja Perawat	19	0
35	Izin Kerja Fisioterapi	2	11
36	Izin Kerja Farmasi	6	0
37	Izin Kerja Tenaga Gizi	11	5
38	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	4	2
39	Izin Kerja Radiografer	14	3
40	Izin Kerja Perekam Medis	3	1
41	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	1	8
42	Izin Kerja Okupasi Terapis	0	0
43	Izin Kerja Ortotis Prostetis	0	0
44	Izin Kerja Teknisi Gigi	0	0
45	Izin Kerja Terapis Wicara	0	0
46	Izin Tukang Gigi	6	1
47	Izin Operasional Optikal	0	1
48	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	15	1
49	Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan	17	0
50	Izin Insidentil	0	0
51	Izin Angkutan Orang dan atau Barang	0	0
52	Izin Penyelenggaraan Reklame	2	2
Jumlah		**1306**	**734**
NON PERIZINAN			
53	Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	0	1
54	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (Galian C)	1	7
Jumlah		**1**	**8**

Sumber : DPMPTSP Nakertrans Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan langkah penting dalam regulasi perizinan bangunan di Indonesia. Sebelum perubahan, izin untuk membangun sebuah gedung disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang fokus pada tahap awal pembangunan. Dengan perubahan ini, izin tersebut menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mencerminkan fokus pada perizinan yang lebih komprehensif dan terinci terkait bangunan gedung.

Perubahan nama ini mencakup peran yang lebih luas, meliputi perizinan untuk konstruksi, penggunaan, pemeliharaan, dan pembongkaran bangunan gedung. Ini berarti

bahwa PBG lebih komprehensif dalam mengatur seluruh siklus hidup bangunan, dari awal pembangunan hingga akhir masa guna bangunan. Dasar hukum perubahan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbedaan antara IMB dan PBG terletak pada fokus dan lingkup perizinan. IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. Sementara itu, PBG juga memberikan perizinan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi dengan fokus yang lebih luas dan komprehensif, termasuk penggunaan dan pemeliharaan bangunan.

2.3.5 Fokus Sumber Daya Manusia

Daerah yang maju pasti harus didukung sumber daya manusia yang handal. Agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain yang sudah lebih maju dari segi sumber daya manusia. Maka pembangunan selalu menitik beratkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk menjadikan SDM daerah yang memiliki daya saing, berkualitas, kreatif dan berprestasi. Ketersediaan SDM yang handal merupakan tolok ukur suatu kemajuan daerah dan kesiapan daerah untuk menuju proses persaingan dengan daerah yang lain terutama sekali dalam perekonomian. Salah satu menjadi kekuatan dan keungulan Kabupaten Pidie Jaya adalah sumber daya manusia yang selama ini telah diakui memiliki prestasi baik di Aceh ataupun Nasional baik yang bekerja di pemerintahan, swasta, ataupun politisi dan bahkan posisi menteri.

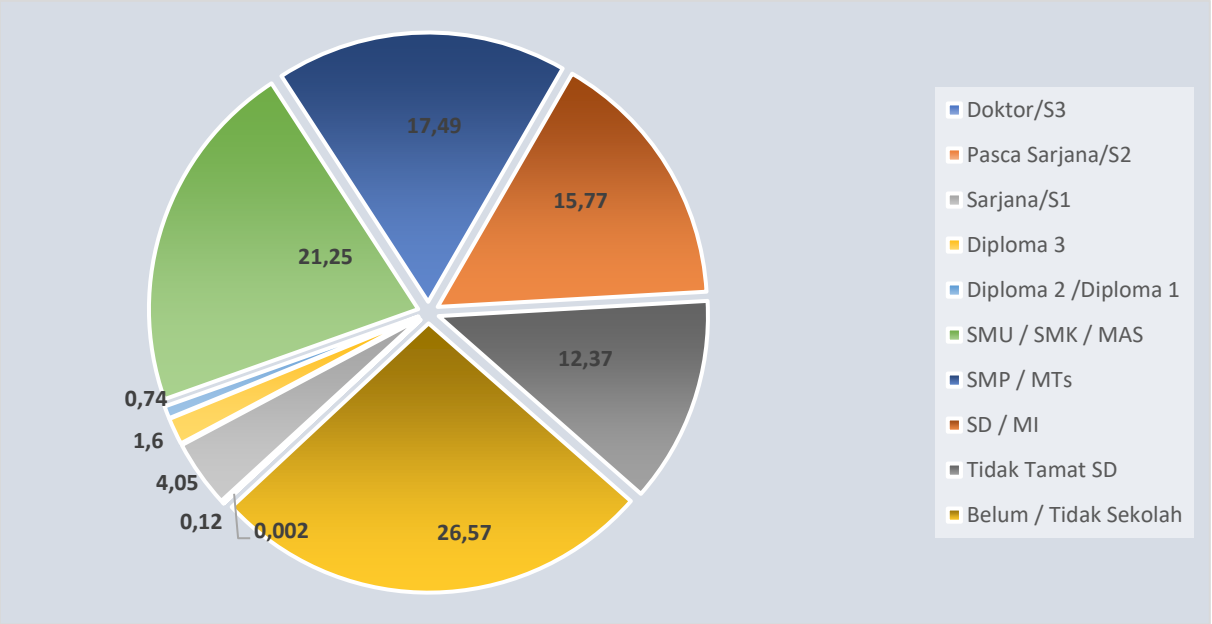
Tabel 2.35.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Doktor/S3	4	0,002
2	Pasca Sarjana/S2	202	0,12
3	Sarjana/S1	6.632	4,05
4	Diploma 3	2.625	1,60
5	Diploma 2 /Diploma 1	1.211	0,74
6	SMU / SMK / MAS	34.778	21,25
7	SMP / MTs	28.619	17,49
8	SD / MI	25.809	15,77
9	Tidak Tamat SD	20.242	12,37
10	Belum / Tidak Sekolah	43.469	26,57
	Total	160.828	100,00

Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya Tahun 2024

Tabel 2.35 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 dimana jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi dan akademi (D1/D2, D3, S1, S2, dan S3) sebanyak

10.674 orang atau 6,52%. Penduduk yang menempuh pendidikan menengah pertama sebanyak 28.619 orang atau 17,49% dan yang menempuh pendidikan menengah atas sebanyak 34.778 orang atau 21,25%. Jumlah penduduk yang menempuh sekolah dasar atau setingkatnya mencapai 25.809 orang atau 15,77%.



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.42. Prosentase Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

Jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menamatkan pendidikan dasar relatif besar yaitu mencapai 12,37% atau sekitar 20.242 orang. Sedangkan sisanya sebesar 26,57% atau sebanyak 43.469 orang merupakan penduduk yang belum memasuki usia sekolah. Pada dasarnya lebih dari 70% penduduk Kabupaten Pidie Jaya telah menempuh pendidikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kondisi ini merupakan modal penting yang sebagai salah satu kunci daya saing daerah dengan daerah yang lain guna memperoleh lapangan pekerjaan, investasi, dan pengentasan kemiskinan.

2.3.5.1 Ketenagakerjaan

A. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 hanya 6.46 persen dan yang menamatkan SLTA sederajat sebesar 21.69 persen. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya seperti pada Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pendidikan	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Doktor/S3	2	2	2	2	4
2	Pasca Sarjana/S2	144	157	157	176	202
3	Sarjana/S1	5.692	5.957	5.957	6.381	6.632
4	Diploma 3	2.508	2.549	2.549	2.580	2.625
5	Diploma 2 /Diploma 1	1.417	1.385	1.385	1.251	1.211
6	SMU / SMK / MAS	34.115	34.493	34.493	33.925	34.778
7	SMP / MTs	30.004	29.747	29.747	28.074	28.619
8	SD / MI	28.622	27.292	27.292	25.651	25.809
9	Tidak Tamat SD	21.836	21.858	21.858	20.026	20.242
10	Belum / Tidak Sekolah	37.090	38.734	38.734	42.762	43.469
	Total	161.430	162.174	160.327	160.828	163.591

*Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya Tahun 2023 *(data awal)*

Mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada sektor pertanian dan perkebunan, kemudian diikuti dengan wiraswasta, perdagangan dan nelayan serta sektor lainya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menempati porsi yang lumayan besar, yaitu 9,12 persen atau sekitar 6.372 jiwa. Bedasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013, jumlah penduduk Pidie Jaya yang berkerja mencapai 54.586 jiwa atau 35,54 persen, dan sekitar 14.727 jiwa merupakan pekerja tidak tetap. ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah di perguruan tinggi dan lulusan dari perguruan tinggi masih sangat minim.

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Defndency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk umumr 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja),

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.37 menujukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2016 sebesar 57,13 yang berarti setiap 100 orang penduduk harus menanggung biaya hidup orang lain sebanyak 57,47 orang yang tidak produktif dan angka ini sudah mulai mengalami perbaikan sampai tahun 2020 sudah menjadi 46,29 sebaliknya makin lama beban ganda ini semakin kecil sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Tabel 2.37.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun			Rasio ketergantungan
	0 – 14 tahun	15 – 64 tahun	65 ke atas	
2016*	43.833	90.934	8.120	57.13
2017	44.433	92.787	8.364	56.90
2018	45.153	94.913	8.653	56.69
2019	37.682	107.690	11.744	45,90
2020	38.329	107.937	11.631	46,29

*Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya (diolah) Tahun 2023 *(data awal)*

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab atau kewenangan pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.4.1.1.1 Pendidikan

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari layanan urusan wajib pelayanan dasar pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, berkreasi, sehat dan berprestasi. Beberapa indikator yang dapat diukur sejauh mana pembangunan pada layanan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagia bahagian dari capaian pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di

jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0 - 100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, APM tercatat sebesar 86,23%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 84,25%. Pada tahun-tahun berikutnya, APM sedikit meningkat tetapi tetap berada di kisaran 84,29% hingga 84,31% pada tahun 2020 dan 2021, serta mencapai 84,54% pada tahun 2023. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, angka ini masih berada di bawah rata-rata APM provinsi Aceh dan nasional, yang masing-masing berkisar di angka 98-99% dan 97-98%.

Pada jenjang SMP/MTs, APM di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, APM tercatat sebesar 74,48% dan meningkat tajam menjadi 78,79% pada tahun 2019. Angka ini tetap stabil pada tahun 2020 dan 2021 di 78,80%, sebelum akhirnya meningkat lagi menjadi 82,01% pada tahun 2022 dan diprediksi mencapai 83,10% pada tahun 2023. Dibandingkan dengan rata-rata APM provinsi Aceh dan nasional, APM Pidie Jaya untuk jenjang ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik meskipun masih sedikit di bawah rata-rata Aceh yang sekitar 84-88% dan rata-rata nasional yang sekitar 80-81%.

Secara keseluruhan, meskipun APM Kabupaten Pidie Jaya masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, ada tanda-tanda perbaikan khususnya di jenjang SMP/MTs. Stabilitas di jenjang SD/MI menunjukkan kebutuhan untuk intervensi yang lebih efektif guna meningkatkan angka partisipasi di tingkat dasar, untuk lebih jelasnya data perkembangan APM dapat dilihat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018–2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun (Persen)					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**						
	Pidie Jaya	86.23	84,25	84,29	84,30	84,31	84,54
	Aceh	99.10	99.12	99.03	98.95	99,07	98,97
	Nasional	97,58	97,64	97,69	97,80	97,88	97,89
2	**SMP/MTs**						
	Pidie Jaya	74.48	78.79	78,80	78,80	82,01	83,10
	Aceh	86,38	86,48	86,87	86,95	88,21	84,85
	Nasional	78,84	79,40	80,12	80,59	80,89	81,35

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024 *(data awal)*

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap terhadap pendidikan penduduk usia sekolah. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pidie Jaya mulai dari tingkat SD, SLTP, maupun SLTA mengalami perubahan selama periode 2018-2023. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2023. APS tercatat sebesar 99,10% pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan puncak pada tahun 2019 menjadi 99,82%. Setelah itu, meskipun ada sedikit penurunan, angka ini tetap berada di atas 99% hingga tahun 2023 dengan APS sebesar 99,30%. Tingkat partisipasi ini sejalan dengan rata-rata APS provinsi Aceh yang juga berada di kisaran 99% serta sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang stabil di angka sekitar 99%.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, APS di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan tren yang tinggi namun dengan fluktuasi yang lebih nyata dibandingkan kelompok usia 7-12 tahun. APS tercatat sebesar 99,01% pada tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 99,65% pada tahun 2019. Setelah itu, angka ini mengalami penurunan bertahap dari 99,29% pada tahun 2020 menjadi 95,07% pada tahun 2022 dan 94,83% pada tahun 2023. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan dengan rata-rata APS provinsi Aceh yang juga mengalami sedikit penurunan namun tetap lebih tinggi di angka sekitar 97-98%. Sementara itu, rata-rata nasional untuk kelompok usia ini stabil di kisaran 95-96%, yang menunjukkan bahwa APS di Kabupaten Pidie Jaya pada kelompok usia 13-15 tahun masih memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi penurunan yang terjadi.

Secara keseluruhan, APS di Kabupaten Pidie Jaya untuk kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil, sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun terdapat penurunan signifikan yang memerlukan intervensi untuk meningkatkan kembali partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama. Rincian perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun (Persen)					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Kelompok Usia 7-12 tahun**						
	Pidie Jaya	99,10	99,82	99,70	99,45	99,54	99,30
	Aceh	99,86	99,75	99,84	99,67	99,44	99,43
	Nasional	99,22	99,24	99,26	99,19	99,10	99,16
2	**Kelompok Usia 13-15 tahun**						
	Pidie Jaya	99,01	99,65	99,29	99,16	95,07	94,83
	Aceh	98,49	98,52	98,49	98,42	97,96	97,72
	Nasional	95,08	95,36	95,74	95,99	95,92	96,10

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024 *(data awal)*

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat PAUD/SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 3 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat

partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berdasarkan UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas mengenai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah : suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkem-bangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jalur Penyelenggaraan PAUD (Pasal 28 UU No 20 Th 2003) Jalur Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain sederajat Jalur Pendidikan Nonformal Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain sederajat Jalur Pendidikan Informal Pendidikan Keluarga atau Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Lingkungan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, APK tercatat sebesar 108,34% kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 menjadi 100,31%. Setelah itu, APK kembali meningkat menjadi sekitar 107% pada tahun 2020 hingga 2023. Rata-rata APK di Pidie Jaya ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata APK di Provinsi Aceh yang berada di kisaran 108-113%, namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berkisar antara 105-108%.

Untuk jenjang SMP/MTs, APK di Kabupaten Pidie Jaya juga menunjukkan fluktuasi selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, APK tercatat sebesar 98,46% dan meningkat sedikit pada tahun 2019 menjadi 99,42%. Namun, setelah itu, APK mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 93,67% pada tahun 2023. Rata-rata APK di Pidie Jaya ini cukup sejalan dengan tren di Provinsi Aceh yang juga mengalami penurunan dari sekitar 99% pada tahun 2018 menjadi sekitar 95% pada tahun 2023. Sementara itu, rata-rata nasional menunjukkan stabilitas yang relatif lebih baik dengan kisaran 91-93%.

Secara keseluruhan, APK di Kabupaten Pidie Jaya untuk jenjang SD/MI menunjukkan peningkatan dan stabilitas yang cukup baik meskipun sedikit di bawah rata-rata provinsi. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs, terjadi penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan partisipasi pada tingkat pendidikan menengah pertama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40.
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023

No	Tingkat Pendidikan	Tahun (persen)					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**						
	Pidie Jaya	108.34	100.31	107.24	107.64	107,24	107,62
	Aceh	113,85	109,93	108,70	108,10	108,34	108,48
	Nasional	108,61	107,46	106,32	106,20	106,27	105,62
2	**SMP/MTs**						
	Pidie Jaya	98.46	99.42	96.86	97.23	96,86	93,67
	Aceh	99,30	97,42	97,79	97,74	95,02	95,51
	Nasional	91,52	90,57	92,06	92,80	92,11	92,51

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024 *(data awal)*

D. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukan bahwa bagaimana rasio jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini dimaksud untuk mengidentifikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan stabilitas dalam jumlah gedung sekolah yang tetap sebanyak 118 unit setiap tahun. Namun, jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) mengalami penurunan dari 17.797 orang pada tahun 2019 menjadi 16.463 orang pada tahun 2023. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah meningkat dari 1:150 pada tahun 2019 menjadi 1:140 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa semakin banyak gedung sekolah yang tersedia per 10.000 penduduk kelompok usia ini, sehingga potensi akses ke pendidikan dasar semakin baik.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah gedung sekolah mengalami peningkatan signifikan dari 31 unit pada tahun 2019 menjadi 55 unit pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) menunjukkan variasi, dengan jumlah terbesar tercatat pada tahun 2021 sebanyak 9.868 orang dan kemudian menurun menjadi 7.142 orang pada tahun 2023. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menunjukkan fluktuasi, mulai dari 1:205 pada tahun 2019, membaik menjadi 1:193 pada tahun 2020, dan kemudian kembali menurun hingga mencapai 1:130 pada tahun 2023. Peningkatan jumlah gedung sekolah yang signifikan pada

jenjang ini berkontribusi pada perbaikan rasio, memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan menengah pertama bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Pidie Jaya. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	**SD/MI**					
	Jumlah gedung sekolah (unit)	118	118	118	118	118
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	17.797	17.942	17.402	16.340	16.463
	Rasio (per 10.000 penduduk)	1:150	1:152	1:147	1:138	1:140
2	**SMP/MTs**					
	Jumlah gedung sekolah (unit)	31	33	33	35	55
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (orang)	6.376	6.374	9.868	7.265	7.142
	Rasio (per 10.000 penduduk)	1:205	1:193	1:194	1:207	1:130

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 *(data awal)*

E. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid, adalah perbandingan antara jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar dibandingkan dengan jumlah murid, rasio ini mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar dengan jumlah murid yang ideal untuk 1 guru agar tercapai mutu pengajaran. Jumlah guru dan murid di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Jenjang Pendidikan	2019*	2020	2021	2022	2023
1	***SD/MI***					
1.1	Jumlah guru	1.075	1.174	2.243	2.313	2.386
1.2	Jumlah murid	17.429	17.833	18.037	17.802	17.916
1.3	Rasio	1 : 16	1 : 15	1 : 8	1 : 8	1 : 8
2	***SMP/MTs***					
2.1	Jumlah guru	592	641	1.177	1.212	1.382
2.2	Jumlah murid	7.750	8.429	10.997	8.310	8.370
2.3	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 9	1 : 7	1 : 6

*Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya, 2024. *(data awal)*

Tabel 2.42 menggambarkan bahwa Pada jenjang pendidikan SD/MI, jumlah guru di Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan signifikan dari 1.075 pada tahun 2019 menjadi 2.386 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah murid menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, berkisar antara 17.429 hingga 18.037

dalam periode yang sama. Rasio guru terhadap murid membaik secara dramatis dari 1:16 pada tahun 2019 menjadi 1:8 mulai tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan jumlah guru yang signifikan ini menunjukkan upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan lebih banyak tenaga pengajar tersedia untuk murid-murid SD/MI.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, jumlah guru juga mengalami peningkatan substansial dari 592 pada tahun 2019 menjadi 1.382 pada tahun 2023. Jumlah murid pada jenjang ini menunjukkan peningkatan yang lebih berfluktuasi, dengan puncak sebanyak 10.997 murid pada tahun 2021 sebelum turun menjadi sekitar 8.370 pada tahun 2023. Rasio guru terhadap murid membaik dari 1:13 pada tahun 2019 menjadi 1:6 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah guru juga berdampak positif pada kualitas pendidikan di jenjang SMP/MTs.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan jumlah guru di kedua jenjang pendidikan dasar, yang berdampak positif pada rasio guru terhadap murid. Ini mengindikasikan peningkatan perhatian terhadap kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa rasio guru terhadap murid semakin kecil, memungkinkan pengajaran yang lebih efektif dan perhatian yang lebih baik terhadap kebutuhan individual murid

F. Kompetensi Tenaga Pendidik

Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi generasi muda dan memajukan masyarakat. Tenaga pendidik di daerah ini diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi dalam merancang dan memberikan pembelajaran yang bermutu. Dengan fokus pada kualitas pendidikan, Kabupaten Pidie Jaya berupaya memastikan bahwa guru-guru di sekolah-sekolah mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Selain itu, pemahaman tentang kurikulum nasional dan kebutuhan khusus siswa juga menjadi bagian integral dari persyaratan sertifikasi tenaga pendidik di wilayah ini. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan mendukung perkembangan holistik siswa, sehingga mereka dapat menjadi kontributor yang berdaya saing dalam masyarakat dan negara. Konsep Merdeka Belajar adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang. Tujuan merdeka belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Tujuan tersebut tidak akan didapatkan tanpa adanya kompetensi seorang guru. Guru yang selalu mengembangkan

kompetensi akan menjadi guru yang cerdas dan profesional. Jika kompetensi tersebut disertai dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, maka tantangan sebagai seorang guru akan dapat dilalui , karena guru profesional adalah guru yang akan mengikuti perubahan, bahkan mau meninggalkan prktik dan sistem lama untuk mengahadapi berbagai tantanga masa kini dan masa yang akan datang seperti dalam perubahan kurikulum merdeka saat ini. Penguatan kompetensi SDM Guru melalui Kurikulum Merdeka di Kabupaten Pidie Jay dilakukan setiap tahunnya dengan memberikan materi terbaru yang sedang berkembang.

Berikut data guru yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi secara rinci disampaikan pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43.
Jumlah Guru Bersertifikasi dan Guru Sarjana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Guru PNS, PAUD, SD Dan SMP (Orang)	1.219	1.190	1.145	1.274	1.426
2	Jumlah Guru Yang Telah Sertifikasi (Orang)	845	835	833	782	760
3	Jumlah Guru Lulus Sertifikasi (Orang)	845	835	833	782	760
4	Persentase Guru Sertifikasi Tiap Tahun (Persen)	69,3 %	70,1 %	72,8 %	61,4 %	53,3%
5	Persentase Guru Lulus Sertifikasi /Lulus PPG (Orang)	69,3 %	70,1 %	72,8 %	61,4 %	53,3%
6	Persentase Guru Lulus Sarjana S1/S2/S3 (SD/SMP)	89,44	91,68	92,59	93,44	94,47

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pidie Jaya, Tahun 2024 *(data awal)*

G. Program Zonasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, yang dimaksud Penerimaan Peserta Didik Baru di sini adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dilaksanakan secara objektif, transparan; dan akuntabel. Juga dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Tentang Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru, ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, bahwa PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran

PPDB meliputi: zonasi; afirmasi; perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi.

Jalur zonasi terdiri atas:

1. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
3. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi. Khusus Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. Penjelasan lebih lanjut tentang Jalur Afirmasi, dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, bahwa PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:

1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
2. penyandang disabilitas.

Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, bahwa Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pidie Jaya di jelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Pelajaran 2023/2024.

2.4.1.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.44.
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Tahun	Kematian Ibu	
		Jumlah Kasus Kematian (Orang)	Angka Kematian (Per 100.000 KH)
1	2019*	1	33
2	2020	6	198
3	2021	6	211
4	2022	7	254
5	2023	1	38

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas. AKI menggambarkan jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (dalam masa nifas) akibat semua sebab yang terkait atau diperbuat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2020-2022 meningkat menjadi 7 kasus, sedangkan dari tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 1 kasus kematian Ibu di Kabupaten Pidie Jaya.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat

meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan ibu yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya.

B. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rote*)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Usia bayi merupakan usia yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian sehingga banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi guna meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Dari tabel diatas menunjukkan jumlah kematian bayi di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2021 ada penurunan dari 12 kasus menjadi 6 kasus kematian bayi, tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 9 kasus dan tahun 2023 menurun kembali yaitu menjadi 4 kasus kematian bayi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45.
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Tahun	Kematian Bayi	
		Jumlah Kematian (Orang)	Angka Kematian (Per 1.000 KH)
1	2019*	12	4
2	2020	9	3
3	2021	6	2
4	2022	9	3
5	2023	4	2

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukan perbaikan yang sangat berarti. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Pidie Jaya

C. Ketersediaan Fasilitas, dan Tenaga Kesehatan

Pembangunan infrastruktur dasar khususnya bidang kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) guna meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan tanggung jawab besar pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Setelah diresmikan pada awal tahun 2016, RSUD Kabupaten Pidie Jaya telah mengembangkan dan memfungsionalkan bangunan yang telah dibangun diantaranya seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, IGD, hemodialisa dan fasilitas pendukung lainnya.

Hal tersebut dengan memanfaatkan dana Otsus dan sumber dana lainnya dengan mengutamakan kepada fungsional RSUD guna meningkatkan pelayanan seperti pengadaan fasilitas rawat inap dan alat kesehatan rujukan, serta pembangunan taman dan tempat pembuangan limbah rumah sakit. Namun bencana gempa bumi yang terjadi pada akhir tahun 2016 telah merusak semua fasilitas rumah sakit yang telah dibangun. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus lebih bekerja keras untuk membangun kembali rumah sakit yang telah rusak tersebut dengan berbagai sumber dan donatur.

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melayani mayarakat dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 12 Puskemas, 18 Pustu, 31 Apotik dan 10 Poliklinik serta sebanyak 236 Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di pedesaan. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskemas dan Pustu berjumlah 2.951 orang. Lebih jelas jumlah sarana dan tenaga kesehatan dapat di lihat pada Tabel 2.46 berikut:

Tabel 2.46.
Indikator Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Posyandu	Jumlah Tenaga Kesehatan				
				Tahun				
				2019*	2020	2021	2022	2023
1	Bandar Baru	3	50	173	523	451	188	537
2	Pante Raja	1	10	83	61	142	54	144
3	Trienggadeng	1	28	155	195	202	116	220
4	Meureudu	1	30	209	197	177	126	225
5	Meurah Dua	1	19	104	100	116	77	137
6	Ulim	1	30	75	154	137	76	153
7	Jangka Buya	1	18	105	94	105	58	123
8	Bandar Dua	3	51	210	302	266	152	301
9	RSU	-	-	602	765	782	126	959
10	Dinkes	-	-	124	127	132	34	152
Jumlah		**12**	**236**	**1.840**	**2.518**	**2.510**	**1.007**	**2.951**

*Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan SDG's, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan melalui berbagai sumber pendanaan. Ada beberapa indikator penting SPM kesehatan yang belum

tercapai secara sempurna, Hal tersebut harus menjadi titik perhatian pemerintah daerah. Karena ketercapaian SPM merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perararaturan perundang-undangan.

D. Rasio puskesmas, polindes, pustu per satuan penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Sejak tahun 2011 seluruh kecamatan di Aceh sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 325 unit. Jumlah ini terjadi peningkatan selama 10 tahun terakhir pada tahun 2021 total puskesmas di Aceh menjadi 362 unit yang terdiri dari puskesmas rawat inap 159 unit dan non rawat inap 203 unit sedangkan jumlah Kecamatan sebanyak 289 Kecamatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976, kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa sampai 50.000 jiwa.

Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2023 jumlah puskesmas sebanyak 12 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan, Jumlah Puskesmas yang dibutuhkan didasarkan pada rata-rata penduduk 30.000 jiwa adalah sebanyak 5,4 unit atau 5 unit untuk jumlah penduduk 163.591 jiwa, artinya Puskesmas yang tersedia sudah melebihi kebutuhan sebanyak 12 unit, jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 adalah 2,20 per 30.000 penduduk, demikian juga untuk fasilitas lainnya seperti Polindes dan Pustu, artinya pembangunan Puskesmas, polindes dan pustu baru tidak diperlukan untuk sementara waktu namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya yang ada perlu ditingkatkan. Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47.
Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu di Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun (jiwa)				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	12
2	Jumlah Polindes	128	128	128	128	128
3	Jumlah Pustu	18	18	18	18	18
Jumlah Penduduk		**161.430**	**162.174**	**159.941**	**160.828**	**163.591**
1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	2,23	2,21	2,55	2,23	2,20
2	Rasio Polindes per 30.000 penduduk	23,79	23,67	24,01	23,88	23,48
3	Rasio Pustu per 30.000 penduduk	3,34	3,32	3,37	3,35	3,30

*Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Disamping itu, Puskesmas akan dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Tabel 2.48.
Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1	Puskesmas Meureudu	Paripurna
2	Puskesmas Meurah Dua	Utama
3	Puskesmas Bandar Dua	Paripurna
4	Puskesmas Kuta Krueng	Paripurna
5	Puskesmas Blangkuta	Paripurna
6	Puskesmas Jangka Buya	Utama
7	Puskesmas Ulim	Paripurna
8	Puskesmas Trienggadeng	Puripurna
9	Puskesmas Panteraja	Puripurna
10	Puskesmas Bandarbaru	Paripurna
11	Puskesmas Cubo	Paripurna
12	Puskesmas Simpang 4 Nyong	Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel 2.48 di atas menunjukkan bahwa Puskesmas di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sudah ter Akreditasi secara keseluruhan.

E. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sebanyak 163.591 jiwa jumlah rumah sakit yang ada sebanyak 1 unit yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk 163.591 jiwa adalah sebesar 1,63 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Pidie masih memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas lainnya masih perlu ditingkatkan. Rasio Kapasitas Rumah Sakit dengan Jumlah Penduduk, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, maksud dari pasal ini adalah penyediaan rumah sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk.

Untuk fasilitas kesehatan yang merupakan salah satu unsur utama dalam pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat disebut Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang terdiri atas posyandu, polindes, poskesdes dan desa siaga. Fasilitas kesehatan yang berasal dari pemerintah terdiri atas puskesmas (puskesmas rawatan, puskesmas non-rawatan), puskesmas pembantu, rumah sakit umum daerah (RSUD). Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49.
Distribusi Jenis Sarana Kesehatan dan Kepemilikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Jenis Sarana Kesehatan	Kepemilikan		Jumlah
		Pemerintah/ Masyarakat	Swasta	
1	RSU / RS Swasta	1	0	1
2	Puskesmas	12	0	12
3	Puskesmas Pembantu	18	0	18
4	Puskesmas Keliling	0	0	0
5	Balai Pengobatan/ Klinik	2	9	11
6	Rumah Bersalin	0	0	0
7	Apotik	0	18	18
8	Toko Obat Berijin	0	18	18
9	Praktek Bersama	0	41	41
10	Praktek dr. Spesialis	0	2	2
11	Praktek dr. Umum	0	14	14
12	Poskesdes	128	0	128
Jumlah				**263**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

F. Rasio dokter per satuan penduduk

Menurut ketentuan WHO, rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 orang penduduk (1 : 2.500), dokter spesialis 1 orang dokter melayani 5.000 orang penduduk (1 : 5.000) dan dokter Gigi 1 orang dokter melayani 9.000 orang penduduk (1 : 9.000). Data tahun 2023 jumlah dokter umum di Kabupaten pidie Jaya sebanyak 80 orang, dokter spesialis sebanyak 20 orang dan dokter gigi sebanyak 21 orang.

Berdasarkan hal tersebut ketersediaan dokter umum saat ini di Kabupaten Pidie Jaya adalah 80 orang, kondisi ideal dokter umum di Kabupaten Pidie Jaya adalah 65 orang, ini berarti pada tahun 2023 terjadi kelebihan dokter umum sebanyak 15 orang, dokter spesialis yang tersedia sebanyak 20 orang sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 32 orang, sedangkan untuk dokter gigi sudah memenuhi kebutuhan yaitu yang tersedia sebanyak 21 orang sedangkan kebutuhan sebanyak 18 orang. Untuk memenuhi kekurangan tersebut pemerintah daerah harus berusaha untuk mendatangkan dari luar daerah atau merekrut tenaga kesehatan baru, baik secara kontrak maupun kerja sama dengan lembaga donor, rasio dokter di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Rasio Dokter di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Tenaga Medis		Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
Dokter Umum	Tersedia	64	45	81	81	80
	Kebutuhan	65	65	64	64	65
Dokter Spesialis	Tersedia	19	19	17	20	20
	Kebutuhan	33	33	32	32	32
Dokter Gigi	Tersedia	20	20	22	20	21
	Kebutuhan	18	18	18	18	18
Jumlah Penduduk		161.430	162.174	159.941	160.828	163.591
Rasio Dokter Umum per 40/100.000 (1 : 2.500 pddk)		1 : 2.522	1 : 3.603	1 : 1.974	1 : 1.985	1 : 2.044
Rasio Dokter Spesialis per 20/100.000 (1 : 5.000 Pddk)		1 : 8.496	1 : 8.535	1 : 9.408	1 : 8.041	1 : 8.179
Rasio Dokter Gigi per 11/100.000 (1 : 9.000 Pddk)		1 : 8.071	1 : 8.108	1 : 7.270	1 : 8.041	1 : 7.790

*Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya 2024 *(data awal)*

G. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Saat ini profesi Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama hamil, masa kehamilan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan ke gawat daruratan. Jumlah Bidan di kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 tercatat sebanyak 370 orang, dengan jumlah penduduk sebanyak 163.591 jiwa, dari kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah bidan sudah melebihi standar nasional (100 bidan per 100.000 penduduk).

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah tenaga keperawatan di Pidie Jaya saat ini adalah 216 orang, kondisi tersebut sudah melebihi target nasional dan standar WHO yaitu sebesar 106,9 per 100.000 penduduk. Sementara untuk tenaga kefarmasian di kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 adalah 56 orang, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut sudah melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk. Untuk pedoman selanjutnya standar ketenagaan puskesmas dapat dilihat pada Tabel 2.51 sebagai berikut:

Tabel 2.51.
Standar Ketenagaan Puskesmas Nasional

No	Jenis Tenaga	Puskesmas kawasan Perkotaan		Puskesmas kawasan Pedesaan		Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1	Dokter atau Dokter Layanan Primer	1	2	1	2	1	2
2	Dokter Gigi	1	1	1	1	1	1
3	Perawat	5	8	5	8	5	8
4	Bidan	4	7	4	7	4	7
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1	1	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	1	1	1	1
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	1	1	1	1	1
8	Tenaga Gizi	1	2	1	2	1	2
9	Tenaga Kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10	Tenaga Administrasi	3	3	2	2	2	2
11	Pekarya	2	2	1	1	1	1
Jumlah		**22**	**31**	**19**	**27**	**19**	**27**

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

H. Persentase balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah balita yang mengalami kekurangan energi dan protein tingkat berat yang diakibatkan karena kurang mengkomsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaain ini dilihat dari status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau dari hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala marasmus, kwasiorkor atau marasmus kwasiorkor. Balita gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibanding anak seusianya. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif

Balita gizi buruk merupakan salah satu indikator kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah secara menyeluruh terutama dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tahun 2019 balita gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 10 Orang, mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu menjadi 7 0rang, 2022 meningkat kembali menjadi 10 Orang sedangkan tahun 2023 menurun kembali menjadi 2 balita gizi buruk. Balita gizi buruk dapat ditekan namun perlu diwaspadai dan ditingkatkan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar memperhatikan pola makan makanan yang bergizi, karena resiko gizi buruk

sangat besar berupa tingkat pertumbuhan badan dan mental akan terganggu. Persentase Balita Gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya disajikan pada Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52.
Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Angka Gizi Buruk	10	7	7	10	2

*Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, 2023 *(data awal)*

I. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penurunan Stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi stunting Kabupaten Pidie Jaya masih sangat tinggi. Berikut data Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023 sesuai tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53.
Perkembangan Prevalensi Stunting
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Prevelensi Stunting	26,49	n/a	29,00	37,8	29,4

*Sumber : Riset Kesehatan Dasar, SGGI Tahun 2023 *(data awal)*

Berdasarkan Tabel di 2.53 atas, Prevalensi stunting di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, prevalensi stunting tercatat sebesar 26,49%. Data untuk tahun 2020 tidak tersedia, namun pada tahun 2021, prevalensi meningkat menjadi 29,00%. Tahun 2022 mencatat peningkatan yang signifikan hingga 37,8%, mengindikasikan adanya masalah serius dalam hal pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak. Pada tahun

2023, prevalensi stunting menurun menjadi 29,4%, tetapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2021. Meskipun ada penurunan pada tahun 2023, prevalensi stunting yang tetap tinggi menunjukkan perlunya intervensi gizi yang lebih kuat dan program kesehatan masyarakat yang lebih efektif untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Pidie Jaya

J. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Profil Pertolongan persalinan merupakan salah satu kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Hal ini dapat menggambarkan indikator output dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional) dan persalinan yang belum memadai bukan pada fasilitas kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum belum begitu baik.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat setiap tahun, di tahun 2023 mencapai 100% Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, tidak ada lagi persalinan yang ditolong oleh tenaga yang bukan kesehatan. Penyebab rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan pada tahun 2019-2022 adalah karena masih adanya praktik-praktik persalinan yang masih tidak memiliki izin yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan, dengan harapan nantinya masyarakat mau melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan. Kegiatan sosialisasi kesehatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa masa yang akan datang. Selanjutnya cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 - 2023 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.54 sebagai berikut:

Tabel 2.54.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023

Uraian/Jumlah	Tahun				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Persalinan dengan bantuan Tenaga Kesehatan (Nakes)	3.010	3.044	2.851	2.752	3.610
Jumlah Ibu Bersalin	3.576	3.576	3.614	3.585	3.610
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes (%)	88,2	89,2	82,7	78,8%	100

*Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meskipun pembangunan infrastruktur terasa meningkat sejak pemekaran Kabupaten Pidie Jaya tahun 2007, namun masih banyak infrastruktur dasar yang belum terpenuhi di Kabupaten Pidie Jaya. Ditambah dengan kehancuran infrastruktur akibat bencana gempa bumi kabupaten Pidie Jaya yang terjadi 7 Desember 2016. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang menghubungkan antar wilayah kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya terus menjadi prioritas pembangunan hingga tahun 2022 guna mendorong peningkatan sumber-sumber ekonomi lokal.

A. Sarana Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55.
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di Kabupaten Tahun 2019 -2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019*	2020	2021	2022	2023
1	**Status/Kelas Jaringan Jalan**						
	Jalan Nasional	Km	37,78	37,78	37,78	37,78	37,78
	Jalan Provinsi	Km	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
	Jalan Kabupaten	Km	520,843	520,843	520,843	520,843	520,843
2	**Jenis Permukaan Jalan Kabupaten**						
	Aspal	Km	274,342	271,767	269,703	276,054	285,443
	Kerikil/Pengerasan	Km	168,286	209,212	206,704	212,708	191,284
	Tanah	Km	78,215	39,865	44,437	32,081	29,152
3	**Kondisi Jalan Kabupaten**						
	Mantap	%	47,521	48,286	40,402	41,170	42,148
	Mantap	Km	247,513	251,498	210,434	214,429	219,523
	Baik	Km	117,394	191,822	178,650	174,429	143,955
	Sedang	Km	71,122	55,691	72,848	36,005	75,568
	Rusak Ringan	Km	52,583	196,925	161,631	148,334	17,056
	Rusak Berat	Km	279,744	76,405	107,714	162,075	284,264

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Menurut Status/Kelas Jaringan Jalan di Kabupaten Pidie Jaya terbagi menjadi 3 yaitu: Jalan Nasional (37,78 Km), jalan Provinsi (23,44 Km) dan Jalan Kabupaten (520,843 Km). Selanjutnya kondisi jalan berdasarkan jenis permukaan Jalan Kabupaten dapat dilihat bahwa kategori Aspal sampai akhir tahun 2023 sepanjang 285,443 Km, Kerikil/Pengerasan sepanjang 191,284 Km dan Kategori tanah sepanjang 29,152 Km. Sedangkan bila Dilihat dari kondisi Jalan Kabupaten, Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2023 dalam kondisi mantap sepanjang 219,523 Km (42,148%), kondisi baik sepanjang 143,955 Km, kondisi rusak ringan sepanjang 17,056 Km, Rusak sedang sepanjang 75,568 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 284,264 Km.

Kondisi awal Jalan Kabupaten dalam keadaan rusak berat pada tahun 2019 sepanjang 279,744 Km namun dalam kondisi rusak ringan sepanjang 52,583 Km, dalam kondisi sedang 71,122 Km, dalam kondisi baik sepanjang 117,394 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 186,901 Km. Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dalam kondisi rusak berat 279,744 Km, dalam kondisi rusak ringan 52,583 Km, dalam kondisi sedang 71,122 Km, dalam kondisi baik 117,394 Km, dan dalam kondisi mantap 188,516 Km. Pada tahun 2020 jalan dalam kondisi rusak berat 76,405 Km, dalam rusak ringan sepanjang 196,925 Km, dalam kondisi sedang mengalami penurunan sepanjang 55,691 Km, dalam kondisi baik 191,822 Km dan meningkat pada kondisi mantap sepanjang 247,513. Pada tahun 2021 kondisi jalan kabupaten dalam rusak berat 107,714 Km, dalam kondisi rusak ringan meningkat 161,631 Km, dalam kondisi sedang menurun sepanjang 72,848 Km, dalam kondisi baik kembali meningkat sepanjang 178,65 Km, dan kondisi mantap sepanjang 251,498 Km. Dan yang terakhir pada tahun 2022 kondisi jalan rusak berat sepanjang 162,075 Km, kondisi rusak ringan 148,334 Km, kondisi sedang menurun 36,005 Km, dalam kondisi baik meningkat sebanyak 174,429 Km dan dalam kondisi mantap sepanjang 210,434 Km

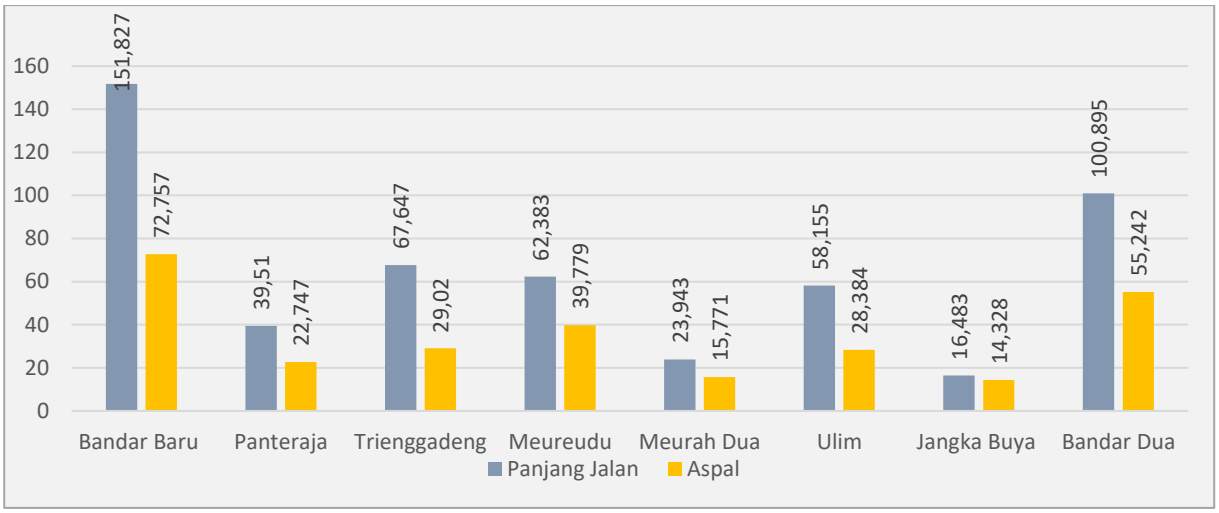
Sesuai dengan qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014 – 2034 sistem jaringan jalan dalam wilayah kabupaten Pidie Jaya adalah: Jaringan Jalan Nasional sepanjang 38,71 Km meliputi : a). Jaringan jalan arteri primer meliputi : 1. Jalan Batas Kabupaten Pidie – Meureudu sepanjang 24,66 Km; 2. Jalan Meureudu – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 14,05 Km; b). Jaringan jalan kolektor primer (K1) berupa jalan Jl. High Grade - Highway Trans Sumatera batas Kabupaten Pidie - batas Kabupaten Bireuen sepanjang 34,41 Km. Sesuai dengan perkembangan yang mana Highway Trans Sumatera berubah menjadi Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Beberapa kriteria tersebut diatas seperti jalan nasional yang ada di Kabupaten Pidie

Jaya secara bertahap akan diupayakan untuk memenuhi standar jalan yang sudah ditetapkan secara nasional. Terutama jalan masuk menuju jalan Nasional akan dibatasi secara efektif dan efisien dan juga aktifitas perdagangan atau pedagang musiman dipinggir jalan akan ditiadakan, sehingga kecepatan dan kapasitas jalan tidak terganggu. Jaringan Jalan Provinsi (K2) dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya sepanjang 23,44 Km meliputi :

1. Jalan Trienggadeng – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 19,48 Km;
2. Jalan Meureudu - Babah Jurong sepanjang 2,32 Km;
3. Jalan Sp Pangwa – Dayah Pangwa sepanjang 1,64 Km;.

Pada Tahun 2009 s.d 2014 telah dilakukan pembukaan jalan yang menghubungkan Meureudu (kabupaten Pidie Jaya) sampai ke Geumpang (kabupaten Pidie), namun akibat kendala hutan lindung dan kondisi keuangan daerah maka jalan tersebut belum selesai, diharapkan jalan tersebut dapat segera dituntaskan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di dua Kabupaten bertetangga, dengan tembusnya jalan tersebut akan membuka keterisolasian dan mempermudah masyarakat berinteraksi dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan hasil survey total panjang jalan Meureudu–Geumpang ± 53 Km, yang sudah dilakukan terobosan sepanjang 18 Km dengan lebar 9 M dan yang sudah diaspal sepanjang 5,5 Km dengan lebar 5 M sedangkan sisanya belum diterobos sepanjang ± 35 Km, hal ini telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyediakan biaya pembangunannya sedangkan biaya ganti rugi lahan yang terkena pelebaran akan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau melalui sumber dana lainnya yang sah.

Periode pemerintahan 2019 s.d 2024 diharapkan jalan Meureudu–Geumpang tersebut dapat tertangani dan segera dituntaskan atau pengaspalan agar dapat dipergunakan secepatnya oleh masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie. Dengan dibukanya jalan tersebut akan membuka keterisolasian Kecamatan Mane dan Geumpang yang mayoritas penduduk berpenghasilan dari sektor perkebunan dan pertanian. Dengan terbukanya akses jalan tersebut maka diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam menjual hasil-hasil produksi perkebunan ke Kabupaten Pidie Jaya



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Gambar 2.43. Perbandingan Jalan Beraspal dalam Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Km)

Gambar 2.43 menunjukan bahwa Kecamatan Bandar Baru dan Bandar Dua yang memiliki ruas jalan kecamatan yang panjang sesuai dengan luas wilayahnya. Panjang ruas jalan ke dua kecamatan tersebut di atas 100 Km. Sedangkan kecamatan lain panjangnya masih di bawah 100 Km. Semua kecamatan persentase penanganan jalan beraspal mencapai hampir 50%. Ada beberapa kecamatan terlihat pada gambar 2.33 penanganan jalan beraspal sudah diatas 50% seperti kecamatan Bandar Baru dan Bandar Dua.

B. Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Tabel 2.56.
Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Baku Sawah (Ha)
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Bandar Baru	6.450	32.900	3.500	42.850	784
2	Panteraja	650	3.750	1.500	5.900	40
3	Trienggadeng	2.600	10.400	5.100	18.100	283
4	Meureudu	3.590	12.260	5.900	21.750	975
5	Meurah Dua	450	5.490	1.000	6.940	356
6	Ulim	560	8.400	8.800	17.760	424
7	Jangka Buya	580	3.000	800	4.380	200
8	Bandar Dua	5.540	30.260	9.550	45.350	2.349
Jumlah		**20.420**	**106.460**	**36.150**	**163.030**	**5.411**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PidieJaya, 2024

Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Pidie Jaya meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Pada akhir tahun 2023 di Kabupaten Pidie jaya terdapat Jaringan Irigasi Primer sepanjang 20.420 meter sedangkan Jaringan irigasi Sekunder sepanjang 106.460 M dengan Luas Baku sawah 5.411 Ha. Sedangkan untuk Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini

Tabel 2.57.
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan/Desa	Luas (Ha)	Kondisi (%)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Bandar Baru	784	57,08	6,07	21,72	15,13
2	Panteraja	40	45,5	9,8	44,7	0
3	Trienggadeng	283	48,04	5,91	20,32	25,73
4	Meureudu	975	75,7	9,23	12,24	2,83
5	Meurah Dua	356	51,29	5,08	17,38	26,25
6	Ulim	424	55,96	3,96	12,03	28,05
7	Jangka Buya	200	69,97	2,23	16,56	11,24
8	Bandar Dua	2.349	62,26	3,32	15,42	19
Jumlah		**5.411**	**58,23**	**5,70**	**20,05**	**16,03**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 meliputi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Pada Kecamatan Bandar Baru seluas 677(Ha) pada kondisi rusak berat sebanyak 7,13% dan terus meningkat hingga kondisi sedang sebanyak 46,84% namun sedikit ada penurunan pada kondisi baik sebanyak 31,25% sedangkan pada Kecamatan Panteraja irigasi seluas 51 (Ha) dalam kondisi baik sebesar 51%. Pada Kecamatan Trienggadeng kondisi irigasi dalam keadaan rusak berat sebesar 40% namun terus membaik sebesar 20%. Kecamatan Meureudu seluas 107 (Ha) dalam kondisi rusak berat sebesar 3% dan terus membaik hingga 64%. Pada Kecamatan Meurah Dua kondisi jaringan irigasi seluas 265 (Ha) dalam kondisi rusak berat 41% dan membaik hingga 27%. Kabupaten Ulim irigasi seluas 357 (Ha) dalam kondisi rusak berat 28% sedangkan dalam kondisi rusak ringan 2% namun meningkat pada kondisi sedang 14% dan pada kondisi baik 56%. Kabupaten Jangka Buya luas irigasi 155 (Ha) dalam kondisi rusak berat 0% dan terus meningkat hingga kondisi baik 58%. Kabupaten Bandar Dua luas irigasi 2.219 (Ha) dalam kondisi rusak berat sebesar 27% mengalami penurunan dalam kondisi rusak ringan 4%, dalam kondisi sedang sebesar 21% dan dalam kondisi baik sebesar 47%.

C. Air Minum dan Sanitasi

Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, terutama untuk minum, memasak mencuci, mandi, dan kakus. Menurut Kementerian Kesehatan RI, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Oleh sebab itu sumber air minum menggunakan ledeng dapat dikatakan sebagai sumber air minum yang baik.

Penduduk yang mendapatkan akses air minum layak pada tahun 2018 sebanyak 505 SR, pada tahun 2019 sebanyak 1.041 SR, pada tahun 2020 sebanyak 0 SR, pada tahun 2021 sebanyak 666 SR, dan pada tahun 2022 yang mendapatkan akses air minum layak sebanyak 318 SR.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Target penyediaan air minum untuk masyarakat dilakukan dengan upaya Pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 40 Kawasan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota/IKK 400 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibukota Pemekaran/Perluasan Perkotaan 100 liter/detik, Bantuan Program 4 PDAM, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Nelayan 15 liter/detik, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar 10 liter/detik.

Kondisi pelayanan Air Minum di Kabupaten Pidie Jaya Dari total kapasitas terpasang 4.640 liter/detik air minum perpipaan, baru berproduksi 3.404 liter/detik, masih terdapat idle capacity 1.235 liter/detik. Kebutuhan Sambungan rumah berdasarkan idle capacity sebanyak 151.106 SR. Dalam hal ini masih dibutuhkan penanganan untuk pengembangan jaringan pelayanan dan sambungan rumah serta

penambahan kapasitas yang besar untuk pencapaian target pelayanan 100 persen air minum pada tahun 2025.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas. Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi.

Sistem jaringan air minum berupa pengembangan daerah pelayanan terdiri atas: a). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu melayani wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Meurah Dua, sebagian wilayah Kecamatan Ulim, sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng; b). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Panteraja dengan kapasitas 5 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja, melayani wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng dan sebagian wilayah Kecamatan Bandar Baru; c). Daerah pelayanan sistem perpipaan dari WTP Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim dengan kapasitas 230 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Meureudu yang dialiri dari Gampong Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua melayani wilayah Kecamatan Ulim, wilayah Kecamatan Meurah Dua, wilayah Kecamatan Meureudu, wilayah Kecamatan Jangka Buya dan wilayah Kecamatan Bandar Dua; d). Pengembangan WTP meliputi: 1). WTP Gampong Jiem-jiem Kecamatan Bandar Baru dengan kapasitas 100 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Bandar Baru, wilayah Kecamatan Panteraja, wilayah Kecamatan Trienggadeng; 2). WTP Gampong Lhok Puuk Kecamatan Pante Raja dengan kapasitas 40 lt/detik dengan sumber air baku dari Krueng Panteraja melayani wilayah Kecamatan Panteraja dan wilayah Kecamatan Trienggadeng; e). pengembangan pemanfaatan air tanah dan air sumber lain secara terkendali.

Sampai saat sekarang pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat, yaitu di Meureudu, Panteraja, Penyediaan air bersih untuk wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan memanfaatkan aliran sungai yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan. Aliran sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai air

baku diantaranya Krueng Meureudu dengan debit air dapat melayani air bersih untuk Kecamatan Meureudu dan sekitarnya termasuk Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Ulim, Kecamatan Bandar Dua, dan sebagian Kecamatan Trienggadeng. Sedangkan sumber air baku Krueng Panteraja melayani air bersih untuk Kecamatan Panteraja, Kecamatan Bandar Baru, dan Sebagian wilayah Kecamatan Trienggadeng, proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan kecamatan sampai hingga tahun 2031 disajikan pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58.
Proyeksi Kebutuhan Air Hingga Tahun 2031

Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih											
	2016*			2021			2026			2031		
	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)	Pddk	SR	(L/dt)
Bandar Baru	41.224	8.245	48	47.443	9.489	55	54.600	10.920	63	61.096	12.219	71
Pante Raja	9.875	1.975	11	11.365	2.273	13	13.079	2.616	15	15.052	3.010	17
Trienggadeng	26.859	5.372	31	30.911	6.182	36	35.574	7.115	41	40.941	8.188	47
Meureudu	26.135	5.227	30	30.078	6.016	35	34.615	6.923	40	39.837	7.967	46
Meurah Dua	13.650	2.730	16	15.709	3.142	18	18.079	3.616	21	20.806	4.161	24
U l i m	18.024	3.605	21	20.744	4.149	24	23.873	4.775	28	27.475	5.495	32
Jangka Buya	11.011	2.202	13	12.681	2.536	15	14.594	2.919	17	16.795	3.359	19
Bandar Dua	29.603	5.921	34	34.069	6.814	39	39.208	7.842	45	45.123	9.025	52
Jumlah	**176.381**	**35.276**	**204**	**203.000**	**40.600**	**235**	**233.622**	**46.724**	**270**	**267.125**	**53.425**	**309**

*Sumber: Qanun RTRW Kab. Pidie Jaya 2014-2034 *(data awal)*

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan

akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga.

Manyoritas rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan jamban/*Water Closet (WC*) dengan kepemilikan *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 mencapai 62,4 persen.

D. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Kabupaten Pidie Jaya diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034, yang mengambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya sedang proses revisi dan Peninjauaan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang

menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW.

2.4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah adalah tempat tinggal manusia yang di dalamnya ada sosialisasi diantara penghuni dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, demikian juga fungsi rumah adalah sebagai penunjang untuk mengembangkan diri. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m2. Sedangkan menurut pedoman umum Rumah Sederhana Sehat kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Menurut kementerian kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m2. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,4 orang per rumah tangga maka suatu hunian dikatakan layak untuk ditempati di Aceh apabila telah melebihi 44 m2 per rumah. Oleh sebab itu digunakan ukuran rumah lebih dari 50 m2. Secara keseluruhan jumlah Rumah Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir.

Disamping itu pembangunan Infrastruktur pemukiman dan perumahan pada tahun 2022 telah dilakukan pembangunan baru sebayak 46 unit rumah layak huni dan 12 unit rehab dengan berbagai sumber pendanaan. Semua ditujukan untuk masyarakat miskin dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan seperti APBK, Otsus, APBA, dan APBN. Pembangunan dan rehabilitasi rumah masing-masing dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) hingga tahun 2021 mencapai 3.733 unit.

Pembangunan RLH khusus ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan kriteria tertentu, hal tersebut sangat berbeda dengan pembangunan rumah akibat bencana gempa bumi yang mengakibatkan rumah warga banyak yang rusak. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membangun sebanyak 2.202 unit rumah masyarakat yang rusak berat dan 4.542 unit rusak sedang akibat gempa bumi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pembangunan perumahan pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut. Pemerintah pusat telah membangun melalui dana stimulan dengan

kisaran harga Rp. 85.000.000,- per rumah rusak berat dan Rp. 20.000.000,- untuk rumah rusak sedang. Program tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan mekanisme yang telah diatur dan telah tuntas dilaksanakan. Total jumlah pembangunan rumah pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kategori rusak sedang dan rusak berat sebanyak 6.487 unit.

Terkait dengan infrastruktur air limbah pemukiman. Pengembangan sarana dan prasarana air limbah pemukiman dalam meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan warga Pidie Jaya masih relatif rendah. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat kepemilikan jamban di Kabupaten Pidie Jaya adalah 69,5 persen dengan rincian 56,1 persen jamban pribadi dan MCK/WC Umum 13,4 persen. Untuk tempat penyaluran akhir tinja rumah tangga manyoritas pembuangan adalah 69,5 persen pemilik kloset, sejumlah 54,5 persen terhubung ke tangki septik, sebanyak 1,0 persen ke pipa sewer, sebesar 2,1 persen cubluk/lobang tanah, sejumlah 0,7 persen langsung ke drainase, 18,6 persen ke sungai/danau/pantai, 1,7 ke kolam/sawah, sejumlah 2,6 persen ke kebun/tanah lapang, dan 18,8 persen masih sembarang.

Kondisi sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya secara umum masih belum memadai. Berdasarkan hasil survei lapangan, terlihat bahwa tingkat pelayanan sistem drainase kota masih rendah. Kondisi ini dapat dilihat terutama pada kawasan perdagangan dan permukiman penduduk. Disamping itu masih terdapat beberapa daerah yang masih dalam katagori rawan banjir, baik itu yang disebabkan oleh air sungai yang meluap maupun air hujan. Beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pelayanan sistem drainase Kabupaten Pidie Jaya dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

- Banyaknya drainase yang tersumbat, baik oleh sedimentasi maupun akibat penumpukan limbah rumah tangga dan sampah;
- Masih terdapat banyak rumah tangga yang belum memiliki saluran drainase;

Selain berfungsi sebagai penyalur air hujan, saluran drainase di beberapa kawasan permukiman di Kota Meureudu juga berfungsi sebagai penyalur air bekas mandi, mencuci, dan masak. Air limbah tersebut disalurkan langsung ke saluran-saluran drainase di tepi jalan yang umumnya terbuka. Panjang dan Kondisi Drainase Perkotaan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 53.299 m dengan persentase 26,88 % dalam kondisi baik dan 73,12 dalam kondisi kurang baik.

2.4.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tabel 2.59.
Rasio Jumlah Satpol PP dan WH
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja (orang)	61	61	57	57	49
2.	Jumlah Wilayatul Hisbah (orang)	10	10	10	9	8
3.	Jumlah Penduduk (orang)	162.541	162.632	161.901	162.771	164.000
4.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2	2	2	2	2
5.	Rasio Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk	3	3	3	3	3

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai 2023 adanya penurunan jumlah tenaga 11 orang dan tidak dilakukan perekrutan kembali sampai akhir tahun 2023 karena ketebatasan anggaran. Jumlah anggota WH pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah sangat kurang sehingga penyelesaian kasus jarimah di kabupaten Pidie Jaya sangat rendah.

Rasio Anggota Banpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya masih kurang yaitu 1 orang /10.0000 penduduk, dari 162.771 orang Penduduk, maka kebutuhan Banpol PP 2 orang. untuk memenuhi pelayanan trantibum linmas dibutuhkan tenaga sebanyak 120 orang. Kebutuhan tenaga WH pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 36 orang yang tersedia 9 orang , adanya kekurangan 25 orang, di samping anggota Banpol PP dan WH juga terdapat kekurangan dari tenaga tehnis lainnya, seperti tenaga PPNS , Intel dan Jabatan Fungsional Satpol PP lainnya.

Tingkat peyenggaraan Trandtibum melalui sosialisasi dan Penegakan Qanun Peraturan Kepala Daerah masih rendah dari jumlah kasus yang dilaporkan hanya

70 % yang dapat ditanganidariakibat kekurangan SDM dan Anggaran yang di sediakan.sehingga capai SPM trantibum belum memenuhi target

Tabel 2.60.
Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Bidang	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Tramtibum	36	36	20	18	18
2	Penegakan Perda	20	20	12	12	8
3	Penegakan Perda Syariah	4	4	4	4	4
4	Penyelesaian Konflik	8	6	8	8	5
5	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam	8	8	8	8	6

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.3.1.1.5.1 Penanganan Bencana

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Beberapa tahun terakhir Kabupaten Pidie Jaya mengalami beberapa bencana alam seperti kebakaran, Gempa Bumi, banjir dan longsor, angin kencang dan orang hilang. Kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023 seperti pada Tabel 2.61 berikut.

Tabel 2.61.
Kejadian dan Penanganan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019*	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran	10	4	13	15	34
2	Banjir dan Longsor	1	4	11	3	2
3	Angin Kencang	4	1	3	6	3
4	Pencarian Orang Hilang	0	0	1	2	2
5	Jumlah kejadian bencana	15	9	28	26	41
6	Kebakaran	10	4	13	15	34

*Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari Tabel diatas, jumlah kejadian bencana terus meningkat. Menurut data BNPB tahun 2019-2023, Kabupaten Pidie Jaya termasuk daerah dengan tingkat

kapasitas penanganan bencana sedang dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 137,6.

2.4.1.1.6 Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 masih sangat tinggi, yaitu 18,40 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah, hal ini tercermin dari banyaknya kasus PMKS seperti pengemis, yatim piatu, anak terlantar, orang tua jumpo yang tidak terurus dan kelompok rentan lainnya masih perlu perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius.

Kondisi keluarga sejahtera dan sosial di Kabupaten Pidie Jaya untuk masa mendatang diharapkan akan lebih baik dengan melakukan berbagai upaya untuk mmeningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh antara lain : Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma, penyediaan dan pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatkan sumber daya kelembagaan kesejahteraan sosial, dan menerapkan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial kepada semua PMKS.

2.4.1.1.6.1 Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 2.62.
Jumlah Sarana Sosial yang Tersedia
di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Panti Asuhan	6	6	6	6	5
2	Panti Jompo	-	-	-	-	-
3	Rumah Aman	-	-	-	-	-
4	Rumah Tunggu Kelahiran	-	-	-	-	-

*Sumber : Dinsos P3A Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.1.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat Untuk mencegah ketimpangan sosial jumlah penduduk harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Pidie Jaya diperoleh dari hasil SAKERNAS tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja, baik yang mempunyai pekerjaan maupun penduduk yang mencari pekerjaan (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut:

Tabel 2.63.
Indikator Ketenagakerjaan Pidie Jaya 2019 - 2023

Rincian	2019*	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	69.845	73.331	69.359	70.905	73.248
Bekerja	66.814	68.507	66.881	67.784	70.066
Pengangguran	3.031	4.824	2.478	3.121	3.182
Bukan Angkatan Kerja	46.160	44.692	50.706	51.578	49.252
TPAK (%)	60,21	62,13	57,77	57,89	59,79
TPT (%)	4,34	6,58	3,57	4,40	4,34

*Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 68.344 orang. Dari jumlah tersebut, 64.912 orang berhasil memperoleh pekerjaan, menciptakan peluang pekerjaan bagi banyak individu. Meskipun demikian, terdapat 3.432 orang yang menghadapi pengangguran. Selain itu, ada sekitar 43.013 orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, mungkin disebabkan oleh pendidikan, pensiun, atau alasan lainnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun ini adalah sekitar 61,37%, dan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,02%.

Tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dalam jumlah angkatan kerja menjadi 69.845 orang. Dari jumlah tersebut, 66.814 orang memperoleh pekerjaan, tetapi masih terdapat 3.031 orang yang menghadapi pengangguran. Bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan menjadi 46.160 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun sedikit menjadi sekitar 60,21%, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 4,34%.

Kemudian, pada tahun 2020, angkatan kerja mengalami peningkatan yang lebih signifikan menjadi 73.331 orang. Dari jumlah tersebut, 68.507 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, tetapi pengangguran juga meningkat menjadi 4.824 orang. Meskipun demikian, bukan angkatan kerja mengalami penurunan menjadi 44.692

orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun ini naik menjadi sekitar 62,13%, sementara tingkat pengangguran terbuka meningkat cukup tajam menjadi sekitar 6,58%.

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja kembali turun menjadi 69.359 orang. Meskipun jumlah ini lebih rendah, 66.881 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, dan pengangguran turun drastis menjadi 2.478 orang. Orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 50.706 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja turun menjadi sekitar 57,77%, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 3,57%.

Terakhir, pada tahun 2022, angkatan kerja mengalami peningkatan kecil menjadi 70.905 orang. Dari jumlah tersebut, 67.784 orang berhasil mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga kembali naik menjadi 3.121 orang. Orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 51.578 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masing-masing adalah sekitar 57,89% dan 4,4%.

Dalam kurun lima tahun ini, Kabupaten Pidie Jaya mengalami variasi dalam hal angkatan kerja, tingkat partisipasi, dan tingkat pengangguran. Perubahan ini bisa mencerminkan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kondisi perekonomian dan lapangan kerja di wilayah ini.

2.4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial terutama persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.64.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		*2019	2020	2021	2022	2023
1	Pidie Jaya	55,49	55,32	55,04	56,33	52,15
2	Aceh	63,31	63,47	63,47	63,92	63,56
3	Indonesia	71,74	72,1	75,24	75,57	76,90

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023 *(data awal)*

Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 IDG Kabupaten Pidie Jaya sebesar 56,33 lebih rendah dibandingkan IDG Aceh yaitu 63,92. Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup

perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

2.4.1.2.3 Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi desa rawan pangan dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain: (a) indikator luas lahan pertanian dan jumlah sarana dan prasarana (Susenas); (b) indikator akses pangan baik individu maupun umum (Susenas); (c) indikator ketersediaan dan pemanfaatan air bersih serta jumlah tenaga kesehatan (Susenas); (d) indikator pendukung, diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk desa dan jumlah rumah tangga (BPS).

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tabel 2.65.
Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa						
		Sangat Rentan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Rentan Pangan	Kurang Tahan Pangan	Tahan Pangan	Sangat Tahan Pangan	Jumlah Desa
1	Bandar Baru	0	8	8	8	11	8	**43**
2	Panteraja	0	0	0	3	4	3	**10**
3	Trienggadeng	0	0	4	6	9	8	**27**
4	Meureudu	0	1	1	2	0	26	**30**
5	Meurah Dua	1	5	1	1	2	9	**19**
6	Ulim	0	1	4	4	10	11	**30**
7	Jangka Buya	0	0	0	3	4	11	**18**
8	Bandar Dua	0	3	3	7	12	20	**45**
Total		**1**	**18**	**21**	**34**	**52**	**96**	**222**

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Dari Tabel 2.65 diatas diketahui bahwa, terdapat satu desa dalam kategori sangat rentan pangan yaitu Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua, 18 desa dalam kategori rentan pangan, 21 desa dalam kategori kurang rentan pangan, 34 desa dalam kategori kurang tahan pangan, 52 desa dalam kategori tahan pangan, dan 96 desa dalam kategori sangat tahan pangan.

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Terobosan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan diversifikasi pangan adalah dengan pembinaan Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan dilakukan dengan pengembangan sayur-sayuran, perikanan dan ternak. Jumlah KWT di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.66 berikut

Tabel 2.66.
Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Pidie Jaya	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	KWT Aktif (klp)	23	19	18	15	10
2	KWT (klp)	207	207	207	207	207
3	Persentase KWT Aktif (%)	11,11	9,18	8,70	7,25	4,83

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, Pidie Jaya mencatat data yang menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan yang beragam dari Kelompok Wanita Tani (KWT). Pada tahun 2019, KWT yang aktif 11.11% dari total

207 kelompok KWT, tetapi angka ini sedikit menurun menjadi 9.18% pada tahun 2020, pada tahun-tahun berikutnya, persentase KWT aktif cenderung mengalami penurunan, mencapai 7.25% pada tahun 2023. Meskipun jumlah total KWT tetap konsisten sepanjang periode tersebut, perubahan dalam persentase KWT aktif mencerminkan fluktuasi dalam partisipasi dan keterlibatan KWT dalam berbagai kegiatan di Pidie Jaya selama periode tersebut.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Data ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67.
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

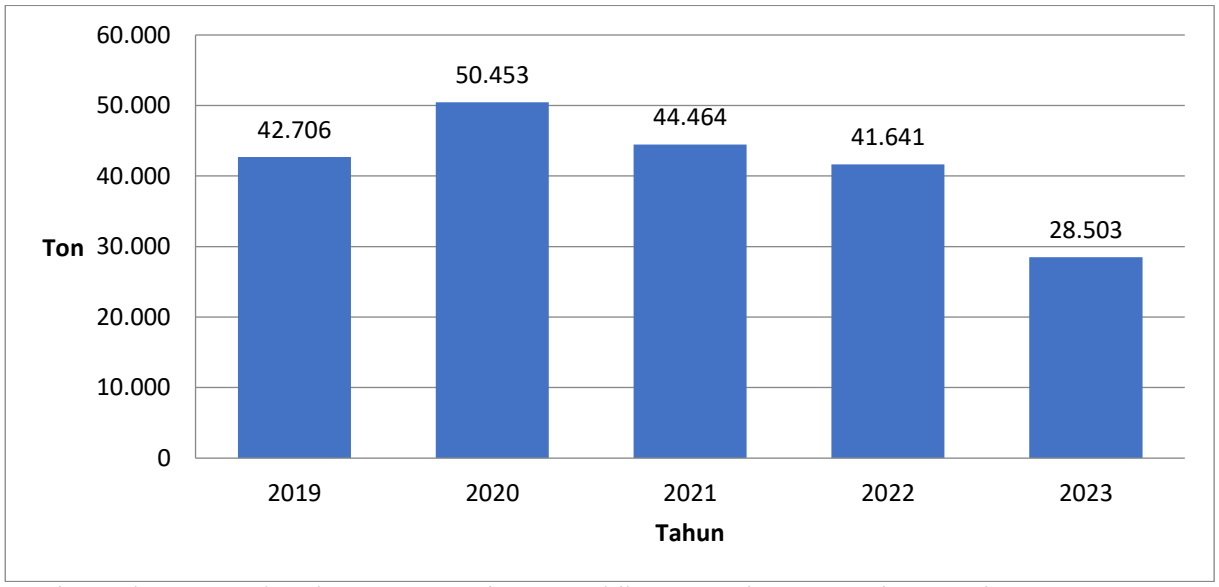
No	Pidie Jaya	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Produksi Gabah (Ton)	97.455	110.579	98.228	93.814	84.439
2	Ketersediaan Beras(Ton)	62.322	70.715	62.817	59.994	48.644
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	161.415	161.415	160.327	160.828	163.591
4	Total Konsumsi Beras(Ton/Jiwa Tahun)	19.617	20.262	18.353	18.353	20.141
5	Surplus/Cadangan Pangan (Ton)	42.706	50.453	44.464	41.641	28.503

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*
**) Angka Sementara*

Selama periode lima tahun dari 2019 hingga 2023, data yang terkumpul dari Pidie Jaya menunjukkan gambaran yang menarik mengenai produksi pangan dan ketersediaan beras di wilayah tersebut. Pada tahun 2019, produksi gabah mencapai 97.455 ton, dengan ketersediaan beras sekitar 62.322 ton. Jumlah penduduk pada tahun itu adalah 161.415 jiwa, dengan total konsumsi beras per jiwa per tahun sekitar 19.617 ton, sehingga tersedianya surplus beras sebesar 42.706 ton.

Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, terjadi fluktuasi dalam produksi dan ketersediaan beras. Puncak produksi terjadi pada tahun 2020, dengan 110.579 ton gabah dan 70.715 ton beras. Meskipun jumlah penduduk stabil, total konsumsi beras per jiwa per tahun juga mengalami peningkatan, mencapai 20.262 ton pada tahun 2020. Hal ini menghasilkan surplus beras yang signifikan sekitar 50.453 ton.

Pada tahun-tahun terakhir periode tersebut, yaitu 2021, 2022 dan 2023 produksi gabah dan ketersediaan beras kembali mengalami penurunan. Meskipun surplus beras mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, Pidie Jaya masih memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Data ini memberikan informasi penting tentang ketahanan pangan di wilayah tersebut dan dapat digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pangan di masa depan.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.44. Surplus/Cadangan Beras di Kabupaten Pidie Jaya (Ton)

Cadangan pangan Kabupaten Pidie Jaya Mengalami penurunan yang sangat signifikan karena produksi padi mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh luas tanam yang terus berkurang setiap tahunnnya. Penurunan luas tanam empat tahun terakhir disebabkan oleh tidak berlanjutnya gerakan tanam tiga kali dalam setahun, kondisi ini memburuk pada tahun 2023 dimana luas tanam menurun menjadi 12,317 Ha, sehingga produksi juga ikut menurun signifikan. Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2023 ini karena dua faktor utama, yaitu: 1) Anomali Iklim (kekeringan) yang mengakibatkan debit air irigasi sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk mengairi seluruh lahan sawah di kabupaten Pidie Jaya, 2)Kearifan lokal petani Kecamatan Trienggadeng dan panteraja yang melakukan istirahat tanah untuk mengembalikan unsur tanah.

2.4.1.2.4 Pertanahan

Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya termasuk SKPK yang baru terbentuk berdasarkan Qanun nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya di pertengahan tahun 2021. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya sudah berupaya menginventarisir data-data yang terkait dengan urusan pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang berbeda dalam pengelolaan pertanahan. Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat Kabupaten dan fokus pada administrasi tanah pemerintah daerah, termasuk pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, dan penyelesaian masalah sengketa tanah pemerintah daerah.

Sebaliknya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki wewenang yang lebih luas dan strategis di tingkat nasional. BPN menyusun dan menetapkan kebijakan pertanahan nasional, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk pendaftaran tanah, sertifikasi, dan pemetaan tanah secara menyeluruh, serta menangani sengketa tanah yang melibatkan beberapa daerah. BPN berfungsi sebagai lembaga pengatur utama yang menetapkan standar dan prosedur nasional, sementara Dinas Pertanahan menerapkan dan menyesuaikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di Kabupaten Pidie Jaya. Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68.
Cakupan Pelayana Bidang Pertanahan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021*	2022	2023
1	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang bersertifikat (bidang)	87	212	212
2	Jumlah Tanah Pemda (Bidang)	241	360	361
3	Persentase Bidang Tanah Pemkab yang Bersertifikat (%)	36	58,8	58,7

*Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

Dari tabel 2.68 diatas dapat di jelaskan bahwa Dinas Pertanahan Pidie Jaya selama tahun 2021-2023 telah menyelesaikan urusan hak-hak atas tanah pemerintah. Tepatnya pada tahun 2023 Dinas Pertanahan telah

menginventarisasikan pengurusan administrasi aset tanah pemerintah sebanyak 212, yang nantinya diserahkan ke bidang aset keuangan.

Dinas Pertanahan selama 2021-2023 telah banyak melakukan pendampingan pengukuran, namun kebanyakan pemdapingan pengukuran tanah waqaf Kemenag. Sedangkan untuk aset pemda, kemudian pendapingan pengukuran di tiga lokasi rencana pengadaan tanah pemda yang berlokasi di Bunot, Alue Ketapang dan Beurawang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, penangan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

2.4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

A. Penanganan Sampah

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam melayani persampahan diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan antara lain alat angkut sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), system transfer depo, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan yang relatif tinggi seperti Kecamatan Meureudu, Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Bandar Baru, dan Bandar Dua terutama khususnya untuk ibukota kecamatan. Wilayah tersebut potensial dalam memproduksi sampah, sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian rencana jaringan sistem persampahan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas: a). Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten; b). Pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem

Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman; c). Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi: pasar; permukiman; perkantoran; dan fasilitas sosial lainnya. d). Optimalisasi TPS di Desa Cot Langien Kecamatan Bandar Baru. e). Pengembangan TPA di Rungkom Kecamatan Meureudu. f). Penyediaan TPA di Blang Awe seluas 10 Ha. g). Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan h). Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Jumlah volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kabupaten Pidie Jaya yang ditangani selama lima tahun (2018-2022) mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Kenaikan volume sampah setiap tahunnya dikarenakan penambahan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah volume sampah pada tahun 2018 sebanyak 26,924 ton, tahun 2019 sebanyak 27,436 ton, tahun 2020 sebanyak 27,957 ton, tahun 2021 sebanyak 28,488 ton dan di tahun 2022 sebanyak 29,029 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69.
Volume dan Sarana Persampahan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Volume Sampah	27.436	27.957	28.488	29.029	29.831
2	Jumlah mobil pengangkut sampah	10	10	10	10	9
3	Jumlah gerobak sampah	7	17	17	17	17

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Kemudian telah ditetapkan pula Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Restribusi Kabupaten. Kedua qanun tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan saat ini yaitu Mobil pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Dump Truk, Mobil Amroll dan Mobil L-300. Jumlahnya pada tahun 2019 sebanyak 10 unit, mengalami kerusakan 1 unit di tahun 2023 sehingga menjadi 9 unit. Gerobak sampah berupa Viar roda tiga. pada Tahun 2019 berjumlah 7 unit, tahun 2020 sampai akhir 2023 mendapat penambahan sebanyak 10 unit, sehingga jumlahnya menjadi 17 unit

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan layanan penampungan dan pengangkutan serta pengelolaan akhir, yaitu dengan peningkatan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping dan Controlled Dumping menjadi Sanitary Landfill. Adapun upaya pengelolaan persampahan dilakukan dalam 2, yaitu program fisik dan non fisik dengan rincian sebagai berikut: a). Pengelolaan di Sumber (Fisik) berupa; 1). Pengadaan sarana layanan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPPS); 2). Pengadaan armada angkutan berupa Truck Pengangkutan Sampah, Armroll, Gerobak Sampah dan tong sampah; b). Pengelolaan Akhir (Fisik), yaitu ; 1). Peningkatan Pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); a). Program Non Fisik, yaitu; b). Kampanye edukasi dan promosi; c). Advokasi pemda (eksekutif dan legislative); d). Bantuan teknis kelembagaan; e). Peningkatan kapasitas SDM; f). Sinkronisasi lintas sektor (implementasi/pendanaan). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pidie Jaya sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan di lingkup Kabupaten Pidie Jaya.

B. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jumlah Luas RTH minimal 30% dari jumlah wilayah. Hal itu untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya 95.210,92 Ha. Luas Wilayah Kota adalah 14.396 Ha. Luas RTH dari Tahun 2018-2020 adalah 9.49 Ha dengan persentase sebesar 7%. Pada tahun 2021 s.d 2022 Luas RTH menjadi 543 Ha dengan persentase sebesar 4%. Luas RTH Taman Kota yang dikelola adalah 10 Ha dan luas RTH Lingkungan Perkantoran yang dikelola adalah 18 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut :

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Luas RTH (ha)	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8
2	Luas Wilayah Kota (ha)	156,74	156,74	156,74	156,74	156,74
3	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	11	24	45	22	8
4	Indeks kualitas Air (IKA)	n/a	n/a	n/a	46,67	63,33
5	Indeks Kualitas Udara (IKU)	n/a	n/a	n/a	92,01	92,15
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	n/a	n/a	n/a	75,40	76,67
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,34	51,32	83,52	71,32	77,92

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya kepada Penanggung Jawab Usaha berupa dokumen UKL-UPL dan SPPL. Selama lima tahun (2019-2023) jumlah dokumen yang dikeluarkan sebanyak 100 dokumen, dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 11 dokumen, tahun 2020 sebanyak 24 dokumen, tahun 2021 sebanyak 45 dokumen, tahun 2022 sebanyak 22 dokumen dan tahun 2023 sebanyak 8 dokumen. Terjadi penurunan jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2023 dikarena pengurusan izin sudah melalui sistem OSS-RBA (Online Singel Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk MHA dan Kampung Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya tidak tersedia data.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari dari tiga parameter uji yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2019 adalah 80,34. Tahun 2020 adalah 51,32. Tahun 2021 adalah 83,52. Perhitugan ini berdasarakan hasil pengujian laboratorium atau perhitungan kualitas udara, air sungai dan tutupan lahan hutan. sedangkan untuk tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya adalah 77,92. dan untuk pengujian sudah dilakukan berdasarkan parameter uji masing-masing indeks, yaitu IKA adalah 63,33. IKU adalah 92,15. IKTL adalah 76,67.

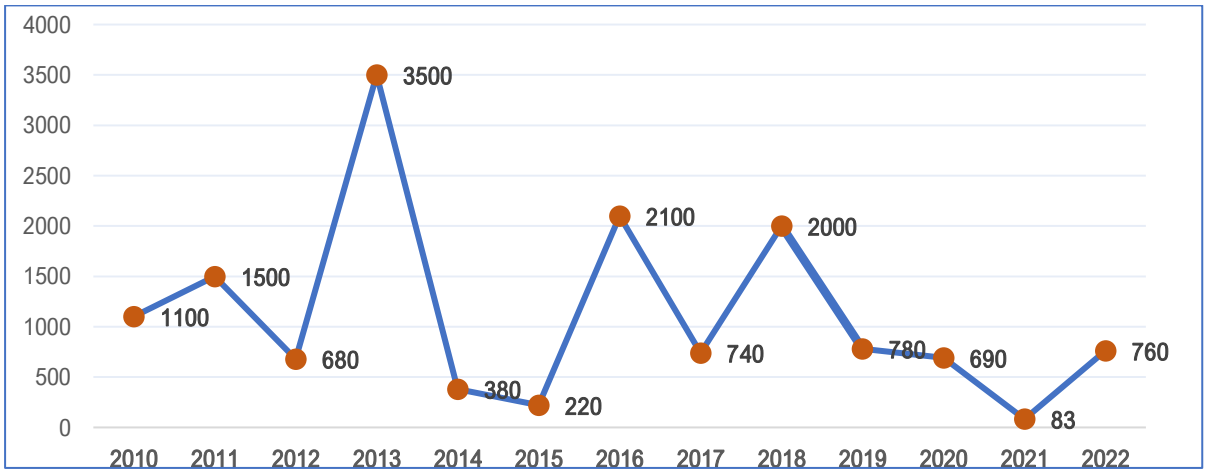
C. Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan dan lahan, terutama pada isu Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA). Pemerintah Aceh berkomitmen menurunkan emisi dari sektor kebakaran hutan dan lahan sebesar 7 persen dari Business As Usual (BAU) Aceh atau setara dengan 42.875.908,18 ton CO_2. Saat ini upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di beberapa lokasi yang rawan terjadi KARHUTLA, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pemadaman KARHUTLA. Namun masih sangat jauh dari kondisi ideal baik kapasitas atau juga sarpras sehingga butuh peningkatan yang lebih agar penanganan KARHUTLA dapat lebih maksimal.

Kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) melalui Sign Smart, data yang dikumpulkan merupakan data dari lintas sektor (Lahan, Energi, Limbah dan Transportasi), IGRK merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam rangka pencapaian target kontribusi

yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Setiap Provinsi wajib menyampaikan laporan IGRK secara Periodik tahunan.

Kegiatan mitigasi terkait Emisi Gas Rumah Kaca yang mendominasi pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan off grid dalam bentuk pembangunan PLTS dan PLTMH. Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung yang banyak dilaporkan adalah program sosialisasi ataupun penyusunan feasibility study suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.



Sumber: pprk.bappenas.go.id/2023

Gambar 2.45. Capaian Potensi Penurunan GRK di Bidang Energi (PRK Daerah-Ton CO2e)

2.4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Administrasi Kependudukan di lakukan dalam rangka Pencapaian Target cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan secara Nasional. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan tahun 2022 telah menghasilkan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan KK sebanyak 13.111 Lembar (per desember 2022) dan Cetak KIA 35.510 Keping (Per 30 desember 2022) cetak KTP sebanyak 17.331 keping dan penduduk yang belum mencetak KTP tetapi telah dikeluarkan surat keterangan penganti KTP hingga 30 desember 2022 sebanyak 0 lembar, Perekaman KTP-el sebanyak 3.939 Jiwa, Penerbitan SKPWNI Pindah Sebanyak 1.328 Lembar sedangkan Penerbitan SKPWNI Datang sebanyak 1.234 lembar Untuk akta kelahiran tahun 2022 tercetak 4.189 lembar sedangkan Akta Kematian sampai tanggal 30 desember 2022 hanya dikeluarkan sebanyak 1.029 lembar.

Untuk Kartu Identitas Anak sudah mulai di cetak tahun 2019 sebanyak 32.226 lembar atau 65,07% dari jumlah penduduk 0-17 tahun. Seluruh pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak di pungut biaya alias Gratis ,ini mulai berlaku bulan februari tahun 2014 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 900/ 326 /SJ, tanggal 17 Januari 2014. Untuk Total Penerbitan Dokumen Kependudukan sampai dengan Akhir Tahun 2023, seperti tersajikan dalam tabel 2.71 berikut ini:

Tabel 2.71.
Jumlah KTP dan Akta yang di Terbitkan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1.	Kartu Tanda Penduduk	8.951	17.246	17.331	17.331	13.462
2.	Akta Kelahiran	6.246	4.923	5.491	4.189	4.888
3.	Akta Kematian	441	722	1.412	1.029	988
4.	Jumlah Kartu Keluarga	12.214	15.566	13.111	12.111	13.111
5.	Kartu Identitas Anak (KIA)	1.103	27.438	6.969	0	6.532
6.	Jumlah Penduduk	161.430	162.174	159.829	160.828	163.591
7.	Jumlah Perekaman KTP-el	6.923	20208	3.939	3.939	3.548

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

A. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 18 Tahn 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Menyebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas Membantu Kepala Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa dan Menggerakkan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Swadaya Gotong Royong. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa Paling sedikit:

a. Rukun Tetangga,
b. Rukun Warga,
c. Pemberdayaan dan Kesejahtreaan Kelurga
d. Karang taruna,
e. Pos Pelayanan Terpadu
f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu di kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Tabel 2.72.
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah LPM	222	222	222	222	222
2	Jumlah desa	222	222	222	222	222
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM)	222	222	222	222	222

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

B. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Preseden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Keejahteraan Keluarga

Gerakakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Dalam Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, Menuju Terwujudnya Keluarga Yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasayarakatan lainnya berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Oleh karena itu perlu pembinaan kepada PKK Kecamatan dan PKK Gampong.

Tabel 2.73.
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kelompok PKK	222	222	222	222	222
2	Jumlah desa	222	222	222	222	222
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	28	30	32	37	40

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pidie Jaya adalah organisasi sosial yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan. PKK bekerja sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, khususnya keluarga, melalui pendekatan holistik dan partisipatif.

Tugas utama PKK Kabupaten Pidie Jaya meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial; pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan; serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan anggota keluarga. Selain itu, PKK Kabupaten Pidie Jaya juga fokus pada kesehatan masyarakat dengan mengorganisir posyandu dan kampanye kesehatan, pengembangan ekonomi melalui usaha kecil dan menengah, serta pelestarian lingkungan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, PKK dibagi dalam beberapa Pokja: Pokja Kesehatan, yang menangani program kesehatan keluarga; Pokja Pendidikan dan Keterampilan, yang mengadakan pelatihan dan pendidikan; Pokja Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, yang mengembangkan ekonomi produktif; Pokja Lingkungan Hidup dan Pelestarian Budaya, yang menerapkan program pelestarian lingkungan dan budaya; dan Pokja Hukum dan Perlindungan Anak, yang berfokus pada perlindungan hukum dan hak-hak anak. Setiap Pokja berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan sinergi antar berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Di Kabupaten Pidie Jaya, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) memiliki beberapa jenis kelompok binaan yang fokus pada berbagai aspek pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis kelompok binaan PKK di Kabupaten Pidie Jaya:

1. Kelompok Posyandu, Kelompok yang berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan.
2. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan keluarga melalui pelatihan usaha, pengembangan usaha kecil, dan pemasaran produk lokal.
3. Kelompok Ketahanan Pangan, Kelompok yang fokus pada pengembangan ketahanan pangan keluarga dengan kegiatan seperti budi daya tanaman pangan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian.

4. Kelompok Kerja Sama Wanita (KOWANI), Kelompok ini berfokus pada pemberdayaan wanita melalui program-program yang mendukung peran serta wanita dalam keluarga dan masyarakat.
5. Kelompok Pendidikan Keluarga, Kelompok yang menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi keluarga mengenai berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan anak, dan pengelolaan keuangan.
6. Kelompok Lingkungan Hidup, Kelompok yang berfokus pada program pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan program kebersihan.
7. Kelompok Perlindungan Anak dan Keluarga, Kelompok yang menangani isu-isu terkait perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah sosial lainnya.
8. Kelompok Seni dan Budaya, Kelompok ini berfokus pada pelestarian dan pengembangan seni serta budaya lokal, termasuk pertunjukan seni dan festival budaya

D. Persentase Posyandu Aktif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan meberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan ibu.

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, memiliki aktu untuk mengelola kegiatan posyandu. Oleh karena itu pembinaan posyandu untuk dapat dilaksanakan kesemau gampong.

Tabel 2.74.
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	226	226	226	226	236
2	Jumlah desa	222	222	222	222	222
3	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : DPMG Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Salah satu cara ntuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk

Cakupan peserta KB Aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumla Pasangan Usia Subur (PUB). Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2019 - 2024 meningkat. Pada tahun 2019, persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 60 persen, tahun 2023 naik menjadi 66 persen sebagaimana tabel di bawah, hal ini menggambarkan bahwa pencapaian program keluarga sejahtera telah berjalan secara optimal, artinya pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab berkeluarga sudah tinggi, dan hal ini perlu ditingkatkan lagi melalui peningkatan pemahaman masyarakat oleh pemuka masyarakat untuk mendukung program tersebut di masa masa yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75.
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019*	2020	2021	2022	2023
Pasangan Usia Subur (PUS)	18.545	19.728	20.880	21.802	23.613
Peserta KB Aktif	10.800	11.612	13.154	14.171	15.585
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	60	62	63	65	66
Kampung Berkualitas (Kampung KB)	11	11	11	11	151

*Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Masalah kependudukan pada hakekatnya menyangkut tiga aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk

sebesar 78 orang/km2. Sementara itu dari aspek kualitas Aceh memiliki kualitas penduduk yang rendah, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia Aceh belum menempati urutan 10 besar dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2017.

Kondisi di atas berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan diantaranya aspek sosial ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja. Besarnya dampak kependudukan ini memerlukan strategi yang memperhatikan perkembangan struktur penduduk, terutama penduduk usia muda dalam menyiapkan remaja memasuki kehidupan berkeluarga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan daerah galcitas, kumuh, perkotaan dan kepulauan, dan menyediakan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin serta pengembangan pelayanan keluarga sejahtera yang komprehensif.

Pengertian Kampung Berkualitas (Kampung KB) adalah Satuan wilayah setingkat dusun/ RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat

Kampung KB merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan keluarga. Program ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas.

2.4.1.2.9 Perhubungan

Dalam pembangunan dan pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting terutama di bidang angkutan umum dan barang. Dengan semakin lancarnya arus transportasi, maka semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi, sosial, dan wilayah. Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan lancar akan mempercepat arus transportasi, sehingga merangsang serta membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya di harapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang semakin pesat. Secara Geografis Kabupaten Pidie Jaya terletak pada posisi yang sangat strategis, karena merupakan sentral bertemunya berbagai moda transportasi darat, ditambah lagi dengan selesainya jalan tembus Meureudu – Mane/Geumpang (Kabupaten Pidie) dan adanya rencana pembangunan *Jalan Tol* dari Pemerintah

Pusat yang pasti akan melewati Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mendukung program tersebut, tentunya membutuhkan beberapa usaha dan pembenahan antara lain :

- Pembangunan, Pengembangan, Pembinaan, Pemantauan Pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan dan transportasi.
- Penetapan Pengelolaan dan Pembinaan usaha perparkiran.
- Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor angkutan umum dan barang dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- Penyediaan, Penatausahaan, Penggunaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana di bidang Perhubungan dan transportasi.

Sampai saat ini teknik sarana dan keselamatan jalan dengan cakupan angkutan wilayah pelayanan dalam Kabupaten Pidie Jaya dan angkutan antar kota belum memenuhi syarat Standard Pelayanan Minimum. Untuk itu perlu terus dilakukan pembenahan agar arus transportasi baik dari dan ke Kabupaten Pidie Jaya maupun dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya semakin lancar, tertib dan teratur. Adapun Sarana dan Prasarana Perhubungan di Pidie Jaya sebagaimana pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah tersedia di KabupatenPidie Jaya Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Tersedia	Kebutuhan
1	Traffick Light	2 unit	7 Unit
2	Halte	5 unit	8 Unit
3	Cermin Cekung	30 Unit	70 Unit
4	Bus Sekolah	11 unit	14 Unit
5	Terminal Bus	1 unit	1 Unit
6	Terminal Mobar	2 unit	4 Unit
7	Jembatan Penyebrangan	1 unit	1 Unit
8	Gedung KIR	1 Unit	1 Unit
9	Marka Jalan	8 Km	500 Km
10	Rambu Lalu Lintas	187 Unit	478 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan daya beli masyarakat akan kendaraan semakin meningkat, maka akan terjadi penumpukan kendaraan pada titik dan jam tertentu yang mengakibatkan kemacetan dan rawan kecelakaan. Untuk mengantisipasi situasi tersebut maka dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana perhubungan serta personil Pengamanan Lalu Lintas (PAM LALIN) yang handal.

2.4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Untuk meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki website milik pemerintah daerah dengan nama www.pidiejayakab.go.id yang berperan sebagai media komunikasi dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Saat ini semua SKPK saat ini sudah memiliki domain website tersendiri hanya saja masih perlu peningkatan Pengelolaan yang baik agar website tersebut lebih aktif dengan menyajikan data-data dan perkembangan pembangunan secara update dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil penilaian SPBE tahun 2022-2023 dapat dilihat pada 2.77 berikut.

Tabel 2.77.
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh Tahun 2022-2023

No	Nama Instansi	2022*		2023	
		Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,85	Cukup	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pidie	2,03	Cukup	2,04	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,62	Kurang	1,70	Kurang
4	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,47	Kurang	1,92	Cukup
5	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,13	Kurang	1,88	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,65	Kurang	1,74	Kurang
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1,62	Kurang	2,61	Cukup
8	Pemerintah Kab. Gayo Lues	1,62	Kurang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,01	Cukup	2,42	Cukup
10	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	1,54	Kurang	2,63	Baik

*Sumber : Kemenpan RB Tahun 2024 *(data awal)*

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi dan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Di Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya dalam Evaluasi SPBE pada Tahun 2022 banyak Indikator yang tidak mencukupi standar penilaian SPBE sehingga menyebabkan penilaian indeks 1,54 dan mendapatkan predikat Baik dan pada Tahun 2023 hasil Evaluasi SPBE

Dalam hal Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 221 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola SP4N LAPOR dan yang tujuannya memberikan keterbukaan akses informasi kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009.

Di Tahun 2023 Pengaduan Masyarakat yang masuk dalam Aplikasi SP4N LAPOR berjumlah 6 Pengaduan telah terdisposisi ke SKPK yang bersangkutan dengan rincian 1 dalam proses dan 5 Pengaduan yang telah terselasaikan 83%.

Dari Hasil Evaluasi Tahun 2023 Kabupaten Pidie Jaya belum Menyelesaikan Renaksi RoadMap SP4N LAPOR, hal ini dikarenakan terkendala dengan Masa Transisi Jabatan Kepemimpinan Bupati Pidie Jaya.

Untuk Tahun 2024 telah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah Menerbitkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 200 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan ROADMAP Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

2.4.1.2.11 Koperasi dan UMKM

Sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. Namun sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif seperti besarnya biaya transaksi akibat ketidakpastiaan dan persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya sumber daya produktif terutama bahan baku, permodalan sarana prasarana, terbatasnya penggunaan teknologi serta informasi pasar. Terkait berbagai permasalahan tersebut, tantangan utama kedepan adalah masih rendahnya produktifitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang menang daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar. Masalah daya saing dan produktifitas ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausaan sumber daya manusia. Tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industri, industri kreatif dan inovasi.

Tabel 2.78.
Jumlah Koperasi, UKM dan UMKM
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	130	133	120	125	105
2	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	73	73	91	90	111
3	Jumlah Koperasi	203	206	211	215	216
4	Persentase Koperasi Aktif	64,03	64,56	56,87	58,13	51,39
5	Jumlah Koperasi Syariah	0	4	9	10	12
6	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	6.394	6.593	6.920	7.234	7.549
7	Jumlah Usaha Menengah	30	32	0	0	-
8	Jumlah Seluruh UMKM	6.424	6.625	6.920	7.234	7.549

*Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari tabel 2.78 diatas menggambarkan perkembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif dari tahun 2019 hingga 2023, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tantangan operasional dan ekonomi. Demikian pula dengan Koperasi Tidak Aktif yang mengindikasikan adanya masalah dalam keberlanjutan operasional khususnya koperasi di Pidie Jaya. Namun Secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun, dari 203 pada tahun 2019 menjadi 216 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan jumlah koperasi, meskipun ada fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif dan tidak aktif.

Jumlah Koperasi Syariah meningkat dari tidak ada pada tahun 2019, menjadi 4 pada tahun 2020, 9 pada tahun 2021, 10 pada tahun 2022, dan mencapai 12 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan minat dan perkembangan koperasi berbasis prinsip syariah di Pidie Jaya.

2.4.1.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan. Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.

Kondisi ini dirasakan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor, selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, juga tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung serta kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal. Selain itu juga pelayanan penanaman modal kepada investor juga sangat terkait dengan belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan membuka peluang kesempatan kerja untuk masyarakat, Kabupaten Pidie Jaya sangat terbuka terhadap investasi baik dari dalam daerah, luar daerah bahkan manca negara. Sektor-sektor

yang di harapkan menjadi daya tarik berinvestasi diantaranya sektor perdagangan, perkebunan, perikanan, pengolahan, pariwisata dan jasa-jasa. Berikut nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79.
Perkembangan Nilai Investasi Tahun 2019-2023
di Kabupaten Pidie Jaya (PMDN)

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek/ Bidang Usaha	Nilai Realisasi Investasi (Rp)
1.	2019*	42	42	2.673.785.145
2.	2020	66	66	47.698.769.855
3.	2021	84	84	33.402.335.802
4.	2022	132	202	130.219.478.406
5.	2023	96	641	91.346.356.349

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pidie Jaya 2024 (data awal)

Perkembangan investasi di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang berinvestasi mencapai 42 dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 2.673.785.145. Tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dengan jumlah perusahaan mencapai 66 dan nilai investasi melonjak menjadi Rp 47.698.769.855, kemungkinan karena perbaikan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah yang lebih mendukung investasi. Namun, pada tahun 2021, meskipun jumlah perusahaan meningkat menjadi 84, nilai investasi menurun menjadi Rp 33.402.335.802, yang mungkin disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 atau masalah lain yang mempengaruhi kepercayaan investor.

Tahun 2022 mencatat peningkatan tajam dengan jumlah perusahaan mencapai 132 dan jumlah proyek melonjak menjadi 202, serta nilai investasi meningkat drastis menjadi Rp 130.219.478.406. Ini menunjukkan peningkatan stabilitas ekonomi, kebijakan investasi yang lebih baik, atau peningkatan infrastruktur yang menarik investor. Namun, pada tahun 2023, meskipun jumlah proyek melonjak drastis menjadi 641, nilai realisasi investasi menurun menjadi Rp 91.346.356.349. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh masalah dalam eksekusi proyek, penurunan kualitas proyek, atau faktor lain seperti kompetisi regional yang mempengaruhi investasi di Pidie Jaya.

Secara keseluruhan, periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan investasi yang fluktuatif dengan puncaknya pada tahun 2022. Untuk menjaga dan

meningkatkan nilai investasi, perlu ada fokus pada perbaikan kualitas proyek, stabilitas kebijakan, serta peningkatan infrastruktur dan promosi investasi

Investasi itu sendiri sangat tergantung dari Iklim investasi seperti stabilitas dan keamanan daerah tujuan investasi. Indikator yang menjadi sorotan diantaranya angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, pemogokan kerja dll. Hal-hal tersebut masih tergolong sangat rendah di Kabupaten Pidie Jaya. Namun demikian tingkat pengetahuan masyarakat terhadap investasi yang selalu dikaitkan dengan isue keagamaan dan sosial serta nilai-nilai budaya lokal dengan pemahaman yang berlebihan, sehingga sedikit menghambat iklim investasi yang masuk ke Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu ketersediaan lahan, tenaga kerja dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan senantiasa diusahakan untuk memberikan pelayanan terbaik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar investor menjadi tertarik berinvestasi.

2.4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Bidang Pemuda

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk secara serius menjadikan agenda pembangunan pemuda sebagai salah satu tema penting dari pembangunan nasional atau pembangunan daerah secara keseluruhan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan (UU No. 40/2009 BAB I Pasal 1). Selanjutnya Undang-Undang ini mengamanatkan Pembangunan Kepemudaan, yaitu “Proses memfasilitasi segala yang berkaitan dengan kepemudaan.” Sedangkan “Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda” dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sasaran ini bisa dicapai dengan cara, yaitu pembinaan karakter pemuda dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan.

Dinas Pemuda Olahraga dan Periwisata Kabupaten Pidie Jaya khususnya Bidang Pemuda terus berusaha secara maksimal untuk memberdayakan para pemuda dengan dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti terlihat pada tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80.
Daftar Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023

No	Uraian Kegiatan	Tahun (Peserta)				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda (liff skil)	38	38	-	-	-
2	Kegiatan seleksi paskibraka tingkat nasional	2	2	2	2	2
3	Pembinaan organisasi kepemudaan	150	100	-	-	-
4	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda	-	111	-	-	-
5	Wirakarya pemuda prestasi	-	-	48	-	-
6	Pelatihan komputer	-	10	15	15	10
7	Pelatihan ketrampilan pemuda (menjahit)	-	-	6	-	-

*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2023 *(data awal)*

Dengan adanya penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan maka diharapkan adanya perbaikan tata kelola organisasi kepemudaan yang lebih moderen dan sesuai dengan tantangan zaman, sehingga organisasi kepemudaan sebagai tempat lahirnya kader-kader penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Pidie Jaya dalam rangka pembinaan kepemudaan dengan menggalakkan program-program lain seperti penganugrahan/penghargaan kepada pelaku Seni Budaya Daerah, Festival Pidie Jaya, Pembinaan Gampong Budaya, dan Program Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah dengan mengikutsertakan pemuda. Pelaksanaan kegiatan budaya tersebut diatas juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada pemuda agar memahami budaya daerah.

Pengembangan keolahragaan juga sangat diperlukan dalam mengikat persaudaraan dan kebersamaan bagi pemuda. Pengembangan ini dilakukan melalui pembinaan terhadap generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Lebih dari 24 cabang olahraga telah dilakukan pembinaan sesuai dengan tanggungjawab KONI Kabupaten Pidie Jaya untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian banyak cabang olahraga yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olahraga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan agar persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berprestasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional.

B. Bidang Olahraga

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas yang berperan aktif dalam peningkatan aktifitas keolahragaan, kepemudaan dan pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menunjang program olahraga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga perlu dibangun secara bertahap oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar segala even olahraga dapat terlaksana dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan standar kompetisi.

Kegiatan keolahragaan dilakukan melalui pembinaan terhadap masyarakat dan generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olah raga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Lebih dari 30 cabang olahraga telah dilakukan pembinaan untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten. Namun demikian banyak cabang olahraga yang masih minim fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olahraga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan, khususnya untuk cabang olahraga persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berprestasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional.

Tabel 2.81.
Jumlah Sarana dan Olahraga di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Sarana dan Prasarana Olahraga (Lapangan)					
		Stadion / GOR	Sepak Bola	Volly	Bulu Tangkis	Futsal	Tennis
1.	Bandar Baru	-	10	10	-	1	-
2.	Panteraja	-	6	8	-	-	-
3.	Trienggadeng	-	4	2	-	-	-
4.	Ulim	-	9	6	-	-	-
5.	Jangka Buya	-	4	2	-	-	-
6.	Meureudu	1	4	7	1	1	1
7.	Meurah Dua	-	2	6	-	-	-
8.	Bandar Dua	-	5	7	-	1	-
Jumlah		**1**	**44**	**48**	**1**	**3**	**1**

Sumber : Disporapar Pidie Jaya Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.81 diatas menjelaskan bahwa jumlah lapangan olahraga minim dan terbatas. Untuk pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan lapangan volly masih menggunakan sumber dana pemerintah gampong. Masih sedikit yang secara utuh dapat dibangun dengan menggunakan sumber dana DAU atau DAK.

Bila dilihat dari prestasi yang dihasilkan oleh atlit-atlit olahraga yang mengikuti even olahraga tingkat kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya fokus terhadap 6 (enam) cabang olah raga yaitu Bola Kaki, Atletik, Pencak Silat, Tenis Meja, Karate dan Taekwondo. Dan diharapkan dapat berkembang ke cabang

olahraga lainnya. Adapun prestasi olahraga yang disumbangkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82.
Peringkat Keikutsertaan POPDA Kabupaten Pidie Jaya
dari Tahun 2008 s.d 2022

No.	Kegiatan	Perolehan Medali	Peringkat
1.	POPDA 2008 di Aceh Selatan	1 Perak 1 Perunggu	19
2.	POPDA 2010 di Aceh Tamiang	1 Emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu	17
3.	POPDA 2012 di Banda Aceh	2 Emas, 3 Perak dan 7 Perunggu	9
4.	POPDA 2014 di Lhokseumawe	4 Emas, 6 Perak dan 3 Perunggu	7
5.	POPDA 2016 di Kota Langsa	5 Emas, 5 Perak dan 5 Perunggu	8
6.	POPDA 2018 di Aceh Tengah	3 Emas, 3 Perak dan 3 Perunggu	12
7.	POPDA 2020 di Aceh Barat	-	-
8.	POPDA 2022 di Aceh Barat	7 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu	6

Sumber : Disporapar Pidie Jaya Tahun 2023 (data termutakhir)
Note: Tahun 2020 Tidak dilaksanakan karena Pandemi COVID-19

Disamping itu pemerintah daerah memberikan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan Narkoba dan penguatan pemahaman keagamaan kepada generasi muda. Hal tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah, tempat peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan

2.4.1.2.14 Statistik

Peranan urusan statistik daerah adalah menjamin ketersediaan data statistik sektoral berupa capaian indikator kinerja utama daerah. Tugas dan fungsi Persandian tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era Keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital.

Peranan urusan statistik daerah adalah menjamin ketersediaan data statistik sektoral berupa capaian indikator kinerja utama daerah.

Tabel 2.83.
Capaian Ketersediaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009 s.d 2023

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2019*	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral	%	68	71	83	93	84

*Sumber : Diskominfo Statistik dan Sandi Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.2.15 Persandian

Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur. Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah system elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Tabel 2.84.
Indikator Urusan Persandian Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2009 s.d 2023

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2019*	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	84	71	73	81	100

*Sumber : Diskominfo Statistik dan Sandi Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.1.2.16 Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat serta cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, adat istiadat, seni, musik, teknologi, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kebudayaan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya;

Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dengan tujuan untuk dapat dilestarikan secara terus menerus. Objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85.
Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya 2023

No	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Nama Objek Pemajuan Kebudayaan	Total	Status
1.	Tradisi Lisan	Seumapa, Zikir Maulid, Dalail Khairat, Hadih Maja, Sya'e, Nazam, Doda Idi Aneuk, dan Hikayat.	8	Aktif
2.	Manuskrip	Hikayat Tanbihul Ihsan, Surat Nikah Masa Kolonial Belanda, Manuskrip Kitab Lapan, dan Manuskrip Masjid Tuha.	4	Terawat
3.	Adat Istiadat	Madeung, Me Gateng, Tueng Dara Baro, Boh Gaca, Intat Linto, Meulakee/Meminang, Intat Ranup Gaca, Meugatib, dan Cah Rhot.	9	Aktif
4.	Permainan Rakyat	Main Gambar, Main Lompat Sungai, Lenggang Rotan, Mobil-Mobilan, Congkak, Lari Balok, Main Hadang, Engrang, Terompah Panjang, Meuen Gaseng, Meuen Chee, Meuen	25	Aktif
		Budee Tomplop, Meuen Keong, Meuen Aneuk Guli, Meuen Budee Trieng, Meuen Jambo, Meuen Tarek Situek, Meuen Balap Ban Moto, Meuen Geunteut Bruek, Meuen Galah, Meuen Geutah, Meuen Kandang, Meuen Geulayang, Geudeu-Geudeu, dan Budee Trieng		
5.	Olahraga Tradisional	Geudeu-Geudeu	1	Aktif
6.	Teknologi Tradisional	Jeungki, Creuh, Langai, dan Peuneurah Pliek	4	Aktif
7.	Pengetahuan Tradisional	Pantangan Kerja Hari Jum'at, Panglima Laot, Beulacan, Asam Udeng, Kanji Rumbi, Salak Pliek, Geutok Meureudu, Timphan Boh Panah, Sate Kaya, Kue Arafik, Nasi Briyani, Mie Caluk Lapangan, Apom Manis Meureudu, Adee, Sie Itek Puteh, Mak Meugang, dan Timphan Baloen,	17	Aktif
8.	Seni	Hikayat, Seumapa, Musik Seurune Kale, Musik Mob-mob, Geudumbak Daya, Tari Ranup Lampuan, Tari Rapa'I Geleng, Rapa'I Bubee, Tari Tarek Pukat, Tari Rateb Meuseukat, Tari Likok Pulo, Tari Laweut, Tari Seudati, dan Tari Teumampoe.	14	Aktif
9.	Ritus	Rapa'I Kaoy, Manoe Tuha, Cok Roh, Khanduri Maulid, Khanduri Ureung Meninggai, Keumaweuh, Seunujoh, Peulheuh Alien, Khanduri Laot, Khanduri Krueng, Khanduri Blang, dan Grimpheng.	12	Aktif
10.	Bahasa	Bahasa Aceh	1	Aktif
Total			**95**	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2024

Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.86 berikut:

Tabel 2.86.
Jenis Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya 2023

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	Makam Akhmad Khatib Langgien	Langgien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
2	Mesjid Baitur Abrar	Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
3	Makam Raja-raja Meureudu	Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
4	Makam Sultan Munawwarsyah bin Sultan Muhammad AlLamuri	Hagu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
5	Makam Kuno Gampong Lueng Bimba	Lueng Bimba Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
6	Makam Kuno Meunasah Raya	Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
7	Pendopo Bupati Pidie Jaya	Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
8	Rumoh Aceh	Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabpaten Pidie Jaya	Ditetapkan
9	Mesjid Baiturrahman	Peudeuk Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan
10	Benteng Kuta Batee	Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Ditetapkan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2024

Selain 10 *(sepuluh)* Cagar Budaya yang telah ditetapkan masih terdapat Objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tersebar di 8 *(delapan)* Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang telah didata oleh Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya diantaranyaJenis Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut:

Tabel 2.87.
Jenis Objek diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Pidie Jaya 2023

No	Kecamatan	Jumlah ODCB	Keterangan
1	Bandar Baru	27 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
2	Panteraja	8 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
3	Trienggadeng	29 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
4	Meureudu	20 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
5	Meurah Dua	31 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
6	Ulim	17 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
7	Jangka Buya	19 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
8	Bandar Dua	13 ODCB	Dalam bentuk Situs, Kawasan, Bangunan, dan Struktur
	Total ODCB	**164 ODCB**	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 2024

Museum Pidie Jaya merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berlokasi di tengah-tengah Taman Kota Pidie Jaya, awalnya bangunan yang berbentuk Rumoh Aceh yang dipindahkan dari Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu didirikan kembali pada awal tahun 2020 dan kini dipergunakan sebagai Bangunan Museum Pidie Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 209 Tahun 2022 tentang Pendirian Museum Pidie Jaya.

Mideun Meurah Seutia yang merupakan Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya yang terletak ditengah-tengah Kota Meureudu merupakan sebuah Bangunan yang dulunya digunakan sebagai Komplek Kantor Bupati Pidie Jaya diawal-awal terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Pada Tahun 2019 Mideun Meurah Seutia diresmikan sebagai sarana Ruang Kreatif sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 191 Tahun 2019 tentang Mideun Meurah Seuia sebagai Ruang Kreatif. Mideun Meurah Seutia sering digunakan sebagai tempat Aktifitas seniman-seniman Pidie Jaya untuk mengekspresikan karya-karya seninya sehingga pada Tahun 2024 Mideun Meurah Seutia resmi menjadi Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya sesuai Surat Keputusan Penetapan Ruang Kreatif Mideun Meurah Seutia sebagai Taman Budaya Kabupaten Pidie Jaya Nomor 170 Tahun 2024.

2.4.1.2.17 Perpustakaan

Peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu kota kabupaten. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anakanak terkadang melebih daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping. Perpustakaan umum Kabupaten Pidie Jaya memiliki jumlah koleksi sebanyak 12.210, yang terdiri dari 4710 judul dan 7500 eksemplar.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 sebanyak 1.180 orang, dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 334 orang. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2023 mencapai 4220 namun jumlah anggota meningkat mencapai 2520 orang. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kunjungan dan jumlah anggota perpustakaan. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakan kabupaten sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88.
Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan

NO	Tahun	2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Anggota Perpustakaan	334	110	498	490	2520
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	1.180	429	1.677	1.365	4220
3	Jumlah Perpustakaan desa mitra Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)	0	0	0	0	8
4	Jumlah Perpustakaan khusus	0	0	0	0	7
5	Jumlah Perpustakaan perguruan tinggi	0	0	0	0	1
6	Jumlah Perpustakaan sekolah	100	105	110	144	144
7	Jumlah koleksi buku pustaka umum	5.250	5.500	8.350	12.210	12.210

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

Jumlah pengunjung perpustakaan juga mengalami variasi serupa dengan jumlah anggota. Penurunan tajam pada tahun 2020 (1,180 ke 429) kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun, jumlah pengunjung meningkat kembali pada tahun 2021 (1,677) dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 (4,220), menunjukkan pemulihan dan mungkin juga peningkatan aktivitas perpustakaan.

Pada tahun 2023, terdapat 8 perpustakaan desa mitra TPBIS yang merupakan salah satu program Perpustakaan Nasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya baru untuk mengembangkan perpustakaan di desa-desa dengan fokus pada inklusi sosial, yang sebelumnya tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, terdapat 7 perpustakaan khusus. Sama seperti TPBIS, ini merupakan perkembangan baru dan mencerminkan diversifikasi jenis perpustakaan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

Pada tahun 2023, terdapat 1 perpustakaan perguruan tinggi. Penambahan ini menunjukkan adanya peningkatan fasilitas pendidikan tinggi di daerah tersebut.

Jumlah perpustakaan sekolah mengalami peningkatan bertahap dari 100 pada tahun 2019 menjadi 144 pada tahun 2022 dan stabil pada tahun 2023. Hal ini

menunjukkan perhatian yang terus meningkat terhadap penyediaan fasilitas perpustakaan di sekolah-sekolah.

Jumlah koleksi buku pustaka umum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 5,250 pada tahun 2019 menjadi 12,210 pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk memperkaya koleksi buku di perpustakaan umum, yang dapat meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek perpustakaan daerah Kabupaten Pidie Jaya. Meskipun ada penurunan yang signifikan pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat pandemi, berbagai indikator menunjukkan pemulihan dan peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan, termasuk pengembangan perpustakaan desa mitra TPBIS, perpustakaan khusus, dan peningkatan koleksi buku, berkontribusi pada peningkatan jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan. Penambahan perpustakaan perguruan tinggi juga menunjukkan perkembangan positif dalam fasilitas pendidikan tinggi di daerah tersebut.

2.4.1.2.18 Kearsipan

Bidang kearsipan baru hanya melakukan kegiatan pembinaan kearsipan dalam bentuk workshop atau sosialisasi dan belum pernah melakukan kegiatan pengawasan arsip/ audit kearsipan sehingga capaiannya belum bisa diukur atau dicatat. Kondisi saat ini petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Kelautan dan Perikanan

Tidak semua kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dari 8 Kecamatan yang memiliki areal tambak. Kecamatan tersebut yaitu kecamatan Bandar Dua yang tidak memiliki areal tambak dan areal budidaya ikan air payau, sedangkan 7 kecamatan lainnya secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sektor kelautan juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah, perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ini ditunjukkan oleh dua sub-sektor perikanan yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie Jaya memainkan peran vital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. DKP terbagi dalam dua bidang utama, yaitu bidang Perikanan Budidaya dan bidang Perikanan Tangkap. Kedua bidang ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan.

Bidang Perikanan Budidaya berfokus pada pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya. Melalui berbagai program dan kegiatan, bidang ini memberikan dukungan teknis dan finansial kepada para petani ikan untuk mengoptimalkan produksi budidaya mereka. Program-program ini mencakup pelatihan teknis dalam metode budidaya yang efisien dan berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti kolam budidaya dan pakan ikan. Bidang ini juga bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pendidikan untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam budidaya perikanan.

Sementara itu, bidang Perikanan Tangkap bertugas mengelola dan mengawasi aktivitas penangkapan ikan di perairan Kabupaten Pidie Jaya. Bidang ini memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk menghindari overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Melalui program pemberdayaan, nelayan diberikan pelatihan dalam teknik penangkapan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, bidang ini juga berupaya meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengolahan yang memadai, seperti tempat pelelangan ikan dan cold storage.

Kedua bidang ini menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya. Bidang Perikanan Budidaya harus mengatasi masalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta memastikan bahwa budidaya perikanan dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, bidang Perikanan Tangkap harus menangani isu overfishing dan perubahan iklim yang berdampak pada hasil tangkapan. Meskipun demikian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka melalui berbagai inovasi dan program yang berdampak positif bagi masyarakat pesisir.

1. Perikanan Budidaya

Berdasarkan data, luas area perikanan budidaya air payau (tambak) dan air tawar (kolam biasa) masing-masing mencapai 2.043,23 ha dan 58,73 ha pada tahun 2022. Adapun jenis perikanan budidaya adalah bandeng, udang, kakap, lele, nila, bawal, dan lain-lain. Luas lahan tambak yang difungsikan masyarakat baru mencapai

75,34 persen, artinya masih besar sekali potensi yang belum dimanfaatkan, salah satunya ada potensi yang dapat diusahakan seperti budidaya rumput laut jenis glasilaria.sp yang dapat di budidayakan pada tambak-tambak masyarakat yang terbengkalai. Apabila diolah dengan baik tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani tambak. Untuk kondisi laut di Kabupaten Pidie Jaya sendiri tidak memungkinkan untuk budidaya rumput laut disebabkan tidak terdapatnya daerah yang arus lautnya tenang.

Data Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.89 berikut:

Tabel 2.89.
Luas Area Tambak dan Petani Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Area Produktif (Ha)	Persentase Pemakaian lahan (%)	Jumlah Petambak (KK)
1	Bandar Baru	22.049,70	1.197,06	804,67	70,84	1.137,00
2	Panteraja	1.499,61	115,35	110,07	95,42	130,00
3	Trienggadeng	7.936,75	276,68	259,52	93,80	444,00
4	Meureudu	12.479,30	137,00	124,00	90,51	268,00
5	Meurah Dua	28,706,50	83,35	83,35	100,00	96,00
6	Ulim	4.175,16	312,3	250,65	80,26	410,00
7	Bandar Dua	17.432,20	-	-	-	-
8	Jangka Buya	934,77	171,15	133,00	77,71	240,00
	Jumlah	**95.211,99**	**2.292,89**	**1.765,89**	**77,02**	**2.725,00**

Sumber : DKP Pidie Jaya Tahun 2024

Data luas area tambak di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 menunjukkan potensi besar dalam budidaya perikanan. Dari total luas lahan tambak sebesar 2.292,89 hektar, terdapat 1.765,89 hektar area produktif dengan persentase pemakaian lahan sebesar 77,02%. Kecamatan Bandar Baru memiliki luas tambak terbesar, yaitu 1.197,06 hektar, dengan 804,67 hektar area produktif dan 1.137 kepala keluarga (KK) yang bekerja sebagai petambak. Di sisi lain, Kecamatan Meurah Dua, meskipun memiliki luas tambak terkecil sebesar 83,35 hektar, berhasil memanfaatkan seluruh lahannya secara produktif dengan efisiensi tinggi.

Beberapa kecamatan seperti Panteraja dan Trienggadeng menunjukkan tingkat pemakaian lahan yang tinggi, masing-masing sebesar 95,42% dan 93,80%, mencerminkan efektivitas pemanfaatan lahan tambak yang optimal. Secara keseluruhan, dengan peningkatan teknologi, pelatihan bagi petambak, dan pengembangan infrastruktur, sektor budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

dapat lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kontribusi ekonomi daerah

Tabel 2.90.
Rekapitulasi Data Produksi Budidaya Perikanan
Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Hasil Produksi (Ton)						Jumlah (Ton)
		Udang Vanname	Udang Windu	Bandeng	Kakap	Nila	Lele	
1	Bandar Baru	2.698,62	38,50	1.132,20	0,00	350,00	250,21	4.472,56
2	Panteraja	574,45	2,50	184,00	0,00	41,00	87,15	889,10
3	Trienggadeng	1.400,68	21,50	695,45	18,50	55,00	72,54	2.263,67
4	Meureudu	767,24	7,00	398,00	0,00	39,00	83,25	1.294,49
5	Meurah Dua	543,30	6,00	350,00	0,00	35,00	97,22	1.031,52
6	Ulim	1.146,50	18,50	511,65	3,50	94,00	103,41	1.877,56
7	Jangka Buya	940,00	18,50	420,00	141,00	79,10	78,39	1.557,39
8	Bandar Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	543,53	648,53
Jumlah		**8.070,79**	**110,50**	**3.691,30**	**163,00**	**798,13**	**1.318,70**	**14.052,82**

Sumber : DKP Pidie Jaya Tahun 2024

Tabel 2.90 menjelaskan data produksi budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 menunjukkan total produksi sebesar 14.361,50 ton, dengan kontribusi dari berbagai jenis ikan dan udang. Kecamatan Bandar Baru mencatat hasil produksi tertinggi dengan total 3.710 ton, yang didominasi oleh produksi udang vaname dan bandeng. Kecamatan Ulim dan Jangka Buya juga menunjukkan hasil yang signifikan, masing-masing sebesar 2.353 ton dan 1.955 ton. Produk utama di kecamatan-kecamatan ini adalah udang vanname, bandeng, dan nila, yang mencerminkan diversifikasi produksi budidaya perikanan di wilayah tersebut.

Beberapa kecamatan seperti Panteraja dan Meurah Dua, meskipun memiliki luas area tambak yang lebih kecil, mampu menghasilkan produksi yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 1.176 ton dan 1.605,10 ton. Kecamatan Bandar Dua menghasilkan 330 ton dengan fokus pada produksi ikan nila dan lele. Data ini menunjukkan potensi besar dalam budidaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan variasi produk yang luas dan distribusi produksi yang merata di berbagai kecamatan. DKP sedang berupaya untuk peningkatan teknologi, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah ini.

2. Perikanan Tangkap

Geografis Kabupaten Pidie Jaya yang umumnya adalah perbukitan dan pesisir maka penduduknya umumnya bermata pencarian pertanian dan perikanan ataupun nelayan tangkap. Sekitar 2.764 orang penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Paling dominan terdapat di kecamatan Panteraja dan Meureudu. Sedangkan untuk kecamatan Bandar Dua dimana masyarakatnya lebih banyak menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian dan perkebunan, serta perdagangan. Tidak ada masyarakat yang menginvestasikan modal pada sektor perikanan tangkap. Hal ini disebabkan karena letak geografis kecamatan Bandar Dua yang tidak memiliki wilayah laut. Sehingga sektor perikanan dan kelautan merupakan faktor penting dalam penyumbang PDRB

Tabel 2.91.
Jumlah Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Kategori Nelayan	Tahun				
(Orang)	**2019***	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Nelayan Tetap	2.004	2.114	2.112	2.215	3.219
Nelayan Sambilan	549	487	481	549	1.844
TOTAL	**2.553**	**2.601**	**2.593**	**2.764**	**5.063**

*Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya umumnya adalah nelayan tradisional. Peralatan yang digunakan umumnya masih menggunakan peralatan sederhana seperti pukat cicin, pancing, jaring insang, dan perangkap. Sedangkan untuk boat dan kapal, nelayan menggunakan kapal motor yang memiliki kapasitas mesin < 5 GT. Sebagiannya lagi masih menggunakan perahu biasa. Kurang dari 10 wirausahawan yang memiliki kapal motor dengan kapasitas mesin 30-50 GT. Dan kurang dari 7 wirausahawan yang memiliki kapal motor dengan kapasitas mesin 50-100 GT.

Jumlah Armada yang ada di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 701 Armada, Meureudu merupakan Kecamatan yang paling banyak memiliki Armada Laut sebanyak 128 armada, kemudian di ikuti oleh Kecamatan Jangka Buya sebanyak 127 armada, kemudian yang paling sedikit adalah kecamatan Bandar Baru sebanyak 58 armada. Sedangkan jumlah alat tangkap perikanan pada Tahun 2022 mencapai 678 alat tangkap.

Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya antara lain ikan tuna, tongkol, teri, dan lain-lain. Ikan tuna merupakan produk unggulan di Kabupaten Pidie Jaya yang berukuran sangat besar, sehingga banyak pengusaha ikan dari Sumatera Utara datang dan membeli langsung ke nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Pidie

Jaya. Hasil perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 16.631 ton pada tahun 2022, antara lain jenis ikan tuna sebesar 1.520 ton, jenis ikan tongkol 3.425 ton, jenis ikan teri 604 ton, jenis ikan Cakalang 7.339 ton, jenis ikan Dencis 726 ton, jenis ikan kembung 808 ton serta jenis ikan lainnya sebesar 70 ton.

Kebutuhan ikan untuk rata-rata penduduk Kabupaten Pidie Jaya mencapai 10.661,1 ton/tahun. Sedangkan jumlah produksi ikan tangkapan dan tambak air payau setahun sebanyak 29.138,1 ton, artinya peluang ekspor sangat memungkinkan. Untuk itu perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya dan peningkatan SDM masyarakat nelayan.

Jumlah alat perikanan tangkap Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.92 sebagai berikut:

Tabel 2.92.
Jumlah Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah	Pukat Cincin	Jaring Insang		Pancing		Perangkap	
				Jaring Insang Hanyut	Jaring Tiga Lapis	Pancing Rawai Tetap	Pancing Tonda	Jermal	Pukat Pantai
1	Bandar Baru	58	0	0	25	33	0	0	0
2	Panteraja	160	29	0	74	0	30	15	12
3	Trienggadeng	64	0	29	4	24	5	0	0
4	Meureudu	132	19	2	4	45	61	0	0
5	Meurah Dua	111	8	51	0	0	52	0	0
6	Ulim	71	1	45	0	20	0	0	0
7	Jangka Buya	97	19	45	0	30	0	0	0
8	Bandar Dua	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**693**	**76**	**172**	**107**	**152**	**148**	**15**	**12**

Sumber: DKP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Sub-sektor perikanan tangkap, wilayah perikanannya mencapai daerah zona ekonomi ekslusif. Adapun jenis-jenis perikanan tangkap adalah Tuna, Tongkol, Kembung, Tenggiri, Cakalang, Dencis, Teri, Kuwe, Turisi, Peperek, dan Layur. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 16.631 ton pertahun, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 14.355 ton.

Jika dilihat dari berbagai jenis perikanan tangkap tahun 2022, produksi terbesar berada pada ikan Tongkol. Produksi Tongkol, Tuna dan Cakalang rata-rata dapat mencapai ± 3.000 ton per tahun. Ikan tersebut mudah ditemukan di laut atau perairan Pidie Jaya atau Aceh pada umumnya. Sedangkan untuk ikan lainnya rata-

rata pertahunnya hanya mencapai sebesar ±1.000 ton per tahun. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93.
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

NO	KOMODITAS	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Teri	2.237	2.237	1.893	567,82	600,95
2	Dencis	2.857	2.857	2.359	726	726
3	Tongkol	3.313	3.313	3.024	2.134,41	4.043,89
4	Peperek	115	115	116	272,61	270,29
5	Tuna	1.655	1.655	1.628	3.159,82	5.120,66
6	Kerapu	-	-	11	-	-
7	Cakalang	1.835	1.835	1.661	2.152,87	2.278,44
8	Tenggiri	532	532	392	46,47	50,01
9	Layur	-	-	200	-	-
10	Kurisi	81	81	77	-	-
11	Kuwe	142	142	146	199,17	220,44
12	Kembung	839	839	610	572,66	577
13	Lamadang	-	-	-	451,37	450,13
14	Kakap Merah	83	83	84	77,81	80.11
15	Udang	145	145	253	5,30	10,66
16	Selar	768	768	595	188,06	200,22
17	Layang	645	645	571	443,67	454,31
18	Lisong	-	-	-	-	-
19	Lemuru	-	-	206	-	-
20	Layaran	-	-	125	101,37	111,18
21	Lain-lain	560	560	404	3.166,59	622,14
TOTAL		**15.807**	**15.807**	**14.355**	**14.266**	**15.092**

*Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya sesuai tabel 2.93 dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam berbagai komoditas. Produksi total pada tahun 2023 mencapai 15.092 ton, mendekati jumlah produksi tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 15.807 ton. Beberapa komoditas mengalami peningkatan produksi yang mencolok, seperti tuna yang meningkat dari 1.655 ton pada 2019 menjadi 5.120,66 ton pada 2023, dan tongkol yang naik dari 3.313 ton pada 2019 menjadi 4.043,89 ton pada 2023. Sebaliknya, beberapa komoditas mengalami penurunan produksi, seperti teri dan dencis. Produksi teri menurun drastis dari 2.237 ton pada 2019 menjadi hanya 600,95 ton pada 2023. Komoditas lainnya seperti udang dan layur menunjukkan variabilitas yang tinggi dengan beberapa tahun tanpa produksi yang tercatat. Secara

keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam produksi per komoditas, total produksi menunjukkan ketahanan yang relatif stabil selama lima tahun terakhir.

Panglima Laot di Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga adat yang sangat penting dalam mengatur tata kelola perikanan tradisional dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Lembaga ini mengatur jadwal melaut, menetapkan aturan penangkapan ikan, dan mengawasi pelaksanaan hukum adat yang berkaitan dengan kelautan. Misalnya, Panglima Laot dapat menetapkan larangan penangkapan ikan di kawasan tertentu untuk menjaga ekosistem laut dan mencegah overfishing. Keberadaan Panglima Laot membantu memastikan bahwa sumber daya laut dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tabel 2.94.
Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

NO	PANGLIMA LAOT KABUPATEN/ KECAMATAN	JUMLAH		KET
		KETUA	SEKRETARIS	
1	PANGLIMA LAOT KABUPATEN	1 Org	1 Org	
2	PANGLIMA LAOT LHOK BANDAR BARU	1 Org	1 Org	
3	PANGLIMA LAOT LHOK PANTERAJA	1 Org	1 Org	
4	PANGLIMA LAOT LHOK TRIENGGADENG	1 Org	1 Org	
5	PANGLIMA LAOT LHOK MEUREUDU	2 Org	2 Org	2 Lokasi
6	PANGLIMA LAOT LHOK MEURAH DUA	1 Org	1 Org	
7	PANGLIMA LAOT LHOK ULIM	1 Org	1 Org	
8	PANGLIMA LAOT LHOK JANGKA BUYA	1 Org	1 Org	
JUMLAH		**10 Org**	**10 Org**	

Sumber: DKP Kab. Pidie Jaya Tahun 2024

Selain mengatur aspek teknis perikanan, Panglima Laot juga berperan dalam menjaga harmoni dan menyelesaikan sengketa antar nelayan. Sebagai mediator yang dihormati, mereka menyelesaikan konflik berdasarkan hukum adat yang diterima oleh semua pihak. Panglima Laot sering berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi untuk mendukung program-program kelautan dan perikanan, termasuk pelatihan bagi nelayan dan konservasi laut. Dengan demikian, Panglima Laot di Pidie Jaya menjadi penghubung penting antara tradisi adat dan modernisasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan

2.4.2.2 Pariwisata

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Objek Wisata Budaya terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, Sedangkan Kawasan Wisata Alam terdapat di Kecamatan Bandar Baru, Bandar Dua, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya. Sedangkan untuk Objek Wisata Buatan dikembangkan di Kecamatan Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Bandar Dua.dan Objek Wisata Khusus meliputi semua Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95.
Jenis dan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Pidie Jaya

No.	Objek Wisata Budaya	Kawasan Wisata Alam	Objek Wisata Buatan	Lokasi
1	Makam Tgk Abdullah Syafi'i Blang Sukon Cubo	Pantai Krueng Cubo	Bendung Irigasi Jim Jim	
2	Benteng Pertahanan Peninggalan Jepang Gampong tu	Pantai Pasi Panteraja	Embung uteun Pantang	
3	Mesjid Kuno di Gampong Mesjid Trienggadeng	Pantai Wisata Khutang	Embung Peulandok	
4	Makam Tgk Dipucok Krueng Beuracan	Pantai Kutaran Meunasah Balek	Irigasi Leubok dan Irigasi Beuracan	
5	Makam Tgk Japakeh Gampong Dayah Kruet	Krueng Batee Meuadee Lhok Sandeng	-	
6	Makam Tgk Malem Dagang Gampong Mens Kumbang	Pantai Pasi Geulanggang	-	
7	Makam Tgk Pante Geulima Gampong Beurandeh Alue	Air Terjun Pucok Krueng Ulim dan Batee Krueng Lhok Ugob	Bendung Irigasi Lhok Ugob	
8	-	Pantai Pasi Aron	-	

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya, 2024

Kabupaten Pidie Jaya memiliki banyak potensi pariwisata meliputi pariwisata pantai, pegunungan, sejarah, kebudayaan, serta wisata religi. Dari seluruh potensi tersebut, Pemerintah Daerah lebih mengarahkan pembangunan wisata kepada objek wisata pantai yang memiliki panorama yang indah seperti Pantai Wisata Islami (Kuthang) di Kecamatan Trienggadeng dan Pantai Meurah Seutia (Manohara) di Kecamatan Meureudu. Uniknya wisata pantai di Kabupaten Pidie Jaya khususnya di Pantai Kuthang, langsung berpapasan dengan jalan nasional yang tidak ditemukan pada daerah lain khususnya di Aceh wilayah timur, dan ini sangat potensial untuk dikembangkan khususnya untuk kuliner dan souvenir cirikhas Pidie Jaya yang

menarik untuk dipasarkan. Tabel berikut merupakan potensi objek wisata Kabupaten Pidie Jaya. Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata dapat dilihat pada Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96.
Potensi Objek Wisata Kabupaten Pidie Jaya dan Jarak Tempuh dari Kecamatan Kelokasi Wisata

No.	Kecamatan	Lokasi dan Objek Wisata	Jarak Tempuh dari Ibu Kota Kec. (Km)
1.	Meureudu	a. Air Terjun Meureudu b. Bendungan Beuracan c. Mesjid Guci Keuramat d. Sungai Bate Ie Blang Awe e. Benteng Sultan Iskandar Muda f. Pantai Kutaran (*Monohara*)	46 6 3 2,5 3 2,5
2.	Bandar Dua	a. Bukit Berbatu Ule Gle	58
3.	Ulim	a. Kuta Batee	50
4.	Trienggadeng/Panteraja	a. Pantai Wisata Islami (Kuthang)	35
5.	Bandar Baru	a. Bendungan Irigasi Cubo b. Pantai Lancang Paru Lueng Putu	21 7,7

Sumber: Qanun RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034

2.4.2.3 Pertanian

Sektor pertanian masih mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya, maskipun dari tahun ke tahun kontribusi sektor ini terus terjadi penurunan yang diakibatkan oleh peralihan ke sektor industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Kontribusi dari tahun 2019-2023 masing-masing adalah 45,44 (2019); 46,99 (2020); 46,05 (2021); 46,46 (2022) dan 46,53 pada tahun 2023.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya. Pola ruang yang ditetapkan bahwa kawasan budidaya terdiri dari: a). Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 4.865,11 Ha; b). Kawasan hutan rakyat seluas 1.225,39 Ha; c). Kawasan hutan pendidikan seluas 150,21 Ha; d). Kawasan peruntukan pertanian yang dibagi dalam pertanian 1). Lahan basah seluas 7.739,21 Ha, 2). Pertanian kering seluas 365,56 Ha, 3). Kawasan hortikultura seluas 2.331,69 Ha, 4). Lahan perkebunan 17.004,26 Ha, 5). Lahan kritis seluas 201,86 Ha, 6). Kawasan peternakan seluas 1.271,55 Ha; e). Kawasan peruntukan perikanan seluas

1.686,72 Ha dan f). Lahan penggunaan lainnya. Luas Baku Lahan Sawah di Pidie Jaya Tahun 2019-2023 secara rinci di sajikan pada Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97.
Luas Baku Lahan Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah (Ha)				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Bandar Baru	1.663	1.872	1.872	1.872	1.872
2	Panteraja	311	235	235	235	229
3	Trienggadeng	1.276	1.384	1.384	1.384	1.384
4	Meureudu	1.145	1.265	1.265	1.265	1.265
5	Meurah Dua	481	595	595	595	595
6	Ulim	754	785	785	785	785
7	Jangka Buya	625	501	501	501	501
8	Bandar Dua	2.518	2.187	2.187	2.187	2.187
Total		**8.773**	**8.824**	**8.824**	**8.824**	**8.818**

*Sumber: Distanpangan Kabupaten Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

Secara umum luas lahan sawah di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dikarenakan adanya pembangunan dan alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian yang merupakan konsekuensi dari perkembangan Kabupaten Pidie Jaya terutama di pusat ibu kota Meureudu dan sepanjang jalan Nasional, namun untuk mengantisipasi alih fungsi lahan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Qanun Nomor 1 tahun 2021 tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Luas lahan sawah mengalami peningkatan pada beberapa kecamatan terutama pada tahun 2018 dan 2019, salah satunya kecamatan Bandar Baru yang bertambah di Gampong Blang Sukon dan Sarah Payang dan untuk Kecamatan Trienggadeng bertambah karena penyesuaian tapal batas kecamatan dengan Kecamatan Panteraja.

Perkembangan kontribusi ini sangat dipengaruhi oleh produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk menghitung produksi salah satu komoditi dalam satu wilayah dibutuhkan luasan tanam, luasan panen, produktivitas tiap kali panen dan jumlah kali panen dalam satu tahun, tabel dibawah menggambarkan luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.98 berikut.

Tabel 2.98.
Luas Tanam dan Luas Panen Komoditi Pangan di Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)					Luas Panen (Ha)				
		Padi	Jagung	Kedelai	Cabai Merah	Bawang Merah	Padi	Jagung	Kedelai	Cabai Merah	Bawang Merah
1	2019	16.657	2.122	40	131	24	16.654	2.149	3	127	19
2	2020	17.641	1.411	7	114	47	17.641	1.795	12	141	33
3	2021	16.285	2.041	38	148	34	16.285	1.903	34	138	42
4	2022	13.751	1.767	137	160	26	13.832	1.952	138	175	21
5	2023	12.317	1.639	398	169	30	11.802	1.605	410	170	38

Sumber: Dinas Pertanian & Pangan Kabupaten Pidie Jaya, 2024

Beberapa upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya guna tercapainya tingkat produktivitas maksimal setiap komoditi unggulan pada sektor pertanian dan pangan diantaranya adalah sebagai berikut: 1)Peningkatan indeks tanam melalui optimalisasi penggunaan lahan dan penyediaan agro input; 2)Peningkatan luas tanam (termasuk integrasi dengan tanaman perkebunan) dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia; 3)Perbaikan sarana dan prasarana penunjang (termasuk ketersediaan bibit unggul dan pupuk); 4)Peningkatan Fungsi Penyuluhan pertanian; 5) Peningkatan pengkajian teknologi pertanian dan pengembangan bibit unggul serta kajian pengolahan hasilnya.

B. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Setiap tahun sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya, tahun 2023 mencapai 46,53%. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 21.668 jiwa atau 13,47% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu pembangunan selalu di arahkan kepada sektor ini dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekonomi mereka.

Keunggulan utama sektor pertanian Kabupaten Pidie Jaya adalah komoditi padi sawah. Komoditi padi sawah memiliki lahan seluas 8.818 Ha dengan potensi dua kali tanam dalam setahun, pada musim rendeng dan musim gadu dengan total luas panen mencapai 12.317 Ha. Adapun jumlah produktivitas Padi mencapai 6,76 ton/ha/tahun.

Tabel 2.99.
Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Pidie Jaya	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Padi (ton)	97.455	110.579	98.228	94.512	79.144
2	Jagung (ton)	10.995	11.596	11.425	12.288	12.199
3	Kedelai (ton)	3,65	15,80	43,3	288	1.004
4	Cabai Merah (ton)	841	1.050	863	1.225	1.902
5	Bawang Merah (ton)	166	518	309	157	489

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tabel 2.99 menggambarkan bahwa selama periode 2019 hingga 2023, produksi pertanian di Pidie Jaya mengalami fluktuasi. Produksi padi yang merupakan salah satu komoditas utama mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir karena luas tanam dan luas panen yang berkurang. Penurunan pada tahun 2021 dikarenakan program pemerintah pusat terkait Gerakan IP 300 (tanam 3 kali dalam setahun) tidak berlanjut di berikutanya (tahun 2021 dan 2022), dan pada tahun 2023 luas tanam menurun menjadi 12,317 Ha, sehingga produksi juga ikut menurun. Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2023 karena dua faktor utama, yaitu: 1) Anomali Iklim (kekeringan) yang mengakibatkan debit air irigasi sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk mengairi seluruh lahan sawah di kabupaten Pidie Jaya, 2) Kearifan lokal petani Kecamatan Trienggadeng dan panteraja yang melakukan istirahat tanah untuk mengembalikan unsur tanah (tidak melakukan penanaman padi sebagaimana biasanya).

Produksi jagung mengalami peningkatan yang signifikan dari 10.995 ton pada tahun 2019 menjadi 12.199 ton pada tahun 2023. Produksi kedelai cenderung mengalami peningkatan karena permintaan pasar dan minat petani. Komoditi Cabai merah dan Bawang merah merupakan komoditi unggulan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah, fluktuasi dalam produksi komoditi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, hama, penyakit tanaman, pengairan, teknik pertanian, dan perubahan permintaan pasar. Pemerintah dan petani setempat mungkin perlu melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik untuk mengoptimalkan produksi pertanian di masa mendatang.

C. Cakupan Bina Kelompok Tani

Selama lima tahun terakhir, Pidie Jaya telah aktif dalam pembinaan kelompok tani untuk mendukung sektor pertanian yang terdiri dari kelompok tani dewasa, pemuda tani, wanita tani, tani kebun, tani ternak, tani tambak dan penangkar. Pada tahun 2019, terdapat 1.520 kelompok tani yang dibina, dan jumlah ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 1.605 pada tahun 2020, 1.608 pada tahun 2021, namun jumlah kelompok tani yang dibina mengalami penurunan pada tahun 2022 karena banyaknya kelompok tani yang tidak aktif dan jumlahnya kembali sedikit bertambah pada tahun 2023.

Tabel 2.100.
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Pidie Jaya	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)	1.520	1.605	1.608	1.561	1.566
2	Jumlah kelompok tani (kelompok)	1.520	1.605	1.608	1.561	1.566
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dalam konteks persentase, yang melihat perbandingan jumlah kelompok tani dengan jumlah kelompok tani yang dibina, persentase yang diperoleh adalah 100%, karena jumlah kelompok tani yang ada semuanya dilakukan pembinaan. Data ini memberikan gambaran tentang perkembangan dan konsistensi program pembinaan kelompok tani di Pidie Jaya selama lima tahun terakhir, dengan beberapa fluktuasi dalam jumlah kelompok tani yang dibina dan jumlah kelompok tani yang ada.

D. Perkebunan

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditi perkebunan Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2019-2023 diuraikan pada Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.101.
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Kelapa		Kakao		Karet		Pinang		Kelapa Sawit	
	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2019	2.491,4	883	6.990,4	800	3,4	685	620,8	479	3,6	2.380
2020	2.498,7	884	7.028,1	801	3,4	685	632	481	3,6	2.380
2021	2.519,6	883	6.999,2	800	3,4	680	638,9	479	3,6	2.380
2022	2.513,3	883	5.527,2	800	3,4	680	642,3	479	3,6	2.380
2023	2.670,2	883	5.628,2	800	3,4	680	639,4	479	3,6	2.380

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan data produksi dan produktivitas untuk komoditi tanaman perkebunan (Kelapa, Kakao, Karet, Pinang dan Kelapa Sawit) di Pidie Jaya selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023. Data produksi dan produktivitas komoditi tanaman perkebunan di Pidie Jaya selama lima tahun terakhir mencerminkan perkembangan sektor perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya. Terjadi fluktuasi tahunan dalam produksi, seperti yang terlihat pada produksi kakao yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 dari 6.990,4 menjadi 5.628,2 ton di tahun 2023 dikarenakan tanaman kakao yang sudah tua yang perlu dilakukan peremajaan dan tanaman kakao juga sedang diserang hama peganggu tanaman yang perlu dilakukan pengendalian hama peganggu tanaman yang intesif, untuk komoditi lainnya seperti kelapa, karet, pinang dan Kelapa Sawit tetap relatif stabil selama periode tersebut

Luas Lahan Perkebunan bertambah akibat adanya perluasan (Land Clearing) untuk penanaman Sawit seluas 664 Ha semenjak Tahun 2021 untuk pengurangan Luas Lahan Perkebunan disebabkan oleh alih fungsi lahan dari Tanaman Kakao ketanaman perkebunan lainnya.

Bila adanya Penambahan/Pengurangan Kelompok Tani Perkebunan disebabkan karena kurangnya perawatan tanaman perkebunan sehingga tanaman menyebabkan terlantar, ini menyebabkan kurang luas lahan dan Kelompok Tani tidak aktif lagi.

Tanaman Kelapa Sawit di Kabupaten Pidie Jaya mulai di budidayakan semenjak Tahun 2021, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan sedangkan Lahan Tanaman Sawit sudah ditanami sejak Tahun 1995 diwilayah Kecamatan Bandar Baru, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Bandar Dua. Masyarakat

Tani lebih cenderung ke Tanaman Sawit karena tanaman Sawit bisa tumbuh tanpa perlakuan dan perawatan yang terlalu intensif.

Tanaman Karet di Pidie Jaya masih tidak ada penambahan luas lahan dan masih tetap luasanya, kalau ada penurunan luas pada tanaman karet, ini karena faktor alam (kekeringan) dan hama penyakit.

Sasaran prioritas dalam pembangunan perkebunan di Pidie Jaya untuk masa yang akan datang masih di fokuskan pada beberapa program antara lain: 1) pemeliharaan perkebunan rakyat yang sudah ada; 2) rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat; 3) penyediaan benih/bibit parsial; 4) Pembangunan perkebunan rakyat; 5) pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; 6) peningkatan sumber daya perkebunan; dan 7) membangun sarana dan prasarana yang mendukung perkebunan.

E. Peternakan

Perkembangan kontribusi Peternakan terhadap PDRB sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi ternak yang termasuk dalam kelompok ternak ruminansia besar seperti sapi tahun 2019 berjumlah 21.613 ekor meningkat sebanyak 237 ekor dibandingkan tahun 2018, kerbau tahun 2019 sebanyak 2.708 ekor, ternak ruminasia kecil seperti Kambing tahun 2019 berjumlah 19.985 ekor dan domba 3.550, hal ini juga gambaran bahwa perkembangan peternakan di Kabupaten Pidie Jaya mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan secara proporsional dalam bentuk usaha kelompok atau perseorangan sebagai usaha pokok, bukan lagi beternak itu sebagai usaha sampingan mengingat kebutuhan pasar daging sangat terbuka. Perkembangan populasi ternak dikabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102.
Jumlah Populasi Ternak Ruminansia Besar
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 - 2023

Tahun	Ternak Besar (ekor)		Ternak Kecil (ekor)		Unggas (ekor)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam	Itik
2019*	21.613	2.708	19.985	3.550	329.966	129.250
2020	21.810	2.716	20.105	3.580	337.744	129.541
2021	21.902	2.745	20.136	3.606	344.767	129.723
2022	19.670	2.119	20.810	3.983	348.745	138.617
2023	16.779	975	21.131	4.040	365.659	140.255

*Sumber: Disbunnak Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tabel diatas menunjukkan data populasi ternak di Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir, mulai tahun 2019 sampai 2023 yang terdiri dari populasi ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Populasi ternak besar, yang meliputi sapi dan kerbau, ternak sapi mengalami fluktuasi dalam jumlah ekor, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 16.779 ekor dari 19.670 ekor pada tahun 2022. Sementara itu, ternak kecil seperti kambing dan domba menunjukkan tren stabil, dengan jumlah yang hampir tetap dari tahun ke tahun, meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2023 menjadi 21.131 ekor. Populasi unggas, yang mencakup ayam dan itik, ternak ayam terus mengalami peningkatan perlahan selama periode tersebut, mencapai 365.659 ekor pada tahun 2023 dari 329.966 ekor pada tahun 2019, juga jumlah kandang ayam terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan kandang modern untuk ternak ruminansia sampai saat ini belum ada di Kabupaten Pidie Jaya karena masyarakatnya sampai saat ini masih memelihara ternaknya secara tradisional dan semi intensif.

Tabel 2.103.
Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Pidie Jaya	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Daging Ruminansia (kg)	171.294	283.662	321.133	301.193	298.930
2	Daging Ayam Potong (kg)	258.755	335.638	356.819	376.612	379.975
3	Telur (butir)	2.112.000	2.784.000	3.328.000	3.776.000	3.796.000

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tabel 2.103 menunjukkan data produksi hasil peternakan di Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir. Produksi daging ruminansia mengalami fluktuatif setiap tahunnya, mulai dari 171.294 kg pada tahun 2019 hingga mencapai 298.930 kg pada tahun 2023. Hal serupa terjadi pada produksi daging ayam potong, yang meningkat dari 258.755 kilogram pada tahun 2019 menjadi 379.975 kilogram pada tahun 2023. Sementara itu, produksi telur juga mengalami peningkatan, dengan jumlah butir telur melonjak dari 2.112.000 butir pada tahun 2019 menjadi 3.796.000 butir pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan produksi daging ternak ruminansia dan unggas di Pidie Jaya. Produksi ini akan terus ditingkatkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani yang terus meningkat dan tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Pidie Jaya. Pembangunan di bidang sub sektor peternakan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peternakan dikabupaten Pidie Jaya sebagaimana pada tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104.
Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Padang Penggembalaan		Jumlah Pos IB (Unit)	Jumlah PUSKESWAN (Unit)	Jumlah RPH (Unit)	Jumlah TPU (Unit)	Jumlah Pasar Ternak (Unit)		Jumlah Pasar Daging (Unit)	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)					Ternak Besar & Kecil	Unggas	Ternak Besar & Kecil	Unggas
2019*	700	-	2	4	1	-	1	-	-	-
2020	606.3	-	2	4	1	-	1	-	-	-
2021	605	-	2	4	1	-	1	-	-	-
2022	306	-	2	4	1	-	1	-	-	-
2023	209	-	2	4	1	-	1	-	-	-

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tabel diatas menunjukkan data sarana prasarana pendukung usaha peternakan di Pidie Jaya selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023. Untuk padang pengembalaan di Pidie Jaya memiliki luas sekitar 700 Ha pada tahun 2019, namun terus mengalami penurunan dengan luas padang pengembalaan pada tahun 2023 hanya 209 Ha ini terjadi karena adanya pengalihan lahan padang pengembalaan menjadi lahan perkebunan. Untuk jumlah pos IB, Pidie jaya hanya memiliki sebanyak 2 unit, jumlah Puskeswan sebanyak 4 unit, jumlah RPH sebanyak 1 unit, dan jumlah pasar ternak kategori ternak kecil sebanyak 1 unit.

Tabel 2.105.
Jumlah Kelompok Terak di Kabupaten Pidie Jaya

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK TERNAK	JUMLAH ANGOTA / ORANG
1	Bandar Baru	8 Kelompok	125
2	Panteraja	8 Kelompok	161
3	Trienggadeng	4 Kelompok	90
4	Meureudu	41 Kelompok	1,230
5	Ulim	14 Kelompok	257
6	Jangka Buya	12 Kelompok	195
7	Meurah Dua	20 Kelompok	481
8	Bandar Dua	6 Kelompok	102
	Jumlah	**113 Kelompok**	**2490**

Sumber : Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor 170 Tahun 2020 Tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan)

Tabel 2.105 menunjukkan data Kelompok Peternak Di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor 170 Tahun 2020 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan), terdapat total 113 kelompok ternak dengan jumlah anggota mencapai 2.490 orang. Kecamatan Meureudu memiliki jumlah kelompok ternak terbanyak, yaitu 41 kelompok dengan 1.230 anggota. Kecamatan lainnya juga memiliki sejumlah kelompok ternak yang aktif, seperti Kecamatan Ulim dengan 14 kelompok dan 257 anggota, serta Kecamatan Meurah Dua dengan 20 kelompok dan 481 anggota. Kecamatan Bandar Baru dan Panteraja masing-masing memiliki 8 kelompok ternak dengan anggota sebanyak 125 dan 161 orang. Di Kecamatan Jangka Buya terdapat 12 kelompok ternak dengan 195 anggota, sementara Kecamatan Bandar Dua memiliki 6 kelompok dengan 102 anggota. Kecamatan Trienggadeng memiliki 4 kelompok ternak dengan jumlah anggota sebanyak 90 orang. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan peternakan tersebar merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan jumlah anggota yang signifikan, mencerminkan pentingnya sektor peternakan dalam perekonomian dan mata pencaharian masyarakat.

Tabel 2.106.
Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Pidie Jaya	Tahun (Kasus)				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	3.794	4.519	4.636	5.492	9.034
2	Jumlah Kasus Penyakit Hewan	3.828	4.645	4.717	5.518	9.128

*Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Tabel 2.106 diatas menunjukkan data penanganan penyakit hewan di Kabupaten Pidie Jaya selama 5 tahun, mulai dari 2019-2023. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3.794 kasus pada tahun 2019 menjadi 9.034 kasus pada tahun 2023. Meskipun begitu, hal yang positif adalah bahwa pihak berwenang berhasil mengatasi dan menangani peningkatan ini dengan baik. Total jumlah kasus penyakit hewan juga mengalami kenaikan seiring waktu, mencapai 9.128 kasus pada tahun 2023. Ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan hewan dan perlunya upaya pencegahan serta penanganan yang lebih baik untuk menjaga populasi hewan yang sehat di Pidie Jaya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penertiban ternak melalui penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyuluhan tentang cara beternak yang baik dan

modern dimana ternak diupayakan selalu berada dikandang dan petani ternak harus menyuplai kebutuhan pakan dan nutrisi yang dibutuhkan ternak seperti *sistem cut and carry* bukan dengan cara konvensional seperti ternak dilepas bebas. Selain itu pemerintah juga mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan peternak dalam hal pemanfaatan limbah pertanian yang dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak diantaranya seperti fermentasi jerami, pemanfaatan kulit buah coklat. Pemanfaatan limbah ternak sendiri sebagai bioenergi seperti pembangunan biogas dan pelatihan pembuatan pupuk kandang.

Sedangkan untuk komoditi ternak unggas (Itik, Ayam Potong dan Petelur) merupakan komoditas penghasil daging dan telur yang sangat laku keras di pasaran lokall Saat ini belum banyak peternak atau investor yang bergerak dalam bidang budidaya ternak itik, ayam potong dan petelur yang dikelola secara modern/intensif. Meningkatnya permintaan daging itik, ayam potong dan telur ayam ras untuk keperluan rumah tangga dan restoran, menjadikan Kabupaten Pidie Jaya pengimpor daging ayam dan telur yang cukup besar.

2.4.2.4 Perdagangan

Sektor perdagangan saat ini terus berkembang, serta telah mampu menyerap tenaga kerja 9.242 orang dimana terdapat 3.143 pedagang baik besar dan kecil menurut skala kabupaten, artinya jumlah tenaga kerja tidak mengalami peningkatan dari tahun 2022 disebabkan dampak dari pandemi yang baru saja selesai sehingga tidak terjadi pertumbuhan industri-industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dimana kontribusinya mencapai 11,01% atau 304.723,4 (*dalam jutaan*) pada tahun 2023. Hal tersebut telah mengalami peningkatan sejak tahun 2014 pada sektor ini. Sektor perdagangan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sangat kita sayangkan pada saat ini banyak toko milik Pemerintah Daerah mengalami penutupan mencapai 70 unit dikarena dampak pendemi covide dan berkembangnya online shop digunakan sebagai usaha perdagangan dengan berbagai jenis usaha. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM terus berupaya untuk menghidupan kembali sektor ini dengan program pengembangan pasar dan pusat perdagangan antar kecamatan.

Tabel 2.107.
Data Sektor Perdagangan Per Kecamatan
dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Pasar Tradisonal	Pasar Lokal	Pertokoan/ Warung/ Kios	Jumlah Pedagang	Pertokoan Pemda
1.	Bandar Baru	2	-	570	675	-
2.	Panteraja	1	1	86	229	6
3.	Trienggadeng	1	2	350	411	8
4.	Meureudu	1	3	432	680	61
5.	Meurah Dua	1	1	161	205	34
6.	Ulim	1	1	163	176	46
7.	Jangka Buya	1	2	160	164	4
8.	Bandar Dua	2	2	550	603	41
	Jumlah	**10**	**12**	**2.472**	**3.143**	**200**

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Sektor perdagangan telah mampu menyerap tenaga kerja 9.242 orang dan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Pemerintah terus mengembangkan sektor ini dengan program pengembangan pasar dan pusat perdagangan antar kecamatan.

2.4.2.5 Perindustrian

Dari segi perindustrian, di Kabupaten Pidie Jaya terkenal dengan salah satu industri rumah tangga, yaitu pembuatan kue adee, seiring dengan waktu industri ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu di Kabupaten Pidie Jaya juga terdapat industri sepatu dan sandal dari kulit. Usaha ini merupakan usaha mandiri yang bertempat di Kecamatan Bandar Dua.Usaha tersebut terus berkembang di karenakan penggunaan bahan dan kualitas bahan yang tetap terjaga.

Industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri pengolahan kakao yang terdapat di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru. Pengolahan coklat ini diproduksi oleh salah satu koperasi yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya. Pabrik pengolahan kakao tersebut mampu mengolah kakao menjadi coklat batangan, aneka makanan coklat, dan aneka minuman coklat.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas : a). kawasan peruntukan industri besar; b). kawasan peruntukan industri menengah; c). kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga; dan d). kawasan peruntukan industri lainnya. Kawasan industri tersebut berlokasi di Kecamatan Panteraja di Gampong Reudeup, Gampong Peurade, Gampong Mesjid Panteraja, dan Gampong Lhok Puuk. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di semua Kecamatan dan Kawasan peruntukan industri lainnya meliputi kawasan industri perikanan terletak di Kecamatan Panteraja Gampong Mesjid Panteraja.

Kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, berupa tempat

pemusatan kegiatan industri dengan kriteria, yaitu ; a). Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri; b). Tersedia sumber bahan baku yang cukup; c). Adanya sistem pembuangan limbah; d). Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial; e). Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi atau yang berpotensi untuk pengembangan irigasi atau tidak terletak kawasan berfungsi lindung atau kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

Sektor riil lainnya yang berkembang di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri masyarakat seperti industri rumah tangga yang masuk dalam kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan terhadap industri tersebut setiap tahunnya. Industri kerajinan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah kelompok Anyaman Tikar Pandan. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.108 berikut.

Tabel 2.108.
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	
		Formal	Non Formal
1	Bandar Baru	77	131
2	Panteraja	21	36
3	Trienggadeng	49	82
4	Meureudu	43	74
5	Meurah Dua	29	49
6	Ulim	140	238
7	Jangka Buya	18	31
8	Bandar Dua	29	50
Jumlah Total		**406**	**691**

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Tabel diatas memperlihatkan jumlah unit usaha industri kecil formal dan non formal di Kabupaten Pidie Jaya. Unit usaha industri kecil formal paling banyak berada di Kecamatan ulim sebanyak 140 unit dan yang terendah berada di Kecamatan Jangka Buya yaitu sebanyak 18 Unit. Sedangkan untuk unit usaha industri non formal paling banyak juga berada di Kecamatan Ulim yaitu 238 unit dan paling rendah berada di Kecamatan Jangka Buya yaitu sebanyak 31 Unit. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa di Kabupaten Pidie Jaya unit usaha industri kecil non formal lebih banyak di bandingkan unit usaha industri kecil formal yaitu 691 unit berbanding dengan 406 Unit dan total unit usaha industri kecil di

Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 sebanyak 1.089 unit yang tersebar di 8 Kecamatan.

Bidang industri yang umumnya merupakan industri masyarakat, paling berkembang seperti industri rumah tangga yang meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok.

Industri lainnya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya adalah industri pengolahan kakao, salah satunya berada di di Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru. Pengolahan coklat ini di produksi oleh salah satu perusahaan swasta yang terdapat di Kabupaten Pidie jaya dan mampu mengolah kakao menjadi coklat batangan, aneka makana coklat dan aneka minuman coklat.

Selanjutnya juga ada pabrik pengolah coklat Pemerintah Kabupaten Pide Jaya sebagai sentra industri Coklat yang terletak di Gampong Paru Cot Kecamatan Bandar Baru. Sentra tersebut sementara ini difungsikan sebagai tempat edukasi pengolahan kakao, tempat produksi kuliner berbahan baku coklat dan tempat pelatihan pengembangan IKM Kabupaten Pidie Jaya.

Kawasan sentra industry coklat tersebut memiliki luas 2 Hektare tanah dan didalamnya terdapat beberapa bengunan yaitu ; pabrik pengolah coklat, gedung serbaguna, caffe, musalla, toilet dan beberapa bangunan kazebo. Terkait dengan kondisi pabrik pengolah coklat sekarang ini memiliki fasilitas berupa mesin produksi coklat batang dan permen coklat. Pabrik pengolah coklat tersebut belum mampu memproduksi coklat bubuk dikarnakan masih memiliki kekurangan mesin produksi seperti mesin penghancur bungkel coklat, mesin pembubuk dan mesin pres kemasan

2.4.2.6 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/ spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pidie Jaya, telah ditetapkan luas kawasan peruntukan transmigrasi kurang lebih 561,28 Ha meliputi: Kecamatan Bandar Baru seluas 105,21 Ha; Kecamatan Tringgadeng seluas 128,23 Ha; Kecamatan Meureudu seluas 129,64 Ha; Kecamatan Meurah Dua seluas 39,14 Ha; Kecamatan Ulim seluas 145,78 Ha; dan Kecamatan Bandar Dua seluas 13,28 Ha.

Transmigrasi Lokal di Kabupaten Pidie Jaya terletak di 6 lokasi yaitu Abah Lueng dan Panton Limeng di Kecamatan Bandar Baru, kemudian Gaharu dan Lhok gugop Kumba di Kecamatan Bandar Dua, kemudian Buloh di kecamatan Trienggadeng serta Lampoh lada di kecamatan Meureudu. Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.109 berikut.

Tabel 2.109.
Capaian Indikator Transmigrasi
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah SP binaan dan aktif	3	3	3	2	2
2	Jumlah SP Mandiri	3	3	3	4	4
3	Jumlah KK Mandiri	240	240	180	130	120

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*
**SP (Satuan Permukiman)*

2.4.3 Penunjang Urusan

2.4.3.1 Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Kabupaten Pidie Jaya. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut; pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah; pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA, APBK dan APBN; penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah dengan Qanun

RPJP Kabupaten Pidie Jaya telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035. Qanun ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 20 (dua puluh) tahun, menjadi acuan di dalam penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya dan pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, periodisasi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035 meskipun belum berakhir, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus Menyusun RPJPK yang baru mengikuti periodisasi RPJPN Tahun 2025-2045

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan visi dan misi RPJPK perlu didukung oleh :(1) komitmen dari kepemimpinan Kabupaten Pidie Jaya yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah kabupaten; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah dengan Qanun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pidie Jaya ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2019 - 2024 yang diundangkan pada tanggal 17 September 2020 dan dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi kepala Daerah terpilih.

Saat ini (2023), Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sedang Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Pidie Jaya akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya pada akhir tahun 2023.

C. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Jaya disusun setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten dan berpedoman pada Arah Kebijakan Tahunan dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan RKPK ini SKPK akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan Prioritas Palfon Anggara Sementara (PPAS) untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBK setiap tahunnya.

2.4.3.2 Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Indikator keuangan daerah Kabupaten Pidie Jaya kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu dapat dilihat pada Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110.
Indikator Keuangan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD (%)	9,70 %	3,33 %	2,90 %	4,53 %	1,08 %
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21,91 %	20,51 %	22,16 %	19,52	17,92
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	16,14 %	17,82 5	19,74 %	20,09 %	13,37
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu
	Tanggal	Qanun Nomor 8 tahun 2018, tanggal 21/12/2018	Qanun APBK Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019	Qanun Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 28/12/2020	Qanun Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 28/12/2021	Qanun Nomor 5 Tahun 2022

Sumber : BPKK Pidie Jaya Tahun 2024 (diolah)

A. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK melakukan pemeriksaan sistem pengendalian interin dan penyajian Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pendapat atau opini yang merupakan dambaan oleh semua Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara. Kabupaten Pidie Jaya untuk pertama sekali memperoleh WTP setelah pemekaran, yaitu pada tahun 2008 selanjutnya di tahun 2015 berturut-turut sampai tahun 2022. Hal tersebut menandakan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Pidie Jaya sudah dilakukan dengan baik.

B. SiLPA Daerah dan Alokasi Belanja Daerah

SiLPA merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Persentase

SiLPA terhadap APBD Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 5,33%. Persentase SiLPA terhadap APBD tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi tahun 2019 sebesar 9,70%, sedang persentase SiLPA terhadap APBD terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,90.

Besar kecilnya SiLPA meproyeksikan efektifitas dari perencanan yang tepat dan penyerapan anggaran yang optimal. Semakin besar SiLPA dapat mengindikasikan bahwa tidak optimalnya penganggaran dan penyerapan belanja Pemerintah Daerah. Secara umum SiLPA dapat terjadi dikarenakan, pendapatan yang melampaui target, penghematan belanja yang dilakukan untuk membiayai kebutuhan prioritas lainnya pada periode yang akan datang, kurang optimalnya target capain belanja daerah dan terakhir SiLPA dapat terjadi diakibatkan oleh melebihinya penerimaan pembiayaan

C. Persentase alokasi belanja Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Alokasi belanja sektor Pendidikan dan Kesehatan merupakan pemenuhan belanja wajib (mandatory Spanding) dalam APBD. Adapun besaran persentase belanja sektor Pendidikan dan Kesehatan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Belanja untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DBH,DAK, dan DID), Transfer Pemerintah Profinsi (Bagi Hasil Pajak Provinsi, DOKA), serta sumber lain yang dialokasi untuk belanja pada sektor pendidikan dan sektor kesahatan. Belanja pada sektor Pendidikan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, gaji guru, dana sertifikasi, tambahan penghasilan, BOP Paud, BOS dan lain-lain. Sedangkan Belanja pada Sektor Kesehatan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Kesehatan.

Alokasi belanja daerah untuk sektor pendidikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 telah mencapai persentase rata-rata 20% jika dibandingkan dengan total belanja APBD. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan dari 15,34% menjadi 21,19%, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 20,51% dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 22,16% . Kondisi pada tahun 2022 sebesar 19,52%

Untuk sektor kesehatan tetap adanya pembenahan pelayanan bidang kesehatan meski sudah mencapai diatas 10% dari rata-rata tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase belanja dibidang kesehatan mencapai 12,30%. Pada tahun

2019 meningkat menjadi 16,14 % dan terus meningkat pada tahun 2020 sejumlah 17,82%, begitu juga dengan tahun 2021 masih mengalami peningkatan sebesar 19,74% sampai tahun 2022 terus meningkat 20,09 %

2.4.3.3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Urusan kepegawaian merupakan unsur penunjang yang memiliki fungsi mengelola ASN dan erat kaitannya dengan beberapa aspek seperti manajemen kepegawaian, pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN, serta pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Salah satu kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018-2022 persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi pegawai. Jumlah ASN di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2022 sebanyak 3.340 orang. Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang profesional, bersih, berwibawa, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarakan data capaian indikator kinerja pada Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,5 % dan terendah pada tahun 2018 dan 2019 yaitu 01%. Hal ini menunjukan bahwa kurang lebih 85 % ASN yang ada di Kabupaten Pidie Jaya belum mengikuti pendidikan formal. Begitu pula dengan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tertinggi pada tahun 2020 yaitu 3,7 %. Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemberi layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan adalah efektifitas dan produktivitas kinerja aparatur, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pembinaan pegawai. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan guna mewujudkan penempatan jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai. Berikut Jumlah pegawai dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 seperti pada tabel 2.111 berikut.

Tabel 2.111.
Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN Kabupaten Pidie Jaya	3.137 Orang	3.220 Orang	3.191 Orang	3.340 Orang	3.540 Orang
2	Rata-rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	370 Orang	222 Orang	654 Orang	796 Orang	728 Orang
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 %	1,6 %	4,5 %	3,2 %	3,2 %
4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	0,5 %	3,7 %	1 %	5,2 %	8 %
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	25 Orang	27 Orang	32 Orang	34 Orang	33 Orang
6	Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah	134 Orang	133 Orang	145 Orang	151 Orang	147 Orang
7	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	1.854 Orang	1.962 Orang	1.949 Orang	2.056 Orang	2.219 Orang

*Sumber : BPKSDM Kab. Pidie Jaya, 2024 *(data awal)*

2.4.3.3.1 Indeks Pelayanan Publik

Penerapan Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Indeks Pelayanan Publik diukur berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

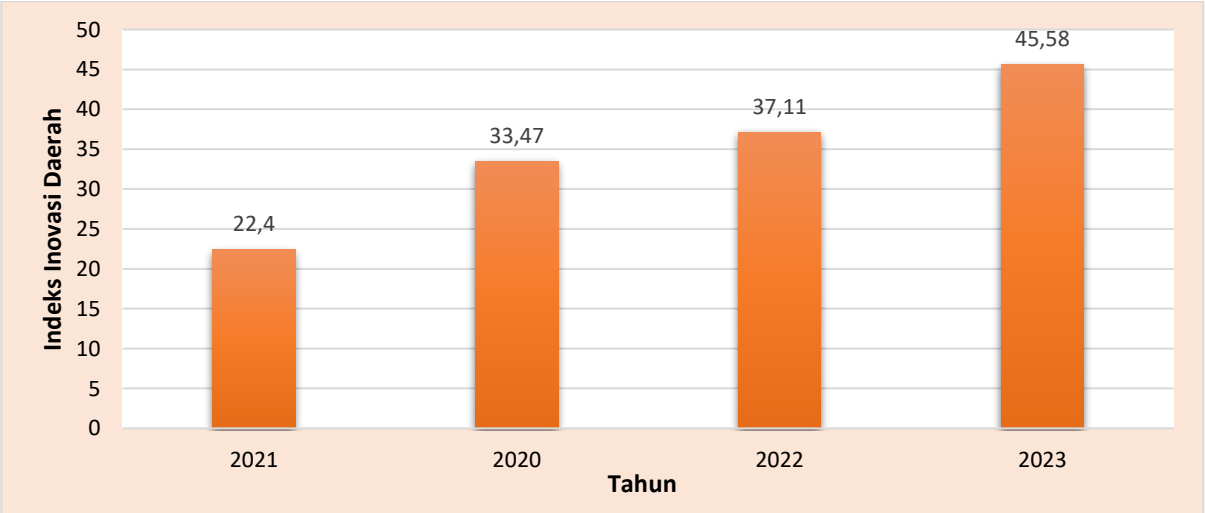
Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi 6 (enam) aspek, yaitu: 1) kebijakan pelayanan, 2) profesionalisme SDM, 3) sarana prasarana, 4) sistem informasi pelayanan publik, 5) konsultasi dan pengaduan, 6) inovasi pelayanan. Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator yang dikelompokan untuk mempermudah identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi.

Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 yang dirilis pada website KEMENPANRB sebesar 2,55 dengan Predikat Baik. Untuk meningkatkan IPP tahun yang akan datang, Pemkab Pidie Jaya dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada SKPK untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. IPP ini berperan penting dalam membangun Pemkab Pidie Jaya yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.4.3.4 Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di dalam suatu daerah yang tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang diperlukan. Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui website pemerintah. Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan inovasi yang diharuskan pemerintah pusat. Dalam hal inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengikuti *Innovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kemendagri dengan capaian pada tahun 2023 kategori inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2021 s.d. 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.46 berikut.



Sumber : IGA Kemendagri Tahun 2024 (data awal)

Gambar 2.46. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2021-2023

Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan penelitian untuk menghasilkan inovasi daearah di Kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya baik dengan cara bekerjasama dengan pihak Akademisi Kampus maupun dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memaksimalkan kegiatan penelitian di Kabupaten Pidie Jaya agar setiap kebijakan yang di jalankan lebih terukur dan efisien.

2.4.3.5 Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan daerah guna memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi. Gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan Internal, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya bertugas melakukan audit internal terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas, badan-badan, dan instansi lainnya. Inspektorat menilai apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan, serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Kinerja Inspektorat dinilai dari seberapa baik mereka mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan tindak lanjut atas temuan-temuan audit.
2. Pencegahan dan Penanganan Korupsi, Dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana korupsi, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integritas aparatur pemerintah. Mereka juga melakukan pemeriksaan khusus jika terdapat indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum. Kinerja Inspektorat dalam aspek ini dapat dilihat dari jumlah temuan korupsi yang berhasil diungkap, tindakan pencegahan yang diambil, serta efektivitas rekomendasi yang mereka berikan.
3. Pembinaan dan Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya juga bertugas memberikan pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, pelaporan keuangan, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, mereka memberikan saran untuk perbaikan sistem dan prosedur kerja yang lebih efisien dan akuntabel. Keberhasilan pembinaan

ini diukur dari tingkat kepatuhan SKPK terhadap rekomendasi Inspektorat dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

4. Tindak Lanjut dan Evaluasi, Kinerja Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya juga diukur dari efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan selama audit dan pemeriksaan. Ini mencakup sejauh mana rekomendasi diterapkan oleh instansi terkait dan dampak perbaikan yang terjadi setelahnya. Kinerja yang baik ditandai dengan tingginya tingkat penyelesaian temuan dan perbaikan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Kabupaten mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat yang berkinerja baik akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui pengawasan yang ketat dan pencegahan terhadap penyimpangan. Untuk tingkat kinerja pengawasan Inspektorat yang telah dilakukan untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.112.
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1.	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	2	2	2	2	3
2.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pendampingan (OPD, Puskesmas, Sekolah, Desa, Mandatory)	41	41	576	401	500
3.	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	3
4.	Persentase tidak lanjut temuan BPK	75,00	75,00	80,88	82,57	89.89

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari tabel 2.112 diatas untuk pencapaian level maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya masih berada pada level 3. Hal ini dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen dari Kepala daerah maupun pemerintah daerah untuk pencapaian SPIP (sistem pengendalian Intern Pemerintah), karena tanpa dukungan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah akan agak sulit mencapainya. Tugas Inspektorat terhadap peningkatan level maturitas SPIP terintegrasi ini hanya sebagai mediasi dan penjamin kualitas terhadap pelaksanaan SPIP suatu Pemerintah Daerah.

Untuk pendampingan yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah untuk setiap tahun mulai 2019-2023 mengalami beberapa perubahan disebabkan karena adanya perubahan regulasi terutama yang mempengaruhi SOTK suatu Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2019 terjadi penambahan OPD baru yakni Dinas Pertanahan. Untuk tahun 2020 berdasarkan

regulasi dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 telah terjadi beberapa penggabungan maupun peleburan SOTK di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk tahun 2022 pendampingan untuk perangkat daerah juga ditambah dengan BUMD yakni PDAM Tirta Krueng Meureudu. Selain pendampingan untuk perangkat daerah yang berjumlah 42 entitas. Inspektorat juga melakukan evaluasi, pendampingan, asistensi maupun monitoring untuk 222 Desa di Kabupaten Pidie Jaya, 125 Sekolah yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 11 Puskesmas dan juga reviu yang wajib dilaksankan dalam hal sebagai penjaminan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan usrusan pengawasan di kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum memadai (13 Auditor untuk tahun 2024)
2. Sarana dan Prasarana yang tidak cukup tersedia baik alat ukur maupun alat kerja lainnya.
3. Jumlah alokasi untuk pelatihan 120 jam sesuai Pedum belum adanya alokasi anggaran.
4. Anggaran Pengawasan yang belum memenuhi regulasi yang ditetapkan yakni 1% dari APBK (Pedum Penyusunan APBD 2024)
5. Banyaknya Jumlah Objek Pemeriksaan yang membutuhkan quality assurance dari Inspektorat dan risiko yang tinggi baik benturan kepentingan maupun benturan dengan instansi vertikal lain maupun Aparat Penegak Hukum (APH)

2.4.3.6 Sekretariat Daerah Kabupaten

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrastif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di sekretariat daerah dilihat pada Tabel 2.113 berikut.

Tabel 2.113.
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	SAKIP	CC	60.86 (B)	61.15 (B)	61.59(B)	62.42 (B)
2	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	46.77(C)	48.20(C)	50.03(CC)	51.45(CC)
3	Jumlah SKPK menerapkan RB	42	42	42	42	42
4	Nilai LPPD	3,2419 (tinggi)	2,9619 (baik)	2,39 (rendah)	1,7350 (sangat rendah)	belum ada penilaian
5	Jumlah Produk Hukum	46	61	71	57	58
6	TPID Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Indeks Pelayanan Publik	-	-	3.65	3.74	2.55
8	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	-	78.10	86.15

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

2.4.3.7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK) dan terintegrasi programprogram DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan. Sekretaris DPRK mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
2. Meyelenggarakan administrasi keuangan
3. Mendukung pelaksana tugas dan fungsi DPRK, dan
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.114.
Jumlah Qanun yang Disahkan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Qanun yang disahkan	5	7	5	6	7
2	Program Legislasi Kabupaten	11	11	10	12	12
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Beberapa permasalahan dalam menjalankan fungsi DPRK diantaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman bidang teknologi informasi yang berbasis kekinian dalam pelaksanaan kelancaran kinerja Sekretariat DPRK Pidie Jaya
2. Kurangnya ketersediaan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan pelaksanaan tugas DPRK Bidang dan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta dapat memenuhi kualitas kompetensi bidang teknologi informasi kekinian dengan memperhatikan keuangan daerah.
3. Penggunaan bahasa-bahasa non formal serta bahasa daerah oleh anggota DPRK Ketika rapat, sehingga risalah dan laporan yang disusun dan dihimpun oleh bagian Persidangan dan Risalah harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan kaidah-kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
4. Dalam Pelaksanaan tugas DPRK di bidang legislasi, khususnya terkait dengan program legislasi kabupaten baik usul inisiatif DPRK maupun usul Pemerintah Kabupaten belum dapat terealisasi sepenuhnya mengingat keterbatasan ploting anggaran dan tingginya intensitas kinerja DPRK di dalam dan di luar kantor.
5. Terkendalanya dalam perumusan ide kreatif untuk penyusunan usul inisiatif DPRK Pidie Jaya, dikarenakan kesiapan sumber daya manusia yang minim khususnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau *legal drafting* dari keilmuan sarjana hukum.
6. Kurangnya fasilitas infrastruktur peralatan kantor sebagai penunjang utama pelaksanaan kegiatan fasilitasi rapat-rapat DPRK sehingga berpengaruh kepada ketepatan waktu penyelesaian tugas yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

2.4.3.8 Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bandar Dua, Bandar Baru, Panteraja, Meurah Dua, Ulim, Meureudu, Jangka Buya dan Trienggadeng.

Pemerintahan kecamatan merupakan komponen penting dalam struktur administrasi pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya. Tugas utama kecamatan mencakup penyelenggaraan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan administrasi di tingkat kecamatan. Dengan perannya yang vital dalam menyediakan pelayanan publik di tingkat kecamatan, pemerintahan kecamatan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Kinerja kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.115 berikut.

Tabel 2.115.
Kinerja Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019- 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Urusan	6	6	6	6	6
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di kecamatan	Persen	78,24	80,29	82	83,26	85,12
3	Cakupan penyelenggaraan pemerintah umum	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pelaporan yang berbasis elektronik	Persen	100	100	100	100	100

*Sumber : Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan. Dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, OPD kecamatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai seksi dan staf yang fokus pada bidang-bidang tertentu, seperti pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, pelayanan umum, dan ketertiban. Struktur ini dirancang untuk memastikan semua aspek pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif di tingkat kecamatan.

Tugas utama OPD kecamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian kewenangan bupati di wilayah kecamatan.

Selain itu, OPD kecamatan juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, memantau pelaksanaan pembangunan, serta memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Fungsi-fungsi ini mencakup pelayanan administratif kepada masyarakat, pembinaan terhadap pemerintahan desa, serta pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, OPD kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK). Sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat di tingkat desa, OPD kecamatan memastikan implementasi program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Peran ini sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun, OPD kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta tantangan geografis dan sosial merupakan beberapa hambatan yang perlu diatasi. Di sisi lain, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki peluang besar untuk memberdayakan potensi lokal, seperti di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Hubungan yang baik antara OPD kecamatan dengan para stakeholder, termasuk pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah. Melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak, OPD kecamatan dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya

Enam urusan yang dilimpahkan kepada camat di tingkat kecamatan adalah:

1. Urusan Pemerintahan Umum: Camat melaksanakan tugas pemerintahan umum, seperti mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan, memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

2. Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan: Camat bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program desa.
3. Pelayanan Publik: Camat memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti pengurusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan berbagai surat keterangan. Camat juga memfasilitasi pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Camat memiliki peran dalam menjaga ketertiban umum dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum serta keamanan di wilayah kecamatan.
5. Pembangunan Daerah: Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati dalam bidang pembangunan daerah di tingkat kecamatan. Ini mencakup pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, serta sosial.
6. Pemberdayaan Masyarakat: Camat berperan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah kecamatan.

2.4.4 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.4.4.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Pelaksanaan Syariat Islam

Aceh memiliki tempat istimewa dalam kontalasi perjalanan sejarah Indonesia. Bukan karena sumbangannya yang yang tidak ternilai dalam perjuangan Nasional, tetapi juga karena karakteristik budaya dan masyarakatnya yang tergolong unik dan menarik perhatian banyak kalangan. Disamping itu Aceh telah diberikan hak Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan memberlakukan Syariat Islam di Aceh berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

Untuk menindaklanjuti kedua Undang-Undang diatas, dibentuklah peraturan-peraturan daerah atau Qanun di Aceh khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam dilapangan yakni Qanun no.11 tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentamg Khalwat (mesum). Dalam perkembangan selanjutnya perlakuan Syariat Islam tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Aceh. melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, diterbitkan payung hukum yang terbaru terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk qanun, yaitu: qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam dan qanun No.6 Tahun 2014 tentag Hukum Jinayah.

Gelegar pemberlakuaan Syariat Islam di Pidie Jaya dimulai sejak terbentuknya Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dan instansi otonom pada awalnya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Namun saat ini telah terbit Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dimana Dinas Syariat Islam mempunyai tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang keistimewaan dan kekhususan Pelaksanaan Syariat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Syariat Islam merupakan urusan keistimewaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang berfungsi pelayanan umum dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU-PA) pasal 125 dan pasal 127.

Pasal 125 UU-PA mengamanatkan:

1. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak
2. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya Pasal 127 UU-PA mengamanatkan :

1. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam.
2. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
3. Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.
4. Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang-undangan

Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam adalah dengan penerapan aturan Islam untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai aturan Islam dalam kehidupan beragama secara kesinambungan dan mensosialisasikan aturan islam tersebut pada kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Pidie Jaya ke depan.

Upaya untuk mendukung terwujudnya kabupaten yang Islami, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam menjadikan peningkatan dan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam sebagai prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syariat Islam. Selama tahun 2014 s/d saat ini, Dinas Syariat Kabupaten Pidie Jaya tetap melaksanakan pengajian rutin mingguan bagi masyarakat. Pengajian rutin mingguan ini dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat luas dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan keagaamaan. Hal ini dikarenakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Selain itu Pemerintah Kaubupaten Pidie Jaya melalui Dinas Syariat Islam juga melakukan pengajian, yaitu membaca Al-Quran berupa surat yasin pada ba'da shalat magrib yang diiringi dengan tausiah dengan mengunjungi mesjid-mesjid dan meunasah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Hal ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang Syariat Islam yang nantinya diharapkan akan timbul kekebalan dalam masyarakat terhadap hal-

hal yang negative (yang dilarang) oleh Syariat Islam. Oleh karena iur, masyarakat akan lebih tahu dan faham tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Materi- materi yang disampaikan berhubungan dengan tauhid, fiqah, tasawuf dan materi-materi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kepribadian islami masyarakat Kabupaten Pidie Jaya secara menyeluruh.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun syariat belum semuanya dipatuhi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah temuan kasus pelanggaran Syariat Islam. Umumnya jenis pelanggaran syariah yang dilakukan adalah Maisir dan khalwat. Meskipun di tahun 2023 temuan kasus berkurang hanya sampai di angka 6 kasus, dikarenakan tim yang diturunkan ke lapangan juga belum memadai disertai berbagai kendala. Penanganan semua kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dalam bentuk pembinaan, kecuali 3 pelanggar yang ditindak lanjutkan ke lidik/sidik sebagaimana tertera pada Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116.
Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus
2019*	8
2020	8
2021	8
2022	8
2023	6

*Sumber: Satpol PP dan WH Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari data diatas terlihat dari tahun ke tahun jumlah kasus terus menurun, namun bukan itu yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan syariat Islam disatu daerah, yang harus diperhatikan tingkat pemahanan masyarakat dalam kehidupan sehari hari, artinya pemerintah tidak berhenti dengan sedikitnya kasus pelanggaran syariat yang terjadi, pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka membina masyarakat untuk memahami syariat Islam.

B. Pengembangan Syiar Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam tidak hanya ibadah dan hukum, tetapi juga meliputi aspek ibadah, ahwal al-syahshiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam juga. Dinas Syariat Islam telah penguatan syiar Islam di Kabupaten Pidie Jaya seperti pelatihan manasik haji, perlombaan pestival anak shaleh,perlombaan zikir maulid,

safari ramadahan, Perlombaan MTQ, perlombaan kegiatan perayaan 1 muharram yang bekerjasama denga bagian kessos setdakab Pidie Jaya.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Pidie jaya akan berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui program pengkaderan dan pemberdayaan ulama, hasilnya diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah sehingga dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, untuk itu Pemerinta Kabupaten Pidie jaya akan bekerja sama dengan MPU Provinsi yang sudah menetapkan satu program Pendidikan Kader Ulama (PKU) sesuai dengan amanah Qanun nomor 2 Tahun 2009 merupakan tugas pokok Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Disamping itu, Pemerintah kabupaten Pidie Jaya juga turut mendukung usaha peningkatan peran ulama dalam mencari berbagai solusi permasalahan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga mendapat kejelasan hukum/fatwa syari'at baik yang berupa fatwa, taushiyah maupun himbauan/saran kepada masyarakat serta kepada instansi pemerintah berupa pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, disamping itu, MPU Kabupaten Pidie jaya juga ikut serta melaksanakan sosialisasi fatwa MPU Aceh kepada para ulama, unsur pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur wanita dan jajaran pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir disebagian besar Kab/Kota yang ada di Aceh. Sarana Dan Prasarana Peribadatan

Dalam hal pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat keberadaan rumah ibadah terutama mesjid dan meunasah, telah lazim digunakan sebagai sarana menghidupkan syiar-syiar Islam seperti pembacaan dalail khairat, pengajian, pengkajian ilmu-ilmu agama dan kegiatan syiar-syiar lainnya. Rumah ibadah di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2022 berjumlah 74 Mesjid dan 318 meunasah yang tersebar di delapan Kecamatan sebagaimana terlihat Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117.
Jumlah Mesjid Dan Meunasah Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 s.d 2023

No	Kecamatan	Mesjid				Meunasah			
		2020*	2021	2022	2023	2020*	2021	2022	2023
1	Bandar Baru	19	19	19	19	58	58	58	58
2	Panteraja	5	5	5	5	14	14	14	14
3	Trienggadeng	8	7	8	9	43	43	43	43
4	Meureudu	11	10	11	11	51	51	51	51
5	Meurah Dua	6	6	6	6	23	23	23	23
6	Ulim	8	8	8	8	33	33	33	33
7	Jangka Buya	3	3	3	3	20	20	20	20
8	Bandar Dua	14	14	14	14	76	76	76	76
Jumlah		**72**	**74**	**74**	**75**	**318**	**318**	**318**	**318**

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2024 *(data awal)*

Selain mesjid dan meunasah keberadaan Majelis Taklim dan juga Taman Pendididikan Al-Qur'an (TPA) merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan khas Islam yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Melalui majelis taklim, masyarakat yang terlibat didalamnya dapat merasakan betapa keberadaan lembaga ini menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah pengetahuan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Begitu juga halnya Taman pendidikan Al-Quran sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan dasar bagi santri yang nantinya diharapkan menjadi anak yang saleh dan salihah serta fungsinya sebagai wahana pendidikan dan kesejahteraan santri

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, melalui Dinas Syariat Islam telah memberikan biaya operasional kepada lembaga Majelis Taklim dan TPA dengan rincian 390 (Tiga Ratus Sembilan Puluh) lembaga Majelis Taklim dan 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.109. Selanjutnya jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya disajikan pada Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118.
Jumlah Majelis Taklim dan TPA yang Mendapat Biaya Operasional Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Majelis Taklim				TPA			
		2020*	2021	2022	2023	2020*	2021	2022	2023
1	Bandar Baru	77	77	77	62	89	89	89	67
2	Panteraja	49	49	49	15	16	16	16	14
3	Trienggadeng	19	19	19	34	47	47	47	48
4	Meureudu	63	63	63	40	80	80	80	59
5	Meurah Dua	29	29	29	25	48	48	48	43
6	Ulim	41	41	41	38	48	48	48	41
7	Jangka Buya	23	23	23	21	38	38	38	38
8	Bandar Dua	89	89	89	59	61	61	61	62
Jumlah		**390**	**390**	**390**	**294**	**427**	**427**	**427**	**372**

*Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2024 *(data awal)*

Tabel 2.119.
Jumlah Guru Santri TPA Perkecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Majelis Taklim				TPA			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bandar Baru	77	77	77	62	89	89	89	67
2	Panteraja	49	49	49	15	16	16	16	14
3	Trienggadeng	19	19	19	34	47	47	47	48
4	Meureudu	63	63	63	40	80	80	80	59
5	Meurah Dua	29	29	29	25	48	48	48	43
6	Ulim	41	41	41	38	48	48	48	41
7	Jangka Buya	23	23	23	21	38	38	38	38
8	Bandar Dua	89	89	89	59	61	61	61	62
Jumlah		**390**	**390**	**390**	**294**	**427**	**427**	**427**	**372**

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya Tahun, 2024

Dinas Syariat Islam untuk melakukan berbagai kebijakan dalam penerapan Syariat Islam secara optimal (kaffah) di Kabupaten Pidie Jaya yang seratus persen penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini pelaksanaan Syariat Islam bukan sebatas pelaksanaan hukum cambuk bagi yang melanggarnya, akan tetapi pelaksanaannya lebih ditekankan bagaimana warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan berlakunya syariat Islam tersebut. Sebagai indikator untuk memenuhi pencapaian target tentang fasilitas keagamaan tempat peribadatan berupa masjid terdapat 75 unit, meunasah berjumlah 318 unit, dan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) sebanyak 427 unit yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

2.4.4.2 Baitul Mal

Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah mengalami perubahan beberapa kali dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 dan yang terakhir diubah kembali dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat. Penerimaan dan realisasi Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.120 berikut :

Tabel 2.120.
Jumlah Penerimaan dan Realisasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Zakat		Infaq	
		Penerimaan	Realisasi	Penerimaan	Realisasi
1	2019*	3.045.789.435,90	2.592.634.980	0	0
2	2020	3.291.978.201,27	2.505.605.931	0	697.000.000
3	2021	5.334.725.988,60	2.695.862.910	0	897.000.000
4	2022	1.653.310.937,06	1.510.747.032	2.275.447.367,27	2.089.513.183
5	2023	1.561.430.367,00	1.580.855,821	1.998.961.400,87	2.013.161.683

*Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Dari tabel diatas untuk penerimaan Zakat dan Infaq mengalami kenaikan yang tidak signifikan karna hanya memperoleh penerimaan Zakat dan Infaqnya yang bersumber dari penghasilan ASN dan rekanan Pemerintah saja. sedangkan penurunan penerimaan Zakat dan Infak disebabkan karna terjadi mutasi gaji guru SMA yang tadinya dikelola oleh Kabupaten menjadi pengelolaannya di Provinsi. Hampir selama 4 (empat) tahun penerimaan dan realisasi Zakat dan Infaq secara kode rekening tidak dipisahkan sehingga semua penerimaan dan penyaluran melalui satu rekening kegiatan Zakat, barulah pada tahun 2022 penerimaan dan penyaluran baik Zakat dan Infaq terpisah berdasarkan Kode Rekening dan Kegiatan

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan jenis penyaluran antara lain bantuan rumah layak huni kepada Fakir Miskin hampir setiap tahun di upayakan agar di salurkan kepada 8 (delapan) Kecamatan dan Muallaf, bantuan kepada Balai Pengajian. Disamping itu, Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya juga memberikan bantuan beasiswa kepada Tahfidz MUQ dalam pengembangan Insan Qurani.

Sumber – sumber Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya saat ini merujuk kepada Qanun No.10 tahun 2007, Peraturan Bupati No.17 Tahun 2008 dan Intruksi Bupati No. 1 Tahun 2012, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap Lembaga Institusi Negara, baik instatusi pusat, daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta (private), dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dan lain-lain.

Sistem Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan pembagian Senif yang didata dan diverifikasi oleh Baitul Mal Gampong (BMG) yang terdiri dari Keuchik dan Imuem Gampong. Pembagian kuota penyaluran berdasarkan Jumlah penduduk Gampong dalam Kecamatan yang kemudian di persentasekan.

Kegiatan Pemberdayaan Zakat atau Penyaluran Zakat di Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut :

1. Penyaluran dari Senif Fakir diperuntukan untuk Mustahik dari 8 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan disalurkan secara transfer kepada mustahik.
2. Pemyaluram dari Senif Miskin diperuntukan kepada Mustahik dari 8 Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan disalurkan secara transfer kepada mustahik.
3. Penyaluran Senif Muallaf diperuntukan untuk muallaf dalam menopang kehidupannya sehari-hari dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan pembinaan yang disalurkan secara tunai atau langsung kepada mustahik.
4. Santunan Syiar Islam diperuntukan kepada Peringatan Hari Besar Islam, Bantuan Musabaqah Tilawatil Quran, Perayaan Maulid baik dalam Dayah/Pasantren dari dalam Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini bersifat konsumtif dan pembinaan yang disalurkan secara transfer kepada Panitia Penyelenggara.
5. Pengembalian Hak UPZ/Amil diperuntukan kepada Unit Pengumpul Zakat SKPK dan Sekolah SD dan SMP Sederajat dalam Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk honorarium secara transfer.

Kegiatan Pemberdayaan Infaq di Kabupaten Pidie Jaya disalurkan kepada penerima Manfaat yang terdiri dari:

1. Santunan Guru Pengajian Miskin diperuntukkan kepada guru pengajian miskin dalam 8 Kecamatan Pidie Jaya. Santunan ini diberikan secara transfer tidak bersifat rutin.
2. Santunan Pimpinan Dayah/Balai Pengajian diberikam kepada Dayah dalam 8 Kecamatan Se Kabupaten Pidie Jaya. Santunan ini diberikan secara transfer dan bersifat rutin tahunan.
3. Santunan Ulama Karismatik, Santunan ini diserahkan secara rutin tahunan kepada 20 Ulama dalam Kabupaten Pidie Jaya.
4. Santunan Fakir Uzur, Santunan ini diserahkan secara tunai kepada Fakir pada usia tua dalam Kabupaten Pidie Jaya.
5. Santunan Disabilitas, Santunan ini diserahkan secara tunai kepada penderita disabilitas miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.
6. Santunan Santri Miskin Berjumlah Santunan ini diserahkan secara transfer kepada Santri Dayah/Balai Pengajian berstatus miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.

7. Santunan kepada Yatim Piatu Berjumlah, santunan ini diserahkan secara non tunai kepada anak-anak miskin yang tidak mempunyai kedua orang tua dalam Kabupaten Pidie Jaya.
8. Santunan kepada Panti Asuhan, santunan ini diserahkan secara transfer kepada Panti Asuhan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
9. Bantuan kepada MUQ, Bantuan ini diserahkan secara transfer dan rutin tahunan kepada Lembaga MUQ Kabupaten Pidie Jaya.
10. Bantuan kepada Majelis Taklim, santunan ini diserahkan secara transfer kepada kelompok-kelompok pengajian dalam Kabupaten Pidie Jaya agar membantu operasional kegitan tersebut.
11. Bantuan Asnaf yang berstatus miskin, bantuan ini diberikan secara insidentil dalam bentuk transfer kepada masyarakat miskin yang dibantu dari sumber Infaq disebabkan karna tidak tertampung dalam senif miskin zakat
12. Bantuan Insidentil, bantuan ini diserahkan secara transfer terhadap yang bersifat sosial tidak tertampung dalam senif zakat, seperti membiayai biaya perjalanan keluarga pasien yang di rujuk ke Ibukota Provinsi atau keluar Provinsi juga bantuan kepada fisabilillah kurang mampu sedang melakukan perjalanan.
13. Bantuan Dana Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin yang dibangun dari awal dan di awasi oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya hingga selesai. Bantuan ini diserahkan secara transfer kepada masyarakat Fakir dan Miskin dalam Kabupaten Pidie Jaya.
14. Bantuan Dana Renovasi Rumah dilakukan terhadap kondisi rumah sudah tidak layak huni dan kondisi penerima bantuan dalam keadaan kesulitan keuangan. Renovasi berat dilakukan pengawasannya oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya hingga selesai. Bantuan ini diserahkan secara transfer kepada masyarakat Fakir dalam Kabupaten Pidie Jaya.
15. Bantuan Kader Tahfidz untuk penghafal Al quran yang berstatus kurang mampu yang merupakan Putera – putri Kabupaten Pidie Jaya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk transfer.
16. Bantuan Modal Usaha untuk masyarakat Miskin pada Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan modal awal memualai usaha agar terberdayakan ekonomi keluarga. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai.

2.4.4.3 Peranan Majelis Adat Daerah

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh.

Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adat-istiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Hubungan adat dengan syariat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana petuah narit maja "Hukom ngon Adat lagei dzat ngon sifeut". Hubungan adat dengan syariat dimaksud, tidak dapat dipisahkan, dimana sisi syariat sebagai penyaring nilai-nilai adat dan pada sisi adat sebagai pilar pendukung terlaksananya syariat seperti petuah narit maja "Hukom meunyoe hana meu adat tabeu, Adat meunyoe hana hukom bateu". Artinya: Hukom (syari'at) tanpa adat hambar, adat tanpa syariat batal (tidak sah).

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan). Namun pada saat ini penerapan norma-norma tersebut sudah mengalami kemunduran. Hal ini jelas terlihat di kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat.

Penyebab utama kemunduran tersebut adalah kurangnya kegiatan pembinaan pada pemuka adat, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memberikan dampak pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat. Di samping itu, pengaruh globalisasi yang bernilai negatif melunturkan nilai-nilai adat di masyarakat. Selain itu tidak cukup kuatnya upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (Heritage) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/ peradaban Aceh telah hilang dan dilupakan. Selain itu masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosesi adat dikalangan generasi muda, wanita, pelajar, mahasiswa dan aparatur

pemerintah sehingga telah menyebabkan kehidupan adat semakin terpuruk. Di sisi lain, kurang optimalnya peran lembaga-lembaga adat, seperti Panglima Laot, Keujruen blang, peutua seuneubok, pawang glee, haria peukan, syahbanda, fungsi keuchik, imuem mukim (kepala Mukim), tuha peut gampong, tuha peut mukim, imuem meunasah (imam kampung) dan sekretaris gampong/mukim. Terutama dalam menegakkan kehidupan adat dalam bidang sosial, pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat maka perlu dilakukan sosialisasi adat/adat istiadat dan pendampingan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu kebijakan dan strategi penguatan adat dan adat istiadat di Daerah diarahkan kepada:

a. Upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat istiadat serta khazanah adat. Selain itu, penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat perlu menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah.
b. Melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat.
c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan gampong.

Berdasarkan kerangka kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama pihak Legislatif telah mengesahkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Adat dan Reusam dan akan memprioritaskan program/kegiatan pembinaan adat sebagai berikut :

a. Penguatan kapasitas pimpinan adat, khususnya imuem mukim, keuchik, imuem chik, imuem gampong, tuha peut dan tokoh masyarakat lainnya.
b. Peningkatan kapasitas dan kuantitas seniman di Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan acara seumapa, narit maja dan seni budaya lainnya yang ada di daerah.
c. Penguatan pemahaman adat di kalangan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya, generasi muda dan tokoh masyarakat
d. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat termasuk adat setempat.

2.4.4.4 Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membentuk wadah yang memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan, yaitu Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Visinya "Terwujudnya pelayanan pendidikan yang religius, profesional, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, menguasai IPTEK, berdaya saing, berwawasan kebangsaan dan berkeadilan bagi masyarakat Pidie Jaya.

Untuk terwujudnya visi tersebut MPD mempunyai misi, yaitu:

1). Mendorong peran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan kompetitis;
2). Menumbuh kembangkan ide/gagasan yang aspiratif dari masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan komite sekolah/madrasah;
3). Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, ikut serta mencegah pengaruh negative melalui ide/gagasan/saran kreatif dan inovatif;
4). Mendorong terciptanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang demokrratis dan berkeadilan serta dijiwai oleh semangat kebangsaan;
5). Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten Pidie Jaya guna mewujudkan tujuan pendidikan Nasional;
6). Mendorong pengembangan dan pelestarian budaya sebagai basis pendidikan;
7). Memantapkan dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan kompetitif secara berkelanjutan;
8). Mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
9). Mendorong dan memantapkan kondisi dan citra Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Pendidikan yang Religius, berkualitas dan kompetitif.

Majelis pendidikan daerah (MPD) Kabupaten Pidie Jaya merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya, dengan tujuan:

1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya;
2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat Pidie Jaya dalam penyelenggaraan pendidikan;
3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Pidie Jaya.

Adapun peran yang dijalankan MPD Kabupaten Pidie Jaya adalah: 1). Pemberi pertimbangan (advisor agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya; 2). Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pidie jaya; 3). Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan; 4). Mediator antara pemerintah dan DPRK Pidie Jaya dengan masyarakat Pidie Jaya.

Untuk menjalankan perannya MPD berfungsi sebagai: 1). Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang di Pidie Jaya; 2). Melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3). Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; 4). Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah dan DPRK kabupaten Pidie Jaya mengenai: a). Kebijakan dan program pendidikan; b). kriteria kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan; c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d). Kriteria fasilitas pendidikan; dan e). Hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2.4.4.5 Pendidikan Dayah

Sebagai sebuah daerah yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan Syariat Islam dapat mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di bidang pendidikan dengan peningkatan kualitas umat dan kualitas penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, maka lembaga pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah dalam rangka menjamin mutu lulusannya dihampir semua kecamatan. Ada beberapa lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dengan mutu berkualitas seperti Dayah Jeumala Amal di Kecamatan Bandar Baru dan Darul Munawarah Kuta Krueng di Bandar Dua. Umumnya lembaga pendidikan dayah di Kabupaten Pidie Jaya menganut model pembelajaran Salafiyah sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh.

Seiring dengan penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya dan di Aceh pada umumnya, maka Lembaga Pendidikan Dayah terus berkembang dalam mengemban tugas untuk mendidik generasi muda yang Islami. Ada beberapa lembaga Pendidikan Dayah yang sudah ada sebelum adanya pemekaran Kabupaten

Pidie Jaya dengan mutu Pendidikan Dayah yang berkualitas seperti Dayah jeumala Amal Di Bandar Baru dan Darul Munawwarah di Bandar Dua. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah terus meningkat Setiap tahunnya dan didikuti dengan penyediaan dan perbaikan mutu sarana dan prasarananya. Tahun 2019 dayah di Kabupaten Pidie Jaya terdapat 60 unit dayah yang berbagai tipe terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 65 unit. Pada Tahun 2021 jumlah dayah mengalami penurun menjadi 56 unit dayah dan mengalami peningkatan kembli di tahun 2023 menjadi 64 unit. Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121.
Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dayah	60	65	56	68	64
2	Jumlah Guru dayah	950	950	962	970	881
3	Jumlah santri	8.432	9.443	10.244	11.567	12.510
4	Dayah Naik Kelas	6	4	11	19	3

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 Dayah belum ada perubahan tipe. Semenjak adanya Tim BADA maka di tahun 2020 sampai dengan 2023 tipe dayah bertambah di Kabupaten Pidie Jaya. Tipe A+ dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 tidak ada mengalami peningkatan jumlah tipe nya masih sama yaitu terdapat 2 dayah yang bertipe A+ tetapi pada tipe A mengalami penimgkatan dari Tahun 2018 yang tidak ada dayah yang bertipe A sampai tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 dayah yang ber tipe A . pada Tipe B dari Tahun 2018 terdapat 9 dayah yang Bertipe B mengalami Peningkatan sampai Tahun 2022 tedapat 16 dayah yang ber Tipe B. selanjutnya untuk Tipe C dari Tahun 2018 terdapat 21 Dayah yang ber Tipe C mengalami peningkatan yang naik turun sampai Tahun 2022 terdapat 25 dayah yang ber Tipe C dan pada Tipe dayah D/non Tipe mengalami penurunan dari tahun 2018 terdapat 24 Tipe D/Non Tipe sampai Tahun 2022 menjadi 22 dayah yang bertipe D/Non Tipe, dikarenakan banyak dayah-dayah yang mengalami peningkatan kelas tipe A sampai tipe C. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.122.

Tabel 2.122.
Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Tipe Dayah	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	A+	2	2	2	2	2
2	A	1	1	6	6	3
3	B	8	10	16	16	19
4	C	20	22	17	25	22
5	D/Non Tipe	30	30	11	22	18
Total Dayah Terakreditasi		56	61	65	52	64

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Setiap tahun Dinas Pendidikan Dayah melakukan monitoring terhadap keberadaan Balai Pengajian dan Dayah, tujuannya adalah untuk memverifikasi perkembangan pada pendidikan nonformal. Verifikasi tersebut biasanya dijalankan setiap awal bulan maret yang melibatkan semua personil pegawai Dinas Pendidikan Dayah pada 8 Kecamatan. Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123.
Rincian Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe, Jumlah Guru dan Santri
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2023

No	Nama Dayah	Tipe Dayah	2019*		2020		2021		2022		2023	
			Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Al-Munawwarah Putra	A+	84	842	84	1.500	100	2.201	386	4.940	300	4.940
2	Al-Munawwarah Putri	A+	70	500	70	308	84	1.485	102	1.495	84	1.495
3	Jeumala Amal	A	109	953	109	1.557	109	1.557	193	1.700	109	1.557
4	Anwarul Munawarah	A	–	–	–	–	–	–	25	349	25	349
5	Bustanul Mualimin Al-Munawarah Putri	A	–	–	–	–	–	–	27	101	27	101
6	Darul Falah	B	32	100	52	461	32	461	20	461	20	461
7	Manbaul Ulum Putri	B	26	231	36	452	26	452	43	300	26	452
8	Bustanul Mualimin Al-Munawarah	B	27	202	27	101	27	101	27	87	27	101
9	Miftahul Ulum Al waliyah	B	–	–	–	–	–	–	12	100	19	124
10	Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah	B	–	–	–	–	–	–	–	–	14	112
11	Darul Faizin	B	19	298	19	87	9	87	29	272	29	272
12	Babul Ilmi	B	19	128	19	122	19	122	70	38	10	100
13	Ibdaul Ulum	B	–	–	–	–	–	–	–	–	7	81
14	Raudhatul Munawarah	B	–	–	–	–	–	–	15	92	12	92

No	Nama Dayah	Tipe Dayah	2019*		2020		2021		2022		2023	
			Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri
15	Madinatuddiniah Babul Munajah	B	–	–	–	–	–	–	–	–	11	150
16	Raudhatul Jinan	B	–	–	8	94	13	100	55	340	35	340
17	Ummul Aiman II	B	18	132	18	240	8	240	18	240	18	240
18	MUQ Pidie Jaya	B	–	–	11	150	11	150	30	193	30	193
19	Darul Ridha Al Munawarah	B	–	–	–	–	–	–	15	98	15	98
20	Makanul Hidayah	B	–	–	–	–	–	–	13	135	13	135
21	Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah	B	–	–	–	–	–	–	20	120	20	130
22	Raudhatul Ulum (ulim)	B	14	135	14	145	14	135	22	445	12	435
23	Raudhatussakdah	C	14	99	14	170	12	110	11	105	8	90
24	Babul Ulum Diniyah Islamiyah	C	18	135	18	120	8	50	12	95	7	81
25	Darussalam Assamadiah Al-Aziziyah	C	17	82	17	150	17	200	17	210	28	112
26	Miftahul Ulum Al waliyah	C	19	220	19	134	19	124	–	–	–	–
27	Baburrahmah	C	10	100	9	91	10	111	8	80	12	102
28	Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah	C	11	105	11	105	8	120	8	120	–	–
29	Ibdaul Ulum	C	10	173	7	81	7	81	7	81	–	–
30	Raudhatul Jinan	C	22	94	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Fathul Ainiyah	C	12	112	12	112	20	112	21	240	–	–
32	Babussalam Tgk.Chik di Rhieng	C	10	151	10	220	10	220	10	220	10	90
33	Tgk. Chik Hj. Di Garot	C	10	78	8	64	8	60	5	49	–	–
34	Madinatuddiniah Miftahussalam	C	22	187	22	150	22	253	10	104	11	120
35	Najatul Mubtadi	C	8	127	8	164	10	164	10	124	13	186
36	Raudhatul Ulum	C	–	–	11	120	11	135	13	138	14	150
37	Darussa'adah Putri	C	11	76	11	169	11	169	10	120	10	120
38	Babussalam Tgk. Chik di TU	C	12	124	7	63	7	63	7	52	7	115
39	Darussa'adah Cab Panteraja	C	10	142	10	162	10	200	10	124	10	124
40	Darussa'adah Cab. Sagoe	C	30	307	30	300	12	200	12	201	19	190
41	Bustanul Ikhsan	C	12	111	9	122	10	201	10	201	11	120
42	Assadiqin Al-Aziziyah	C	11	82	11	106	11	160	11	150	14	150
43	Misbahudh dhulam Putra	C	18	93	10	120	12	205	12	250	27	300
44	Ummul Aiman III	C	–	–	11	150	15	186	20	200	15	214
45	YPI. Darul Muttaqin	C	–	–	12	125	10	102	8	53	8	53
46	Darul Muhajirin	C	–	–	–	–	–	–	10	102	10	102
47	Babul Ulum Al-Munawarah	C	–	–	–	–	–	–	8	140	8	140
48	Istiqamatuddin Raudhatul Muaqla	C	–	–	–	–	–	–	64	389	55	340
49	Manbaul Fata	C	–	–	–	–	–	–	12	129	12	130
50	Al-Mutaalimin Nahdatul Amal Al-Aziziyah	D	11	105	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Raudhatul Jinan Al-Malasyi	D	8	46	8	60	8	60	8	65	8	65

No	Nama Dayah	Tipe Dayah	2019*		2020		2021		2022		2023	
			Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri	Guru	Santri
52	Darussa'adah Cab. Uteun Bayu	D	15	160	15	253	–	–	–	–	–	–
53	Ulumul Qur'an Pulo	D	14	136	14	135	–	–	–	–	–	–
54	Baitul Amal Aceh	D	10	93	12	65	4	65	4	65	–	–
55	Babul Istiqamatuddin	D	10	93	8	65	6	70	5	70	–	–
56	Darul Muta'alimin	D	6	58	6	58	4	58	5	55	–	–
57	Madinatuddiniyah Nurussalam	D	8	76	8	123	8	99	10	91	–	–
58	Raudhatul Munawarah	D	14	160	14	171	24	171	–	–	–	–
59	Bustanul Aitam	D	5	40	5	40	5	40	5	40	8	30
60	Dawiyatuddarsi	D	8	158	8	152	8	185	11	190	11	180
61	Hadiqatul Muarif	D	7	60	7	60	–	–	3	43	–	–
62	Ribatul Mutaalimin	D	10	90	10	90	7	90	10	135	8	80
63	Nurul Islam	D	5	40	7	100	7	100	7	100	7	100
64	Mudil Hasani Al-Aziziyah	D	3	34	5	84	5	84	8	130	7	100
65	Sirajul Huda Al-Aziziyah	D	5	80	5	120	8	130	8	140	8	140
66	Al-Hijrah	D	8	160	10	160	10	160	10	90	5	60
67	MUQ Pidie Jaya	D	11	110	–	–	–	–	–	–	–	–
68	Miftahul Huda	D	5	75	5	65	–	–	–	–	–	–
69	Darul Aitam	D	8	58	8	123	8	100	8	112	6	60
70	Nuril Anwar	D	15	500	15	400	–	–	–	–	–	–
71	YPI. Darul Muttaqin	D	12	90	–	–	–	–	–	–	–	–
72	Babul Khairat	D	5	90	6	125	5	80	5	80	5	75
73	Sirajul Huda (Panteraja)	D	7	100	7	90	–	–	–	–	–	–
74	Darussa'adah Cab. Paru	D	6	115	6	125	–	–	–	–	–	–
75	Misbahudh dhulam Al-Aziziyah Putri	D	7	106	7	145	7	150	10	200	10	180
76	M'ahad Ulum Taqiyuddin Al-Aziziyah	D	15	175	15	190	15	190	6	100	6	96
77	Nurul Huda	D	8	160	8	150	–	–	–	–	–	–
78	Al-Muhajirin Tgk Chik di Langgien	D	10	190	10	195	9	156	9	100	7	80
79	Raudhatul Ulum	D	8	117	–	–	–	–	–	–	–	–
80	LPI. Hidayatullah Al-Aziziyah	D	–	–	11	150	11	138	10	134	9	130
81	Babussabri	D	–	–	9	120	–	–	7	98	4	35
82	Anwarul Munawarah	D	–	–	–	–	12	145	–	–	–	–
83	Al-Fata	D	–	–	–	–	–	–	9	150	11	180
84	Nurul Jadid	D	–	–	–	–	–	–	8	93	10	100
85	Darul Mubaraqah Al-Munawarah	D	–	–	–	–	–	–	–	–	5	40
Jumlah Total			969	9.594	993	11.829	883	12.588	1.614	17.464	1.307	16.718

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 *(data awal)*

Sejak tahun 2019 sampai 2023 Dinas Pendidikan Dayah telah mengelola beberapa Dayah yang bertitel (Tipe A+, A, B, C, dan D). Pada tahun 2019 jumlah Dayah yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Dayah sebanyak 60 unit dayah (Tipe

A+ 2 unit, Tipe A 1 unit, Tipe B 7 unit, Tipe C 20 Unit, dan Dayah Tipe D 30 unit) daftar terlampir. Pada tahun 2020 Dayah – dayah yang di kelola oleh Dinas Pendidikan Dayah meningkat menjadi 65 Unit yang terdiri daripada Dayah yang bertipe (A+ sebanyak 2 Unit, Tipe A sebanyak 1 Unit, Tipe B sebanyak 10 Unit, Tipe C sebanyak 22 Unit dan Tipe D sebanyak 30 Unit), Daftar terlampir. Seiring dengan perkembangan Pendidikan Dayah di Pidie Jaya, Dinas Pendidikan Dayah setiap tahun melakukan monitoring untuk memverifikasi Dayah – dayah apakah keberadaan Dayah tersebut masih bisa di pertahankan, hasil verifikasi 2021 ada beberapa Dayah yang harus diturunkan Tipenya menjadi Balai Pengajian dari 65 Dayah pada tahun 2020 menjadi 56 Dayah pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut, (Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 1 Unit, Tipe B 9 Unit, Tipe C 22 Unit dan Tipe D 22 Unit), Daftar terlampir.

Pada tahun 2022 hasil verifikasi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Dayah jumlah Dayah kembali meningkat dari 56 Unit Dayah menjadi 68 Unit dengan demikian jumlah Dayah bertambah 12 Unit yaitu (Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 3 Unit, Tipe B 15 Unit, Tipe C 25 Unit dan Tipe D 22 Unit) daftar terlampir. Dan hasil verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Dayah pada tahun 2023 tentang keberadaan Dayah – dayah kembali terjadi penurunan dari 68 menjadi 64 Unit Dayah yaitu (Tipe A+ 2 Unit, Tipe A 3 Unit, Tipe B 19 Unit, Tipe C 22 Unit dan Tipe D 18 Unit) daftar terlampir.

Sesuai dengan terjadinya pasang surut keberadaan Dayah dari tahun ke tahun juga berimbas kepada guru-guru pengajian dimana mereka harus bergerak kedayah – dayah yang lain sesuai dengan perkembangan Dayah.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil evaluasi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2015-2035 adalah sebagai beikut :

1. Pencapaian sasaran pokok dan penerapan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 sebagai berikut:
   a. Tahun 2022, PDRB Pidie Jaya 3,65 masih tergolong rendah dibandingkan dengan PDRB Aceh 5,44 dan Nasional 5,72. Sedangkan, target tahun akhir tahapan kedua (2020-2024) RPJPK Pidie Jaya sebesar 5 – 6 persen. Pidie Jaya memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target ini
   b. Angka kemiskinan Pidie Jaya pada Tahun 2022 sebesar 18,45 persen lebih besar dari Aceh sebesar 14,46 persen. Capaian ini sudah melebihi target

tahun akhir tahapan kedua (2020-2024) RPJPK Pidie Jaya sebesar 16 – 18 persen. Meskipun target kemiskinan ini sudah tercapai, namun perlu untuk diturunkan agar dapat lebih baik dari rata-rata kemiskinan Aceh.

c. Tingkat pengangguran Pidie Jaya Tahun 2022 sebesar 4,4 persen cenderung menurun ke arah yang lebih baik dan sudah di atas rata-rata Aceh sebesar 5,97 persen. Capaian Pidie Jaya ini sudah melebih target tahapan kedua (2020-2024) RPJPK Pidie Jaya sebesar 8 – 9 persen

d. Indeks pembangunan manusia (IPM) Pidie Jaya sudah sangat baik di atas rata-rata Aceh dan Nasional. Tahun 2022, IPM Pidie Jaya sebesar 74,34 sudah lebih baik dari IPM Aceh sebesar 72,30. Capaian ini sudah melebihi target akhir periode RPJMK Pidie Jaya tahun 2024 sebesar 72,13.

e. Indeks Gini Pidie Jaya Tahun 2021 sebesar 0,236 sudah lebih rendah dari pada Indeks Gini Aceh sebesar 0,324. Capaian ini lebih tinggi dari target akhir periode RPJMK Pidie Jaya tahun 2024 adalah sebesar 0,210

f. Inflasi masih terkendali di seluruh seperti kabupaten/kota lainnya di Aceh. Tingkat Inflasi Pidie Jaya tahun 2021 adalah sebesar 2,19 lebih rendah dari inflasi Aceh sebesar 2,24. Capaian ini lebih baik dari target akhir periode RPJPMK Pidie Jaya tahun 2024 sebesar 3,00 persen

g. Beberapa sasaran pokok pembangunan masih belum dapat diukur karena bersifat kualitatif.

2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sudah berjalan dengan baik.

3. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera sesuai dengan visi dan misi Aceh dan Nasional sudah berjalan dengan baik.

4. Periodisasi Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pidie Jaya Tahun 2015-2035 tidak sesuai dengan periodisasi RPJPK Nasional Tahun 2005-2025.

5. Visi Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera masih sesuai untuk dipertahankan pada RPJPK Pidie Jaya Periode 2025-2045.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Tren Demografi dan Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan Tahun 2045.

Jika dilihat dari persentase pertumbuhan penduduk yang memiliki tren penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun, diperkirakan dalam 20 tahun ke depan pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tingkat yang ideal. Saat ini permasalahan kepadatan penduduk berfokus pada persebaran penduduk yang tidak merata terutama pada wilayah kota dan perdesaan. Kepadatan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Selain itu terdapat perbedaan luas wilayah antar daerah dengan beberapa wilayah kawasan hutan lindung, yang menyebabkan persebaran penduduk tidak merata.

2.6.1.1 Jumlah Total Penduduk

Kurun periode 2020-2045 persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025 hingga 2030 yang merupakan puncak bonus demografi. Jika dilihat perbandingan jangka lima tahunan, pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 (dibandingkan dengan tahun 2020) diperkirakan mencapai 5,78 persen, dan sedikit berkontraksi menjadi 4,82 persen pada tahun 2030. Pada tahun 2045 pertumbuhan penduduk diperkirakan berhasil ditekan dengan pertumbuhan sekitar 3,3 persen

Tabel 2.124.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690

Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2024

2.6.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Selama kurun waktu 2023 hingga 2045 diproyeksikan terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dimana pada Tahun 2045 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 100.395 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 100.295 Orang dengan Rasio 100,10 % dari total penduduk Kabupaten

Pidie Jaya sebanyak 200.690 orang. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan rasionya dapat dilihat pada Tabel 2.125 berikut

Tabel 2.125.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Laki-Laki	81.666	84.068	89.139	93.545	97.246	100.395
Perempuan	81.925	84.478	89.158	93.347	97.027	100.295
Rasio	99,68	99,51	99,98	100,21	100,23	100,10

Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2024

2.6.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk berdasarkan umur diperkirakan akan mengalami pergeseran dari tahun ke tahun. Pada penduduk dengan kategori tidak produktif, jumlah penduduk usia 0-14 tahun cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2035 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2040 hingga tahun 2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia tersebut mencapai 25,53 persen. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2045, dimana proporsi usia tersebut diperkirakan hanya sekitar 21,79 persen. Berbeda dengan usia tidak produktif lainnya yaitu usia 65+ atau disebut penduduk lansia. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan menyebabkan Usia Harapan Hidup (UHH) semakin baik. Pada tahun 2025 penduduk berusia 65+ diperkirakan hanya sebesar 7,25 persen. Persentase ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun puncaknya pada tahun 2045, dimana penduduk berusia 65+ meningkat signifikan dengan proporsi mencapai 11,69 persen.

Tabel 2.126.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
0-14 Tahun	41.148	43.031	44.906	45.842	44.655	43.731
15-64 Tahun	109.667	113.279	119.199	124.390	129.829	133.494
> 65 Tahun	11.955	12.236	14.192	16.660	19.789	23.465
Angka Ketergantungan	48,42	48,79	49,58	50,25	49,64	50,34

Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2024

Jumlah penduduk usia produktif yaitu antara 15-64 tahun memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Kurun periode 2023-2045 persentase penduduk usia produktif mengalami fluktuatif, dimana puncaknya pada tahun 2025-2030. Pada periode tersebut jumlah penduduk usia produktif mencapai 67,21 persen pada tahun 2025 dan 66,85 persen pada tahun 2030. Diperkirakan pada periode tersebut Kabupaten Pidie Jaya mengalami puncak bonus demografi, dimana jumlah usia produktif mendominasi struktur penduduk.

Rasio ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 adalah sebesar 48,42 persen dan diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi 50,34. Berdasarkan kelompok usianya, pada tahun 2023, penduduk di Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun), yakni sebesar 67,38 persen, sementara sisanya adalah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2023 adalah sebesar 48,42 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun, dan penduduk usia 65 tahun ke atas).

2.6.1.4 Bonus demografi, dan penduduk usia tua

Penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun tercatat memiliki proporsi yang dominan dalam struktur penduduk di Kabupaten Pidie Jaya. Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Komposisi penduduk usia produktif mencapai 67,21 persen pada tahun 2025 dan 66,85 persen pada tahun 2030. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun mendominasi total keseluruhan penduduk, atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Pada kondisi ini angka ketergantungan penduduk diperkirakan akan menurun, disebabkan proporsi jumlah usia tidak produktif yang lebih rendah. Bonus demografi dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jika SDM dipersiapkan dengan baik dan terencana. Kebijakan yang pro terhadap pembangunan SDM akan sangat bermanfaat bagi pemanfaatan bonus demografi ke depan. Sebaliknya, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan.

Rasio ketergantungan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 adalah sebesar 48,79 persen dan diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi 50,34. Berdasarkan kelompok usianya, pada tahun 2025, penduduk di Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh penduduk usia produktif (15–64 tahun), yakni sebesar 67,21 persen, sementara

sisanya adalah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 orang penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun, dan penduduk usia 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan penting untuk diketahui karena rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan maka akan semakin baik atau semakin kecil beban yang ditanggung penduduk usia produktif. Pada puncak bonus demografi yaitu tahun 2025-2030, rasio ketergantungan penduduk mengalami penurunan dikarenakan jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah usia tidak produktif. Seiring menurunnya bonus demografi, rasio ketergantungan kembali meningkat. Diperkirakan pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 50,34. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk usia 65+ yang meningkat proporsinya menjadi 11,69 persen dari total penduduk. Total penduduk usia 0-14 tahun juga masih cukup tinggi yaitu pada kisaran 21,79 persen. Meningkatnya angka penduduk usia tidak produktif menyebabkan beban penduduk usia produktif meningkat

2.6.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 menyoroti tantangan dan peluang penting dalam pengembangan wilayah. Pertumbuhan penduduk yang signifikan menjadi poin kunci, memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan air minum, listrik, dan pengelolaan persampahan. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan proyeksi peningkatan jumlah penduduk, dengan fokus pada kapasitas rumah sakit, puskesmas, dan sekolah.

Selain itu, aspek transportasi dan aksesibilitas menjadi esensial untuk dipertimbangkan guna mendukung kebutuhan masyarakat yang berkembang. Pengembangan ekonomi dan industri perlu diintegrasikan dalam proyeksi ini untuk memastikan infrastruktur yang memadai untuk pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Upaya pengembangan wilayah juga harus memperhitungkan dampak lingkungan, dengan mengadopsi praktik berkelanjutan untuk meminimalkan jejak lingkungan.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun dapat menjadi panduan strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tuntutan masa depan. Keseluruhan analisis ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan yang efektif guna menjawab dinamika perkembangan Kabupaten Pidie Jaya menuju tahun 2045.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat tinggal juga akan meningkat. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, dapat diproyeksikan juga jumlah kebutuhan rumah masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya di tahun 2045. Hasil proyeksi kebutuhan perumahan di Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2045 dapat dilihat pada table 2.127 berikut.

Tabel 2.127.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Jumlah Penduduk	163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690
Junlah Kartu Keluarga	40.898	42.137	44.574	46.723	48.568	50.173
Proyeksi Kebutuhan Rumah	32.718	33.709	35.659	37.378	38.855	40.138

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya di Tahun 2025 diprediksikan berjumlah 168.546 jiwa dengan kebutuhan rumah penduduk berjumlah 33.709 unit. Jumlah kebutuhan rumah tersebut dapat diprediksi berdasarkan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang yang tinggal dalam satu rumah. Jumlah kebutuhan rumah akan terus bertambah hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 40.138 unit, bila dibandingkan dengan ketersediaan rumah di tahun 2023, maka Kabupaten Pidie Jaya masih perlu mempersiapkan diri untuk membangun sekitar 7.206 unit sampai tahun 2045.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum untuk Kabupaten Pidie Jaya sampai tahun 2045 yaitu 372,99 lt/d. Proyeksi dilakukan berdasar pada jumlah penduduk, tingkat

pelayanan PDAM, kebutuhan domestik dan non domestik, kebutuhan lain-lain dan kehilangan air. Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (ltr/detik)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Jumlah Penduduk	163.591,00	168.546,00	178.297,00	186.892,00	194.273,00	200.690,00
Tingkat Pelayanan PDAM (%)	25,32	31,99	45,68	59,98	72,94	85,91
Penduduk Terlayani	41.415,00	53.915,00	81.439,78	112.098,47	141.706,64	172.407,80
Jumlah Penduduk Per SR	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Jumlah SR (unit)	8.283,00	10.783,00	16.287,96	22.419,69	28.341,33	34.481,56
Pemakaian Per orang (m3/hari)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Kebutuhan air SR (m3/hari)	4.555,65	5.930,65	8.958,38	12.330,83	15.587,73	18.964,86
Kebutuhan Domestik (lt/detik)	52,73	68,64	103,68	142,72	180,41	219,50
Kebutuhan Non Domestik (lt/detik)	10,55	13,73	20,74	28,54	36,08	43,90
Kebutuhan lain-lain (hotel, rumah sakit, terminal penumpang, dll) (lt/detik)	3,69	4,80	7,26	9,99	12,63	15,37
Kehilangan Air (lt/detik)	35,49	34,87	34,24	33,53	33,22	32,06
Faktor Koefisien kebutuhan air perkotaan	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	**122,95**	**146,45**	**199,10**	**257,74**	**314,82**	**372,99**

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.128 diatas, Kabupaten Pidie Jaya dihadapkan pada tantangan signifikan terkait kebutuhan air minum, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2045, terlihat bahwa tingkat pelayanan PDAM akan mencapai 100%, memastikan seluruh penduduk terlayani oleh sistem tersebut. Peningkatan jumlah sambungan rumah (SR) menjadi 34.481,86 pada tahun 2045 menunjukkan upaya untuk memperluas jangkauan layanan. Namun, dengan peningkatan kebutuhan air domestik, non-domestik, dan kebutuhan khusus lainnya seperti hotel, rumah sakit, dan terminal penumpang, perlu dilakukan upaya serius dalam perencanaan dan manajemen sumber daya air. Kehilangan air dalam distribusi juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan memperhitungkan faktor koefisien kebutuhan air perkotaan, proyeksi kebutuhan air minum hingga 2045 mencapai 372,99 liter per detik. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam pengelolaan infrastruktur air dan pemanfaatan sumber daya air diperlukan agar Kabupaten Pidie Jaya dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Proyeksi kebutuhan listrik untuk Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 menggambarkan sebuah tantangan signifikan yang harus diatasi dalam mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan perkembangan infrastruktur rumah.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan peningkatan jumlah rumah, kebutuhan listrik pun mengalami lonjakan yang cukup besar. Rata-rata daya listrik per rumah yang meningkat dari 900 VA pada tahun 2023 menjadi 2.200 VA pada tahun 2045 mencerminkan adopsi teknologi dan perangkat listrik yang lebih canggih di rumah tangga. Proyeksi kebutuhan listrik yang melonjak dari 29.638,53 KVA pada tahun 2025 menjadi 88.303,60 KVA pada tahun 2045 menunjukkan perlunya investasi signifikan dalam infrastruktur kelistrikan. Oleh karena itu, Kabupaten Pidie Jaya perlu merancang kebijakan yang holistik untuk memastikan penyediaan listrik yang memadai, berkelanjutan, dan efisien. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mengadopsi solusi berkelanjutan, Kabupaten ini dapat menghadapi tantangan tersebut dengan efektif untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Tabel 2.129.
Proyeksi Kebutuhan Listrik
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Jumlah Penduduk	163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690
Jumlah Rumah	32.718	33.709	35.659	37.378	38.855	40.138
Rata-rata daya listrik (VA)	900	900	1.300	1.300	2.200	2.200
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	**29.446,38**	**30.338,28**	**46.357,22**	**48.591,92**	**85.480,12**	**88.303,60**

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan untuk Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 mencerminkan tantangan signifikan dalam mengelola volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan proyeksi timbulan sampah yang naik dari 569,70 m3/hari pada tahun 2025 menjadi 702,42 m3/hari pada tahun 2045, keberlanjutan dalam pengelolaan limbah menjadi suatu keharusan. Kabupaten ini perlu memprioritaskan implementasi strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur daur ulang, kampanye edukasi untuk masyarakat mengenai pengurangan sampah, dan investasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang inovatif. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pihak pemerintah, dan sektor swasta, Kabupaten Pidie Jaya dapat mencapai tujuan pengelolaan persampahan yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, wilayah ini dapat menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya

global untuk mengurangi dampak sampah terhadap ekosistem. Hasil Proyeksi dapat dilihat pada tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah (m3/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Jumlah Penduduk	163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690
Proyeksi Timbulan Sampah (kg/org/hari)	81.795,50	84.273,00	89.148,50	93.446,00	97.136,50	100.345,00
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Terkait dengan daur ulang sampah, TPA Blang Awe dapat difungsikan lebih lanjut sebagai lokasi daur ulang sampah. Namun, Kabupaten Pidie Jaya perlu meningkatkan kapasitas dan partisipasi dalam program daur ulang sampah. Seiring dengan peningkatan timbulan sampah, program daur ulang dapat memainkan peran penting dalam mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPST. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya dan mendukung kegiatan daur ulang harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan komunitas lokal untuk mengembangkan industri daur ulang yang mampu mengolah berbagai jenis sampah, seperti plastik, kertas, dan logam.

Dalam jangka panjang, peningkatan program daur ulang akan membantu mengurangi tekanan pada TPST dan memperpanjang umur fasilitas pengelolaan sampah yang ada. Dengan demikian, proyeksi pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 mencerminkan perlunya pendekatan yang holistik, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas daur ulang, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan peningkatan jumlah penduduk dari 163.591 pada tahun 2023 menjadi 200.690 pada tahun 2045, proyeksi fasilitas kesehatan mencakup peningkatan signifikan dalam unit rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Disamping peningkatan kuantitas

pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga harus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang telah tersedia seperti pemenuhan dokter spesialis, peralatan pendukung yang lengkap dan upaya mewujudkan Puskesmas Bandar Baru untuk ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah untuk wilayah barat guna memenuhi kebutuhan populasi masyarakat yang terus berkembang.

Jumlah rumah sakit diharapkan meningkat dari 1 menjadi 3, menandakan upaya untuk memperluas kapasitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Sementara itu, proyeksi puskesmas menunjukkan peningkatan dari 12 unit pada tahun 2023 menjadi 17 unit pada tahun 2045, mencerminkan komitmen untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan di tingkat primer. Selain itu, jumlah puskesmas pembantu diperkirakan meningkat dari 19 pada tahun 2023 menjadi 30 pada tahun 2045, mencerminkan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat komunitas.

Inisiatif ini mencerminkan visi Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor kesehatan. Dengan membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan, diharapkan dapat mencapai pelayanan kesehatan yang merata, efektif, dan berkualitas. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, proyeksi ini menjadi landasan strategis dalam menyediakan layanan kesehatan yang responsif dan terjangkau bagi seluruh komunitas.

Tabel 2.131.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Jumlah Penduduk		163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690
Proyeksi Fasilitas Kesehatan:							
▪ Rumah Sakit	Unit	1	1	2	2	2	3
▪ Puskesmas	Unit	12	12	14	14	15	17
▪ Puskesmas pembantu	Unit	19	19	25	25	27	30

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 menandakan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan akan meningkat dari 162.771 pada tahun 2023

menjadi 200.690 pada tahun 2045, proyeksi fasilitas pendidikan melibatkan peningkatan signifikan pada berbagai tingkat pendidikan.

Peningkatan jumlah unit Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) dari 75 pada tahun 2023 menjadi 92 pada tahun 2045 mencerminkan upaya untuk memberikan akses pendidikan sejak usia dini. Demikian juga, peningkatan unit Taman Kanak-Kanak (TK) dari 72 menjadi 89, serta peningkatan jumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari 121 menjadi 149, menunjukkan dedikasi terhadap pendidikan tingkat dasar yang merata.

Di tingkat menengah, proyeksi untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/SMK (SMA/MA/SMK) menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk akses pendidikan menengah yang berkualitas.

Inisiatif ini mencerminkan visi Kabupaten Pidie Jaya untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing. Dengan menyusun dan meningkatkan fasilitas pendidikan di semua tingkatan, kabupaten ini berupaya memastikan bahwa pendidikan yang bermutu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah secara keseluruhan

Tabel 2.132.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Jumlah Penduduk		163.591	168.546	178.297	186.892	194.273	200.690
Proyeksi Fasilitas Pendidikan:							
▪ KB dan TPA	Unit	75	78	82	86	90	92
▪ TK	Unit	72	75	79	83	86	89
▪ SD/MI	Unit	121	125	133	139	144	149
▪ SMP/MTs	Unit	51	53	56	59	61	63
▪ SMA/MA/SMK	Unit	34	35	37	39	41	42
▪ Perguruan Tinggi	Unit	1	1	1	2	2	2

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2045 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketersediaan sebuah perguruan tinggi negeri. Saat ini, Kabupaten Pidie Jaya hanya memiliki satu unit perguruan tinggi, yaitu kampus politeknik. Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dari 163.591 jiwa pada tahun 2023 menjadi 200.690 jiwa

pada tahun 2045, jelas bahwa kebutuhan akan pendidikan tinggi akan terus meningkat.

Penambahan jumlah perguruan tinggi menjadi dua unit pada tahun 2035 merupakan langkah yang strategis. Pertumbuhan populasi yang diproyeksikan, serta meningkatnya jumlah lulusan SMA/MA/SMK, mengindikasikan bahwa permintaan untuk pendidikan tinggi akan semakin besar. Keberadaan satu perguruan tinggi tambahan akan membantu menampung lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini juga berpotensi mengurangi arus migrasi keluar daerah, di mana lulusan SMA/SMK mencari pendidikan tinggi di luar kabupaten.

Selain itu, penambahan perguruan tinggi juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pidie Jaya. Dengan menyediakan lebih banyak program studi yang relevan dengan kebutuhan lokal, perguruan tinggi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di daerah ini. Pendirian kampus baru atau pengembangan kampus yang sudah ada juga dapat membuka peluang kerja baru, baik di sektor pendidikan maupun sektor-sektor pendukung lainnya, seperti jasa, perumahan, dan transportasi.

Namun, upaya peningkatan jumlah perguruan tinggi harus disertai dengan perencanaan yang matang, termasuk dalam hal pendanaan, pemilihan lokasi strategis, dan penyediaan tenaga pengajar yang kompeten. Dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan sangat penting untuk merealisasikan proyeksi ini dan memastikan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Pidie Jaya.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Pidie Jaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur ruang dan pola ruang wilayah guna mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana ini mencakup berbagai aspek penting seperti penetapan sistem pusat kegiatan, pengembangan jaringan prasarana, serta optimalisasi sumber daya alam yang tersedia. Dengan mengintegrasikan berbagai sistem seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air, Kabupaten Pidie Jaya berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Selain itu, kawasan strategis juga ditetapkan untuk memaksimalkan potensi wilayah, seperti pengembangan kawasan

agropolitan, minapolitan, agrowisata, serta kawasan gampong terpadu, yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi, Kabupaten Pidie Jaya diharapkan dapat mencapai pembangunan yang Islami, maju, dan berkelanjutan.

2.7.1 Penggambaran Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

2.7.1.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Pidie Jaya

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat kegiatan utama wilayah kabupaten sesuai arahan RTRWA yaitu PKL Meureudu dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa;
2. PPK sebagai pusat kegiatan beberapa kecamatan meliputi:
    - kawasan perkotaan Lueng Putu di Kecamatan Bandar Baru sebagai pusat perdagangan dan jasa;
    - kawasan perkotaan Panteraja sebagai pusat kegiatan perikanan, industri, perdagangan dan jasa;
    - kawasan perkotaan Trienggadeng di Kecamatan Trienggadeng sebagai pusat kegiatan pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa;
    - kawasan perkotaan Babah Jurong Kecamatan Meurah Dua sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
    - kawasan perkotaan Ulim, Kecamatan Ulim sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
    - kawasan perkotaan Jangka Buya Kecamatan Jangka Buya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan perikanan; dan
    - kawasan perkotaan Ulee Glee di Kecamatan Bandar Dua sebagai pusat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

2.7.1.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Pidie Jaya

Rencana Sistem Jaringan Prasarana di Kabupaten Pidie Jaya merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten. Sistem jaringan prasarana ini terdiri dari dua komponen utama: sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Kedua komponen ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, serta akses terhadap layanan publik yang lebih baik.

Sistem jaringan prasarana utama mencakup tiga sektor transportasi penting, yaitu transportasi darat, transportasi perkeretaapian, dan transportasi laut.

- **Transportasi darat** meliputi jaringan jalan yang terdiri dari jalan Tol, Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan dalam kabupaten. Jaringan ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk memfasilitasi distribusi barang dan jasa, sehingga memperkuat sektor ekonomi lokal. Selain itu, infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan diatur untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam perjalanan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
- **Transportasi perkeretaapian**, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, diharapkan menjadi salah satu alternatif transportasi yang efisien dan ramah lingkungan di masa depan. Ini akan membantu mengurangi beban pada jaringan jalan raya dan memperluas pilihan transportasi bagi masyarakat.
- **Transportasi laut** difokuskan pada pengembangan pelabuhan dan fasilitas terkait, yang sangat penting untuk daerah pesisir. Ini akan memperkuat sektor perikanan dan perdagangan laut, yang merupakan salah satu potensi ekonomi utama Kabupaten Pidie Jaya.

Secara lebih detail dapat dilihat pada dokumen RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034.

2.7.1.3 Rencana Sistem Jaringan Energi

Rencana Sistem Jaringan Energi di Kabupaten Pidie Jaya dirancang untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sistem ini mencakup pengembangan energi listrik dan jaringan pipa

minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Sistem energi listrik di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari dua komponen utama, yaitu pembangkit energi listrik dan jaringan energi listrik. Dalam hal pembangkit energi listrik, rencana pembangunan difokuskan pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan memanfaatkan sumber daya air Krueng Meureudu yang dapat menghasilkan energi listrik 20-30 MW. PLTA ini dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor swasta dan PT. PLN.

Pengembangan jaringan energi listrik melibatkan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 275 KV dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 KV yang akan melintasi berbagai kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, gardu induk akan dikembangkan di Gampong Blang Awe di Kecamatan Meureudu untuk mendukung distribusi listrik di seluruh kabupaten.

Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki potensi minyak dan gas bumi yang berada di lepas pantai Blok Andaman yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan penerimaan asli daerah dimasa yang akan datang. Sejauh ini masih dilakukan tahap eksploitasi.

2.7.1.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan telekomunikasi, peningkatan infrastruktur seperti menara pemancar dan kabel serat optik merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan memberikan ruang kepada Pihak Swasta untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menara pemancar yang lebih banyak dan tersebar secara strategis akan memperluas jangkauan sinyal, mengurangi daerah yang tidak terjangkau, dan meningkatkan kecepatan serta kualitas koneksi. Selain itu, pengembangan jaringan serat optik akan memberikan kapasitas data yang lebih tinggi dan kestabilan koneksi yang lebih baik, mendukung layanan internet cepat untuk pengguna di berbagai lapisan masyarakat.

Rencana ini juga memanfaatkan teknologi terkini untuk memastikan bahwa Kabupaten Pidie Jaya tetap relevan dengan perkembangan global. Penggunaan teknologi 4G dan persiapan untuk adopsi teknologi 5G menjadi bagian penting dari strategi ini. Teknologi 5G, khususnya, menawarkan kecepatan internet yang sangat

tinggi, latensi rendah, dan kapasitas yang lebih besar, yang akan sangat mendukung berbagai aplikasi modern seperti telemedicine, e-learning, dan smart city initiatives. Selain itu, implementasi teknologi ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Selain memperluas dan meningkatkan jaringan, rencana ini juga fokus pada peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan bagi semua pengguna. Ini mencakup program-program yang mendorong penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan layanan pelanggan dan menyediakan paket yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat akan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan telekomunikasi, dan sektor swasta adalah kunci untuk keberhasilan rencana ini. Pemerintah daerah akan berperan aktif dalam menyediakan kebijakan yang mendukung dan insentif untuk investasi infrastruktur telekomunikasi. Selain itu, pendanaan untuk proyek-proyek ini akan mencakup sumber-sumber dari anggaran pemerintah, dukungan dari lembaga keuangan, dan investasi swasta.

Secara keseluruhan, rencana sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Pidie Jaya diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan informasi

2.7.1.5 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan jaringan prasarana sumberdaya air, terdiri atas:

1. Rencana pengelolaan wilayah sungai berupa DAS Krueng Lueng Putu, DAS Krueng Pante Raja, DAS Krueng Beuracan, DAS Krueng Meureudu, DAS Krueng Ulim, DAS Krueng Jeulanga dan DAS Krueng Kiran.
2. Pengendalian sungai yaitu jaringan sumberdaya air lintas lintas kabupaten meliputi:
   a. Krueng Putu (Pidie – Pidie Jaya); dan
   b. Krueng Bale Iliek (Pidie jaya – Bireun).
3. Penyediaan Waduk Krueng Meureudu di WS Meureudu - Baro di Kecamatan Meurah Dua sebagai penmbangkit listrik, irigasi, sumber air baku dan pengendali banjir;
4. pengembangan embung

5. Pemanfaatan daerah irigasi
6. Pengembangan sistem pengendalian banjir

2.7.2 Penggambaran Rencana Pola Ruang Hutan Lindung

Di dalam Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, pemantapan kawasan lindung merupakan salah satu produk utama yang akan dihasilkan. Penetapan kawasan lindung ini mengacu pada hasil analisis kesesuaian lahan yang tercantum dalam Keppres No. 32 tahun 1990 mengenai Pengelolaan Kawasan Lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam serta sumberdaya buatan guna pembangunan berkelanjutan, salahsatunya adalah Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Pidie Jaya seluas 48.004,21 Ha meliputi:

a. Kecamatan Bandar Baru dengan luas 8.333,03 Ha, meliputi Gampong Abah lueng, Gampong Meunasah Jiem Jiem dan Gampong Sarah Panyang.
b. Kecamatan Trienggadeng, dengan luas 1,32 Ha, terletak di Gampong Panton Raya.
c. Kecamatan Meureudu dengan luas 4.859,48 Ha, meliputi Gampong Lampoh Lada, dan Gampong Glumpang tutong.
d. Kecamatan Meurah Dua, dengan luas 24.720,08 Ha, meliputi Gampong Lhok Sandeng.
e. Kecamatan Bandar Dua, dengan luas 10.090,38 Ha, meliputi Gampong Kumba Ateueh, Cot Keng, Blang Miro, Krueng Kiran, Kumba, Cot Geurufai, Lhok Pusong, Gaharu, dan Alue Sane

2.7.3 Kawasan Strategis Kabupaten

2.7.3.1 Kawasan Perkotaan Meureudu

Secara geografis Perkotaan Meureudu memiliki potensi cukup besar untuk berkembang di masa mendatang karena terkait dengan fungsi dan peranannya sebagai Ibukota Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan perkotaan Meureudu diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kabupaten. Posisi Perkotaan Meureudu yang dilewati jalan arteri primer Banda Aceh – Medan menjadi kekuatan utama perkembangan dan pertumbuhan perkotaan Meureudu. Untuk mendorong prioritas pembangunan, maka ditetapkan Meureudu sebagai kawasan strategis Kota Meureudu Raya .

2.7.3.2 Kawasan Strategis Agropolitan

Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan kajian Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pidie Jaya, Kawasan Agropolitan meliputi:

a. kawasan barat berpusat di Kecamatan Bandar Baru; dan
b. kawasan Timur berpusat di Kecamatan Bandar Dua.

Di Kabupaten Pidie Jaya, penerapan konsep agropolitan terlihat dalam distribusi hasil pertanian dari desa-desa yang melaksanakan aktifitas pertanian ke kawasan-kawasan utama, yaitu Kecamatan Bandar Baru di Barat dan Kecamatan Bandar Dua di Timur. Proses ini dimulai dengan kegiatan pertanian di perdesaan, di mana petani menanam berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan sayuran. Setelah panen, hasil pertanian dikumpulkan dan menjalani pengolahan awal di pusat pengumpulan lokal, yang mencakup penyortiran dan proses seperti penggilingan padi atau pengeringan untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan produk.

Selanjutnya, produk yang telah diproses dikemas dengan baik dan dipersiapkan untuk distribusi. Dari Desa, hasil pertanian dibagi sesuai dengan tujuan distribusi ke Kecamatan Bandar Baru di Barat dan Kecamatan Bandar Dua di Timur. Pengemasan yang baik penting untuk menjaga kualitas produk selama perjalanan, dan transportasi dilakukan menggunakan truk atau kendaraan angkut yang direncanakan untuk meminimalkan waktu perjalanan.

Setibanya di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Bandar Dua, produk pertanian dibawa ke pusat distribusi lokal atau pasar. Di kedua kecamatan ini, produk dipasarkan kepada konsumen, pedagang, dan pengecer, dengan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan permintaan. Dengan sistem distribusi yang efisien, petani di desa akan memperoleh akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan mereka dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Pendekatan agropolitan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Bandar Dua. Pusat distribusi di kedua kawasan ini berfungsi sebagai pusat ekonomi yang membantu pertumbuhan bisnis lokal dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, proses distribusi ini memperkuat hubungan antara wilayah pedesaan dan kawasan urban, mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pidie Jaya.

2.7.3.3 Kawasan Strategis Minapolitan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan pedesaan yang terjadi, pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (pedesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk Kawasan Minapolitan. Berdasarkan hasil kajian minapolitan di Kabupaten Pidie Jaya, kawasan minapolitan meliputi Jangka Buya-Ulim-Lueng Bimba-Meuraksa dan Panteraja-Lancang Paru-Njong.

2.7.3.4 Kawasan Agrowisata

Agrowisata atau wisata agro adalah kegiatan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum. Pengembangan agrowisata pada konsep umum dapat ditempuh melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas. Objek wisataagro tidak hanya terbatas kepada objek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi objek wisata yang menarik. Kawasan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi buah-buahan yang kemudian dapat diolah sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dari komoditas yang diunggulkan. Kawasan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya meliputi:

- Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah (Blang Cari – Blang Rheue – Lhok Gajah)

Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah diarahkan pada pengembangan komoditas Durian, Manggis, Rambutan, dan Nangka. Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah terletak di Gampong Blang Cari, Blang Rheue, Lhok Gajah, Kecamatan Ulim.

- KS Agrowisata Paru
  Kawasan Agrowisata Paru diarahkan pada pengembangan Buah Duku dan Rambutan. Kawasan Agrowisata Paru terletak di Paru Keude.

2.7.3.5 Kawasan Gampong Terpadu

Kawasan Gampong Terpadu di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebuah inisiatif strategis untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang direncanakan di Kemukiman Nanggroe Timur, Kecamatan Ulim. Gampong ini bertujuan untuk menjadi model kawasan mandiri yang mengedepankan tiga aspek utama: mandiri energi, mandiri pangan, dan mandiri generasi. Dalam hal mandiri energi, kawasan ini akan mengembangkan sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau biomassa, untuk memenuhi kebutuhan energi lokal secara berkelanjutan.

Untuk aspek mandiri pangan, Gampong Terpadu akan menerapkan teknologi pertanian modern dan sistem pertanian yang efisien guna memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lokal. Sementara itu, mandiri generasi mencakup upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mempersiapkan generasi mendatang untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tetapi juga untuk menciptakan model pembangunan yang dapat direplikasi di gampong-gampong lain di Kabupaten Pidie Jaya.

2.7.3.6 Kawasan Historis Blang Raweue

Kawasan Historis Blang Raweue terletak di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan merupakan salah satu lokasi penting dalam konteks wisata sejarah di Aceh. Kawasan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena dulunya merupakan kawasan militer yang digunakan oleh Kerajaan Aceh. Sebagai salah satu pusat kekuatan militer, Blang Raweue memainkan peran strategis dalam pertahanan dan penguasaan wilayah pada masa kejayaan Kerajaan Aceh.

Saat ini, Kawasan Historis Blang Raweue tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tetapi juga merupakan bagian dari Kawasan Strategis taman nasional dan konservasi alam Ulu Masen. Kawasan Strategis ini ditetapkan untuk pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata yang berkelanjutan, mengingat nilai historis dan ekologisnya yang penting. Blang Raweue menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menjelajahi jejak-jejak sejarah militer Aceh, belajar tentang strategi pertahanan kerajaan, dan memahami lebih dalam tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu.

Pengembangan kawasan ini sebagai destinasi wisata sejarah diharapkan dapat menarik minat wisatawan, mendukung pelestarian warisan budaya, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Upaya untuk mengintegrasikan situs sejarah dengan pengembangan kawasan strategis akan membantu mempromosikan nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata

2.7.3.7 Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi wisata pesisir yaitu pantai Wisata Islami di Kecamatan Trienggadeng. Posisi Kecamatan Trienggadeng disepanjang pesisir pantai timur memiliki akses yang mudah karena dilewati jalan utama arteri primer Banda Aceh – Medan. Pemandangan pantai yang indah dan area pantai berpasir yang luas menjadi kelebihan pantai di Kecamatan Trienggadeng. Pengembangan prasarana penunjang wisata di kawasan pantai, serta menjadikan perkotaan Trienggadeng dan sekitarnya dapat menjadi kawasan yang tumbuh cepat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.

2.8 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPK

Sebagai refleksi dari komitmen yang teguh untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, Kabupaten Pidie Jaya menegaskan komitmennya untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) yang berkelanjutan untuk periode 2025-2045. Dalam konteks ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil akan memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan landasan yang krusial dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap langkah pembangunan, Kabupaten Pidie Jaya bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem lingkungan yang menjadi sumber daya utama bagi kehidupan masyarakat serta warisan untuk generasi mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanahkan tentang penekanan bagaimana upaya untuk memastikan bahwa TPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dapat diintegrasikan ke dalam RPJPA. Meskipun demikian, tetap memberikan peranan penting aspek lingkungan hidup melalui instrument daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pembangunan

Potensi permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Secara makro, pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan pembangunan khususnya pendukung ekonomi. Walaupun masih tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi makin melambat. Di samping itu, penciptaan lapangan kerja masih menjadi salah satu masalah besar meskipun angka inflasi relatif kecil dan terkendali. Di sisi lain pertumbuhan nilai investasi masih relatif sangat kecil.

Oleh karena itu untuk dua puluh tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama masyarakat dan semua komponen masyarakat yang ada akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik yang bersifat lokal maupun yang bersifat global, permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan tujuan dan isu strategis serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

3.1.1 Implementasi pelaksanaan Syariat Islam, Sosial, Budaya dan Adat Istiadat belum optimal.

1) **Pelaksanaan Syariat Islam belum optimal**, meskipun Indeks Pembangunan Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya terhitung baik yaitu sebesar 86 dan provins 82,72. Namun hal tersebut belum mencerminkan upaya optimal penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya yang ditandai dengan Pengelolaan masjid belum sempurna, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Pengumpulan dan distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) masih jauh di bawah potensi yang ada. Dalam hukum jinayat, tingginya kasus pelanggaran dan banyaknya kasus yang belum tertangani

mengindikasikan penegakan hukum syariah yang belum efektif. perkembangan Lembaga Keuangan Syariah masih lambat, Indeks Pembangunan Syariat di Kabupaten Pidie Jaya belum mampu diukur dengan baik dan akurat.

2) **Belum optimalnya pendapatan dan Pendistribusian Zakat**, hal ini ditandai dengan kecilnya pendapatan daerah dari Zakat yaitu hanya Rp.3,6 Milyar, sedangkan potensi zakat diperkirakan hampir mencapai 10 Milyar, Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kinerja aparatur dalam menggali potensi zakat yang tersedia, dalam proses pendistribusian juga masih belum maksimal, belum terlihat program yang dapat mengungkit perekonomian para penerima zakat.

3) **Pelayanan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan,** hal ini ditandai dengan masih banyak penyandang disabilitas sebanyak 951 orang namun yang sudah terbantu dengan berbagai program dan sumber dana sebanyak 300 orang, anak terlantar 115, Fakir dan miskin baru dapat disantuni sebanyak 22 persen dari total yang ada, warga lanjut usia terlantar sebanyak 226 orang yang penanganan nya masih belum layak, gelandangan dan pengemis yang belum memperoleh kehidupan yang layak sebanyak 12 orang.

4) **Belum optimalnya pelaksanaan pemajuan kebudayaan** terutama adat istiadat meliputi adat, hukum adat, lembaga adat, dan kapasitas tokoh adat, serta penguatan kembali sistem peradilan adat di gampong dan mukim hal ini ditandai dengan masih rendahnya indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya Aceh yaitu 48,25 dan provinsi Aceh sebesar 48,89 serta nasional 51,90.

3.1.2 Sumber Daya Manusia masih rendah:

1) **Sumber daya manusia masih rendah**, minimnya SDM di Kabupaten Pidie Jaya yang memperoleh kesempatan kerja baik di pemerintahan maupun swasta. hal ini dibuktikan dengan jumlah kelulusan CPNS tahun 2023 hanya 30 persen yang berasal dari Kabupaten Pidie Jaya. Selebihnya CPNS yang lulus berasal dari luar Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan pada sektor swasta, pemerintah belum mampu secara maksimal dalam memberikan pelatihan dan keterampilan atau pendidikan tambahan yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja, hingga tidak mampu bersaing di tingkat daerah dan nasional.

2) **Tingkat Pendidikan masih belum ideal.** Hal ini ditandai Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masih jauh dari angka yang ditetapkan UNDP sebesar 18 Tahun, Angka Harapan Lama Sekolah kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 berada di 14,99 tahun. Sesuai tabel 3.1.

Tabel 3.1
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional Tahun 2018-2023

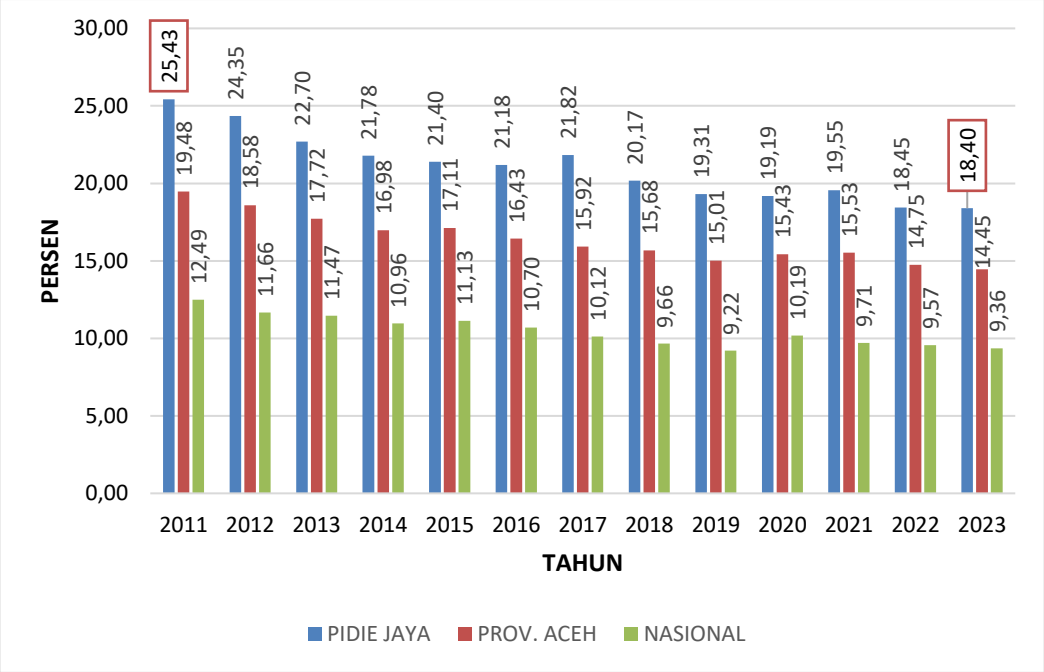
No	Uraian	Tahun					
		2018*	2019	2020	2021	2022	2023
1	PIDIE JAYA	14,53	14,54	13,82	14,97	14,98	14,99
2	ACEH	14,27	14,3	14,31	14,36	14,37	14,38
3	NASIONAL	12,91	12,95	12,98	13,08	13,1	13,15

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2024 (data awal)

3) **Mutu guru belum optimal dan merata**. Guru tersertifikasi pada jenjang pendidikan SD sudah mencapai 80 persen, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP guru yang tersertifikasi belum mencapai 60 persen dan selain itu masih tingginya guru dengan status bukan PNS yaitu mencapai 63 persen serta distribusi guru yang belum sesuai dengan kebutuhan sekolah.
4) **Masih rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Pidie Jaya**, dimana indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sebesar 64,08 sedangkan Aceh sebesar 66,23 dan Nasional sebesar 69,42;
5) **Angka ketergantungan penduduk masih tinggi,** hal ini ditandai dengan rasio ketergantungan hidup di Kabupaten Pidie Jaya 48,62 sedangkan Aceh lebih tinggi yaitu 53,51 persen, secara nasional lebih rendah yaitu 44,4%, Ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia non-produktif (seperti anak-anak dan orang lanjut usia) terhadap penduduk usia produktif di Kabupaten Pidie Jaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh secara keseluruhan dan rata-rata nasional.
6) **Kemandirian dayah secara ekonomi juga masih rendah**, kurangnya inisiatif membekali para santri dayah dengan ilmu kewirausahaan, kurangnya mendapatkan pelatihan-pelatihan baik dibidang pertanian, perikanan dan lain-lain. Akan tetapi lebih fokus pada perbaikan sarana prasarana. Dari 69 jumlah dayah hanya 28% yang mandiri. Belum munculnya 3 peran dayah yang utama yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan.

7) **Masih tingginya prevalensi stunting,** Angka Prevelansi Stunting Kabupaten Pidie Jaya tahun 2023 sebesar 29,4 angka ini lebih tinggi dari angka stunting Nasional yaitu 21,5 persen. Tingginya prevalensi stunting menunjukkan adanya masalah gizi dan kesehatan yang perlu ditangani secara serius di Kabupaten Pidie Jaya;

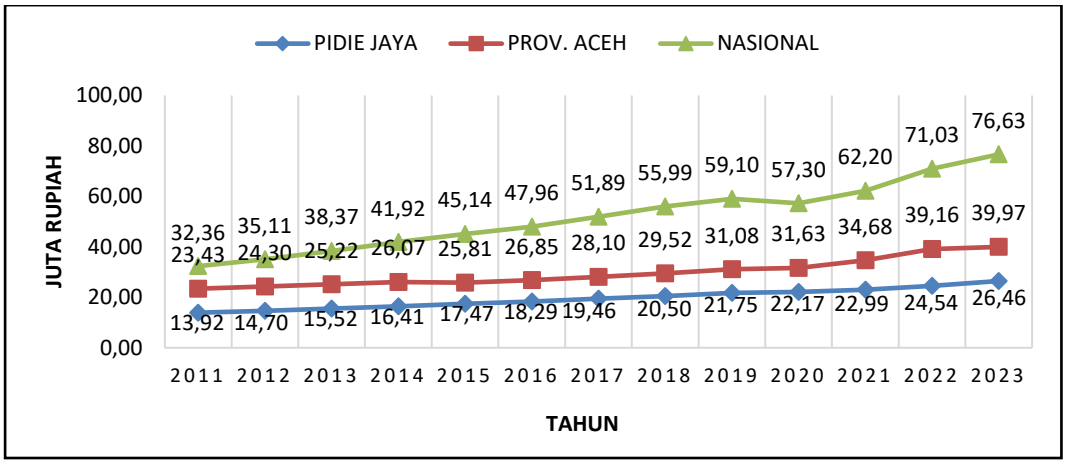
8) **Angka kemiskinan masih tinggi**, Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten termiskin ke-4 di Aceh yaitu pada angka 18,40 di tahun 2023, sedangkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 (Maret 2023) dan nasional 9,36%. Kemiskinan dapat mencakup rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, infrastruktur yang kurang, serta masalah-masalah lain yang terkait dengan kesenjangan ekonomi dan sosial.



Sumber : BPS Aceh Tahun 2024 (data awal)

Gambar 3.1 Perbandingan Angka Kemiskinan Pidie Jaya Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2011 s.d 2023 (Persentase)

9) **Pendapatan perkapita masih rendah**, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar Rp. 26,46 Juta dan pendapatan Per Kapita Aceh Rp. 39.97 Juta sedangkan nasional Rp. 71.03 juta, Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan per kapita di Kabupaten Pidie Jaya termasuk kurangnya kesempatan kerja yang layak, rendahnya produktivitas ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya.



Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 (data awal)

Gambar 3.2 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya, Aceh dan Nasional (ADHB) Tahun 2011-2023 (Juta Rupiah),

10) **Pemberdayaan Gender yang masih rendah**, hal ini ditandai dengan akses terbatas kepada pendidikan dan pekerjaan, kekerasan gender, dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik serta hukum, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar 52,15 sedangkan Aceh 63,54 dan nasional 76,90.

11) **Penanganan Disabilitas belum maksimal,** hal ini ditandai oleh masih rendahnya persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, yaitu hanya 20% dari jumlah 236 PMKS.

12) **Kesejahteraan pekerja belum maksimal**, hal ini ditandai oleh masih redahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagkerjaan di kabupaten Pidie Jaya sebesar 2,33%, dan Aceh sebesar 20,86%. Sedangkan nasional sudah mencapai 26,97 persen.

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya belum maksimal dan fluktuatif:

1) **Perkembangan laju perekonomian Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi dan masih kurang menggembirakan**, hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Kabupaten Pidie Jaya sebesar 4,24 persen dan Aceh sebesar 4,23 persen sedangkan nasional 4,94 persen.

2) **Inflasi Kabupaten Pidie Jaya masih belum stabil**, yang tercermin dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga akhir Desember 2024 pada angka 0,51 %. Pada prinsipnya angka ini baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai hingga 5 persen per tahun. Biasanya komoditi seperti tanaman pangan harganya berfluktuatif disebabkan cuaca ekstrem dan gagal panen. Dampak dari inflasi yang tidak

stabil ini dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada daya beli yang melemah dan peningkatan biaya hidup, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

3) **Belum optimalnya iklim berusaha untuk usaha kecil dan mikro**. Hal ini ditandai Masih rendahnya persentase jumlah usaha kecil dan menengah, termasuk jumlah koperasi aktif Kabupaten Pidie Jaya yang hanya mencapai 18 persen.
4) **masih minimnya pengetahuan dan pemanfaatan ekonomi digital** bagi pengembangan koperasi, ekonomi kreatif, dan UMKM, Masih rendahnya Proporsi Ekonomi Kreatif terhadap PDRB, disebabkan minimnya infrastruktur dan teknologi yang mendukung ekonomi digital dan minimnya masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk proses kegiatan perekonomian. Sebagai contoh hanya dibawah 10 dunia usaha yang mendaftarkan usahanya pada e-catalok lokal.
5) **Industri Pengolahan dan pariwisata masih lemah**, hal ditandai dengan Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya masih sangat rendah dan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang hanya 3,48 persen dimana komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan langsung dijual tanpa melalui proses hilirisasi.
6) **Iklim investasi belum mengembirakan,** hal ini ditandai dengan masih minimnya Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB dan Nilai investasi Kabupaten Pidie Jaya masih sangat rendah dengan realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar 91 milyar.
7) **Pola konsumsi pangan dan gizi masyarakat belum seimbang** yang terlihat dari rendahnya asupan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral dalam pola makan sehari-hari. Masyarakat cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan pokok seperti beras, namun kurang dalam mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan sumber protein hewani atau nabati. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, keterbatasan akses terhadap bahan pangan bergizi, serta pengaruh kebiasaan dan budaya makan yang turun-temurun. Akibatnya, masalah gizi seperti stunting pada anak-anak.
8) **Produksi Pertanian semakin menurun**, hal ini ditandai dengan masih rendahnya produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan,

hortikultura) dan peternakan, seperti produktivitas padi atau bahan pangan utama bahan lokal yang masih berkisar 6,78 ton per hektar di tahun 2021 menjadi 5,9 ton/ha pada tahun 2022, produksi padi mengalami penurunan, pada tahun 2021 produksi padi Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 98.228 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 94.512 ton. (update data ke tahun 2023)

9) **Luas panen juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.** Luas panen padi di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 16.285 hektar pada tahun 2021 menjadi 13.832 hektar pada tahun 2022, dan semakin berkurang menjadi 11.802 hektar pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, petani kesulitan memperoleh Pupuk, serta berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk keperluan lain. Selain itu, serangan hama dan penyakit tanaman yang tidak terkendali juga berkontribusi terhadap penurunan luas panen.
10) **Masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian.** Hal ini disebabkan karena sebagian besar komoditas pertanian dijual dalam bentuk mentah, tanpa melalui proses yang dapat meningkatkan kualitas dan harganya. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengelola produk pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tambah juga masih terbatas. Akibatnya, pendapatan petani tetap rendah, dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah belum maksimal.
11) **Kesejahteraan Petani belum maksimal,** hal ini tercermin dari rendahnya pendapatan dan kualitas hidup Petani. Meskipun pertanian merupakan sektor utama, banyak petani di Kabupaten Pidie Jaya masih menghadapi tantangan besar, seperti akses terbatas ke teknologi modern, modal, dan pasar yang menguntungkan. Selain itu, rendahnya nilai tambah dari komoditas pertanian memperparah kondisi, karena hasil panen sering dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Kurangnya dukungan dalam bentuk pelatihan, infrastruktur, dan perlindungan harga juga membuat petani rentan terhadap fluktuasi pasar dan cuaca.
12) **Pengelolaan dan produktivitas kelautan dan perikanan belum maksimal**, hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil tangkapan dan produksi perikanan serta kurangnya pengelolaan sumber daya laut yang

berkelanjutan. Meskipun sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar, masalah seperti penangkapan ikan yang tidak teratur, kerusakan habitat, dan keterbatasan teknologi serta fasilitas pendukung menyebabkan produktivitas rendah. Selain itu, kurangnya program pelatihan dan bimbingan bagi nelayan serta sistem pengawasan yang lemah berkontribusi terhadap pengelolaan yang tidak efektif.

13) **Potensi Kelautan dan perikanan Aceh khususnya di Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap ancaman IUU Fishing** (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) dan Destructive Fishing, dan belum optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan konservasi perairan dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang berkelanjutan,

14) **Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya** yang tercermin dari rendahnya produktivitas dan efektivitas sistem budidaya yang ada. Meskipun sektor ini memiliki potensi besar, berbagai tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, teknologi budidaya yang belum berkembang, dan pengetahuan yang terbatas di kalangan petani ikan menghambat kemajuan. Sistem pengelolaan yang tidak efisien, termasuk manajemen pakan dan kualitas air yang buruk, juga berkontribusi terhadap hasil budidaya yang tidak maksimal.

3.1.4 Kualitas Tatakelola pemerintahan dan inovasi daerah belum optimal.

1) **Pemanfaatan Digital untuk pelayanan publik belum optimal,** Hal ini ditandai dengan keterbatasan akses dan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanan pemerintah. Meskipun teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, banyak layanan publik masih dikelola secara manual atau melalui metode tradisional, menyebabkan proses yang lambat dan kurang efisien. Kurangnya infrastruktur digital, keterampilan teknis, dan akses internet di beberapa wilayah juga membatasi penerapan sistem e-government dan aplikasi pelayanan online. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan layanan digital memperparah situasi.

2) **Pelaksanaan otonomi khusus Aceh belum optimal** yang diindikasikan belum diaplikasikan secara penuh peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam UUPA dan Mulai tahun 2028 Pemerintah Aceh tidak lagi menerima dukungan Dana Otonomi Khusus.

3) **Belum terintegrasinya data dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan**. SIPD masih mencakup perencanaan dan penganggaran sedangkan integrasi dengan penatausahaan dan pelaporan serta hasil monitoring dan evaluasi belum berjalan.
4) **Kemandirian Pendanaan Masih lemah**. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah (dana transfer) sebesar 88 persen dari total APBK, berkurangnya Dana Otsus yang menyebabkan terganggunya pendanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya terutama sektor pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan infrastruktur. Penurunan tersebut mulai tahun 2023 sebesar 50 persen (1 persen dari DAU Nasional) dan pada tahun 2028 menjadi 0 persen. Pendapatan asli daerah masih sangat rendah yaitu 12 persen dari APBK.
5) **Belum optimalnya pelaksanaan riset serta pemanfaatan hasil riset** untuk mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini dikarenakan kabupaten Pidie Jaya belum memiliki Kampus atau universitas. Tanpa adanya institusi pendidikan tinggi, akses terhadap penelitian berkualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan menjadi terbatas.
6) **Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi** melalui penguatan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi dan birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien dimana nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 sebesar 51,45 dengan kategori CC.
7) **Pelayanan dasar belum optimal**, hal ini ditandai dengan Pelayanan dasar belum optimal, yang terlihat dari belum maksimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) keterbatasan akses dan kualitas dalam berbagai sektor layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai, seperti kurangnya fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas. Di sektor pendidikan, infrastruktur sekolah yang terbatas dan kekurangan tenaga pengajar berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi juga belum memadai, menghambat akses dan kenyamanan hidup masyarakat. Keterbatasan anggaran dan koordinasi antara berbagai pihak turut memperburuk kondisi ini.

8) **Pembangunan gampong masih rendah**, hal ini ditandai dengan Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pidie Jaya yaitu 0,65 dan Aceh 0,6483, sedangkan nasional sebesar 0,6724.
9) **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** seperti cakupan akta kelahiran yang belum mencapai 100 persen, cakupan akta kematian yang masih rendah, dan masih belum terbaharuinya data kependudukan by name by address.

3.1.5 Masih tingginya ketimpangan Infrastruktur antar wilayah;

1) **Belum optimalnya sarana transportasi**, hal ini ditandai masih rendahnya kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 65,80 persen dan di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,65 persen;
2) **Penanganan perumahan dan permukiman masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih luasnya permukiman kumuh di Kabupaten Pidie Jaya yaitu terdapat di 66 desa dari 222 desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya;
3) **Infrastruktur dan pelestarian sumber daya air masih belum optimal**, hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemeliharaan dan pelestarian Sumber Daya Air dan masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA; infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 40,39 persen, adanya pengurangan debit air andalan dan beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 38,21 persen dari potensi genangan banjir; dan Masih rendahnya irigasi dalam kondisi baik
4) **Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan**, belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat karena belum berfungsinya terminal angkutan orang di kecamatan Meurah Dua.
5) **Kawasan transmigrasi belum optimal**, hal ini dikarenakan banyaknya kawasan transmigrasi nasional maupun lokal yang ditelantarkan dan memerlukan pembinaan lebih lanjut

3.1.6 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah;

1) **Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah**, hal ini ditandai dengan masih tingginya indeks Risiko Bencana mencapai 137,6 (tahun 2023)

2) **Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan hidup,** hal ini ditandai Indeks kualitas lingkungan hidup masih 71,32 sedangkan Aceh sebesar 78,29 sedangkan indeks kualitas hidup nasional 72,42 persen.
3) **Pembangunan energi dan Sumber Daya Mineral belum optimal**, hal ini ditandai dengan Belum tercapainya akses listrik untuk seluruh masyarakat yang tercermin dari belum tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen hingga saat ini, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, energi angin (bayu), dan juga energi alternatif lainnya dari bahan nabati; dan Masih banyaknya terdapat pertambangan tanpa izin (PETI).

3.2 Isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan Isu Strategis Aceh. Isu strategis Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar. Berikut merupakan Isu Megatren dan Internasional, Isu strategis Nasional, Isu Strategis Aceh dan Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya.

3.2.1 Isu Megatren dan Internasional

Isu Strategis Megatren dan Internasional meliputi:

3.2.1.1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan fenomena yang melibatkan perubahan dalam struktur populasi manusia dunia yang meliputi pertumbuhan populasi, penuaan populasi, urbanisasi, migrasi dan perubahan struktur keluarga yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. *International Monetary Fund (IMF)* menyatakan bahwa tren peningkatan populasi dunia akan terus berlanjut. Sebagian besar pertumbuhan populasi dunia akan terjadi di negara negara kurang berkembang, dimana populasinya meningkat lebih dari lima kali lebih cepat dari pada di negara negara maju (IMF) dimasa mendatang. Sementara itu menurut data yang dikeluarkan *Word Population Prospects* (2022) diprediksi populasi penduduk dunia pada tahun 2050 meningkat menjadi 9,7 miliar jiwa. Hal ini tentu akan menjadi tantangan dalam penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan keterbatasan sumber daya alam dan lahan.

3.2.1.2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global menjadi tantangan bagi setiap negara. Berbagai dinamika geopolitik seperti perebutan pengaruh antara Amerika Serikat-Tiongkok, konflik di Timur Tengah, hingga merebaknya gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama yang bersifat transnasional memiliki dampak bagi situasi global. Disisi geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2050, nilai output negara negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai ouput dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Selanjutnya peranan negara maju (G7) juga akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output menjadi 20 persen pada tahun 2050 dari 32 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2050 diperkirakan perekonomian global akan meningkat sebanyak 3 kali dibandingkan tahun 2015 dengan kontribusi terbesar dari 5 (lima) negara (Tiongkok, India, AS, Jepang dan Indonesia) yang mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

3.2.1.3. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang semakin maju menjadi kekuatan utama yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dari komunikasi hingga industri, dari pendidikan hingga bisnis. Tidak dapat dipungkiri perkembangan dalam teknologi informasi memberikan dampak yang sangat besar untuk kehidupan manusia saat ini. Salah satu dampak utama kemajuan teknologi adalah konektifitas global yang samakin kuat. Melalui internet jarak dan batas geografis tidak lagi menjadi hambatan. Internet telah membuka pintu bagi munculnya bisnis baru dan inovasi. Disektor pendidikan, teknologi telah memperluas akses ke pengetahuan dan peluang belajar. *E-learning* dan kursus online telah mengubah cara mendapatkan pendidikan. Sementara itu, dibidang industri kemajuan teknologi telah mempercepat proses produksi, mengotomatiskan tugas tugas rutin dan meningkatkan efisiensi. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu menghadapi era globalisasi yang semakin terhubung dan kompleks.

3.2.1.4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Menurut UU DESA, dua pertiga penduduk dunia pada tahun 2050 akan tinggal di kawasan perkotaan, dimana sekitar 95 persen berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies pada umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Berdasarkan laporan *United Nation* tentang Urbanisasi Global, diproyeksi pada tahun 2050 populasi perkotaan dunia akan bertambah sebesar 2,5 miliar orang dimana hampir 90 persen peningkatan terkonsentrasi di Asia dan Afrika.

3.2.1.5. Konstelasi Perdagangan Global

Menurut laporan Prospek Ekonomi Global yang dikeluarkan Bank Dunia, selama tahun 2023 perdagangan global barang dan jasa hampir stagnan, menandai salah satu kinerja terlemah dalam 50 tahun terakhir di luar resesi global. Volume perdagangan barang turun sebesar 1,9% akibat perlambatan tajam dalam produksi industri global. Ekonomi negara maju, terutama di Eropa, mengalami penurunan signifikan, sementara ekonomi untuk negara-negara pasar berkembang (*emerging markets*) mengalami hasil yang beragam dengan pertumbuhan di Tiongkok dan Eropa serta Asia Tengah tetapi kontraksi di Amerika Latin, Afrika sub-Sahara, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

Dalam beberapa bulan terakhir, perdagangan global terhambat oleh gangguan di dua rute pelayaran penting. Serangan terhadap kapal-kapal di wilayah Laut Merah mengurangi lalu lintas melalui Terusan Suez, rute maritim terpendek antara Asia dan Eropa, yang biasanya dilalui oleh sekitar 15 persen volume perdagangan maritim global. Sebaliknya, beberapa perusahaan pelayaran mengalihkan kapal-kapal mereka di sekitar Tanjung Harapan. Hal ini meningkatkan waktu pengiriman rata-rata 10 hari atau lebih, sehingga merugikan perusahaan-perusahaan dengan persediaan terbatas. Di sisi lain dunia, kekeringan parah di Terusan Panama telah memaksa pihak berwenang untuk memberlakukan pembatasan yang telah secara substansial mengurangi penyeberangan kapal setiap hari sejak Oktober 2024,

memperlambat perdagangan maritim melalui titik kemacetan utama lainnya yang biasanya mencakup sekitar 5 persen dari perdagangan maritim global.

3.2.1.6. Tata Kelola Keuangan Global

Secara umum, perekonomian global yang sehat sangat tergantung pada sistem tata kelola yang kuat melalui kerangka regulasi dan pengawasan yang tepat. Namun, pembangunan struktur tata kelola yang memadai untuk pasar global bukanlah tugas yang mudah. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (Al), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (skill) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan. Salah satu inovasi disektor keuangan adalah pemanfaatan AI, untuk tata kelola keuangan yang lebih baik diperlukan regulasi dan peningkatan pengawasan AI dalam mengatasi potensi risiko stabilitas keuangan bagi sektor perbankan dan NBFI, dengan kata lain kerangka regulasi dan pengawasan harus mengikuti pendekatan yang seimbang yang memungkinkan peserta sektor keuangan untuk memanfaatkan potensi dan memahami risiko AI.

3.2.1.7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Kelas menengah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi global sebagai pendorong utama pengeluaran konsumen. Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif dengan kebangkitan kelas menengah. Kelas menengah yang kuat akan menghasilkan basis konsumen yang stabil dan berkontribusi pada pertumbuahn ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan kelas menengah. Pada tahun 2045 diprediksi jumlah kelas menengah mencapai 8,8 miliar jiwa atau lebih dari 90 persen populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dimana sebelumnya didominasi oleh kawasan Eropa dan AS, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat tersebut akan menjadi peluang sekaligus tantangan pada aspek sosial ekonomi dan politik. Sebagai

penggerak ekonomi berkelanjutan, kelas menengah global merupakan target pasar yang penting bagi banyak industri internasional (Kharas, 2016). Asia-Pasifik akan tetap menjadi populasi kelas menengah terbesar sementara kelas menengah mapan di Eropa dan Amerika Utara akan mengalami pertumbuhan yang rendah pada tahun 2030. Namun, Amerika Utara kemungkinan besar akan tetap menjadi pendorong utama komsumsi global.

3.2.1.8. Persaingan Sumber Daya Alam

European Environment Agency dalam tulisannya menyatakan bahwa penggunaan SDA secara global telah meningkat sepuluh kali lipat sejak tahun 1900 dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat lagi pada tahun 2030. Meningkatnya permintaan dapat membahayakan akses ke beberapa SDA penting dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, distribusi geografis yang tidak merata dari beberapa SDA dapat meningkatkan volatilitas harga, merusak standar hidup dan bahkan berkontribusi terhadap konflik geopolitik. Diseluruh dunia, negara negara telah mengalami perubahan ekonomi struktural bergeser dari masyarakat agraris yang tergantung pada biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi dan material ke ekonomi perkotaan dan industrialisasi. Kemajuan teknologi dalam pembangunan ekonomi meningkatkan metode dalam menemukan dan mengekstraksi pemanfaatan SDA. Ditambah lagi dengan meningkatnya populasi dunia empat kali lipat pada abad ke 20 dan inovasi dalam mendukung output ekonomi membawa perubahan besar terhadap pola komsumsi. Kedepan, populasi global diprediksi akan meningkat lebih dari sepertiga pada tahun 2050 yang mencapai 9,6 miliar. Output ekonomi dunia diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada periode 2010-2050 dan kelas menengah diperkirakan akan meningkat dari 27 persen menjadi 58 persen dari populasi dunia pada tahun 2030 yang diprediksi sebesar 8,4 miliar jiwa.

3.2.1.9. Perubahan Iklim

Menurut *United Nations*, perubahan iklim mengacu pada perubahan pola suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Diperkirakan sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi penggerak utama dari perubahan iklim khususnya sejak era revolusi industri dengan penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas. Penggunaan bahan bakar fosil telah menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh timbulnya GRK dari berbagai aktivitas manusia berdampak terhadap suhu bumi yang lebih panas, badai yang lebih keras dan merusak menjadi

lebih intens dan lebih banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Ketika suhu meningkat, lebih banyak uap yang terevaporasi yang memperburuk curah hujan yang ekstrim dan banjir. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah ketersediaan air, membuat ketersediaan air semakin langka di lebih banyak wilayah sehingga meningkatkan risiko kekeringan pertanian yang mempengaruhi produksi pangan dan merusak ekosistem baik darat, laut dan sungai. Perubahan iklim dan peningkatan cuaca yang ekstrim dapat meningkatkan kelaparan dan kondisi gizi buruk secara global. Hal ini disebabkan karena rusaknya atau tidak produktifnya sektor perikanan, pertanian dan peternakan. Perubahan iklim global mempunyai dampak yang buruk terhadap keberlangsungan pembangunan pertanian. Perubahan iklim berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan musim tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Pola perubahan curah hujan dan kenaikan suhu hingga banjir maupun kekeringan menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan.

Disektor kesehatan, perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, dampaknya meliputi paparan langsung terhadap perubahan pola cuaca seperti suhu, curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Kejadian cuaca ekstrem ini dapat membahayakan kesehatan manusia, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Secara tidak langsung, perubahan iklim mempengaruhi faktor lingkungan seperti kualitas air, udara, dan makanan, penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air, kehilangan fungsi ekosistem, dan degradasi lahan. Semua faktor ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Risiko kesehatan tidak langsung termasuk kematian dan penyakit yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti penyakit yang disebabkan oleh suhu ekstrem, pencemaran udara, kontaminasi air dan makanan, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor dan hewan pengerat.

Upaya dan solusi mengurangi GRK perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan dari pemanasan global. Industri menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan dalam mencegah meningkatnya emisi GRK. Penerapan teknologi ramah lingkungan, inisiatif keuangan berkesinambungan, penggunaan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), ekonomi sirkular, serta kerja sama antar sektor dilakukan untuk mengurangi emisi karbon pada sektor industri.

3.2.1.10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Perubahan besar terjadi dalam pemanfaatan ruang angkasa untuk beberapa tahun terakhir. Akses dan penggunaan ruang angkasa menjadi hal yang penting bagi masyarakat modern dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Aktifitas ruang angkasa terus mengalami peningkatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta/komersil di seluruh dunia. Pemanfaatan ruang angkasa yang terus meningkat akan menjadi ancaman dan peluang bagi ekonomi, keamanan, kepentingan, nilai dan cara hidup. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara siginfikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa melibatkan semua pelaku baik sektor publik maupun swasta yang ikut dalam kegiatan pengembangan, penyediaan dan penggunaan produk dan layanan antariksa, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur dan penggunaan insfrastruktur antariksa (stasiun bumi, wahana peluncur, dan satelit) hingga ke berbagai aplikasi berbasiskan antariksa (peralatan navigasi, telpon satelit, layanan meteorologi, dll.), serta ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut (OECD, 2012). Beberapa analis memprediksi bahwa industri antariksa dapat menjadi industri bernilai triliun dolar pada tahun 2040.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

3.2.2.1. Produktivitas rendah

Produktivitas pekerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN, yaitu US$ 23,89 ribu per pekerja, sedangkan rata-rata ASEAN adalah US$ 24,27 ribu per pekerja dimana produktivitas yang rendah dapat berdampak pada penurunan PDB per kapita, investasi yang tidak optimal serta juga akan menghambat pengembangan inovasi. Upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja akan ditempuh melalui peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada tujuh subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Pelaksanaan Kebijakan fiskal juga akan diarahkan dengan prinsip konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi. Upaya peningkatan lapangan

kerja yang berkualitas juga diharapkan dapat dapat meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

3.2.2.2. IPTEKIN dan Riset Lemah

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, kebijakan iptekin di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru masih belum menjadi diskursus publik utama baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, maupun di tengah masyarakat. Untuk itu, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia supaya akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal. Iptekin telah terbukti dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses produksi dan diversifikasi produk industry dimana riset dan inovasi diupayakan dengan diversifikasi produk, serta penyiapan infrastruktur pendukung guna menjaga kualitas bahan baku, termasuk infrastruktur konektivitas sebagai penghubung daerah produsen hulu.

Iptekin dan riset menjadi salah satu elemen kunci dalam mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan *(knowledge-based economy)* pada banyak negara maju. Pada masa sekarang banyak negara berkembang telah berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan ekonominya melalui pendekatan Iptekin. Beberapa dari mereka kemudian berhasil melepas status negara berkembang menjadi negara maju yang disebut sebagai negara industri baru, sehingga, dengan cara meniru, mereplikasi, mengadaptasi, mengabsorbsi kebijakan Iptekin dan pengembangan riset ini akan menjadi salah satu bentuk best practices yang dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Namun demikian, seringkali implementasi kebijakan tersebut berjalan tidak sesuai dengan rencana atau tidak mencapai tujuan. Untuk itu, kebijakan iptekin di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan yang antara lain akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat.

3.2.2.3. Deindustrial Dini

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan sektor industri sebagai penopang perekonomian. Namun, dalam satu dekade terakhir kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren penurunan. Hal itu mengindikasikan adanya gejala deindustrialisasi dini, yaitu penurunan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Kontribusi sektor manufaktur Indonesia hanya menyentuh angka 18,3 persen, dari yang sebelumnya pernah mencapai 32 persen, menunjukkan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi dini. Sementara itu, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta industri dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian.

Walaupun Indonesia telah keluar dari status negara berpenghasilan rendah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, namun daya saing manufaktur terus mengalami penurunan. Deindustrialisasi dini disebabkan beberapa faktor, antara lain rendahnya investasi di sektor manufaktur, lemahnya daya saing produk lokal, dan tingginya biaya produksi. Selain itu, pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap kinerja sektor industri. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri memiliki *multiplier effect* yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Industrialisasi menjadi strategi utama bagi banyak negara di dunia untuk membangun ekonominya. Berawal dari Revolusi Industri di Inggris, kemudian melebar ke Eropa dan AS, pasca-Perang Dunia II industrialisasi juga dijalankan banyak negara berkembang untuk mengatasi ketertinggalan. Sebagian negara berhasil, seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Namun, banyak juga yang lambat kemajuannya, bahkan gagal, dan kembali ke struktur ekonomi sebelumnya, tanpa peningkatan ekonomi yang berarti. Industrialisasi merupakan bagian penting dari transformasi ekonomi dengan menjadikan sektor manufaktur sebagai penggerak utama ekonomi. Dengan demikian, intensitas modal, produktivitas, dan teknologi yang lebih tinggi, keterkaitan yang kuat dengan sektor primer dan jasa serta sifatnya yang tradable (dapat diperdagangkan ke luar negeri), sektor industri akan tumbuh tinggi dengan menarik sektor primer (pertanian dan pertambangan) serta membangun sektor jasa yang lebih produktif. Dinamika ini juga diikuti dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke manufaktur secara

bertahap. Deindustrialisasi dini dapat berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia, dimana sektor industri memiliki multiplier effect yang tinggi, yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.2.2.4. Pariwisata dibawah Potensi

Pariwisata Indonesia memang memiliki potensi besar, namun masih belum optimal. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia karena dua sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian cenderung mengalami stagnasi. Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah, walaupun secara jumlah konstribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dalam bentuk sumbangannya terhadap PDB, penerimaan devisa,dan penyerapan tenaga kerja. Potensi yang besar dari sektor pariwisata di Indonesia harus dikembangkan dan ditingkatkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pariwisata juga merupakan sebuah industri yang kompleks karena melibatkan banyak sekali industri lainnya, seperti industri perhotelan, restoran dan rumah makan, transportasi darat, laut, dan udara, industri kerajinan, industri jasa seperti biro perjalanan dan pemandu wisata, dan lainnya. Karena melibatkan aneka ragam industri lainnya yang berarti juga melibatkan banyak orang dari berbagai profesi, pariwisata disebut memberikan *multiplier effects* atau efek ganda kepada banyak orang. Hal ini, berarti bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Tetapi dengan potensi yang besar di sektor pariwisata Indonesia, banyak sekali kendala untuk memajukan sektor ini. Kendala yang sering ditemui adalah infratruktur baik perjalanan darat, laut maupun udara, sumber daya manusia, teknologi, pengembangan industri yang berdaya saing, pembiayaan, perluasan pasar, serta penciptaan iklim usaha. Semuanya itu, tidak dapat dibenahi dengan waktu satu atau dua tahun. Tetapi membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

3.2.2.5. Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor kelautan menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Namun, peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional masih belum optimal. Sektor kelautan memiliki peran yang

sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, sektor ini menjadi sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan berkontribusi langsung terhadap PDB melalui sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, dan transportasi laut. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sektor kelautan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui beberapa cara. Pertama, melalui eksploitasi sumber daya alam laut seperti perikanan, minyak dan gas, serta mineral laut. Kedua, melalui pengembangan industri berbasis kelautan seperti perikanan, akuakultur, dan pariwisata bahari. Ketiga, melalui peningkatan konektivitas dan transportasi laut yang dapat mendukung perdagangan dan distribusi barang. Keempat, melalui peningkatan investasi di sektor kelautan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh sektor kelautan dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional cukup beragam. Di antaranya adalah masalah pengelolaan sumber daya alam laut yang belum optimal, tingginya tingkat pencemaran laut, perubahan iklim yang berdampak pada keseimbangan ekosistem laut, serta masalah *illegal fishing* yang merugikan perekonomian nasional. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan investasi di sektor kelautan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional antara lain adalah dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan, meningkatkan investasi dan infrastruktur di sektor kelautan, mengembangkan industri berbasis kelautan, serta melakukan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengelolaan sumber daya laut dan penanggulangan masalah lingkungan laut. Sektor kelautan penting untuk masa depan perekonomian nasional karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, sektor kelautan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, sektor ini dapat

menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, mulai dari masalah pengelolaan sumber daya alam, perubahan iklim, hingga illegal fishing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memaksimalkan peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional.

3.2.2.6. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah

Kontribusi koperasi dan UMKM di Indonesia masih dianggap rendah dibandingkan dengan potensinya. koperasimerupakan pilar ekonomi kerakyatan menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan bangsa. Koperasi dengan filosofi kegotongroyongannya mampu mengungkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya. Sehingga jumlah dan kontribusi yang diberikan koperasi perlu terus didorong dengan mengoptimalkan lebih jauh lagi agar mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sebagai upaya untuk mengembangkan koperasi, pemerintah terus mendorong terwujudnya konglomerasi ekonomi Indonesia melalui koperasi. Koperasi juga didorong memiliki peningkatan jumlah anggota yang signifikan dan mengalami peningkatan aset serta mampu berpartisipasi aktif selama pandemi. Selain itu pemerintah juga telah memberikan insentif kepada koperasi dengan program penyaluran dana bergulir Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif khusus bagi UMKM. Langkah ini bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha. Usaha-usaha ini tersebar di berbagai sektor, seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa dan juga termasuk kuliner, fesyen, kerajinan tangan, hingga teknologi digital. Keberadaan UMKM sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, karena mampu

menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional masih ditemukan kendala pada modal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan, kurangnya kelengkapan administrasi, atau minimnya informasi tentang layanan keuangan. Oleh karena itu, program seperti KUR dan berbagai insentif lainnya dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini.

3.2.2.7. Insfrastruktur dan literasi rendah

Salah satu strategi pemerataan pembangunan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, dan listrik juga menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong berkembangnya kegiatan sosial ekonomi di desa. Pengentasan daerah tertinggal berhasil cukup signifikan dari 199 kabupaten Tahun 2005 menjadi 62 kabupaten Tahun 2019.

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi penawaran, tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi adalah kesiapan infrastruktur TIK meliputi kapabilitas dan kapasitas infrastruktur TIK berupa penetrasi jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan infrastruktur TIK juga mengalami hambatan sulitnya kondisi geografi di beberapa daerah. Dari sisi permintaan, masih dihadapi tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal yang tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, serta daya beli yang rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.

Budaya literasi,kreativitas, dan inovasi belum optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, ditandai dengan disparitas kemampuan literasi antarwilayah, serta akses penduduk terhadap TIK yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak diikuti dengan kemampuan dalam memilah informasi.

3.2.2.8. Pembangunan belum berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, dimana disebabkan beberapa hal antara lain kerusakan lingkungan berupa masih tingginya deforestasi hutan yang menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3.2.2.9. Integrasi domestik terbatas

Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga menyebabkan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022), infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi, belum terintegrasi antar sektor, program, daerah, serta belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi dan menurunkan efektivitas dari alokasi perlindungan sosial pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim

3.2.2.10. Kualitas SDM masih rendah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pada era pasar bebas Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat akan dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada Tahun 2045 yang dihadapkan dengan tantangan peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai tingginya kesenjangan IPM antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

3.2.2.11. Tata kelola pemerintahan belum optimal

Tata kelola pemerintahan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan pembinaan dan pengawasan yang kuat serta penerapan kode etik penyelenggara negara. Permasalahan terkait ketimpangan kuantitas dan kualitas aparatur daerah, regulasi yang tumpeng tindih, serta kurang kondusifnya sistem politik daerah yang cenderung menguatkan kelompok kepentingan politik tertentu di daerah merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tata kelola pemerintah yang akan segera diatasi.

3.2.2.12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah

Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, dengan

adanya landasan supremasi hukum dan stabilitas nasional Indonesia di kancah internasional penting untuk memastikan keberlangsungan keberhasilan pembangunan. Kebijakan pembangunan dan penataan sistem hukum nasional akan dikembangkan seiring dengan penataan sistem etika jabatan publik dalam rangka pembinaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dukungan infrastruktur yang efektif untuk peningkatan kualitas demokrasi dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Supremasi hukum menjamin akan kepastian hukum dan keadilan. Stabilitas politik menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif, keamanan nasional yang tangguh menciptakan lingkungan aman, sedangkan stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat.

3.2.2.13. Demokratisasi belum optimal

Proses demokratisasi demokratisasi di Indonesia belum optimal, dimana ini ini disebabkan oleh antara lain adanya kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan mekanisme kokreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat menyebabkan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Penting untuk mencatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak bersifat mutlak dan terus berkembang seiring waktu. Berbagai langkah akan diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan literasi politik melalui program pendidikan dan informasi yang merata. Kedua, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memberantas korupsi dan memperkuat integritas lembaga-lembaga demokratis. Terakhir, perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi politik dan fasilitasi dialog antarkelompok masyarakat.

3.2.2.14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan, tetapi kesenjangan saat ini masih cukup tinggi utamanya antara Jawa dan luar Wilayah Jawa, serta antara wilayah barat dan timur. Oleh karena itu, pembangunan di luar Wilayah Jawa dengan berfokus pada penciptaan pemerataan

ekonomi bagi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan prinsip hilirisasi, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan pertumbuhan di luar Wilayah Jawa lebih tinggi dibandingkan di Wilayah Jawa.

Dengan tercapainya pertumbuhan yang tinggi serta peningkatan urbanisasi di kota-kota di luar Jawa, dorongan migrasi ke Wilayah Jawa akan berkurang, bahkan bisa sebaliknya, terjadi peningkatan migrasi ke luar Wilayah Jawa. Dengan migrasi alami ini dan transmigrasi (migrasi buatan) yang terus diperkuat, tekanan penduduk di Wilayah Jawa akan berkurang. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut, pada setiap wilayah akan diterapkan tiga transformasi, yaitu transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang didukung dengan dua landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Aceh

Isu strategis Aceh meliputi:

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Aceh karena dampaknya dapat mempengaruhi Aceh secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

3.2.3.1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 2). Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, 3) Promosi Gaya Hidup Sehat, 4) Peningkatan Gizi Masyarakat, 5) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, 7) Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, 8) Peningkatan Kesehatan Mental, 9) Pemberdayaan Komunitas, 10) Kebijakan dan Regulasi yang Inklusif , dan 11) Penyusunan Regulasi Pangan dan Obat yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran makanan serta obat-obatan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multi-sektor, melibatkan berbagai aspek dari kesehatan hingga pendidikan dan sanitasi. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menanggulangi stunting yaitu: 1) Intervensi Gizi Spesifik, 2) Intervensi Gizi Sensitif, 3) Penguatan Sistem Kesehatan, 4) Pendekatan Lintas Sektor (pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial), 5). Edukasi dan Peningkatan Kesadaran, 6) Intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, 7) Penggunaan Data dan Penelitian, dan 8) Pengembangan Kebijakan Evidence Based (Berbasis Bukti).

3.2.3.2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan penting dilakukan untuk mencapai pemerataan pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa langkah penting yang dapat diambil yaitu : 1) Pemerataan Pendidikan yang difokuskan antara lain untuk peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan, bantuan dan subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; 2) Perkuatan Pendidikan Vokasi dilakukan antara lain dengan cara pengembangan kurikulum vokasi, pemagangan, kerjasama dengan dunia usaha, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, sertifikasi dan akreditasi, kampanye literasi, penyediaan infrastruktur literasi.

3.2.3.3. Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai sektor dan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan: 1) pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan, 3) peningkatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, 4) bantuan sosial, 5) pemenuhan kebutuhan perumahan dan pelestarian lingkungan hidup, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.

3.2.3.4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dengan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, perlu dilakukan dengan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) diversifikasi

ekonomi, 2) peningkatan investasi, 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4) peningkatan kewirausahaan, 5) pengembangan infrastruktur, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan ekonomi, dan 7) peningkatan produktivitas dan inovasi, 8) pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 9) pengembangan sektor jasa, industri dan pariwisata, 10) pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi.

3.2.3.5. Optimalisasi Riset dan Inovasi serta Teknologi Digital

Optimalisasi riset dan inovasi serta teknologi digital merupakan kunci untuk memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi ini yaitu : 1) meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D), 2) penguatan ekosistem inovasi, 3) pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, 4) optimalisasi teknologi digital, 5) penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset, inovasi dan teknologi digital, 6) kolaborasi internasional, dan 7) pemanfaatan data dan AI (*Artificial Intelligence*).

3.2.3.6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.

Untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, 2) meningkatkan keterampilan dan pendidikan, 3) meningkatkan akses dan inklusivitas, 4) mendorong kewirausahaan, 5) digitalisasi dan teknologi, 6.) kebijakan dan regulasi yang mendukung (berupa insentif pajak, regulasi yang ramah usaha, dan kebijakan tenaga kerja), 7) penguatan sektor umkm, dan 8) peningkatan produktivitas melalui inovasi.

3.2.3.7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport

Memperkuat industri pengolahan dan ekspor adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan standar produk, 2) pengembangan teknologi dan inovasi, 3) peningkatan infrastruktur dan logistik, 4) kebijakan dan regulasi yang mendukung, 5) pengembangan sumber daya manusia, 6) peningkatan akses pasar, 7) dukungan keuangan dan investasi, 8) pemberdayaan umkm, dan 9) keberlanjutan dan ramah lingkungan.

3.2.3.8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau adalah dua tujuan yang saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut yaitu : 1) peningkatan produktivitas pangan melalui: a) penggunaan teknologi modern, b) pertanian presisi, c) penggunaan varietas tanaman unggul, d) sistem irigasi cerdas, e) praktik pertanian berkelanjutan, dan 2). pengembangan ekonomi hijau dengan cara: a) pemanfaatan energi baru terbarukan, b) pembangunan infrastruktur energi hijau, c) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, d) konservasi hutan, e) pengelolaan air, f) pengembangan industri hijau, g) penggunaan teknologi ramah lingkungan, h) kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ramah lingkungan, dan i) pendidikan lingkungan.

3.2.3.9. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan spesifik dan memaksimalkan potensi masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital, dan kebijakan perkotaan yang berkelanjutan. Untuk memperkuat pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan agroindustri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM, pariwisata berbasis desa, akses keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya, upaya untuk mensinergikan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan konektivitas dan kolaborasi, dan (2) pengembangan klaster ekonomi.

3.2.3.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 1) peningkatan transparansi, 2) peningkatan akuntabilitas, 3) partisipasi publik, 4)

reformasi birokrasi, 5) pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan 6) pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, 7) memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan dan manajemen SDM, 8) membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum, 9) mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi, organisasi internasional, dan donor internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

3.2.3.11. Memperkuat Otonomi Khusus

Memperkuat Otonomi Khusus Aceh memerlukan berbagai langkah yang terfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hak-hak khusus yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh: 1) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) Pengembangan Ekonomi Lokal, 4) Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 6) Penegakan Hukum dan Keamanan, 7) memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional, 8) Memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan di Aceh sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi khusus serta memastikan bahwa implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu.

3.2.3.12. Kemandirian Ruang Fiskal

Mewujudkan kemandirian ruang fiskal di Aceh memerlukan pendekatan yang terfokus dan spesifik, mengingat karakteristik dan kebutuhan unik Aceh. Beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan yaitu: 1) optimalisasi penerimaan daerah, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan, 3) diversifikasi ekonomi, 4) peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, 5. pengelolaan utang daerah, 6) penguatan kapasitas administrasi fiskal, 7. pemberdayaan ekonomi lokal, dan 8) penguatan kebijakan dan regulasi. 8) diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat. 9) Peningkatan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, 10) Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh, 11) Promosi

investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, 12) mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif.

3.2.3.13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan karakteristik unik Aceh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Syariat Islam, 2) Penegakan Hukum Syariat Islam, 3) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Aceh, 4) Penguatan Kelembagaan Adat, 5) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariat dan Budaya, 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Pengembangan Budaya, 7) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kekhususan Aceh yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, 8) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh.

3.2.3.14. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas, serta memperkuat gender dan keluarga, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro, 2) penanganan disabilitas, 3) memperkuat gender, 4) memperkuat keluarga (pendidikan, kesehatan, gizi dan ekonomi), 5) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

3.2.3.15. Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan

Pemanfaatan sumber daya cadangan mineral dan batubara serta migas, diperoleh secara maksimal haruslah dilaksanakan dengan mengedepankan tata kelola pertambangan yang profesional, menerapkan kaidah pertambangan yang baik yang berwawasan lingkungan serta berdampak positif bagi masyarakat Aceh. Beberapa Upaya spesifik yang dapat dilakukan selain mendukung kebijakan nasional diantaranya: 1) Pemetaan potensi Cadangan Minerba serta MIgas Aceh yang

terintegrasi, 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap IUP agar berstatus clear and clean, 3) Peningkatan industri hulu berbasis Minerba dan Migas yang prospektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 4) Hilirisasi industri minerba, minyak dan gas di wilayah Aceh.

Mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan dan energi baru terbarukan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan antara lain: 1) pengembangan kebijakan dan regulasi, 2) mendorong investasi pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, 3) peningkatan efisiensi energi, 4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup, 5) edukasi dan kesadaran publik, 6) penelitian dan inovasi, dan 7) pengembangan ekonomi hijau.

3.2.3.16. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam dan *antropogenik*. Berikut adalah Langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana antara lain: 1) penguatan sistem peringatan dini, 2) penguatan infrastruktur dan tata ruang, 3) pengembangan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, 4. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, 5) penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan 6) pemanfaatan teknologi dan inovasi, 6) meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana, 7) Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.

3.2.3.17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan

Memperkuat pembangunan kewilayahan adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Berikut adalah beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembangunan kewilayahan anatara lain: 1) pengembangan infrastruktur, 2) pemberdayaan ekonomi lokal, 3) peningkatan kualitas hidup, 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 5) pemberdayaan sosial dan kelembagaan, 6) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan 7) meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, 8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah terpencil, terjauh dan pinggiran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan

akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 8) mendorong adopsi inovasi dan teknologi di wilayah yang membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

3.2.3.18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan infrastruktur daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain: 1) investasi infrastruktur strategis, 2) peningkatan pengawasan dan kualitas konstruksi, 3) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, 4) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, 5) peningkatan akses layanan dasar, dan 6). pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan (konservasi lingkungan, pengelolaan air dan tanah, dan pengendalian pencemaran), 7) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Pidie Jaya

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045, penting untuk memahami dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang akan mempengaruhi arah pembangunan di masa mendatang. Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh, dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan memahami isu-isu strategis ini, RPJPK Pidie Jaya dapat disusun secara lebih tepat sasaran, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Terdapat 17 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut:

3.2.4.1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Kabupaten Pidie Jaya perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini termasuk melakukan kampanye penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola makan sehat serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan. Penanggulangan stunting, khususnya pada anak-anak, harus menjadi fokus utama dengan mengoptimalkan program-program pencegahan dan intervensi yang melibatkan ibu hamil dan anak-anak.

3.2.4.2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi, dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.

Isu pemerataan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya harus diatasi dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata serta peningkatan kualitas pendidikan vokasional. Langkah-langkah tersebut meliputi penyediaan fasilitas dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan melakukan program-program literasi dan membuka akses ke perpustakaan umum di berbagai tingkatan.

3.2.4.3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas penting dalam agenda pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Diperlukan implementasi program bantuan sosial yang efektif, seperti bantuan langsung tunai dan program keberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya ini harus disertai dengan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi masyarakat miskin.

3.2.4.4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan serta Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Pidie Jaya harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya serta mengoptimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya. Langkah-langkah ini melibatkan mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta memperkuat infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

3.2.4.5. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus mendukung optimalisasi riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini melibatkan kemitraan antara lembaga riset, industri, dan pemerintah untuk meningkatkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi, serta fasilitasi pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital dalam usaha mereka.

3.2.4.6. Kemudahan Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat

Kabupaten Pidie Jaya perlu menciptakan peluang kerja yang lebih mudah diakses oleh masyarakat serta meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini dapat

dilakukan melalui pembangunan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, perlu diperluas peluang pelatihan keterampilan dan pendidikan formal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

3.2.4.7. Pengembangan Industri Pengolahan dan Ekspor

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi produk lokal, Kabupaten Pidie Jaya harus memperkuat sektor industri pengolahan dan meningkatkan kemampuan ekspor. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong diversifikasi produk lokal, memperkuat jejaring kerjasama antarperusahaan, serta meningkatkan pemasaran produk lokal ke pasar nasional dan internasional.

3.2.4.8. Pengembangan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.

Kabupaten Pidie Jaya harus mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah ini meliputi dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan, penerapan teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas, serta investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi.

3.2.4.9. Perkotaan dan Pendesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Pembangunan perkotaan dan pendesaan harus menjadi fokus untuk menjadikan keduanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini membutuhkan investasi dalam infrastruktur yang memadai di kedua wilayah tersebut, serta pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3.2.4.10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.

Kabupaten Pidie Jaya harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini mencakup peningkatan kapasitas dan transparansi lembaga pemerintahan, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberdayaan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

3.2.4.11. Kemandirian Ruang Fiskal Daerah.

Kabupaten Pidie Jaya harus meningkatkan kemandirian pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta pengelolaan utang yang bijaksana untuk menjaga stabilitas fiskal.

3.2.4.12. Penguatan Syariat Islam dan Budaya Aceh.

Penting bagi Kabupaten Pidie Jaya untuk memperkuat pemahaman dan praktik syariat Islam serta melestarikan budaya Aceh sebagai bagian integral dari identitas lokal. Hal ini melibatkan penyelenggaraan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, dan program-program seni dan kebudayaan yang memperkuat nilai-nilai dan tradisi lokal.

3.2.4.13. Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga.

Kabupaten Pidie Jaya harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani masalah pekerja migran kembali ke daerah asal (PMKS), orang dengan disabilitas, serta memperkuat peran gender dan keluarga dalam pembangunan. Ini termasuk pengembangan program inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dan orang dengan disabilitas, serta pemberdayaan perempuan melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

3.2.4.14. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan

Kabupaten Pidie Jaya harus memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini meliputi pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, investasi dalam energi terbarukan, serta peningkatan efisiensi energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3.2.4.15. Pengurangan Risiko Bencana.

Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus diperkuat untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya. Ini mencakup perbaikan sistem peringatan dini, penyusunan rencana tanggap darurat yang efektif, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

3.2.4.16. Perkuatan Pembangunan Kewilayahan.

Pembangunan kewilayahan harus didorong untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar di wilayah pedesaan. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan potensi ekonomi lokal di pedesaan.

3.2.4.17. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas.

Kabupaten Pidie Jaya harus terus meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi, serta pemeliharaan rutin dan perawatan infrastruktur yang sudah ada.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari Analisa sebelumnya. Gambaran cita-cita dan harapan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi Pembangunan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita bersama Masyarakat daerah atau stakeholder Pembangunan daerah, yang merefleksikan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

4.1. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin di capai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gab) antara kondisi dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan. Dalam menentukan Visi, Kabupaten Pidie Jaya tetap mengacu pada Visi Aceh dan Nasional guna menjaga keselarasan dan konsistensi sehingga tujuan Indonesia emas pada tahun 2045 dapat terwujud.

Perumusan Visi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025 – 2045 telah disingkronkan dengan visi Aceh yaitu “Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan” dan visi nasional yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, berdasarkan kondisi Kabupaten Pidie Jaya saat ini dan skenario yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki maka Visi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya:

“PIDIE JAYA YANG ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Maju dan Berkelanjutan:

ISLAMI merupakan suatu kondisi masyarakat Pidie Jaya yang secara utuh menjalankan segala aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam aspek aqidah, syariah dan akhlak. Karakter yang islami tersebut tercermin pada praktek kehidupan masyarakat Pidie Jaya yang memiliki akhlak mulia, toleran, sopan santun, taat beribadah, beretika, cinta damai, anti kekerasan, mencintai ilmu, taat aturan dan kooperatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Masyarakat Pidie Jaya berkomitmen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tertanam kuat dalam budaya dan kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam berbagai dimensi. Pertama, Masyarakat Pidie Jaya memiliki aqidah yang kokoh, dengan keyakinan kuat terhadap ajaran Islam sebagai landasan spiritual. Kedua, Syariat Islam ditegakkan dengan adil dan konsisten dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, mencakup pelaksanaan ibadah, hukum muamalah, dan hukum jinayat. Ketiga, masyarakat Pidie Jaya dikenal dengan akhlak yang mulia, seperti kejujuran, amanah, dan adil, yang tercermin dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Keempat, kehidupan sosial yang harmonis tercipta dalam lingkungan yang damai dan toleran, dengan semangat gotong royong dan ukhuwah yang kuat. Kelima, pendidikan berbasis Islam diarahkan untuk menghasilkan generasi yang cerdas secara intelektual dan tangguh secara moral dan spiritual. Terakhir, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dikelola berdasarkan prinsip ekonomi syariah, menekankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan, serta menjauhi praktik-praktik yang tidak Islami seperti riba dan korupsi.

MAJU tercermin dari kondisi masyarakat Pidie Jaya yang berdaya saing, modern, tangguh, inovatif, dan adil, serta memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing ditingkat daerah, nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas SDM, menguatnya ekonomi, kelembagaan yang sehat, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik yang dinamis.

BERKALANJUTAN adalah kondisi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, Kualitas hidup masyarakat kabupaten Pidie Jaya ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik, sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan estafet pembangunan secara sehat.

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi Kabupaten Pidie Jaya adalah:

1. **Peningkatan Pendapatan per Kapita**
   a. PDRB per kapita (Rp Juta) dari 26,50-27,85 (2025) menjadi 119,34-138,70 (2045).
   b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) dari 44,60 (2025) menjadi 129,64 (2045)
   c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) dari 3,85-4,00 (2025) menjadi 6,94-7,11 (2045).

2. **Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan**
   a. Tingkat Kemiskinan (%) dari 16,35-18,28 (2025) menjadi 0,33-0,83 (2045).
   b. Rasio gini (Indeks) dari 0,220-0,221 (2025) menjadi 0,228-0,251 (2045).
   c. Kontribusi PDRB daerah (%) dari 0,58 (2025) menjadi 1,03 (2045).
   d. Pertumbuhan Ekonomi (%) dari 4,28-4,51(2025) menjadi 4,18-5,17 (2045).

3. **Syariat Islam dan pengaruh secara global meningkat :**
   a. Indeks Pelayanan Publik dari 2,55 (2025) menjadi 5 (2045).
   b. Indeks Pembangunan Syariat dari 80,00 (2025) menjadi 90,00-95,00 (2045).

4. **Daya saing sumber daya manusia meningkat**
   a. Indeks Pembangunan Manusia dari 77,8 (2025) menjadi 90,00 (2045).

5. **Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

   a. Penurunan intensitas emisi GRK (%) dari 36,08 (2025) menjadi 91,09 (2045).

   b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 78,20 (2025) menjadi 86,52 (2045).

Tabel 4.1
Sinkronisasi Visi dan Sasaran Visi RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPA 2025-2045				RPJPK PIDIE JAYA 2025-2045			
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan				Aceh Islami, Maju dan Berkelanjutan				Pidie Jaya yang Islami, Maju dan Berkelanjutan			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US$)	5.500	30.300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	44,23 - 44,41	219,54 -258,70	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	26,50-27,85	119,34-138,70
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI)	46,61	129,64		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	44,60	129,64
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3*	6,94-7,11		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,85 –4,00	6,94-7,11
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0.83	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	16,35-17,82	5,5-3,83
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,290-0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,290-0,293	0,228-0,251		b. Rasio gini (Indeks)	0,220-0,221	0,228-0,251
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03		c. Kontribusi PDRB daerah terhadap Provinsi (%)	0,58	1,03
						d. Pertumbuhan Ekonomi	4,28-4,51	4,18-5,17		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28-4,51	4,18-5,17
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam	a. Indeks Pelayanan Publik	4,01	5	Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan Syariat Islam	a. Indeks Pelayanan Publik	2,55	5
						b. Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00		b. Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,47	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a. Indeks Modal Manusia	0,55	0,47
										b. Indeks Pembangunan Manusia	77,80	90,00
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	a. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	36,08	91,09	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	36,08	91,09
		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82,89	86,52		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,20	86,52

4.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mendukung pencapaian Visi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 maka ditetapkan 8 Misi yaitu:

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial**

   Misi ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berkualitas, tangguh, dan berdaya saing yang difokuskan dengan upaya peningkatan pendidikan merata dan bermutu, layanan kesehatan universal, serta perlindungan sosial yang inklusif, dengan komitmen untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan fasilitas untuk tumbuh dan berkembang.

2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi**

   Transformasi ekonomi dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, mendorong potensi ekonomi lokal khususnya sektor-sektor unggulan serta mengoptimalkan inovasi dalam rangka meningkatkan investasi dan produktifitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta penyediaan sarana prasarana dan SDM yang berkualitas sehingga dapat membentuk pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan.

3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

   Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance)* diwujudkan dengan upaya mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem kelembagaan serta sarana prasarana pemerintah. Selain itu juga mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sistem organisasi perangkat daerah melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah agar lebih optimal, peningkatan pengawasan terkait operasionalisasi sistem organisasi perangkat daerah dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Upaya lainnya adalah dengan cara meningkatkan tata kelola inovasi kebijakan seiring dengan perkembangan wilayah.

4. **Mewujudkan Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi, dan Implementasi Syariat Islam**

   Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi, dan Implementasi Syariat Islam diwujudkan dengan upaya penguatan stabilitas

ekonomi, politik, dan keamanan daerah, serta implementasi nilai-nilai dan pendidikan Islam. Misi ini juga diwujudkan dengan upaya membangun fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan keadilan serta mempromosikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

5. **Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis**

   Misi ini diwujudkan dengan upaya memperkuat ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial, budaya, dan ekologis. Misi ini juga diwujudkan dengan upaya mempromosikan pembangunan karakter yang kuat dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial budaya dan perlindungan lingkungan.

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**

   Misi ini diwujudkan dengan upaya meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Misi ini juga diwujudkan dengan upaya menerjemahkan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola ke tingkat kecamatan dan desa, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan unik setiap wilayah.

7. **Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**

   Misi ini diwujudkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan sebagai pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Misi ini juga diwujudkan dengan upaya meningkatkan pencegahan dan pengurangan potensi kerusakan lingkungan melalui kebijakan yang mengarahkan pada peningkatan konservasi di Kabupaten Pidie Jaya. Upaya yang lain adalah meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pelestarian lingkungan, yang dipadukan dengan upaya pelibatan stakeholder dalam mengelola pembangunan yang berkelanjutan.

8. **Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**

   Misi ini diwujudkan dengan upaya menerapkan kaidah pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan serta memastikan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan dengan manajemen berbasis risiko yang efektif dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Visi dan Misi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Pokok Visi	Misi
Islami	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam
Maju	Mewujudkan transformasi sosial
	Mewujudkan transformasi ekonomi
	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan
	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Tabel 4.3
Sinkronisasi Misi RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPA 2025-2045	Misi RPJPK PIDIE JAYA 2025-2045
1	Transformasi Sosial,	Mewujudkan Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi sosial
2	Transformasi Ekonomi,	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi
3	Transformasi Tata Kelola,	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia,	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7	Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,	Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Kesinambungan Pembangunan.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Tabel 4.4
Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

VISI	NO.	MISI	NO.	TUJUAN PEMBANGUNAN
Pidie Jaya yang Islami, Maju dan Berkelanjutan	1	Mewujudkan Transformasi sosial	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
			2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata
			3	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif
	2	Mewujudkan transformasi ekonomi	4	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
			5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau
			6	Meningkatnya Transformasi Digital
			7	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
			8	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	9	Meningkatnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	4	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	10	Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial
			11	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro
			12	Meningkatnya Implementasi Syariat Islam
	5	Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis	13	Meningkatnya kualitas Beragama dan Berbudaya
	6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	14	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	7	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	15	Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas
			16	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.
	8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	17	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Sejalan dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola berdasarkan permasalahan (gap) dan isu strategis. Proses pencapaian tujuan pada periode akhir yaitu "Pidie Jaya Islami dan Maju 2045" dibagi dalam empat tahap Pembangunan yang akan menjadi acuan bagi 4 periode Bupati terpilih dimasa yang akan datang dalam menyusun RPJMK Pidie Jaya.

5.1. Arah Kebijakan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten Pidie Jaya selama 20 tahun difokuskan kepada (1) penguatan pondasi transformasi (2025-2029), (2) percepatan transformasi (2030-2034); (3) Peningkatan daya saing (2035-2039); (4) Mewujudkan Pidie Jaya Islami dan maju (2040-2045). Uraian masing-masing arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Pada Tahap ini merupakan **penguatan Fondasi Transformasi** dengan fokus sebagai berikut :

a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
b. Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan berkisar antara 4,28 – 4,51 persen pertahun, upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset dan inovasi serta produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan perkotaan di pusat-pusat kecamatan, Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storoge System (ESS), pengembangan PLTA dan PLTB, implementasi carbon credit, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga serta infrastruktur pendukungnya, dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan energi terbarukan.
c. Transformasi tata kelola birokrasi difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi untuk penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis

sistem merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

d. Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan dan kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh yang berkelanjutan, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan individu dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh.
e. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan konektifitas antar wilayah seperti pembangunan jalan dua jalur di ibu kota kabupaten jalan Kabupaten dalam keadaan mantap yang terhubung langsung dengan jalan Provinsi Aceh dan Jalan Nasional, pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pembangunan infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya mengarah kepada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan serta ramah lingkungan.
f. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) terutama pada kecamatan dengan dengan tingkat kemiskinan masih sangat tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, melanjutkan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum serta penyediaan infrastruktur SDA, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas pertanian dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir.
g. Ketahanan ekologi difokuskan; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam beradaptasi menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan

standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storoge System (ESS), implementasi carbon credit, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, tetap mempertahankan moratorium hutan, dan perkuatan kelestarian hutan, serta menjaga keletarian satwa liar agar tetap nyaman di habitatnya serta pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

h. Kesinambungan pembiayaan pembangunan, melalui keberlanjutan dana otsus, reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah seperti keterlibatan perusahaan dengan CSRnya, LSM funding, dioptimalkan fiskal terutama Pendapatan Asli Daerah, serta pembiayaan.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode (2030-2034)

Pada tahap ini, dengan telah terwujudnya fondasi yang kuat, Kabupaten Pidie Jaya melakukan **percepatan transformasi**, sebagai berikut:

a. Percepatan transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan SDM yang inklusif dan berkualitas.

b. Percepatan Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,5-4,75 persen pertahun. Produktivitas sektor unggulan secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah kecamatan, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru dan bioekonomi.

   Transisi energi difokuskan pada eksplorasi energi hijau terbarukan dan energi laut (arus, gelombang, pasang surut dan perbedaan suhu lapisan laut); dan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital.

c. Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik nasional dan lokal yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipatif.

d. Mempercepat dan memantapkan Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, memperkuat implementasi otonomi khusus Aceh
e. Percepatan pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh Kabupaten Pidie Jaya.
f. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses pastisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi Kabupaten Pidie Jaya untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan memastikan untuk pelayanan dasar dan daya saing daerah
h. Optimalisasi pembiayaan pembangunan dari sumber pendanaan pemerintah terutama dana otonomi khusus, sumber pendanaan non pemerintah seperti investasi, CSR dan LSM Funding.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode (2035-2039)

Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk **Peningkatan Daya Saing** daerah, sebagai berikut:

a. Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan transformasi yang

menghasilkan pada kemandirian dan perluasan dan penguatan peran Kabupaten Pidie Jaya dalam *Global Value Chain* (proses menghasilkan suatu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara dimulai dari proses produksi hingga proses pemasaran), pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,75-4,95 persen pertahun penguasaan teknologi menengah dan tinggi, dan menjadi hub maritim Nusantara. Transisi energi difokuskan pada melanjutkan PLTB offshore; implementasi hidrogen dan amonia rendah karbon untuk industri dan transportasi;

b. Transformasi tata kelola pemerintahan ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik nasional dan lokal yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri,
c. Keamanan daerah tangguh, stabilitas, dan pelaksanaan Syariat Islam, dimana tahap ini difokuskan pada pemantapan, sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian Keuangan negara, serta perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan Corruption Impact Assessment (Penilaian Dampak Korupsi), serta aparatur negara dan non-aparatur negara yang paham hukum, memiliki paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi semua warga negara dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik. dan ekonomi, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, penguatan implementasi Syariat Islam, Otonomi Khusus Aceh dan pemantapan intervensi korban konflik dan perdamaian yang semakin kuat.
d. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas kualitas nasional untuk mendorong ekspansi regional dan global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
e. Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang kornprehensif penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih

dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.

f. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk pelayanan dasar dan daya saing daerah serta koneksitas dan aksesibilitas. Pembiayaan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, dan LSM Funding.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode (2040-2045)

Pada tahap ini diharapkan terwujudnya **Pidie Jaya Islami dan Maju 2045**, dengan kondisi Pidie Jaya sebagai berikut:

a. Transformasi sosial difokuskan pada perwujudan masyarakat Pidie Jaya yang islami, sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, SDM unggul, inovatif dan berdaya saing global, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdayaguna, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

b. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Kabupaten Pidie Jaya sebagai kabupaten berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi yaitu 4,95 – 5,17 persen pertahun dan mendukung Aceh menjadi salah satu poros maritim di Nusantara serta masuk ke dalam lima besar produsen pangan di Indonesia dan mendunia. Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu kabupaten yang mendukung kebijakan nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru.

c. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan difokuskan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Keamanan daerah tangguh, supremasi hukum, stabilitas, dan penerapan Syariat Islam secara Kafah, penegakan hukum yang terpadu, akuntabel, berkeadilan dan berkemakmuran ; Pidie Jaya menuju zero corruption (tanpa korupsi) dan terselamatkannya asset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, menguatnya otonomi khusus Aceh, perdamianan yang abadi dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya kemandirian dan pengelolaan fiskal.

d. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dengan konektivitas dan aksesbilitas provinsi maupun nasional dengan dukungan tata kelola

kelembagaan yang handal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

e. Ketahanan dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber farmakologi, dan penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) menuju pencapaian zero emission (tanpa emisi) melalui Transisi energi rendah karbon untuk industri.
f. Terwujudnya Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta didukung dengan pembiayaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PENINGKATAN DAYA SAING	TERWUJUDNYA PIDIE JAYA ISLAMI DAN MAJU 2045
PIDIE JAYA YANG ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1 - Mewujudkan Transformasi Sosial	Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif	Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas	Transformasi sosial yang dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, inovasi dan berdaya saing, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif;.
	Misi 2 - Mewujudkan transformasi ekonomi	Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Pidie Jaya, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat penumbuhan utamanya di Kecamatan, implementasi carbon credit; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan energi terbarukan	Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas secara masif, penguatan dan perluasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di pusat kecamatan, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi. Transisi energi difokuskan; dan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif. Transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, serta pengembangan kemampuan sebagai produsen digital.	Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan kemandirian ekonomi serta, penguasaan teknologi menengah dan tinggi, rendah karbon untuk industri dan transportasi;	Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan pidie jaya sebagai kabupaten berpendapatan tinggi dan salah satu produsen pangan di Aceh, dan menjadi salah satu kabupaten yang mendukung kebijakan penerapan ekonomi hijau dan biru, produk pangan termasuk produk olahan Aceh yang mendunia, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan
	Misi 3 - Mewujudkan Transformasi Tata	Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang	Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya	Transformasi tata kelola ditekankan pada terwujudnya	Transformasi Tata Kelola difokuskan tercapainya regulasi

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PENINGKATAN DAYA SAING	TERWUJUDNYA PIDIE JAYA ISLAMI DAN MAJU 2045
	Kelola Pemerintahan yang Baik	tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas ASN dan masyarakat.	kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, serta masyarakat sipil yang partisipastif	kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik nasional dan lokal yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat yang mandiri,	dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
	Misi 4 - Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi subtansial, stabulitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam.	Mempercepat dan memantapkan Keamanan daerah yang tangguh, demokrasi, stabilitas ekonomi, implementasi Syariat Islam, penguatan stabilitas politik lokal dan nasional, pembaharuan substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi	Keamanan daerah tangguh, stabilitas, dan pelaksanaan Syariat Islam, dimana tahap ini difokuskan pada pemantapan, sistem pencegahan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian Keuangan negara, serta perbaikan tata Kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment, kebebasan sipil dan kesetaraan yang terjamin bagi masyarakat dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik. dan ekonomi, peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja daerah, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, penguatan implementasi Syariat Islam, dan perdamaian yang semakin kuat.	Keamanan daerah tangguh, supremasi hukum, stabilitas, dan Islam Kafah, penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan ; Penekanan tindak korupsi daerah dan terselamatkannya asset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia, perdamaian yang abadi dan nyaman, terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat, menguatnya kemandirian dan pengelolaan fiskal, dan berkontribusi pada penumbuhan ekonomi.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PENINGKATAN DAYA SAING	TERWUJUDNYA PIDIE JAYA ISLAMI DAN MAJU 2045
			kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. pemantapan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam.		
	Misi 5 - Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis	Ketahanan ekologi difokuskan; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. Transisi energi difokuskan pada pemanfaatan Energy Storoge System(ESS); implementasi carbon credit, peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya, tetap mempertahankan moratorium hutan, dan perkuatan kelestarian hutan, serta penyelesaian konflik satwa	Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses pastisipasi yang inklusif; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten; meningkatnya manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.	Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang kornprehensif penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; serta pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan, serta integrasi sistem pangan.	Ketahanan dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber farmakologi, dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian emisi zero emission melalui Transisi energi rendah karbon untuk industri.
	Misi 6 - Pembangunan Kewilayahan yang	Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan jalan Kabupaten dalam keadaan	Pembangunan wilayah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur	Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas antar	Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk menjaga ketersediaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		PERKUATAN PONDASI TRANSFORMASI	PERCEPATAN TRANSFORMASI	PENINGKATAN DAYA SAING	TERWUJUDNYA PIDIE JAYA ISLAMI DAN MAJU 2045
	Merata dan Berkeadilan	mantap pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, mengarah kepada pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dan ramah lingkungan. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok. Kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum dan penyediaan infrastruktur SDA, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas pertanian dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir	pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas fisik, terutama jalan kabupaten yang masih belum mantap Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk menyiapkan manusia yang berdaya saing di seluruh Pidie Jaya	wilayah untuk mendorong ekspansi regional terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat penumbuhan yang didukung dengan pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah	infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di daerah dengan konektivitas dan aksesbilitas nasional dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang handal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
	Misi 7 - Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan.	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang didukung komitmen dan partisipasi para pihak.	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang berimplikasi pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan yang berimplikasi untuk pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah serta koneksitas dan aksesibilitas	Terwujudnya Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Misi 8 - Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.	Kesinambungan pembiayaan pembangunan, melalui keberlanjutan dana otsus, reformasi tata kelola mobilisasi dan optimalisasi pembangunan non pemerintah seperti keterlibatan perusahaan dengan CSRnya, LSM funding, dioptimalkan fiskal terutama Pendapatan Asli Pidie Jaya serta pembiayaan.	Dalam pembiayaan pembangunan terjadi optimalisasi sumber pendanaan pemerintah, yang telah berkembang menjadi sumber pendanaan non pemerintah, terutama investasi, CSR dan LSM Funding.	Pembiayaan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi, CSR, LSM Funding.	Pembiayaan pembangunan pada tahap ini sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

5.2. Sasaran Pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi pada akhir periode RPJPK.

Sasaran pokok RPJPK Tahun 2025-2045 dirumuskan dari arah pembangunan, Arah kebijakan transformasi daerah dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPK dengan RPJPA dan RPJPN sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah. Perumusan sasaran pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2.
Perumusan Sasaran Pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
1	Mewujudkan Transformasi sosial	Kesehatan untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,25	78,45	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	
			2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2	Kesehatan Ibu dan Anak:				
			3	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	12	4		
			4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28,5	6,2		
			5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):				
			6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	81	95		
			7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	98		
			8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5		
			9	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).						
			10	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal						
			11	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.						
			12	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.						
			13	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			14	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.						
			15	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.						
			16	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan						
			17	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan						
			18	Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya						
			19	Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan.						
			20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi						
		Pendidikan Berkualitas yang Merata	1	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	5	Hasil Pembelajaran:			Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata	
			2	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			3	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.		i) Literasi Membaca	6,70-10,04	69,57-69,57		
			4	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		ii) Numerasi	0,00 – 2,00	60,87-65,22		
			5	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			6	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		i) Literasi Membaca	25,70-29,04	64,65 – 66,65		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			7	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		ii) Numerasi	20,70-23,04	58,98 – 60,98		
			8	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,6	12,94 – 13,06		
			9	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,98 - 15,00	16,24 – 16,32		
			10	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,58	13,58 – 14,80		
			11	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	35,12	80		
			12	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.						
			13	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah tertinggal						
			14	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah tertinggal						
			15	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).						
			16	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			17	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada daerah tertinggal						
			18	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.						
			19	Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga						
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16,35-17,82	5,5-3,83	Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	
			2	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada daerah tertinggal	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	3,86	85,16		
			3	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah.	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55		
			4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.						
			5	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah tertinggal, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah tertinggal melalui bertambahnya demand.						
			6	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.						
			7	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi,						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat						
			8	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah tertinggal						
			9	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah tertinggal						
			10	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.						
			11	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.						
			12	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah						
			13	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.						
			14	Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata						
			15	Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.						
			16	Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie Jaya untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.						
			17	Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.						
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,85-4,00	6,94 – 7,11	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
			2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	12	Pengembangan Pariwisata				
			3	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,62	3,13		
			4	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0,73	1,33		
			5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	13	Proporsi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	7,9	20,89		
			6	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD				
			7	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,84	15,32		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			8	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	1,06	2,25		
			9	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,33	6,8		
			10	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,28	3,61		
			11	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,92	4,82		
			12	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				
			13	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.		a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,4 – 5,5	3,5 – 4,49		
			14	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	16	80		
			15	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	41,8	62,7		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			16	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	17	Tingkat Penguasaan IPTEK:				
			17	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.		a) Indeks Daya Saing Daerah	3	4		
			18	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis.		b) Indeks Inovasi Daerah	45,28-48,3	82,20-85,10		
			19	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan lingkungan						
			20	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan jalan provinsi dan tol trans-Sumatera untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:						
			21	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke jalan Provinsi dan jalan Tol yang ada di kabupaten Pidie Jaya.						
			22	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten						
			23	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan Perikanan.						
			24	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.						
			25	mendukung Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antar wilayah untuk peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.						
			26	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.						
			27	Peningkatan produktivitas BUMD.						
			28	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan,						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.						
			29	Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Pidie Jaya yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan						
			30	Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Pidie Jaya.						
			31	Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pidie Jaya.						
			32	Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Kabupaten Pidie Jaya						
			33	Meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Pidie Jaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan						
			34	Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya. Ini melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.						
			35	Mendorong diversifikasi perekonomian Kabupaten Pidie Jaya dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar						
			36	Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal						
			37	Investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pidie Jaya melalui perencanaan komprehensif, pendanaan APBD/APBN, regulasi yang disederhanakan, peningkatan kapasitas SDM, transparansi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.						
			38	Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,						
			39	Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal						
			40	Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.						
			41	Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi						
			42	Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan agar terciptanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.						
			43	Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya						
			44	Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.						
			45	Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.						
			46	Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk lebih mandiri secara finansial.						
			47	Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya						
			48	Ikut serta mendukung Aceh sebagai Industri pariwisata Halal						
		Penerapan Ekonomi Hijau	1	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	
			2	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21		
			3	Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pidie Jaya yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
		Transformasi Digital	1	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,7	7,3	Meningkatnya Transformasi Digital	
			2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.						
			3	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.						
			4	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; mendukung penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;						
			5	mendukung penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk percepatan transformasi digital.						
			6	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).						
			7	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			8	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.						
			9	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.						
			10	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital di Kabupaten Pidie Jaya.						
			11	Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.						
			12	membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.						
			13	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,						
			14	Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Kabupaten Pidie Jaya dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.						
			15	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.						
			16	penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.						
			17	mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi-institusi riset dan universitas.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			18	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya.						
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat daerah	6,17	4,33	Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
			2	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,48	27,7		
			3	Mendukung pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api terutama pada ruas Banda Aceh-Medan.	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2	9,73		
			4	mendukung penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah tertinggal dengan pelabuhan-pelabuhan utama						
			5	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global						
			6	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.						
			7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama domestik lainnya.						
			8	Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di dalam maupun luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.						
			9	Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.						
			10	Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			11	Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.						
			12	Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk yang ada di kabupaten Pidie Jaya.						
			13	Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.						
			14	Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal di pasar domestik						
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
			2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)		a) Proposi konstribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap provinsi (%)				
			3	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	62	100		
			4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.		c1) Persentase Desa Mandiri	6,15	26		
			5	Mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,65	0,86		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			6	Mendukung Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.						
			7	Mendukung pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.						
			8	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.						
			9	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.						
			10	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.						
			11	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.						
			12	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan Jalan Provinsi dan Jalan Tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.						
			13	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.						
			14	Peningkatan jumlah desa mandiri						
			15	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.						
			16	Mendorong pengembangan industri kreatif seperti kerajinan tangan dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.						
			17	Mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				seluruh wilayah Aceh khususnya Pidie Jaya untuk peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi						
			18	meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.						
			19	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.						
			20	Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.						
			21	Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.						
			22	Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.						
			23	Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.						
3	Mewujudkan Transformasi Tata	Regulasi dan Tata Kelola Yang	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kabupaten Pidie Jaya	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100	Meningkatnya Reformasi Tata	

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
	Kelola Pemerintahan yang Baik	Berintegritas dan Adaptif	2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	5	Kelola Pemerintahan yang Baik	
			3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan iinformasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa terutama yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	26	Indeks Pelayanan Publik	2,55	5		
			4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi	27	Indeks Integritas Nasional	70,2	84.56.00		
			5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme						
			6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital						
			7	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.						
			8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya						
			9	Penguatan tapal batas wilayah administrasi Pidie Jaya						
			10	Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama melalui lembaga pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			11	Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan Daerah terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh						
			12	Mendukung perkuatan sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh (Pasal 223 UUPA)						
			13	Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.						
			14	Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Kabupaten dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.						
			15	Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.						
			16	Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.						
			17	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.						
			18	Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan						
			19	Membangun komitmen dengan stakeholder yang terlibat dalam pemerintahan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan						
			20	Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi						
4	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang	1	Melaksanakan mitigasi konflik di Kabupaten Pidie Jaya	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh,	
			2	mendukung penguatan otonomi Aceh		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	85		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
	substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	tangguh, dan Demokrasi Subtansial	3	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing		Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	28,99	95	Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial	
			4	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,55	78.55.00		
					30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi		
			5	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan						
			6	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi						
			7	Meningkatkan peran dan fungsi KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan						
			8	Memantapkan sistem pemilihan langsung						
			9	Memperkuat partai politik lokal						
			10	Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia						
			11	Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah						
			12	mendukung implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.						
			13	Peningkatan kapasitas ASN di Kabupaten Pidie Jaya dapat melalui pelatihan rutin, pengembangan kompetensi, pemberian beasiswa untuk studi lanjutan, program mentoring, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan						
			14	Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi daerah						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			15	mendukung penyusunan qanun implementasi otonomi khusus Aceh.						
			16	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.						
			17	Mendukung Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan keberlanjutan otonomi khusus Aceh.						
		Stabilitas Ekonomi Makro	1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2	1,4	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	
			2	Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiskal Cadaster)	32	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,8 – 2,7		
			3	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendalaman keuangan	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
			4	Peningkatan kredit untuk masyarakat		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2		
			5	Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45	4,71		
			6	melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat		c) Nilai Transaksi Saham per kapita per Kabupaten (rupiah)				
			7	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan		d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9		
			8	Menggali pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dengan melakukan peningkatan administrasi pajak dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.	34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07		
			9	Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.						
			10	Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.						
			11	Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.						
			12	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kabupaten Pidie Jaya						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.						
			13	Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Kabupaten Pidie Jaya						
		Syariat Islam	1	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Pidie Jaya	35	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	Meningkatnya Implementasi Syariat Islam	
			2	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	36	Persentase dayah yang mandiri	44	95		
			3	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.						
			4	mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.						
			5	Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			6	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah						
			7	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.						
			8	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.						
			9	Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.						
			10	Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.						
			11	Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.						
			12	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi						
5	Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,79 - 66,01	Meningkatnya kualitas Beragama dan Berbudaya	
			2	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,19 - 73,23	79,76 - 80,95		
			3							
			4	Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.						
			5	Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						
			6	Mendorong promosi dan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.						
			7	Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya lokal yang Islami.						
			8	Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Pidie Jaya. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
			9	Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan						
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,93 – 73,23	78,25 – 78,54	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
			2	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,750-0,520	0,239 - 0,217		
			3	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal						
			4	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			5	Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif						
			6	Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.						
			7	Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.						
			8	Memberikan bantuan finansial dan pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan.						
			9	Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.						
			10	Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.						
			11	Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.						
			12	Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.						
			13	Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program-program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.						
			14	menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.						
7	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	
			2	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	42	Kualitas Lingkungan Hidup				
			3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,56	89,18		
			4	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,19	60		
			5	Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.		c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	2	90		
			6	Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	21,98	100		
			7	mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.						
			8	Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.						
			9	Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
			10	Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.						
			11	Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.						
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
			2	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.		a) Ketahanan Energi				
			3	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1.940		
			4	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90		
			5	Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,		b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	8,48	0,54		
			6	mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian		c) Ketahanan Air				
			7	meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan		- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,19	7,53		

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis						
			8	Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Kabupaten Pidie Jaya.		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20,47	100		
			9	Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.						
			10	Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro.						
			11	Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.						
			12	Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.						
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	137,6	154,18-131,13	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
			2	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.						
			3	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu		a. Kumulatif	18,54	42,17		
			4	Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.		b. Tahunan	29,56	75,38		
			5	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.						
			6	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).						
			7	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.						
			8	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas						
			9	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri),						

No	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET		SASARAN POKOK	KET
							BASLINE 2025	TARGET 2045		
				sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.						
			10	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.						
			11	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.					
			12	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.						

5.2.1. Arah Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045

Arah Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah sebagai bahagian kontribusi tujuan pembangunan provinsi dan nasional. Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dirumuskan berdasarkan Sasaran pokok RPJP Aceh yang berjumlah 17 (tujuh belas) dan telah diselaraskan dengan arah (tujuan) pembangunan nasional. Sasaran Pokok tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok transformasi yaitu (1) kebijakan transformasi (transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transmasi tata kelola); (2) landasan transformasi (supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan, ketahanan sosial dan ekologi); dan (3) kerangka implementasi transformasi (pembangunan kewilayahan, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kesinambungan pembangunan)

5.2.1.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

A. Sasaran Pokok 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan untuk semua dapat diwujudkan melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kepsertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejateraan SDM Kesehatan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Pidie Jaya	Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, pemerintahan, pemberdayaan Masyarakat.
2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pidie Jaya	Kesehatan
3	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatkan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pidie Jaya	Kesehatan
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pidie Jaya	Kesehatan, pemberdayaan masyarakat
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pidie Jaya	Kesehatan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Pidie Jaya	Kesehatan
7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pidie Jaya	Kesehatan
8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal	Pidie Jaya	Kesehatan
9	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberculosis, malaria, HIV dan kusta).	Pidie Jaya	Kesehatan
10	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal	Pidie Jaya	Kesehatan
11	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Pidie Jaya, Terutama Kec. Meureudu, Bandar Baru, Meurah Dua, Bandar Dua, Jangka Buya, Panteraja	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Pekerjaan Umum perumahan rakyat, pertanian, pangan, Kelautan dan perikanan, Perencanaan
12	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Pidie Jaya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Pekerjaan Umum perumahan rakyat, pertanian, pangan, Kelautan dan perikanan
13	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Pidie Jaya	Kesehatan
14	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tubercolosis dan respirasi.	Pidie Jaya	Kesehatan, pemberdayaan masyarakat
15	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui promotif, preventif primer, preventif sekunder, kuratif dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas layanan.	Pidie Jaya	Kesehatan, pemberdayaan masyarakat
16	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Pidie Jaya	Kesehatan
17	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Pidie Jaya	Kesehatan
18		Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya	Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya	Pidie Jaya	Kesehatan
19		Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk	Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk	Pidie Jaya	Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sosial

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		berperan dalam bidang kesehatan.	berperan dalam bidang kesehatan.		
20		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi	Pidie Jaya	Pendidikan, pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

B. Sasaran Pokok 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata

melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru, Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 2

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan	Pidie Jaya	Pendidikan, kesehatan
2	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Pidie Jaya	Pendidikan
3	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pidie Jaya	Pendidikan, kesehatan, pemerintahan
4	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pidie Jaya	pendidikan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Perhubungan, Pendidikan
5	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pidie Jaya	Pendidikan
6	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pidie Jaya	Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
7	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Pidie Jaya	Pendidikan, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	(termasuk kondisi kebencanaan daerah).				
8	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Pidie Jaya	Pendidikan
9	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Pidie Jaya	Pendidikan
10	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pidie Jaya	Pendidikan
11	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Pidie Jaya	Pendidikan
12	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua	Pendidikan
13	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah tertinggal	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua	Pendidikan
14	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP .	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah tertinggal	Pidie Jaya	Pendidikan
15	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	Pidie Jaya	Pemerintahan, Perencanaan
16	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua	Disdik dan Dinas Pendidikan Dayah, DisKominfo
17	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada daerah tertinggal	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua	Pendidikan
18	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP.	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Pidie Jaya	Pendidikan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
19		Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga	Meningkatkan olah raga prestasi melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Pidie Jaya	Pemuda dan olahraga

C. Sasaran Pokok 3 Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif

Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses indfrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktek buang air besar sembaragan (BABS), akses Rumah layak dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 3

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, dan Bandar Dua	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR
2	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada daerah tertinggal	Pidie Jaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, PUPR, Komunikasi dan informatika, persandian
3	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah.	Pidie Jaya	Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian, Kop UKM, Pertanian, Pangan
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Pidie Jaya	Tenaga Kerja, Pendidikan, Kop UKM, Sosial Pertanian
5	Pengembangan/peningkatan government-induced	Pengembangan/peningkatan government-induced	Pengembangan/peningkatan government-induced activities	Pidie Jaya	PUPR, Perhubungan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya demand.	activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya demand.	dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah tertinggal, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di daerah tertinggal melalui bertambahnya demand.		
6	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pidie Jaya	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Pidie Jaya	Pendidikan Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Kop UKM,
8	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah tertinggal	Pidie Jaya	Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah tertinggal	Pidie Jaya, terutama Kec. Bandar Baru, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Bandar Dua	Perindustrian, koperasi
10	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pidie Jaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Pidie Jaya	Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kekhususan
12	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pidie Jaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal	Pidie Jaya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.		
14		Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata	Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata	Pidie Jaya	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR, Kekhususan, Pendidikan Inspektorat Daerah
15		Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.	Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.	Pidie Jaya	Sosial
16		Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.	Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Pidie Jaya untuk memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.	Pidie Jaya	Pendidikan, Kekhususan
17		Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.	Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.	Pidie Jaya	Sosial, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan,

5.2.1.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam unggulan, meningkatkan produktivitas ekonomi dan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi makro yang bertumbuh dan terintegrasi antara domestik dan nasional, membuka peluang kerja dan usaha produktivitas tenaga kerja, terutama perempuan dan disabilitas, meningkatkan produktivitas

perikanan tangkap dan tambak serta garam lokal, memperkuat pengawasan laut terhadap ilegal fishing. Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, memperkuat Usaha Mikro Dan Kecil (UMKM), kuantitas dan kualitas koperasi aktif lintas daerah, produktivitas pertanian, terutama luas tanam dan produktivitas pertanian bahan pokok, perkebunan, perikanan dan ekonomi biru, ekonomi hijau, memperkecil ketergantungan dan ketimpangan penduduk, memperbesar investasi, kemandirian desa, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan akses kredit keuangan. Percepatan peningkatan produktivitas secara masif, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di perkotaan baru, percepatan peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) yang naik kelas, kuantitas dan kualitas koperasi aktif Lintas Daerah, mempercepat peningkatan produktivitas pertanian, terutama luas tanam dan produktivitas padi, industrialisasi hasil perkebunan, perikanan dan penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau dan bioekonomi mempercepat pengecilan ketergantungan dan ketimpangan penduduk, memperbesar investasi, mempercepat kemandirian desa, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan akses kredit keuangan yang mudah dan cepat, pengembangan kemampuan sebagai produsen digital, akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan air. pada penguatan transformasi yang menghasilkan economic power house melalui peningkatan daya saing yang tinggi secara regional dan berkelanjutan, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif, penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi di bidang ketahanan pangan, terutama pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta integrasi sistem pangan.

D. Sasaran Pokok 4 Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, jalan provinsi, perhubungan, pemerataan listrik, peningkatan produktivitas BUMD dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan IPTEK dan Inovasi, pengembangan BUMA, ekonomi syariat dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 4

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR
2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Tenaga Kerja Perdagangan, Perindustrian
3	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pidie Jaya	Pertanian
4	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Pidie Jaya	Pertanian, Setdakab, Disperindagkop
5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perdagangan, Perindustrian
6	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pidie Jaya	Pertanian, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Setda
7	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Perencanaan
8	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,
9	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Setda, Koperasi
10	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Setda
11	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan
12	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Kec. Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Jangka Buya	Kelautan dan Perikanan, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian
13	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan,

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.		
14	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja ESDM, Pertanian Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata, Kop UKM, Bappeda
16	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata, DisKominfo
17	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata, PUPR
18	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis.	Pidie Jaya	Perhubungan, PUPR
19	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan lingkungan	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan lingkungan	Pidie Jaya	PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Pembangunan jalan Provinsi yang terkoneksi dengan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan jalan provinsi dan tol trans-Sumatera untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Pidie Jaya	PUPR
21	- Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang terkoneksi ke jalan tol Banda Aceh-Jantho-Sigli-Meureudeu-Bireuen-Lhokseumawe;	- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke jalan Provinsi dan jalan Tol yang ada di kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	PUPR
22			- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Bandar Baru, Meureudu, Bandar Dua.	PUPR
23	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama Pelabuhan	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan Perikanan.	Panteraja, Meureudu, Jangka Buya	Perhubungan, Kelautan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.	Malahayati, Pelabuhan Lhokseumawe, dan Pelabuhan Meulaboh.			
24	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Kec. Bandar Baru, Panteraja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya dan Bandar Dua.	Setda, PUPR
25	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	mendukung Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) dan jaringan transmisi antar wilayah untuk peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Pidie Jaya	Setda
26	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Pidie Jaya	Setda, Kekhususan
27	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pidie Jaya	Setda
28		Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.	Pidie Jaya	DSI, Bappeda, Setdakab, Distanpang
29		Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Pidie Jaya yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR
30		Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah Aceh.	Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR
31		Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Aceh	Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	Tenaga Kerja
32		Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh	Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Kop-UKM
33		Meningkatkan promosi pariwisata Aceh baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya,	Meningkatkan promosi pariwisata Kabupaten Pidie Jaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata,

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan	pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan		
34		Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh. Ini melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.	Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pidie Jaya. Ini melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
35		Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Mendorong diversifikasi perekonomian Kabupaten Pidie Jaya dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Pidie Jaya	Penanaman Modal, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan
36		Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Pidie Jaya	Koperasi-UKM
37		Investasi dalam pembangunan infrastruktur,	Investasi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pidie Jaya melalui perencanaan komprehensif, pendanaan APBD/APBN, regulasi yang disederhanakan, peningkatan kapasitas SDM, transparansi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.	Pidie Jaya	Perencanaan Penanaman Modal, PUPR, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, ESDM
38		Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,	Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja,	Pidie Jaya	Tenaga Kerja
39		Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal	Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal	Pidie Jaya	Kop-UKM
40		Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Pidie Jaya	Penanaman Modal

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
41		Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Pidie Jaya	Penanaman Modal
42		Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.	Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan agar terciptanya lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata
43		Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan	Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata
44		Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.	Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, ESDM, Pertanian Lingkungan Hidup, Kehutanan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
45		Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Pidie Jaya	Kop-UKM
46		Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Aceh untuk lebih mandiri secara finansial.	Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk lebih mandiri secara finansial.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM
47		Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh	Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM
48		Menjadikan Aceh sebagai Industri pariwisata Halal	Ikut serta mendukung Aceh sebagai Industri pariwisata Halal	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Pariwisata

E. Sasaran Pokok 5 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau

penerapan Ekonomi Hijau dapat diwujudkan melalui peningkatan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer. Langkah awal yang perlu diambil adalah mengidentifikasi potensi EBT secara lokal, seperti energi surya, angin, biomassa, dan hidro. Dengan memahami potensi ini, dapat dibuat rencana pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sosialisasi dan implementasi regulasi yang mendukung pembangunan EBT juga

perlu ditekankan, termasuk insentif pajak dan kemudahan perizinan. Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses ini tidak boleh diabaikan, dengan mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap manfaat EBT. Kemitraan dengan sektor swasta dan LSM dapat menjadi kunci untuk menggalang dukungan finansial dan teknis, sementara inovasi teknologi perlu didorong guna meningkatkan efisiensi. Infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan transmisi listrik dan penyimpanan energi, juga harus diperkuat. Melalui langkah-langkah ini, Kabupaten Pidie Jaya dapat meraih keberlanjutan ekonomi dan mengurangi dampak lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 5

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	PIDIE JAYA	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pendidikan, ESDM dan Kelautan Perikanan
2		Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	PIDIE JAYA	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan
3		Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Kabupaten Pidie Jaya yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	PIDIE JAYA	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan

F. Sasaran Pokok 6 Meningkatnya Transformasi Digital

Transformasi Digital melalui peningkatan kapasitas dan askes informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 6

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Pidie Jaya	Pertanian, Kominfo, Perdagangan, Perindustrian, Kop UKM, Tenaga kerja, Setda
2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Kominfo, I Perdagangan, Perindustrian,, Kop UKM, Tenaga kerja, Setda
3	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan, Kominfo, Setda
4	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; mendukung penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja;	Pidie Jaya	Perkim, Kominfo, Linkungan Hidup, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga kerja, Kesehatan, Setda
5	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	mendukung penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk percepatan transformasi digital.	Pidie Jaya	Kominfo, Setda
6	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Pidie Jaya	Kominfo, Setda
7	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Pidie Jaya	Kominfo, Setda
8	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah,	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah,	Pidie Jaya	Kop-UMKM. Perdagangan, Perindustrian,

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		Tenaga kerja, Pertanian Kominfo, Setda
9	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Pidie Jaya	Kop-UMKM, Kebudayaan, Pariwisata Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kominfo, Setda
10		Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital di Aceh.	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital di Kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
11		Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.	Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
12		membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
13		Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
14		Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Kabupaten Pidie Jaya dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
15		Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Pidie Jaya	Kominfo
16		penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	Pidie Jaya	Kominfo
17		mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi-institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.	mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi-institusi riset dan universitas.	Pidie Jaya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
18		Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan Aceh	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	Perencanaan, Perdagangan, Perindustrian,

G. Sasaran Pokok 7 Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyedian produk pertanian yang berpotensi pasar global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistic, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata ratai global, Kerjasama global dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 7

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pidie Jaya	Distanpangan, Distannak
2	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan	Pidie Jaya	PU, Dishub
3	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh-Lhokseumawe-Medan.	Mendukung pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api terutama pada ruas Banda Aceh-Medan.	Pidie Jaya	Dishub
4	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	mendukung penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah tertinggal dengan pelabuhan-pelabuhan utama	Pidie Jaya	Dishub
5	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Pidie Jaya	Bappeda
6	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Pidie Jaya	Disperindag, Setdakab
7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama domestik lainnya.	Pidie Jaya	DPMTSP, Setdakab, Disperindag,
8		Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang	Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di dalam maupun	Pidie Jaya	Bappeda, Setdakab, Kesbangpol

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		menjadi kewenangan Pemerintah.	luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.		
9		Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10		Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan Aceh dan mencari pasar ekspor yang baru	Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian
11		Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan Aceh untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.	Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.	Pidie Jaya	Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
12		Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional bagi produk-produk Aceh.	Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan daerah lain untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produk yang ada di kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13		Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.	Membangun rantai pasokan yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi dan pemasaran produk.	Pidie Jaya	Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
14		Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh baik di pasar domestik maupun internasional.	Mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal di pasar domestik	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

H. Sasaran Pokok 8 Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Menjadikan perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerjasama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana kota, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyedian perumahan yang layak dan terjangkau dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Sasaran Pokok 8

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk	Pidie Jaya	PUPR, Bappeda, Dishub, DisKominfo

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh.	mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan		
2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Pidie Jaya	PU, DLH, Perumda Air Minum, Dishub, Setdakab
3	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	PU, Perumda Air Minum
4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	BPBD, PU, Dinsos
5	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	DLH, PU
6	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Mendukung Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	DisKominfo, PU, Dishub
7	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Mendukung pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	Dishub, PU
8	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesbilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	Dishub, PU
9	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	Setdakab, PU
10	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Pidie Jaya	Pariwisata, PUPR, Kominfo, Pendidikan
11	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pidie Jaya	Disporapar, Disdikbud, DSI, DisKominfo

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
12	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan Jalan Provinsi dan Jalan Tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.	Kec. Bandar Baru, Meureudu, Bandar Dua.	PUPR
13	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Pidie Jaya	PUPR
		Memperkuat peran dan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Pasal 167 UUPA)			
14		Peningkatan jumlah desa mandiri	Peningkatan jumlah desa mandiri	Pidie Jaya	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15		Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata
16		Mendorong pengembangan industri kreatif seperti seni dan kerajinan, musik, dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.	Mendorong pengembangan industri kreatif seperti kerajinan tangan dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata
17		Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Aceh untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi	Mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Aceh khususnya Pidie Jaya untuk peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi	Pidie Jaya	Kominfo
18		meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.	meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.	Pidie Jaya	Penanaman Modal
19		Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.	Pidie Jaya	Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
20		Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.	Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.	Pidie Jaya	Kop-UKM
21		Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di	Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.	kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.		
22		Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.	Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.	Pidie Jaya	Pertanian
23		Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Pidie Jaya	Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5.2.1.3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola difokuskan pada restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten tepat fungsi, penyempurnaan penataan regulasi, meningkatkan kualitas dan pelaksanaan regulasi, terutama tentang otonomi khusus Aceh, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. kapasitas riset inovasi, pemenuhan akses digital di Kabupaten Pidie Jaya, mendorong dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penegakan supremasi hukum, stabilitas, dan perkuatan politik lokal dalam bingkai Negara RI, dan memperkuat ketertiban dan keamanan, pengembangan budaya hukum, memperkuat perdamaian Aceh berlandaskan Pancasila, memperkuat keamanan insani dan keamanan siber, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, lembaga legislatif yang modern, parpol lokal dan nasional yang berbasis nilai, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif dan meningkatkan kemandiriannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik nasional dan lokal yang berintegritas, serta masyarakat sipil yang partisipasi. Selanjutnya transformasi digital semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan, penguatan riset dan inovasi digital, penegakan hukum di level

kabupaten, meningkatkan peran satuan polisi PP dan WH, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, adaptifnya pengelolaan fiskal dan moneter terhadap guncangan perekonomian serta optimalnya pengelolaan sektor keuangan terutama dana otonomi khusus. terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, partai politik nasional dan lokal yang modern dan berintegritas, pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang mandiri, mendukung sepenuhnya sistem pemberantasan korupsi yang berkualitas dan mengoptimalkan pemulihan aset dan pengembalian Keuangan negara, serta perbaikan tata Kelola melalui pendekatan Corruption Impact Assessment, paradigma restoratif dan berperspektif HAM, kebebasan sipil dan kesetaraan dalam kehidupan dan dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya sosial, politik. dan ekonomi. Peningkatan jumlah penerimaan dan efektivitas belanja Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan, memperkuat dan memperbanyak jumlah PPNS di Satpol PP dan WH. tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel berkeadilan dan berkeadilan, terutama bidang ketenteraman dan Syariat Islam; Aceh menuju zero corruption dan terselamatkannya aset dan Keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum terutama Satpol PP dan WH yang berintegritas dan memiliki paradigma restoratif dengan berlandaskan hak asasi manusia dan menguatnya pengelolaan dan kemandian fiskal daerah.

I. Sasaran Pokok 9 Meningkatnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi tata kelola melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembangaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.11.
Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Sasaran Pokok 9

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Setdakab, Sekwan
2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan,	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam	Pidie Jaya	Bappeda, Dinsos P3A, DPMG, Setdakab

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	dan pengawasan pembangunan.	kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.		
3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan iinformasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa terutama yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan iinformasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa terutama yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan	Pidie Jaya	DinKominfo, Setdakab, Inspektorat
4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi	Pidie Jaya	BKPSDM, Setdakab
5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Pidie Jaya	Inspektorat, BKPSDM, Bappeda, Setdakab
6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pidie Jaya	Inspektorat, DisKominfo, DPMPTSP, Catpil, RSUD, Dinkes
7	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pidie Jaya	BKPSDM, Setdakab
8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Pidie Jaya	Kesbangpol, Setdakab
9		Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh	Penguatan tapal batas wilayah administrasi Pidie Jaya	Pidie Jaya	Setda
10		Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA (Pasal 23 UUPA)	Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama melalui lembaga pemerintah Daerah untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan	Pidie Jaya	Sekretariat DPRD
11		Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan (Pasal 23 UUPA)	Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan Daerah terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh	Pidie Jaya	Perencanaan dan Sekretariat DPRD
12		Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh (Pasal 223 UUPA)	Mendukung perkuatan sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh (Pasal 223 UUPA)	Pidie Jaya	Setda dan Sekretariat DPRD
13		Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan	Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan	Pidie Jaya	Kominfo

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.	keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.		
14		Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Aceh dan Bappeda Aceh untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.	Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Kabupaten dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.	Pidie Jaya	Inspektorat Daerah
15		Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Pidie Jaya	Setda
16		Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	Pidie Jaya	Pendidikan dan Pelatihan
17		Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Pidie Jaya	Inspektorat Daerah
18		Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Pidie Jaya	Kominfo
19		Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Membangun komitmen dengan stakeholder yang terlibat dalam pemerintahan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Pidie Jaya	Inspektorat Daerah
20		Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Pidie Jaya	Kominfo, Perencanaan

5.2.1.4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, Stabilitas Ekonomi dan Implementasi Syariat Islam

J. Sasaran Pokok 10 Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial.

Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung kemanan dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 10

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1		Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervenasi untuk korban konflik di Aceh	Melaksanakan mitigasi konflik di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Kesbangpol

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
2		Memperkuat otonomi Aceh	mendukung penguatan otonomi Aceh	Pidie Jaya	Setdakab, Setwan
3	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap illegal fishing	Pidie Jaya	DKP
4	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaanal ternati f& kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Pidie Jaya	BPKK, Setdakab, Bappeda
	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Simeulue).				
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran SatpolPP dan WH dan Pengamanan hutan	Pidie Jaya	Satpol PP
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Pidie Jaya	Kesatuan Bangsa dan politik
7		Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Pasal 56 dan Pasal 60 UUPA)	Meningkatkan peran dan fungsi KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan	Pidie Jaya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
8		Memantapkan sistem pemilihan langsung Aceh (Pasal 65 UUPA)	Memantapkan sistem pemilihan langsung	Pidie Jaya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
9		Memperkuat partai politik lokal Aceh (Pasal 75 UUPA)	Memperkuat partai politik lokal	Pidie Jaya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
10		Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia (Pasal 227 UUPA)	Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia	Pidie Jaya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
11		Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan propinsi	Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan daerah	Pidie Jaya	Penanaman Modal, Kekhususan
12		memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	mendukung implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	Pidie Jaya	Setda dan Sekretariat DPRD
13		Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan di Aceh dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan otonomi khusus.	Peningkatan kapasitas ASN di Kabupaten Pidie Jaya dapat melalui pelatihan rutin, pengembangan kompetensi, pemberian beasiswa untuk studi lanjutan, program mentoring, dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan	Pidie Jaya	Pendidikan dan Pelatihan
14		Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan	Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada	Pidie Jaya	Perencanaan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		potensi Aceh serta memperhitungkan aspek-aspek otonomi khusus.	kebutuhan dan potensi daerah		
15		Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.	mendukung penyusunan qanun implementasi otonomi khusus Aceh.	Pidie Jaya	Setda dan Sekretariat DPRD
16		Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Pidie Jaya	Perencanaan
17		Membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus Aceh.	Mendukung Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan keberlanjutan otonomi khusus Aceh.	Pidie Jaya	Setda

K. Sasaran Pokok 11 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro.

Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan pengendalian inflasi, peningkatan pajak daerah, sabilitas sektor keuangan daerahh, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 11

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Pidie Jaya	Setdakab, Disperindag, Bappeda, Distanpang, DKP, Disbunnak, Inspektorat, BPKK.
2	Peningkatan Pajak Daerah	Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster)	Peningkatan Pajak Daerah (Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiskal Cadaster)	Pidie Jaya	BPKK,
3	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Meningkatkan kemandirian fiskal Aceh dan pendalaman keuangan	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan pendalaman keuangan	Pidie Jaya	Setdakab, BPKK
4	Peningkatan kredit untuk masyarakat	Peningkatan kredit untuk masyarakat	Peningkatan kredit untuk masyarakat	Pidie Jaya	Setdakab, Disperindag
5		Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan (Pasal 159 UUPA)	Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan	Pidie Jaya	Perencanaan
6		melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	Pidie Jaya	Keuangan
7		Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Pidie Jaya	ESDM, Keuangan
8		Memperkuat pengumpulan pajak dan	Menggali pendapatan daerah melalui pajak dan	Pidie Jaya	Keuangan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	retribusi dengan melakukan peningkatan administrasi pajak dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.		
9		Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Pidie Jaya	Keuangan, Perencanaan
10		Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Pidie Jaya	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Kop-UKM, Kelautan dan Perikanan
11		Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Pidie Jaya	Keuangan, Setda
12		Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kabupaten Pidie Jaya dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Pidie Jaya	Keuangan, Pendidikan dan Pelatihan
13		Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh	Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian Kop-UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

L. Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Implementasi Syariat Islam.

Peningkatan Implementasi Syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek al quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.14.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 12

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1		Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Pidie Jaya	Pidie Jaya	Kekhususan, Pendidikan, Setda, Kop UKM, dan Kominfo
2		Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayatul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Pidie Jaya	Kekhususan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Setda
3		Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Pidie Jaya	Kekhususan, Kominfo
4		mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.	mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.	Pidie Jaya	Kekhususan
5		Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Pidie Jaya	Pendidikan, Tenaga Kerja, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6		Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Kec. Bandar Dua dan Bandar Baru	Pendidikan, Tenaga Kerja, Pertanian
7		Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Pidie Jaya	Kekhususan
8		Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Pidie Jaya	Kekhususan, Kop UKM
9		Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, seperti Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.	Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Syariat Islam.	Pidie Jaya	Pendidikan dan Pelatihan, Kekhususan
10		Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat Aceh untuk meningkatkan	Melakukan kebijakan pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya untuk	Pidie Jaya	Kekhususan

No	Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJPA 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.	meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam.		
11		Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.	Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang peradilan, ekonomi, sosial, dan moral.	Pidie Jaya	Kekhususan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
12		Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi	Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi syariat Islam yang mengayomi	Pidie Jaya	Kekhususan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.2.1.5. Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologis

M. Sasaran Pokok 13 Meningkatnya kualitas Beragama dan Berbudaya

Peningkatan kualitas Beragama dan Berbudaya melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.15.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 13

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata Kekhususan Pendidikan
2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Pidie Jaya	Kesbangpol, Kekhususan Pendidikan
3		Memperkuat lembaga wali nanggroe dalam kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya (Pasal 95 UUPA)			
4		Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 UUPA)	Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.	Pidie Jaya	Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Sekretariat DPRD, Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
					Desa, Kelautan dan Perikanan
5		Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 221 UUPA)	Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pidie Jaya	Kekhususan Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
6		Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Mendorong promosi dan pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
7		Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya Aceh yang Islami.	Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya lokal yang Islami.	Pidie Jaya	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
8		Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Aceh. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Aceh.	Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Pidie Jaya. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pidie Jaya	Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
9		Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Pidie Jaya	Sosial, Kekhususan, Lingkungan Hidup,

N. Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.

Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan

perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 14

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1		Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Pidie Jaya	Sosial, Perlindungan perempuan dan anak, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan
2		Penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pidie Jaya	Sosial, Perlindungan perempuan dan anak,
3		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang mendukung penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Inklusi	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Pidie Jaya	Sosial, Perlindungan perempuan dan anak, Keluarga Berencana
4		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, kesehatan reproduksi pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pidie Jaya	Sosial, Perlindungan perempuan dan anak,
5		Meningkatkan peran dan fungsi pemuda anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Meningkatkan peran dan fungsi pemuda dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Pidie Jaya	Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat, Penanamana Modal, Perindustrian dan Perdagangan
6		Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Pidie Jaya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
7		Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.	Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.	Pidie Jaya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan
8		Memberikan bantuan finansial dan	Memberikan bantuan finansial dan pendampingan	Pidie Jaya	Pemberdayaan Perempuan dan

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan.	kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan.		Perlindungan Anak, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
9		Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Pidie Jaya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mahkamah Syariah
10		Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.	Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.	Pidie Jaya	Kepemudaan dan Olahraga, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kop UKM
11		Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.	Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.	Pidie Jaya	pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12		Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.	Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.	Pidie Jaya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13		Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program-program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.	Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program-program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.	Pidie Jaya	Kepemudaan dan Olahraga
14		menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.	menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.	Pidie Jaya	Kepemudaan dan Olahraga

O. Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas.

Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian

pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.17.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 15

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, keanekaragaman hayati, konservasi, dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pidie Jaya	PUPR, Lingkungan Hidup
2	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari hutan lindung dan ekosistem alami terutama pada Kawasan Ekosistem Leuser wilayah Aceh dan penambahan kawasan lainnya (Pasal 150 UUPA)	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup, PUPR, Pertanian
3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup
4	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan sumberdaya alam berbasis energi terbarukan untuk menuju kemandirian pangan dan air.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Pidie Jaya	ESDM, PUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Pangan
5		Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi (Pasal 156 UUPA)	Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.	Pidie Jaya	ESDM, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup
6		Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang berkelanjutan dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 162 UUPA)	Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pidie Jaya	Kelautan dan Perikanan
7		mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.	mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
8		Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.	Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup, ESDM
9		Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.	Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup,
10		Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.	Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup, Perencanaan
11		Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.	Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.	Pidie Jaya	PUPR, Lingkungan Hidup,

P. Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Peningkatan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.18.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 16

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pidie Jaya	PUPR, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2		Memperkuat ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi; meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi; menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi; mendukung pembangunan Energi baru terbarukan bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota: melindungi masyarakat	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Pidie Jaya	Pertanian

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi; memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.			
3		Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Pidie Jaya	PUPR, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pertanian
4		Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5		Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,	Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
6		mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian	mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
7		meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk	meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik,	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
		memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis	pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis		
8		Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Aceh.	Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Kabupaten Pidie Jaya.	Pidie Jaya	ESDM
9		Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.	Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.	Pidie Jaya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
10		Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro.	Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro.	Pidie Jaya	ESDM
11		Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.	Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.	Pidie Jaya	ESDM
12		Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.	Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.	Pidie Jaya	Perhubungan

Q. Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.19.
Arah Kebijakan Sasaran Pokok 17

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		Masyarakat, Pendidikan, PUPR, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2		Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Pendidikan dan pelatihan Kominfo, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pendidikan
3	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Pidie Jaya	Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian
4		Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam (Pasal 226 UUPA)	Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.	Pidie Jaya	Kesehatan, Sosial
5		Membuat dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana di seluruh wilayah Aceh.	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6		Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7		Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan untuk menghadapi bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8		Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti daerah pesisir, lereng gunung, dan daerah aliran sungai	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045	Arah Kebijakan RPJPA Tahun 2025-2045	RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045		
			Arah Kebijakan	Pembangunan Kewilayahan	Bidang Urusan
			dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas		
9		Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, shelter, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
10		meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan dan pedesaan.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PUPR
11		Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana.	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Pidie Jaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
12		Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Pidie Jaya	Perencanaan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.2.2. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah

Indikator beserta target capaian sasaran pokok RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 yang telah di rumuskan berdasarkan Arah Pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.20 berikut:

Tabel 5.20.
Indikator Sasaran Pokok RPJPK
Pidie Jaya Tahun 2025-2045

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET DAERAH		KET
						BASELINE 2025	TARGET 2045	
1	Sasaran Pokok 1 - Meningkatnya Derajat Kesehatan Mayarakat	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,25	78,45	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	12	4	
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28,50	6,20	
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	81,00	95,00	
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,00	98,00	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,50	99,50	
2	Sasaran Pokok 2 - Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang merata	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:			
					a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
					i) Literasi Membaca	6,70-10,04	69,57-69,57	
					ii) Numerasi	0,00 – 2,00	60,87-65,22	
					b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
					i) Literasi Membaca	25,70-29,04	64,65 – 66,65	
					ii) Numerasi	20,70-23,04	58,98 – 60,98	
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,60	12,94 – 13,06	
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,98 - 15,00	16,24 – 16,32	
				6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,58	13,58 – 14,80	
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	35,12	80,00	
3	Sasaran Pokok 3 - Meningkatnya kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16,35-17,82	5,5-3,83	
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	3,86	85,16	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET DAERAH		KET
						BASELINE 2025	TARGET 2045	
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22,00	55,00	
4	Sasaran Pokok 4 - Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,85-4,00	6,94 – 7,11	
				12	Pengembangan Pariwisata			
					a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,62	3,13	
					b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0,73	1,33	
				13	Proporsi PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	7,90	20,89	
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
					a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,84	15,32	
					b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	1,06	2,25	
					c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,33	6,80	
					d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,28	3,61	
					e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,92	4,82	
				15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
					a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,4 – 5,5	3,5 – 4,49	
					b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	16	80	
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	41,80	62,70	
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			
					a) Indeks Daya Saing Daerah	3,00	4,00	
					b) Indeks Inovasi Daerah	45,28-48,3	82,20-85,10	
5	Sasaran Pokok 5 - Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21	
					b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94	
6	Sasaran Pokok 6 - Meningkatnya Transformasi Digital	IE6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,70	7,30	
7	Sasaran Pokok 7 - Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat daerah	6,17	4,33	
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,48	27,70	
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,00	9,73	
8	Sasaran Pokok 8 - Terwujudnya perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET DAERAH		KET
						BASELINE 2025	TARGET 2045	
	Pertumbuhan Ekonomi							
					a) Proposi konstribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap provinsi (%)			
					b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	62,00	100,00	
					c1) Persentase Desa Mandiri	6,15	26,00	
					c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,65	0,86	
9	Sasaran Pokok 9 - Meningkatnya Reformasi tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00	
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	5,00	
				26	Indeks Pelayanan Publik	2,55	5,00	
				27	Indeks Integritas Nasional	70,20	84.56	
10	Sasaran Pokok 10 - Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Substansial	IE10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	28	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	
					Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	85	
					Persentase korban konflik yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial	28,99	95,00	
				29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,55	78.55	
				30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	
11	Sasaran Pokok 11 Meningkatnya stabilitas ekonomi makro	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,20	1,40	
				32	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,8 – 2,7	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
					a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2	
					b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45	4,71	
					c) Nilai Transaksi Saham per kapita per Kabupaten (rupiah)			
					d) Total Kredit/PDRB (%)	18,10	55,90	
				34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07	
12	Sasaran Pokok 12 Meningkatnya Implementasi Syariat Islam	IE12	Syariat Islam	35	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	
				36	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95,00	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		TARGET DAERAH		KET
						BASELINE 2025	TARGET 2045	
13	Sasaran Pokok 13 Meningkatnya kualitas Beragama dan Berbudaya	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,79 - 66,01	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,19 - 73,23	79,76 - 80,95	
14	Sasaran Pokok 14 Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,93 – 73,23	78,25 – 78,54	
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,750-0,520	0,239 - 0,217	
15	Sasaran Pokok 15 Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	
				42	Kualitas Lingkungan Hidup			
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,56	89,18	
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,19	60,00	
					c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	2	90	
					d) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	21,98	100,00	
16	Sasaran Pokok 16 Meningkatnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
					a) Ketahanan Energi			
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1.940	
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90	
					b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	8,48	0,54	
					c) Ketahanan Air			
					- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,19	7,53	
					- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20,47	100	
17	Sasaran Pokok 17 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	137,60	154,18-131,13	
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
					a. Kumulatif	18,54	42,17	
					b. Tahunan	29,56	75,38	

Tabel 5.21.
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan
RPJPN, RPJPA dan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
					Indikator	Target Nasional			Indikator	Target Daerah			Indikator	Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
I	TRANSFORMASI SOSIAL														
1	Mewujudkan Transformasi sosial	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,4	80	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,28	78,45	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,25	78,45
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	154	17		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	12	4
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	25,5	6,2		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	28,50	6,20
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76	3	Penanganan Tuberkulosis:			3	Penanganan Tuberkulosis:		
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71	95		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	81,00	95,00
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,29	98,00		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,00	98,00
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,50	99,50
1	Mewujudkan Transformasi sosial	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:			5	Hasil Pembelajaran:		
					a) Rata-rata nilai PISA				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
					i) Lietrasi Membaca	396	485		i) Lietrasi Membaca	8,17-13,04	69,57 – 69,57		i) Lietrasi Membaca	6,70 – 10,04	69,57 – 69,57
					ii) Numerasi	404	490		ii) Numerasi	0,00 – 4,35	60,87 – 65,22		ii) Numerasi	0,00 – 2,00	60,87 – 65,22
					iii) Scien	416	487		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional			Indikator	Target Daerah			Indikator	Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
									i) Lietrasi Membaca	27,18 – 29,18	64,65 – 66,65		i) Lietrasi Membaca	25,70-29,04	64,65 – 66,65
									ii) Numerasi	22,94 – 24,94	58,98 – 60,98		ii) Numerasi	20,70-23,04	58,98 – 60,98
					c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,14	12		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20 – 10,21	12,94 – 13,06		c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,60	12,94 – 13,06
					d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,37	14,81		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,66 – 14,68	16,24 – 16,32		d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,98 - 15,00	16,24 – 16,32
				6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	13,58 – 14,80	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,58	13,58 – 14,80
				7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,87	7,5	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	71,93	80,00	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	35,12	80,00
1	Mewujudkan Transformasi sosial	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	06-07	0.5-.08	8	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0,83	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16,35-18,28	0,45-0,83
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	44,1	99,5	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	29,17	85,16	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	3,86	85,16
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	60	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22,00	55,00
II	**TRANSFORMASI EKONOMI**														
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,8	28	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,20 – 5,30	6,94 – 7,11	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3,85-4,00	6,94 – 7,11
				12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata			12	Pengembangan Pariwisata		
					a)Rasia PD8 Pariwisata (%)	4,5	8		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,84	3,13		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,69	3,13
					b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	11,73	29,33		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0,73	1,33
				13	Proporsi PDB Ekanomi Kreatif (%)	7,9	11	13	Proporsi PDRB Sektor industri pengolahan (%)	7,90	20,89	13	Proporsi PDRB Sektor industri pengolahan (%)	7,90	20,89
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
					a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3	5		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	13,12	15,32		a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	11,84	15,32
									b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,30	2,25		b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	1,06	2,25
					b) Rasio Kewirausahaan	2,9	8		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,80		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,33	6,80
					c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1.1 (2020)	10		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,78	3,61		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,28	3,61
					d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,4	5,1		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,92	4,82
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,60 – 5,28	3,49 – 4,49	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,4 – 5,5	3,5 – 4,9
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,52	62,70	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	41,80	62,70
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:			17	Tingkat Penguasaan IPTEK:		
					a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0.28 (2020)	2.2-2.3		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA				a) Indeks Daya saing Daerah	3	4
					b) Peringkat Inovasi Global	75 (2022)	30 Besar		b) Peringkat Inovasi Daerah	13	5		b) Peringkat Inovasi Daerah	45,28-48,30	82,20-85,10
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,8	90,65		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21
					b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	IE6	Transformasi Digital	19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	51	20 Besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,70	7,30
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Biaya Logistik (%PDB)	16.9 (2019)	8	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	4,33	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Daerah	6,17	4,33
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,8	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,48	27,70	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,48	27,70
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26	40	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,07	9,73	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,00	9,30
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
			Pertumbuhan Ekonomi												
					a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	44,58	48,92		a) Proposi konstribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) (Disesuaijan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama				a) Proposi konstribusi PDRB Wiayah Metropolitan Terhadap Nasional (%) (Disesuaijan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama		
					b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkay dan berkelanjutan (%)	64	100		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkay dan berkelanjutan (%)	68,5	100		b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkay dan berkelanjutan (%)	62,00	100
					c) Persentase Desa Mandiri				c1) Persentase Desa Mandiri	0,54	7,08		c1) Persentase Desa Mandiri	6,15	26,00
									c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,67	0,86		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,65	0,86
III	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**														
3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Materi Hukum	0,25	0,49	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100	24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	100,00
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,70	5,00	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	5,00
				26	Indeks Pelayanan Publik	3,87	5	26	Indeks Pelayanan Publik	4,41	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik	2,55	5,00
				27	Indeks Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	70.20	84.56	27	Indeks Integritas Nasional	70,20	84,56
					a) Indeks Integritas Nasional	71.94 (2022)	96,98								
					b) Indeks Persepsi Korupsi	34	60								
IV	**KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH**														
4	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	IE10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	28	Indeks Pembangunan Hukum : disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun arah pembangunan (IE) yang sama	0.6 (2021)	0,84	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34,78	100	28	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34,78	100
									Persentase korban konflik yang mendapatkan	28,99	95		Persentase korban konflik yang mendapatkan	28,99	95,00

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
									pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial				pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial		
				29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62.8 (2020)	80	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17	78.55	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61,55	78,55
				30	Indeks Demokrasi Indonesia	60-70 (Sedang)	>80 (Tinggi)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi
	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	10.0-12.0	18.0-20.0	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,14	1,40	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,20	1,40
				32	Tingkat Inflasi (%)	2.5+/-1	2.0+/-1	32	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,8 – 2,7	32	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5	0,8 – 2,7
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
					a) Aset Perbankan/PDB (5)	66,9	200		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	18,9	59,2
					b) Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,6	60		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45	4,71		b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,45	4,71
					c) Aset Asuransi/PDB (5)	9,1	20		c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	1.443.394	12.094.020		c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*		
					d) Total Kredit/PDRB (%)	37,8	80-90		d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9		d) Total Kredit/PDRB (%)	18,10	55,90
				34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07	34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07
	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	IE12	Syariat Islam	35	Asia Power Index (Diplomatic Influence): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	60.4 (2023)	75.0-80.0	35	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	35	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00
				36	Asia Power Index (Military Capability): Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama	14,6	45,0	36	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95	36	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95,00
V	**KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI**														

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
	Mewujudkan Masyarakat Pidie Jaya yang Berketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologis	IE13	Beragama Maslahat dan Berbudaya	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,7	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,53 – 56,56	65,79 – 66,01	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,79 – 66,01
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,70 - 73,81	79,76 - 80,95	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,19- 73,23	79,76 - 80,95
	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58.49 (2022)	80	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,19 – 73,23	78,25 – 78,54	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	62,93 – 73,23	78,25 – 78,54
				40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458	0,15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,466-0,464	0,239-0,217	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,750-0,520	0,239-0,217
	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.35 (2020)	0,75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656
				42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup			42	Kualitas Lingkungan Hidup		
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72.42 (2022)	76,12		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	82,89	89,18		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,56	89,18
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,19	60,00		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,19	60,00
					c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	15 (13% terdaur Ulang)	70 (15% terdaur ulang)		c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	5	90		c) Timbilan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	2	90
									d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	22	100		d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	21,98	100,00
	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
					a) Ketahanan Energi	6,61	8,24		a) Ketahanan Energi				a) Ketahanan Energi		
									- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1.940		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	650	1.940
									- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90		- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90
					b) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	6,2	2,1		c) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	8,48	0,54		c) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	8,48	0,54

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPN 2025 - 2045				IUP RPJPA 2025 - 2045				IUP RPJPK PIDIE JAYA 2025 - 2045			
				Indikator		Target Nasional		Indikator		Target Daerah		Indikator		Target Daerah	
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045
					(Prevalence of Undernourishment (%)				Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)				Pangan (Prevalence of Undernourishment (%)		
					c) Ketahanan Air				c) Ketahanan Air				c) Ketahanan Air		
					-Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	63,45	200		-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.19	7.53		-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,19	7,53
					-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100		-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30.47	100		-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20,47	100
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Proposi Kerugian Ekonomi langsung akibat bencana realtif PDB (%)	0,14	0,11	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	181,05	154,18-131,13	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	137,60	154,18-131,13
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
					a. Kumulatif	28,12	51,51		a. Kumulatif	18.54	42.17		a. Kumulatif	18,54	42,17
					b. Tahunan	32,65	80,96		b. Tahunan	29.56	75.38		b. Tahunan	29,56	75,38

BAB VI
PENUTUP

Dokumen RPJPK ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMK untuk setiap periodenya (5 tahunan), mengikuti mekanisme dan aturan (dasar hukum) yang berlaku, mengakomodir semua kepentingan pihak pemangku kepentingan dengan tetap menjaga konsistensi keselarasan antara APBK, APBA dan APBN.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Pidie Jaya Islami dan Maju 2045 akan terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJPK Pidie Jaya harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat.

6.2. Konsistensi Perencanaan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan sangat diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah disusun, serta ketersediaan pendanaan yang optimal dan pemanfaatannya secara efektif. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik juga memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Langkah ini penting, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan nasional hingga tingkat proyek atau keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses ini harus dilakukan dengan menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan.

6.2.1. Keterkaitan RPJPK Pidie Jaya dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penyusunan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 harus mengakomodasi keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi sebagai bagian dari kerangka pembangunan nasional yang lebih besar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa visi, misi, strategi, dan program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tidak hanya sejalan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung agenda pembangunan Provinsi dan nasional yang telah ditetapkan.

RPJPK perlu mempertimbangkan arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi panduan utama bagi pemerintah pusat dalam menetapkan prioritas pembangunan nasional. Koordinasi ini memastikan bahwa program-program di tingkat kabupaten seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal mendukung pencapaian target nasional yang lebih luas.

Keterkaitan dengan perencanaan pemerintah provinsi juga penting untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan dan program pembangunan daerah dengan prioritas strategis provinsi. Misalnya, dalam hal pengembangan infrastruktur atau pengelolaan sumber daya alam, RPJPK Pidie Jaya harus sejalan dengan rencana pembangunan provinsi Aceh untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat konektivitas antar wilayah.

Selain itu, RPJPK juga perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan memastikan keterkaitan yang kuat antara RPJPK Pidie Jaya dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mendukung transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal. Ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih baik antar instansi pemerintah untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik dan lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan lntegratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- lntegratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi lndikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable. Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART) sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, Aceh dan RPJPK Pidie Jaya. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPK Pidie Jaya Tahun 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJMK, dan seluruh indikator RPJMK harus menjadi bagian dari RKPK dan Renstra SKPK.

6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPK, RPJMK, dan RKPK, perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2.2.2. Kerangka Pengendalian

Kerangka pengendalian menjadi landasan yang vital untuk memastikan keberhasilan dan akuntabilitas dalam implementasi rencana pembangunan jangka panjang. Kerangka ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan strategis.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko potensial yang meliputi faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas, serta faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional atau kondisi lingkungan. Selanjutnya, dengan mengembangkan mekanisme pengendalian yang sesuai, seperti kebijakan dan prosedur operasional standar, serta sistem pengawasan yang efektif, kerangka pengendalian memastikan bahwa implementasi RPJPK berjalan sesuai rencana.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi bagian integral dari proses ini, memungkinkan penyesuaian strategis saat kondisi berubah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan penerapan kerangka pengendalian yang kuat, RPJPK Pidie Jaya dapat menjaga keberlanjutan pembangunan yang efisien dan efektif, serta memastikan manfaatnya maksimal bagi seluruh masyarakat daerah ini.

6.2.3. Sistem Insentif

Sistem insentif menjadi instrumen penting untuk mendorong partisipasi aktif dan efektif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sistem ini dirancang untuk memberikan

dorongan atau penghargaan kepada pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu yang berperan dalam implementasi strategi pembangunan sesuai dengan visi jangka panjang kabupaten.

Insentif dapat berupa penghargaan formal untuk pencapaian tertentu seperti penurunan tingkat kemiskinan atau peningkatan kualitas infrastruktur, yang tidak hanya meningkatkan motivasi tetapi juga mengakui kontribusi positif terhadap pembangunan lokal. Selain itu, kemudahan perizinan atau pembebasan pajak bagi investasi yang mendukung prioritas pembangunan juga dapat mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial kabupaten. Dengan mengimplementasikan sistem insentif yang tepat, RPJPK dapat membangun lingkungan kerja sama yang kuat dan merangsang inovasi di semua tingkatan, menjadikan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

6.2.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPK Pidie Jaya dapat dimutakhirkan melalui RPJMK Pidie Jaya.

Mekanisme perubahan mencakup prosedur evaluasi rutin yang bertujuan untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan, keberlanjutan strategi, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan rencana. Evaluasi berkala tidak hanya membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dari strategi yang diusulkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat dan dinamika lingkungan. Selain itu, mekanisme ini mengedepankan konsultasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata dari komunitas lokal. Dengan demikian, fleksibilitas dalam implementasi, pengawasan yang kontinu, serta evaluasi yang mendalam menjadi landasan penting dalam membangun RPJPK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Pidie Jaya

6.2.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik memainkan peran krusial dalam memastikan partisipasi luas masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Komunikasi publik tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan dan membangun konsensus mengenai arah pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Melalui dialog terbuka, pertemuan publik, dan konsultasi yang inklusif, pemerintah daerah dapat memperoleh pandangan yang bervariasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa RPJPK mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil komunitas lokal. Dengan demikian, komunikasi publik menjadi landasan yang penting untuk membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya yang berkelanjutan dan inklusif.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Selain itu, pembiayaan pembangunan juga mencakup aspek manajemen risiko keuangan, di mana pemerintah daerah harus mempertimbangkan keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya keuangan jangka panjang, serta memastikan bahwa penggunaan dana tidak mengakibatkan beban keuangan yang berlebihan atau tidak dapat terpenuhi di masa mendatang. Dengan demikian, pembiayaan pembangunan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

6.4. Kerangka Regulasi

Dalam upaya menjamin pelaksanaan RPJPK maka perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045. Selanjutnya untuk pelaksanaan masing-masing periode pembangunan (2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045) perlu

disusun dan ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) sesuai dengan periode dimaksud yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan regulasi pendukung lainnya yang diperlukan.

Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sinergi dan berkesinambungan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi daerah agar dapat mencapai **"Pidie Jaya yang Islami, Maju, dan Berkelanjutan"** menuju Pidie Jaya Islami dan Maju 2045.

6.5. Analisis Manajemen Risiko

Manajemen risiko harus dirancang secara kontekstual, selaras dengan tantangan dan potensi unik yang dimiliki daerah. Di Kabupaten Pidie Jaya, misalnya, risiko dapat muncul dari fluktuasi ekonomi lokal, ketahanan pangan akibat penurunan luas panen, atau dinamika sosial terkait pelaksanaan Syariat Islam. Mengidentifikasi faktor-faktor ini memungkinkan pemetaan risiko yang lebih akurat, sehingga langkah mitigasi dapat dirancang secara spesifik. Misalnya, untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian, dapat diterapkan diversifikasi komoditas dan penguatan teknologi pertanian. Dengan pendekatan ini, transformasi daerah menuju visi "Pidie Jaya Islami, Maju, dan Berkelanjutan" dapat terus dijaga dari potensi hambatan yang mengancam pencapaian target tahun 2045.

Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pengawalan RPJPK. Pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha harus berkolaborasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Proses ini melibatkan monitoring berkelanjutan, evaluasi berkala, serta kesiapan untuk melakukan penyesuaian strategi saat terjadi perubahan kondisi eksternal. Hal ini memastikan bahwa perjalanan menuju transformasi daerah pada tahun 2045 tetap berada di jalur yang benar, dengan langkah-langkah strategis yang berlandaskan realitas lokal dan berorientasi pada keberlanjutan.




PIDIE JAYA
PEUGAH LAGË BUET,
PEUBUET LAGË NA